



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT

2013



Penggunaan TKDN di Sektor MIGAS

*The Utilization of Local Content
in Oil and Gas Sector*



Sambutan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

*Foreword
by Director General of Oil and Gas*

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga keluarga besar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi pada tahun 2013 dan menyampaikan laporan capaian kegiatan tahun 2013 dalam buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2013.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu lembaga negara yang membidangi sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki peran strategis diantaranya sebagai penyumbang devisa negara yang mempengaruhi besaran penerimaan negara dan mampu menciptakan multiplier efek yang memberikan dorongan kepada roda penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai sektor yang strategis, industri minyak dan gas bumi dengan karakternya yang padat modal, padat resiko dan padat teknologi diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan lebih meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk terus dan lebih banyak memberi peran dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di tanah air Indonesia.

Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2013 memberikan gambaran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 dan sebagai wadah rangkuman peristiwa yang terjadi selama tahun 2013 yang diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tahun mendatang. Pada tahun 2013 ini, Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyajikan tema terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas

Let us praise to God the Almighty for His grace that has enable Directorate General of Oil and Gas in conducting the duty and function in oil and gas sector in 2013 and in reporting the achievement in 2013 in the Annual Report of Directorate General of Oil and Gas 2013.

Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources as the governmental institution in charge of oil and gas sector has the strategic roles to contribute to the state revenue and to create multiplier effect to promote the sustainable national development.

The oil and gas industry as a strategic sector having the characteristics of high capital, high risk and high technology is expected to be beneficial for the people welfare by increasing the domestic industry's capability and role in Indonesia oil and gas sector.

The 2013 Directorate General of Oil and Gas Annual Report provides the performance achievement and summarizes the events in 2013 as the reference in policy making in the upcoming years. The 2013 Directorate General of Oil and Gas Annual Report took the theme regarding local content as one of the efforts by Directorate General of Oil and Gas in providing information to the readers concerning its achievement in managing the national resources to obtain significant portion in domestic oil and gas industry.



Bumi untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai ruang lingkup dan pencapaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam mengelola sumber daya nasional untuk mendapatkan porsi yang lebih penting di dalam industri minyak dan gas bumi yang beroperasi di dalam negeri. Dengan meningkatnya keikutsertaan komponen lokal akan mendorong peningkatan komponen lokal untuk memiliki daya saing yang lebih besar dalam menghadapi era globalisasi.

The increasing local content portion will develop its competitiveness in globalization era.

Semoga Buku Laporan Tahunan ini mampu memberikan manfaat ke semua pemangku kepentingan sub sektor minyak dan gas bumi, sehingga dapat lebih memberikan perannya untuk pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi yang lebih baik dan senantiasa dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

We sincerely hope that this Annual Report will be beneficial to all stakeholders in oil and gas sub sector in their efforts to enhance the oil and gas sub sector management and to support the national development goals.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyusunan Buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2013 dan semoga dapat terjalin kerja sama yang lebih baik di masa mendatang.

We would kindly express our gratitude to all related parties for the participation in supporting the accomplishment of the 2013 Directorate General of Oil and Gas Annual Report. We hope for the enhanced cooperation in the future.

Jakarta, April 2014


Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi
Director General of Oil and Gas
A. Edy Hermantoro

Daftar Isi | Table of Contents

	Sambutan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi <i>Foreword by Director General of Oil and Gas</i>	2
	Profil <i>Profile</i>	6
	Kejadian Penting 2013 <i>Milestone 2013</i>	10
BAB 01	PENGUNAAN TKDN DI SEKTOR MIGAS <i>THE UTILIZATION OF LOCAL CONTENT IN OIL AND GAS SECTOR</i>	14
	Latar Belakang <i>Background</i>	16
	Tantangan Dan Pencapaian TKDN <i>Challenge and Achievement in Local Content</i>	17
BAB 02	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI <i>SECRETARIAT OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS</i>	26
	Keuangan <i>Finance</i>	28
	Rencana dan laporan <i>Planning and Report</i>	32
	Hukum <i>Legal</i>	36
	Umun dan Kepegawaian <i>General Affairs and Human Resources</i>	50
BAB 03	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI <i>DIRECTORATE OF OIL AND GAS PROGRAM DEVELOPMENT</i>	52
	Investasi Migas <i>Oil and Gas Investment Development</i>	54
	Penerimaan Negara <i>State Revenue</i>	59
	Kerjasama Migas <i>Oil and Gas Cooperation Affairs</i>	68
	Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri <i>Domestic Potential Empowerment</i>	72
	Penyiapan Program <i>Program Planning</i>	78
BAB 04	DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI <i>OIL AND GAS UPSTREAM BUSINESS DEVELOPMENT</i>	84
	Wilayah Kerja Konvensional Migas <i>Conventional Oil and Gas Working Area</i>	86
	Wilayah Kerja Non Konvensional Migas <i>Unconventional Oil and Gas Working Area</i>	89
	Eksplorasi Migas <i>Oil and Gas Exploration</i>	92
	Eksplorasi Migas <i>Oil and Gas Exploitation</i>	97
	Pengembangan Hulu Migas <i>Oil and Gas Upstream Business Development</i>	106
BAB 05	DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI <i>OIL AND GAS DOWNSTREAM BUSINESS DEVELOPMENT</i>	114
	Niaga Migas <i>Oil and Gas Trade and Commerce</i>	116
	Pengolahan Migas <i>Oil and Gas Processing</i>	123
	Pengangkutan Migas <i>Oil and Gas Transportation</i>	136
	Penyimpanan Migas <i>Oil and Gas Storage</i>	143
	Harga dan Subsidi <i>Oil and Gas Price and Subsidy</i>	148
BAB 06	DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI <i>OIL AND GAS TECHNIQUE AND ENVIRONMENT</i>	152
	Standarisasi <i>Standardization</i>	154
	Lingkungan <i>Environment</i>	158
	Keselamatan Hulu Migas <i>Oil and Gas Upstream Safety</i>	165
	Keselamatan Hilir Migas <i>Oil and Gas Downstream Safety</i>	174
	Penunjang <i>Supporting Business</i>	179
	Penutup <i>Closing</i>	182



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES



SUSUNAN REDAKSI

EDITORIAL BOARD

PELINDUNG | Advisor

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Director General of Oil and Gas

PENANGGUNG JAWAB | Supervisor

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Secretary of Directorate General of Oil and Gas

PEMIMPIN REDAKSI | Editor in Chief

Kepala Bagian Rencana dan Laporan
Head of Planning and Report Division

EDITOR | Editor

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
Sub-Division Head of Evaluation and Report

TIM PENYUSUN | Writer

Mochamad Imron, Sinta Agustina, Wulan Sitarahmi, Mahmudah Perwirawati, Shinta Raesanti, Tony Ardi P., Nurul Muhammad, Gatot Kurniawan, Wurdaningsih, Beni Herdianto, Elisabeth Dian K., Yohannes Martin, M. Ilhamsyah, Anton B.P., Benny Tambuse Supriyadi, Fahmi Muktafi, Meilida Mirza A., Anton Pribadi, Stranti Nastiti K., Rakhmad P., Andri Surya, Nia Marlyana Urlyagustina R., Arie Jaka S., Ilham Rakhman H.

TRANSLATER

Sularsih



Ir. A. EDY HERMANTORO, M.Si

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Director General of Oil and Gas

Pria lahir di Yogyakarta, 7 Oktober 1956 menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi semenjak tahun 2013 dan sebelumnya menjadi Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi hingga akhir tahun 2012. Lulusan Sarjana Teknik Geologi, Universitas Pembangunan Veteran-Yogyakarta tahun 1983 dan mendapat gelar Sarjana (S2) Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia tahun 2003. Tahun 2012-2013 pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2008-2010); Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama–Biro Perencanaan dan Kerjasama pada Sekretariat Jenderal DESDM (2007-2008). Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, ia juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi– Direktorat Pembinaan Program Migas (2006-2007); Kabag Penyusunan Program dan Laporan (2003-2006); Kasubdit Pengelolaan Wilayah Kerja–Direktorat Eksplorasi dan Eksploitasi (2001-2003); Kepala Seksi Geofisika – Direktorat Eksplorasi dan Eksploitasi (1995-2001); dan Pj. Kepala Seksi Geofisika – Direktorat Eksplorasi dan Produksi (1993-1995).

A. Edy Hermantoro was born in Yogyakarta on 7 October 1956. He was appointed as Director General of Oil and Gas since 2013 after conducting as Acting of Director General until the end of 2012. Graduated from Geological Engineering of University of Pembangunan Veteran Yogyakarta in 1983 and earned his Master's Degree in Administration from University of Indonesia in 2003. In 2012-2013, Edy was previously appointed as Secretary of Directorate General of Oil and Gas, Director of Oil and Gas Upstream Business Development from 2008 to 2010, Head of Planning and Cooperation Bureau in Secretariat General of DESDM from 2007 to 2008, Deputy Director of Oil and Gas Program Planning from 2006 to 2007, Division Head of Program and Report from 2003 to 2006, Deputy Director of Working Area Management-Directorate of Exploration and Exploitation (2001-2003), Section Head of Geophysics-Directorate of Exploration and Exploitation (1995-2001) and Acting of Section Head of Section Head of Geophysics-Directorate of Exploration and Exploitation (1993-1995).



Ir. Heri Poernomo MEMD

**Sekretaris Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi**
*Secretary of Directorate General
of Oil and Gas*

Pria lahir di Yogyakarta, 2 Juni 1958 menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sejak tahun 2013 Lulus sarjana (S1) Teknik Geologi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 1986, pernah belajar di University of Auckland, Selandia Baru tahun 1990 dan mendapat gelar Diploma (D3) Post Graduate Diploma Energy Technology. Selanjutnya mendapat gelar Sarjana (S2) Master of Environmental Management and Development, The Australian Nasional University – Australia pada tahun 1994. Pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Migas–Direktorat Pembinaan Program Migas pada Direktorat Jenderal Migas dan Gas Bumi (2010-2013); menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Migas - Direktorat Pembinaan Program Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2007-2010); Kasubdit Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi–Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2006-2007); Kasubdit Eksplorasi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2003-2006); Kabag Penyusunan Program dan Laporan - Sekretariat Ditjen Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2001-2003); Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan – Sekretariat Ditjen Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2000-2001); Senior Technical Officer (Level 3) pada Timor Gap Joint Authority – Darwin Australia (1998-2000); dan PH Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan – Sekretariat Ditjen Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (1996-1998).



Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.si

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
Director of Oil and Gas Program Development

Heri Poernomo was born in Yogyakarta on 2 June 1958. He was appointed as Secretary of Directorate General of Oil and Gas since 2013. He earned his Bachelor's Degree of Geological Engineering, University of Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta in 1986. He also received Post Graduate Diploma on Energy Technology from University of Auckland, New Zealand in 1990. He graduated his Master Degree on Environmental Management and Development from Australian National University in 1994. Previously, he was Director of Oil and Gas Program Development in 2007 to 2013, Deputy Director of Oil and Gas Exploration-Directorate of Oil and Gas Upstream Business Development from 2003 to 2007, Division Head of Program and Report-Secretariat of Directorate General of Oil and Gas from 2001 to 2003, Sub Division Head of Evaluation and Report-Secretariat of Directorate General of Oil and Gas from 2000 to 2001, Senior Technical Officer (Level 3) in Timor Gap Joint Authority-Darwin Australia from 1998 to 2000, and Acting of Sub Division Head of Evaluation and Report-Secretariat Directorate General of Oil and Gas from 1996 to 1998.

Pria lahir di Purworejo, 20 Februari 1961, Menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2013 Lulus Sarjana (S1) Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta tahun 1988, meraih gelar Sarjana (S2) Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia tahun 2001 dan gelar Doktor (S3) Ilmu Ekonomi, Universitas Padjajaran – Bandung tahun 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sejak tahun (2012-2013) pernah berturut-turut dipercaya menjabat sebagai Kasubdit Wilayah Kerja – Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (2007-2011); Kepala seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi-Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas (2006-2007); Kepala Seksi Penawaran Wilayah Kerja (2003-2006); Kepala Seksi Persiapan Wilayah Kerja (2001-2003); dan Kepala Seksi Geologi (1997-2001).

Naryanto Wagimin was born in Purworejo on 20 February 1961. He was appointed Director of Oil and Gas Development since 2013. He received his Bachelor's Degree from Geological Engineering of Gadjah Mada University –Yogyakarta in 1988. He earned his Master's Degree in Environmental Study from University of Indonesia in 2001 and Doctor's Degree in Economics from University of Padjajaran-Bandung in 2011. Previously, he was Director of Oil and Gas Upstream Business Development from 2012 to 2013, Deputy Director of Working Area from 2007 to 2011, Section Head of Exploration Business Services from 2006 to 2007, Section Head of Working Area Offer from 2003 to 2006, Section Head of Working area Planning from 2001 to 2003 and Section Head of Geology in 1997 to 2001.



Ir. Hendra Fadly

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Director of Oil and Gas Upstream Business Development

Pria lahir di Pangkal Pinang, 12 Desember 1957, menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2013. Lulusan Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (1985) sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2011-2013); Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksploitasi Migas – Dit. Pembinaan Usaha Hulu Migas (2011-2011); Kasubdit Eksploitasi Migas – Dit. Pembinaan Usaha Hulu Migas (2006-2011); Kasubdit Pengembangan Gas Bumi – Dit. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas (2003-2006); Kasi Pasokan Gas – Dit. Eksplorasi dan Eksploitasi Migas (2001-2003); Kasi Peningkatan Pengurusan Cadangan – Dit. Eksplorasi dan Produksi Migas (1994-2001); dan Pjs. Kasi Peningkatan Pengurusan Cadangan – Dit. Eksplorasi dan Produksi (1993-1994)

Hendra Fadly was born in Pangkal Pinang on 12 December 1957. He was appointed Director of Oil and Gas Upstream Business Development since 2013. He earned his Bachelor's Degree in Petroleum Engineering from Institute of Technology Bandung in 1985. Previously, he was Director of Gas in BPH Migas from 2011 to 2013, Deputy Director of Oil and Gas Exploitation Supervision-Directorate of Oil and Gas Upstream Business Development from 2011 to 2011, Deputy Director of Oil and Gas Exploitation from 2006 to 2011, Deputy Director of Gas Development-Directorate of Oil and Gas Exploration and Exploitation from 2003 to 2006, Section Head of Gas Supply-Directorate of Oil and Gas Exploration and Exploitation from 2001 to 2003, Section head of Reserve Development-Directorate of Oil and Gas Exploration and Production from 1994 to 2001 and Acting of Section Head of Reserve Development-Directorate of Exploration and Production from 1993 to 1994.



Ir. Mohammad Hidayat

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Director of Oil and Gas Downstream Business Development

Pria lahir di Gresik, 2 Juli 1960, sejak tahun 2013, menjabat sebagai Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. Lulus Sarjana (S1) Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Veteran – Surabaya tahun 1986, sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun yang sama, pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi pada Subdirektorat Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (2011-2013); Kasubdit Pengolahan Migas – Di Pembinaan usaha Hilir Migas pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2006-2011); Kasi Pengolahan Minyak Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2001-2006); Kasi Pengilangan Minyak Bumi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (1999-2001); Kasi Proses Khusus pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (1995-1999); Pj. Kasi Proses Khusus pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (1993-1995).



Ir. Edi Purnomo

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
Director of Oil and Gas Technique and Environment

Mohammad Hidayat was born in Gresik on 2 July 1960. He was appointed Director of Oil and Gas Downstream Business Development since 2013. He received his Bachelor's Degree in Chemical Engineering from University of Pembangunan Veteran - Surabaya in 1986. Previously, he was Secretary of Directorate General of Oil and Gas in 2013, Deputy Director of Oil and Gas Processing from 2006 to 2013, Section Head of Oil Processing from 2001 to 2006, Section Head of Oil Refining from 1999-2001, Section Head of Special process from 1995 to 1999, and Acting of Section of Special Process from 1993 to 1995.

Pria lahir di Wonosari, 4 Desember 1956, sejak tahun 2012 menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi. Lulusan Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1983) sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Migas (2009-2010); Kasubdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri – Dit. Pembinaan Program Migas (2006-2009); Kasubdit Tenaga Khusus–Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (2004-2006); Kasubdit Barang Operasi–Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (2001-2004); Pj. Kasubdit Bina Barang Operasi – Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (1999-2001); Kasi Pelayanan Import Barang Operasi Perminyakan–Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (1998-1999); Kasi analisis Barang Impor Operasi Perminyakan – Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (1993-1998); Kasi evaluasi barang Impor Perminyakan–Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (1992-1993); dan sebagai Pj. Kasi Evaluasi Barang Impor Operasi Perminyakan – Dit. Pembinaan Pengusahaan Migas (1990-1992).

Edi Purnomo was born in Wonosari on 4th of December 1956. He was appointed Director of Oil and Gas Technique and Environment since 2012. He earned his Bachelor's Degree in Civil engineering from University of Gadjah Mada-Yogyakarta in 1983. He was previously Secretary of Directorate General of Oil and Gas from 2009 to 2010, Deputy Director of Domestic Potential Empowerment-Directorate of Oil and Gas Program Development from 2006 to 2009, Deputy Director of Special Force-Directorate of Oil and Gas Business from 2004 to 2006, Deputy Director of Operation Goods-Directorate of Oil and Gas Business from 2001 to 2004, Acting of Deputy Director of Operation Good Monitoring from 1999 to 2001, Section Head of Oil and Gas Operation Good Import from 1993 to 1998, Section Head of Oil and Gas Import Goods Evaluation from 1992 to 1993 and Acting of Section head of Oil and Gas Operation Import Goods Evaluation from 1990 to 1992.

Kejadian Penting Milestone 2013



Alokasi Gas untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Menteri ESDM Jero Wacik bersama dengan Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo dan Dirjen Migas, A. Edy Hermantoro, Rabu (6/2) melakukan jumpa pers terkait alokasi gas untuk kebutuhan domestik tahun 2013 dan tahun mendatang. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan bahan bakar gas di Indonesia.

Gas Allocation for Domestic Demand

Minister of Energy and Mineral Resources Jero Wacik, Vice Minister of Energy and Mineral Resources Susilo Siswoutomo, and Director General of Oil and Gas A. Edy Hermantoro held press conference on Wednesday (6/2) concerning gas allocation for domestic demand in 2013 and the upcoming years due to the increasing gas demand in Indonesia.

Pengumuman Pemenang Lelang Penawaran Langsung WK Migas Tahap II Tahun 2012

Dalam rangka meningkatkan produksi migas nasional dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, Kamis (21/3), Pemerintah mengumumkan 14 Pemenang Lelang penawaran langsung wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2012, yang telah dilaksanakan pada 11 Oktober-27 November 2012. Total komitmen eksplorasi sebesar US\$ 84,295 juta dan bonus tanda tangan (signature bonus) yang akan diterima langsung oleh Pemerintah sebesar US\$ 15,5 juta.

The Announcement of Oil and Gas Working Area Direct Offer Phase II Year 2012

In the effort to enhance the national oil and gas production as well as to increase exploration and exploitation activity, the government announced 14 winners of Oil and Gas Working Area Direct Offer Phase II Year 2012 on Thursday (21/3). The tender was conducted from 11 October to 27 November 2012. The total exploration commitment is US\$ 84.295 million. The signature bonus for the government is US\$ 15.5 million.



Sosialisasi Permen ESDM No 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian BBM Bersubsidi

Untuk menjaga volume BBM bersubsidi, Selasa (22/1) dilakukan sosialisasi Permen ESDM No. 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat BBM bersubsidi dan melarang kendaraan instansi menggunakan BBM Bersubsidi.

Socialization of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 01 Year 2013 on Subsidized Oil Fuel Control

In order to control the subsidized oil fuel volume, Directorate General of Oil and Gas held the socialization of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 01 Year 2013 on Subsidized Oil Fuel Control on Tuesday, 22 January 2013. The purpose of the socialization is to promote the public awareness on the importance of subsidized oil fuel saving and to inform the prohibition of subsidized oil fuel for official vehicle.

Kerjasama dengan Denmark untuk Pengembangan Industri Migas

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang minyak dan gas bumi, Senin (4/3) pemerintah melalui Kementerian ESDM, mengundang Denmark dalam acara *Danish Business Sector Seminars*. Diyakini kedua belah pihak akan membentuk perdagangan yang kuat. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, berharap Denmark akan mengembangkan bisnisnya di industri migas Indonesia.

Cooperation with Denmark on Oil and Gas Industry Development

In order to enhance the cooperation in oil and gas, the government cq Ministry of Energy and Mineral Resources invited Denmark in *Danish Business Sector Seminars* on Monday (4/3). Both sides agreed to build strong cooperation in trade. Director General of Oil and Gas MEMR, A. Edy Hermantoro, expected Denmark to develop its business in Indonesia oil and gas industry.

The 3rd Indonesia-Korea Gas Working Group Meeting

Ketua Delegasi Indonesia, A. Edy Hermantoro, yang juga Dirjen Migas membuka *The 3rd Indonesia-Korea Gas Working Group Meeting* di Bali, Senin (29/4). Pertemuan ini merupakan rangkaian acara *The 6th Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF)*. Ketua Delegasi Korea pada pertemuan ini adalah Kim Jundong, Deputy Minister of Trade, Industry and Energy Republik of Korea. Dalam pertemuan ini diharapkan makin eratnya kerjasama di bidang minyak dan gas bumi.

The 3rd Indonesia-Korea Gas Working Group Meeting

The Head of Indonesian Delegation, Director General of Oil and Gas A. Edy Hermantoro, officially opened the 3rd Indonesia-Korea Gas Working Group Meeting in Bali on Monday (29/4). The meeting was held back to back with the 6th Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF). The Head of Korea Delegation is Kim Jundong, Deputy Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea. The meeting is purposed to enhance both countries' cooperation in oil and gas.

6



Indonesia – Amerika, Regional Workshop on the Changing Global Gas Market and Unconventional Gas

Indonesia menggandeng Amerika Serikat untuk mengembangkan potensi gas alam nonkonvensional (*shale gas*) di Indonesia. Untuk menyukseskan kerja sama tersebut, Senin (6/5) Kementerian ESDM dengan Departemen Luar Negeri AS menggelar acara *Regional Workshop on the Changing Global Gas Market and Unconventional Gas*. Dimana *Shale gas* merupakan gas yang didapat dengan merekahkan batuan induk tempat terbentuknya gas bumi.

Indonesia-US Regional Workshop on the Changing Global Gas Market and Unconventional Gas

Indonesia and US agreed to develop shale gas in Indonesia. To support this cooperation opportunity, MEMR and US Department of State held *Regional Workshop on the Changing Global Gas Market and Unconventional Gas* on Monday (6/5). *Shale gas* is gas trapped in shale formation.

7



Konvensi dan Pameran IPA ke 37

Konvensi dan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke 37 kembali digelar 15-17 Mei di Jakarta. Acara diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun ini tema yang diangkat adalah "*Promotion Investment in a Challenging Environment*". Tema ini sesuai dengan kondisi di industri hulu migas nasional, dimana Indonesia membutuhkan Investasi dalam skala besar untuk melakukan eksplorasi yang mayoritas berada di laut dalam di Indonesia bagian Timur, serta merealisasikan secara penuh potensi hidrokarbon yang ada melalui penerapan *Enhanced Oil Recovery (EOR)* atau *Improved Oil Recovery (IOR)*, ditengah tantangan dari sisi peraturan dan perundang-undangan serta kondisi ekonomi global.

The 37th IPA Convention and Exhibition

The 37th IPA Convention and Exhibition was held on 15-17 May in Jakarta. It was officially opened by President Susilo Bambang Yudhoyono and took the theme "*Promotion Investment in a Challenging Environment*". The theme was illustrated by the condition of national oil and gas upstream industry in which Indonesia requires major investment in exploration especially in deep water in eastern part of Indonesia. Indonesia also needs to realize the hydrocarbon potential through *Enhanced Oil Recovery (EOR)* or *Improved Oil Recovery (IOR)* among the challenges in laws and regulations and global economy condition.

8



Peresmian Jargas Prabumulih

Sekitar 4.600 rumah tangga di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, kini dapat bernapas lega. Setelah rampung dibangun tahun 2012, akhirnya gas bumi dapat dialirkan ke rumah mereka. Peresmian pengaliran gas bumi untuk rumah tangga ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Dirjen Migas, A. Edy Hermantoro dan Walikota Prabumulih Ridho Yahya. Pengaliran gas bumi untuk rumah tangga di Kota Prabumulih, ini merupakan kota ke 8 dari 13 kota yang telah rampung pembangunannya.

The inauguration of Prabumulih City Gas

The number of 4,600 households in Prabumulih, South Sumatera has now connected to city gas. After the construction stage in 2012, the gas is now flowed. The city gas for household is officially

inaugurated by Vice Minister of Energy and Mineral Resources Susilo Siswoutomo witnessed by Governor of South Sumatera Alex Nurdin, Director General of Oil and Gas A. Edy Hermantoro and Prabumulih Mayor Ridho Yahya. The city gas for household in Prabumulih is the 8th city from 13 cities with completed city gas construction.

9



Pelantikan Eselon I dan II KESDM

Menteri ESDM, Jero Wacik, (15/8) melantik 16 orang pejabat baru tingkat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ESDM. Dua orang Pejabat Eselon I yang dilantik adalah Agus Budi Wahjono sebagai Staf Ahli Bidang Investasi dan Produksi, serta Surono sebagai Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sementara untuk eselon II ada 14 orang yang dilantik.

Inauguration of Echelon I and II MEMR

Minister of Energy and Mineral Resources Jero Wacik (15/8) inaugurated 16 new Echelon I and II in MEMR. The inaugurated Echelon I is Agus Budi Wahjono as Assistant to Minister on Investment and Production and Surono as Assistant to Minister on Landscape and Environment. The Minister also inaugurated 14 Echelon II.

10



Farmout Forum Migas 2013

Untuk kedua kalinya, pemerintah menyelenggarakan Farmout Forum Indonesia (FFI) di mana FFI 2013 menampilkan 17 blok migas, terdiri atas 12 blok migas konvensional dan 5 blok gas methana batubara (CBM) Acara ini merupakan sarana untuk memberikan informasi potensi geologi migas Indonesia,

Kejadian Penting Milestone 2013

khususnya blok migas yang dioperasikan oleh suatu perusahaan atau operator perminyakan kepada calon potensial investor dalam rangka berbagi resiko geologi dan konsep eksplorasi.

Oil and Gas Farmout Forum 2013

For the second time, the government held Farmout Forum Indonesia (FFI) 2013 offering 17 oil and gas blocks consisted of 12 conventional oil and gas blocks and 5 CBM blocks. The forum is aimed at giving the information of Indonesia oil and gas geological potential, especially oil and gas block operated by oil company to potential investor in sharing the geological risk and exploration concept.



Pelantikan Eselon III dan IV Ditjen Migas
Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro melantik dan mengambil sumpah 36 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Auditorium Migas, Rabu (2/10). Pelantikan dihadiri para pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Migas dan Kementerian ESDM. Pejabat eselon III yang dilantik berjumlah 14 orang dan eselon IV sebanyak 22 orang. Perinciannya, promosi dari pejabat eselon IV ke jabatan eselon III sebanyak 5 orang, promosi dari jabatan fungsional/tertentu menjadi eselon IV sebanyak 5 orang dan mutasi internal sebanyak 26 orang.

The Inauguration of Echelon III and IV of Directorate General of Oil and Gas

Director General of Oil and Gas MEMR A. Edy Hermantoro representing Minister of Energy and Mineral Resources inaugurated and took the oath of 36 Echelon III and IV of Directorate General of Oil and Gas consisted of 14 Echelon III and 22 Echelon IV at Migas Auditorium on Wednesday (2/10). The inauguration was attended by Echelon II in Directorate General of Oil and Gas and MEMR. Five Echelon IV were inaugurated into Echelon III. Five functional staffs were inaugurated into Echelon IV, while 26 of them were from internal mutation.

12



Indonesia-Korea Jalin Kerja Sama Sektor Energi

Dalam rangkaian kunjungan Presiden Korea Park Geun-hye ke Indonesia, dilakukan penandatanganan kerja sama Indonesia dan Korea di sektor energi. Dirjen Migas Kementerian ESDM, A. Edy Hermantoro mewakili Menteri ESDM menandatangani kerja sama dengan Korea Gas Safety Corporation di Grand Hyatt Hotel, Jumat (11/10). Kerja sama dengan KGS ini, terutama terkait dengan keselamatan area gas, terutama LNG, CNG dan LPG. Pengalaman Korea terkait keselamatan kapal-kapal gas, diharapkan dapat ditiru oleh Indonesia.

Indonesia-Korea Energy Cooperation

Director General of Oil and Gas MEMR A. Edy Hermantoro representing Minister of EMR signed MoU with Korea Gas Safety Corporation at Grand Hyatt Hotel on Friday (11/10). The cooperation with KGS is in the area of gas especially LNG, CNG and LPG. Korea's experience in gas safety is expected to be shared to Indonesia.

13



Forum Komunikasi Keselamatan Migas

Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro, Rabu (30/10), membuka acara Forum Keselamatan Migas. Forum Komunikasi Keselamatan Migas merupakan kegiatan tahunan yang merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengawasan operasi pada kegiatan migas. Kali ini Forum Komunikasi Keselamatan Migas tahun 2013 mengambil tema "Optimalisasi Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Migas Yang Melewati Umur Desain".

Oil and Gas Safety Communication Forum

Director General of Oil and Gas MEMR A. Edy Hermantoro on Wednesday (30/10) opened Forum Komunikasi Keselamatan Migas (Oil and Gas Safety Communication Forum). It is an annual forum to monitor and supervise the oil and gas operation activity. Forum Komunikasi Keselamatan Migas 2013 took the theme "Operation and Maintenance Optimization of Oil and Gas Tools Exceeding the Reliability Lifetime".

14



Pelantikan Susmar

Jabatan Kepala Staf Khusus Urusan Maritim (Susmar) Migas diserahkan dari Kolonel Laut (Purn) Sidik Wasito, SE kepada Kolonel Laut (KH) Jaka Santosa Adiwardoyo, S.Sos, MH. Serah terima jabatan disaksikan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro dan para pejabat terkait lainnya, Kamis (7/11) di Auditorium Migas. Susmar memiliki peran yang sangat strategis tugasnya adalah mengkoordinasikan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan migas di lepas pantai, khususnya yang menyangkut kemaritiman dengan semua instansi sipil maupun militer di lingkungan daerah kegiatan migas yang bersangkutan.

The Inauguration of Maritime Special Staff

Marine Colonel (Retired) Sidik Wasito, SE is appointed as Head of Oil and Gas Maritime Special Staff replacing Marine Colonel Jaka Santosa Adiwardoyo, S.Sos, MH. The handover was witnessed by Director General of Oil and Gas MEMR A. Edy Hermantoro and other related officials on Thursday (7/11) at Migas Auditorium. Maritime Special Staff has a strategic role in coordinating the safety of conduct of regulations in offshore oil and gas activity, especially the maritime issue with all civil and military institution in oil and gas working area.

15



Konvensi IV Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro membuka Konvensi IV Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Minyak dan Gas Bumi di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (4/12). Konvensi Nasional RSKKNI dalam Sektor Migas tahun 2013 kali ini mengambil tema "Dengan kompetensi kerja yang sesuai standar, dapat meningkatkan produktivitas sektor migas dalam menghadapi globalisasi". Kegiatan ini merupakan salah satu amanat PP No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan kerja Nasional untuk menyusun draf RSKKNI sektor migas dalam tahapan konvensi nasional.

The 4th RSKKNI Convention

Director General of Oil and Gas opened the 4th RSKKNI (Draft of Indonesia National Worker Competency Standard) Convention at Royal Kuningan Hotel Jakarta on Wednesday (4/12). The National Convention of RSKKNI in oil and gas in 2013 took the theme "Enhancing Oil and Gas Sector Productivity in Globalization with Standardized Work Competency". The convention is mandated in Government Regulation Number 31 Year 2006 on National Work Training System as the effort to formulate oil and gas RSKKNI draft in national convention stage.

16



Peresmian Perdana LNG Untuk Transportasi Kendaraan Berat di Bontang

Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro, Direktur Utama PT Badak NGL Nanang Untung, Direktur Umum PT Pertamina Luhur Budi Djatmiko dan Direktur Utama PT Pertamina Gas Hendra Jaya, meresmikan sekaligus melakukan uji coba penggunaan LNG untuk transportasi, di Bontang, Kalimantan Timur Jumat (6/12). Peresmian LNG Untuk Transportasi merupakan langkah lanjut dari program konversi BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi yang saat tengah digencarkan. Proyek ini bertujuan mengkonversi sistem bahan bakar kendaraan berat dari BBM Solar menjadi bahan bakar dual fuel yaitu LNG- Solar, dengan komposisi 60% LNG dan 40% Solar.

The Inauguration of LNG for Heavy Transportation in Bontang

Director General of Oil and Gas MEMR A. Edy Hermantoro, President Director of PT Badak NGL Nanang Untung, General Director of PT Pertamina Budi Djatmiko and Director of PT Pertamina Gas Hendra Jaya officially inaugurated and conducted the initial LNG for transportation in Bontang, East Kalimantan on Friday (6/12). The inauguration of LNG for transportation is the follow up of oil fuel to gas conversion program for transportation. The project is purposed to convert the fuel system of heavy transportation from diesel fuel to dual fuel (LNG-diesel fuel) with the composition of 60% LNG and 40% diesel fuel.

17



Kesiapan Stok BBM dan LPG Jelang Natal 2013 & Tahun Baru 2014

Menteri ESDM, Jero Wacik didampingi Dirjen Migas, Dirjen Mineral dan Batubara, Kepala Badan Litbang ESDM, Kepala BPH Migas, Sekjen DEN, dan Direksi PT Pertamina.(Persero) melakukan kunjungan kerja ke Terminal BBM PT Pertamina di Plumpang, Senin (23/12) pagi guna mengecek langsung pengamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG menyambut Tahun Baru 2014. Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM menerima laporan dari PT Pertamina mengenai kesiapan distribusi BBM. Stok BBM nasional pada periode Natal 2013 & Tahun Baru 2014 dalam kondisi "Aman".

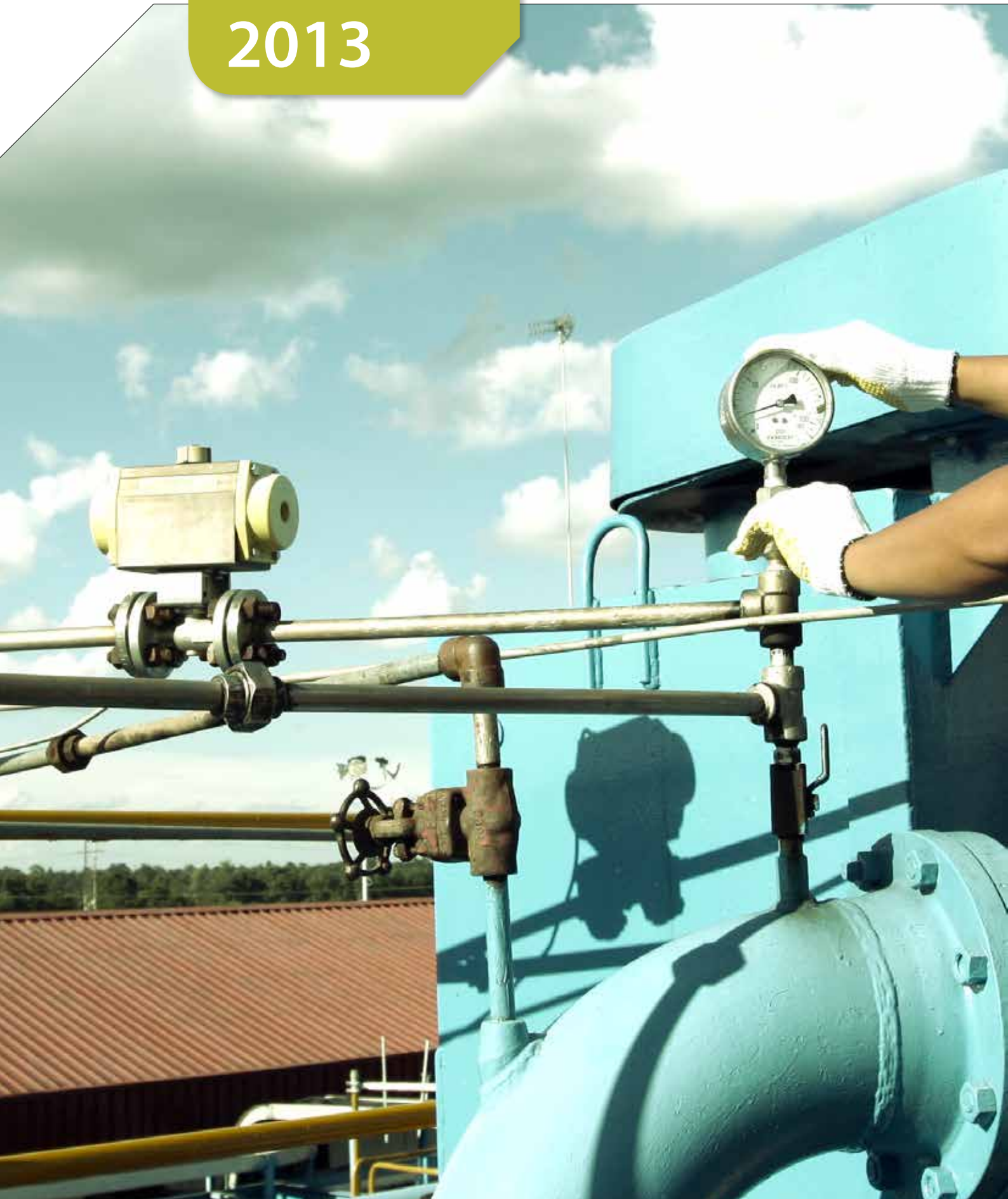
The availability of Oil Fuel and LPG Supply for Christmas 2013 and New Year 2014

Minister of Energy and Mineral Resources Jero Wacik accompanied by Director General of Oil and Gas, Director General of Mineral and Coal, Head of Research and Development Agency for Energy and Mineral and Resources, Head of BPH Migas, Secretary General of National Energy Council and PT Pertamina Board of Director visited Pertamina Oil Fuel Terminal in Plumpang on Monday (23/12) to check the oil fuel and LPG supply for New Year 2014. During the visit, PT Pertamina reported Minister Jero concerning the oil fuel distribution. The national oil fuel supply is adequate for Christmas 2013 and New Year 2014.



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2013





01

BAB
CHAPTER

Penggunaan TKDN di Sektor MIGAS

The Utilization of Local Content in Oil and Gas Sector

Latar Belakang
Background

Tantangan dan Pencapaian TKDN
Challenge and Achievement in Local Content

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

LATAR BELAKANG BACKGROUND

Globalisasi merupakan istilah yang sudah akrab di telinga sejak beberapa tahun silam. Globalisasi memberi dampak terbukanya suatu negara dari berbagai aspek kehidupan. Pola pikir, budaya, produk hingga komoditas lainnya “bebas” masuk ke suatu negara, hampir tidak ada pembatas. Bagi negara yang memiliki keunggulan, globalisasi memberi kesempatan untuk ekspansi ke negara lain dalam berbagai bidang. Sebaliknya, bagi negara yang belum memiliki daya saing akan tertinggal dan hanya berperan sebagai pasar untuk menjual produk. Produk-produk luar negeri akan “membanjiri” negara yang tertinggal tersebut. Akibatnya, negara itu hanya menjadi “penonton” di negeri sendiri. Yang terdekat, *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) akan diberlakukan tahun 2015 nanti. Pelaksanaan AFTA 2015 berarti menghadapi liberalisasi ekonomi. Tak pelak, AFTA 2015 menguji kesiapan Indonesia dalam mengarungi ketatnya perdagangan bebas bagi negara-negara ASEAN tersebut.

Kesiapan Indonesia berkompetisi dengan negara-negara lain mencakup hampir seluruh segi. Tak terkecuali di sub sektor minyak dan gas bumi (migas). Peran sub sektor migas bagi pembangunan nasional ialah sebagai sumber bahan baku industri, memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, sumber pendapatan negara, dan menciptakan efek berantai. Lebih lanjut, industri migas adalah industri padat modal, risiko, dan teknologi. Di sinilah komponen lokal, atau disebut juga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjadi elemen yang tidak boleh dikesampingkan. Derasnya arus globalisasi, yang tidak diimbangi dengan penguatan akar mentalitas jati diri bangsa, akan makin menggerus karakteristik suatu negara. Kebiasaan menggunakan produk luar negeri secara terus-menerus bukan saja akan mengubah pola pikir bangsa Indonesia, tapi juga akan mengubah pola budaya bangsa Indonesia. Padahal, membeli produk asing sama saja dengan menyehatkan masyarakat luar, dan sebaliknya tidak menyehatkan masyarakat Indonesia sendiri.

Pada hakikatnya, cinta tanah air adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah airnya. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam upaya menggunakan produk dalam negeri atau dengan TKDN yang tinggi. Pemakaian suatu produk dalam negeri dapat merangsang tumbuh dan kembangnya berbagai industri terkait produk tersebut. Namun, produk-produk lokal yang dihasilkan tentu mensyaratkan sumber daya manusia dengan kualitas mumpuni yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Jika ini terwujud, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki daya saing dalam kancah internasional.

Globalization has been very familiar to us these years. In globalization, all aspects including the way of thinking, culture, products and other commodities to freely enter into a country, almost without a barrier. For countries with superiority, globalization gives them the opportunity to expand to other countries in many sectors. Conversely, countries with no competitiveness will be left behind and will take the role as the market to sell the products. Imported products flood the market in these countries. They have no superiority in their own countries. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) will start in 2015 which marks the economy liberalization. AFTA 2015 will surely test Indonesia in facing free trade competition in ASEAN countries.

Indonesia will compete with other countries in all sectors, including oil and gas. In national development, oil and gas sub sector plays the role to provide industrial raw material sources, to meet domestic fuel demand, to contribute to state revenue, and to create multiplier effect. Furthermore, oil and gas is an industry with high capital, high risk and high technology. In this case, local content or commonly known as TKDN becomes an important element. Facing the strong globalization without strengthening the national identity and mentality will surely erode a nation's identity. The consumerism upon the imported products will not only change Indonesian way of thinking, but also will change Indonesian culture. Purchasing imported products will make the foreigners prosperous, and not the other way.

Essentially, nationality is a pride of being a part of the nation. Nationality can be shown in the form of using the domestic product and high local content. The domestic product consumption may stimulate the growth and development of the domestic industry. However, the qualified domestic product requires qualified human resources as well. If it is realized, Indonesia will surely be able to have international competitiveness.

TANTANGAN DAN PENCAPAIAN TKDN CHALLENGE AND ACHIEVEMENT IN LOCAL CONTENT

Pemanfaatan dan penggunaan TKDN dalam sub sektor migas bukan perkara mudah. Sejumlah tantangan harus dihadapi. Salah satunya ialah kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal karena belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis *research and development*. Lebih jauh, tantangan ini berupa belum tersedianya industri bahan baku hulu, seperti *green pipe*, *seamless pipe*, *round bar (studbolt)*, *stainless steel*, dan *steel plate*. Selain itu, kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah. Rendahnya kapasitas atau industri ini mencakup *valve*, *stud bolt*, *pressure gauge*, *forging*, dan *mechanical seal*. Spesifikasi produk, misalnya *forging* atau *casting*, yang belum sesuai juga termasuk tantangan yang harus diatasi. Tambah pula, sejumlah produk masih berlisensi luar negeri, contohnya *casing*, *tubing*, *wellhead*, *valve*, dan *pressure valve*. Tantangan lain datang dari masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar teknologi yang berasal dari luar negeri juga merupakan tantangan dalam peningkatan TKDN di sub sektor migas.

Dari berbagai tantangan di atas, membuka keran impor barang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Namun, pengendalian terhadap impor barang perlu diterapkan. Meski begitu, pengendalian impor barang bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan yang seringkali terjadi antara lain penggunaan teknologi baru oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya meningkatkan produksi. Tantangan ini menjadi lebih besar bila barang operasi yang digunakan belum tersedia di dalam negeri atau masih harus impor. Tantangan berikutnya ialah pengawasan barang operasi baru dilakukan berdasarkan pengajuan Rencana

The utilization of local content in oil and gas sub sector is not merely an easy task. There are challenges to be faced. The capability of domestic oil and gas supporting industry is not yet optimum. It has not been able to increase the technology with research and development basis. Another challenge is the lack of raw material in upstream industry such as green pipe, seamless pipe, round bar (studbolt), stainless steel and steel plate. Besides that, the capacity of domestic industry is still low that includes valve, stud bolt, pressure gauge, forging and mechanical seal. The inappropriate product specification, such as forging or casting, is also a challenge. Furthermore, several products are foreign licensed such as casing, tubing, wellhead, valve, and pressure valve. The industry with domestic capital (also known as Perusahaan Modal Dalam Negeri/PMDN) is still limited as well. It is due to the high capital, high technology and limited market, both in domestic and abroad. The foreign technology is considered to be a challenge in increasing the local content in oil and gas sub sector.

From the above mentioned challenges, importing goods may solve the problems. However, the import needs to be controlled. It is also considered as a challenge. The utilization of new technology is a challenge for Contractor of Cooperation Contract in increasing the production. It will be a big issue if the operational goods are not available in Indonesia and need to be imported. Another one is the supervision to the new operational goods that is conducted based on RKBI or Masterlist by the Contractor of Cooperation

Piala Anugerah Cinta Karya Bangsa
Tahun 2011 & 2012
*Trophy of Anugerah Cinta Karya Bangsa
Year 2011 & 2012*



Kebutuhan Impor Barang (RKBI) atau *Masterlist* oleh KKKS. Di samping itu, pengajuan RKBI pada umumnya dilakukan sesudah proses lelang selesai. Tidak hanya itu, mekanisme pengadaan pemenuhan kebutuhan barang untuk kegiatan *Engineering Procurement Constructors Installation* (EPCI) di KKKS juga belum diatur. Dalam perusahaan migas diperlukan teknologi tinggi yang terus berkembang sehingga dibutuhkan tenaga yang benar-benar ahli dan

Contract. Generally, Masterlist is proposed after the tender is accomplished. Besides that, the mechanism of goods procurement for Engineering Procurement Construction Installation (EPCI) in the Contractor of Cooperation Contract is not yet regulated. The oil and gas industry requires developing high technology. Thus, it requires experts and skilled workers. The need of experts has not been fulfilled by national worker. It becomes a challenge in increasing



terampil. Kebutuhan akan tenaga ahli ini belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja nasional. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan TKDN di sub sektor migas. Pada perusahaan-perusahaan di sub sektor migas, khususnya perusahaan dengan investor asing, akan cenderung untuk menempatkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya sendiri. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan bisnis mereka.

Untuk alasan itu, maka penggunaan tenaga kerja asing dalam kegiatan industri migas harus dikendalikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah investasi dan eksplorasi migas semakin bergerak ke timur Indonesia. Pasalnya, di wilayah tersebut masih banyak cekungan yang belum tereksplorasi, sebagian besar berada di laut dalam. Teknologi dan kompetensi tenaga kerja pada kegiatan sub sektor migas di laut dalam tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan di lokasi lainnya. Tantangan-tantangan sudah menghadang. Namun, upaya untuk mencari solusi dalam mengatasi tantangan itu lebih berarti. Untuk hal ini, Pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi. Regulasi itu antara lain adalah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kedua aturan itu adalah upaya Pemerintah dalam melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan produk-produk asing terkait dengan pengadaan barang/jasa di kalangan Pemerintah.

Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengutamaan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi produk lokal dalam memenuhi kebutuhan barang operasi perminyakan. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah adalah dengan mengendalikan importasi barang operasi perminyakan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas. Regulasi lainnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No.15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini merupakan upaya Pemerintah dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri di kegiatan usaha hulu migas.

the local content in oil and gas sub sector. The oil and gas companies, especially companies with foreign investment, tend to hire foreign workers from their origin country to secure their business.

For this reason, the foreign worker empowerment in oil and gas industry should be controlled quantitatively and qualitatively. Nowadays, the oil and gas investment and exploration are moving to the eastern part of Indonesia in which many unexplored basins are located in deep water. The technology and worker competency required in deep water are different with what other location needed. Challenges are there to be solved. Thus, the government has prepared the regulation. Presidential Regulation Number 70 Year 2012 on Government Goods and Services Procurement and Presidential instruction Number 2 Year 2009 on Domestic Product Utilization are the efforts to control the foreign products utilization through the government goods and services procurement.

Based on Oil and Gas Law Number 22 Year 2001, the government is obligated to supervise the empowerment of local worker, as well as domestic goods, services and engineering transparently and competitively. The supervision is aimed at protecting the local product to meet the oil operation goods demand. Another effort by the government is to control the import of oil operation goods as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 037 Year 2006 on Import Procedure and Goods Finishing Proposal for Oil and Gas Upstream Operation. Meanwhile, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 15 Year 2013 on Domestic Product Utilization in Oil and Gas Upstream Activity is the effort to optimize the utilization of domestic product in upstream activity.

TABEL TARGET PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
TARGET OF USE IN DOMESTIC PRODUCT UPSTREAM OIL AND GAS

BARANG GOODS				
No	KOMODITAS COMMODITIES	Target Capaian TKDN (%) Target of Local Content(%)		
		Jangka Pendek Short-Term (2013-2016)	Jangka Menengah Medium Term (2017-2020)	Jangka Panjang LongTerm (2021-2025)
1.	Bahan Bakar Fuel	60	75	95
2.	Pelumas Lubricants	50	60	70
3.	Pipa Pemboran (OCTG) Drilling pipe			
	- Kualitas Tinggi Hi Grade	25	40	55
	- Kualitas Rendah Low Grade	15	25	40
4.	Pipa Penyalur linepipe	50	65	80
5.	Lumpur pemboran, semen, dan bahan kimia Drilling mud, cement and chemicals	40	60	80
6.	Electrical Submersible Pump	15	30	50
7.	Pompa Pumping Unit	40	55	70
8.	Mesin & Peralatan Machinery & Equipment	20	30	50
9.	Wellhead dan Xmas tree			
	- Darat on shore	40	60	80
	- Laut offshore	15	35	50
10.	Lain-lain Other Goods	15	25	40

JASA SERVICES				
No	KOMODITAS COMMODITIES	Target Capaian TKDN (%) Target of Local Content(%)		
		Jangka Pendek Short-Term (2013-2016)	Jangka Menengah Medium Term (2017-2020)	Jangka Panjang LongTerm (2021-2025)
1.	Jasa Pemborongan EPCI Chartering services EPCI			
	- Darat on shore	50	70	90
	- Laut offshore	35	45	55
2.	Jasa Pemboran Drilling services			
	- Darat on shore	55	75	95
	- Laut offshore	35	45	55
3.	Jasa Perkapalan Shipping services	75	85	95
4.	Jasa Pesawat Udara Airplane Services	80	90	100
5.	Jasa Survei, Seismik, dan Studi Geologi Services Survey, Seismic and Geological Studies			
	- Darat on shore	60	75	90
	- Laut offshore	15	25	35
6.	Jasa FEED FEED services	60	70	80
7.	Lain-lain Other Services	40	60	80

Selain regulasi, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas juga mencakup menetapkan peta jalur (*road map*) penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kebijakan lainnya berupa mewajibkan pengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun tersebut yang telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk meningkatkan penggunaan produk dan jasa dalam negeri, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas juga tak tinggal diam. Sejumlah langkah diambil Ditjen Migas. Langkah-langkah itu ialah dengan mengendalikan impor barang produksi; menjalankan program pembinaan dan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI); dan menyusun kebijakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Selanjutnya, melakukan pembinaan terhadap kemampuan produksi dalam negeri dan menerbitkan buku serta E-Book Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN). Di samping itu ditempuh upaya pembinaan melalui pemberian preferensi terhadap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa. Penghargaan dan sanksi kepada kontraktor dan penyedia barang/jasa dalam negeri juga diterapkan. Tak cukup sampai di situ, Pemerintah pun mencanangkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program ini bertujuan untuk mendorong badan usaha maupun masyarakat agar lebih sering menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Dengan demikian, P3DN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global. Membangun perekonomian bangsa tentu saja dibutuhkan kerja sama semua pihak. Semua harus duduk bersama, untuk saling berbagi dan berdiskusi sehingga bisa menemukan solusi yang baik bagi semua. Setali tiga uang, upaya meningkatkan TKDN pada sub sektor migas tidak akan berhasil bila hanya dilakukan segelintir pihak. Sinergi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tidak bisa diabaikan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), misalnya, dapat menetapkan target TKDN yang harus dicapai oleh kontraktor, membina kontraktor untuk memenuhi target penggunaan TKDN, memberi informasi kepada publik tentang rencana pengadaan barang atau jasa hulu migas hingga mengkoordinasikan kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan TKDN. Di lain pihak, KKKS dapat menyaratkan agar produksi barang atau jasanya semaksimal mungkin dilakukan di dalam negeri. Para KKKS juga bisa menetapkan spesifikasi teknis barang atau jasa dengan berlandaskan buku APDN. Target pencapaian TKDN juga dicanangkan oleh

Besides regulations, the government's policy to increase the domestic product competitiveness in upstream activity also includes the short term, midterm and long term road map of domestic product utilization in upstream activity. There is also a policy concerning the obligation of utilizing domestic goods, services, technology and engineering, as well as fulfilling the requirement of quality, delivery time and price based on goods and services procurement. In order to increase the domestic product and services, Directorate General of Oil and Gas has taken the actions such as controlling the production goods import, conducting supervision program to Foreign Worker and Indonesian Workers, and formulating the policy on domestic goods and services utilization.

The government then carries out the supervision upon the domestic product capability and launches E-book of Domestic Product Appreciation. The supervision also gives preferences on goods and services procurement. There is also reward and sanction to the domestic goods/services contractor and supplier. The government also issues the Domestic Product Utilization Program (P3DN). The program is purposed to promote the business entities and people to utilize domestic product rather than the imported product. Thus, this program has an important role in Indonesia economy growth globally. Developing the nation economy requires the cooperation of all related parties to share and discuss in formulating the best solution. The Program of Domestic Product Utilization in oil and gas sub sector will not be succeeded without the synergy of all stakeholders.

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas (SKK Migas) may determine the local content target that must be achieved by the contractor, direct the contractor to meet the local content requirement, give information to the public regarding the goods and services procurement in upstream oil and gas, and coordinate the contractor in increasing the local content. On the other hand, Contractor of Cooperation Contract may request the maximum utilization of its goods and services in Indonesia. They may also determine the technical specification of their goods and services based on Domestic Product Appreciation book. The target of local content achievement is also prepared by the Contractor

para KKKS dalam setiap pengadaan barang atau jasa. Para penyedia barang dan jasa juga bisa memberi andil dalam peningkatan TKDN di sub sektor migas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain memenuhi kualitas, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan; memenuhi komitmen TKDN barang atau jasa; dan meningkatkan TKDN barang atau jasa itu sendiri.

Pemberdayaan sumber daya manusia juga tak terlepas dari solusi dalam peningkatan TKDN pada sub sektor migas. Maka, monitoring perlu dilakukan. Pengendalian penggunaan TKA oleh perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, baik KKKS maupun perusahaan jasa penunjang perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memberdayakan penggunaan tenaga kerja nasional. Secara garis besar, tujuan utama dari TKDN sendiri adalah menggiatkan dan menumbuhkan usaha-usaha lokal sehingga pengadaan barang atau jasa dapat memanfaatkan komponen lokal, baik dari sisi material maupun overhead sehingga dapat meminimalkan biaya produksi. Batasan atau ukuran TKDN ini mencakup tiga aspek, yaitu material, tenaga kerja, dan overhead. Upaya untuk mencapai target TKDN ini memerlukan dukungan terhadap pendalaman struktur industri, peningkatan dan inovasi teknologi serta investasi (permodalan).

Dari berbagai langkah yang telah diambil, Kementerian ESDM telah meraih berbagai pencapaian. Salah satunya adalah TKDN pada kegiatan usaha hulu migas mengalami kecenderungan meningkat dalam delapan tahun terakhir. Pada tahun 2006, misalnya, *total expenditure* pada seluruh KKKS migas di Indonesia adalah US\$8.523,9 juta. Pada tahun itu, pengadaan barang dan jasa tercatat US\$6.857 juta dengan TKDN sebesar 43%. Delapan tahun berselang, angka-angka tersebut meningkat. Pada tahun 2013, total expenditure mencapai US\$22.415 juta. Pada tahun sama, pembelanjaan barang dan jasa adalah sebesar US\$12.553 juta dengan penggunaan barang dan jasa dalam negeri sebesar US\$7,03 juta atau setara dengan 56%. Pencapaian berikutnya ialah nilai Rencana Impor Barang (RIB) tahun 2013 mengalami penurunan nilai sampai dengan 13,5% dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian impor barang operasi melalui mekanisme RIB memberikan pengaruh terhadap penekanan biaya nilai impor yang sekaligus dapat mempengaruhi peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri pada pengadaan barang operasi di KKKS.

Pengendalian TKA di sub sektor migas juga telah membuahkan hasil nyata. Pada tahun 2013, telah terjadi penurunan penggunaan tenaga kerja asing sebesar 223 orang atau turun 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengendalian penggunaan TKA di sub sektor migas memberikan pengaruh terhadap peningkatan penggunaan tenaga kerja nasional. Saat ini, penggunaan

of Cooperation Contract in each goods and services procurement. The goods and services supplier is able to take part in increasing the local content in oil and gas sub sector. The steps to be taken are to fulfill the quality, delivery time, and price requirement, to fulfill the commitment of local content, and to increase the local content itself.

The human resources empowerment cannot be separated from the effort in increasing the local content in oil and gas. Monitoring needs to be conducted. The foreign worker management by the oil and gas companies, both Contractor of Cooperation Contract and services companies, should be conducted sustainability for the purpose of national worker empowerment. The main purpose of local content is to promote local industries. Thus, the goods and services procurement will utilize the local component, both the material and the overhead, to minimize the production cost. The limitation of local content includes three aspects: material, worker, and overhead. The effort to reach the local content target requires the support to industry structure deepening, technology development and innovation, and investment.

The Ministry of Energy and Mineral Resources has gained achievements from the efforts taken. One of them is the increase of local content in oil and gas upstream business in the last eight years. In 2006, the total expenditure in all Contractors of Cooperation Contract in Indonesia is US\$ 8,523.9 million. The goods and services procurement in 2006 is recorded US\$ 6,857 million with 43% of local content. This number increased eight year afterward. In 2013, the total expenditure is US\$ 22,415 million. At the same year, the goods and services expenditure is US\$ 12,553 million with the domestic goods and services consumption of US\$ 7.03 million or equivalent to 56%. The next achievement is the decline of Goods Import Plan in 2013 up to 13.5% compared to the number in 2012. It shows that the control on operation goods import through Goods Import Plan has influenced the import cost and the increase of domestic product utilization in operation goods procurement in Contractor of Cooperation Contract.

The foreign worker control in oil and gas sub sector has produced tangible result. In 2013, there has been a decline of foreign workers up to 223 persons or 9% compared to the previous year. It means that the foreign worker control in oil and gas sub sector has influenced the increase of national worker. At present, the national worker in oil and gas sub sector reaches 98.9% from

STRATEGI SINERGI STAKEHOLDER

STRATEGY OF STAKEHOLDER SYNERGY

Ditjen Migas <i>Directorate General of Oil and Gas</i>	SKK MIGAS <i>SKK MIGAS</i>	KKKS <i>Contractor of Cooperation Contract</i>	Penyedia Barang & Jasa <i>Providers of Goods & Services</i>
Melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri dalam rangka menerbitkan SKUP Migas; <i>Conducting research and assessment capabilities of domestic products in order to publish SKUP of oil and gas;</i>	Menetapkan target TKDN yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Daftar Rencana Pengadaan <i>Set a target of domestic products to be achieved by the Contractor in any Work Plan and Budget and / or the Procurement Plan List</i>	Mensyaratkan agar semaksimal mungkin produksi barang/jasa dilakukan di dalam negeri <i>Requiring the production of goods / services performed in the country</i>	Memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa <i>Meet quality, delivery time and price in accordance with the provisions of the procurement of goods and services</i>
Menerbitkan dan memperbaharui Buku APDN secara berkala; <i>Publish and update periodically APDN Books;</i>	Membina Kontraktor untuk memenuhi target pencapaian penggunaan produk dalam negeri yang tercantum di dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Daftar Rencana Pengadaan <i>Organizing contractor to meet achievement targets on the use of domestic products that are listed in the Work Plan and Budget and / or the Procurement Plan List</i>	Menetapkan spesifikasi teknis atas barang/jasa dengan mempertimbangkan Buku APDN <i>Set of technical specifications for goods / services in accordance with the Book APDN</i>	Memenuhi komitmen TKDN jasa yang dinyatakan sendiri (self assesment) yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa <i>Meet the commitment of local content self-assessment, specified in the procurement contract of goods or services dan/</i>
Melakukan kualifikasi terhadap perusahaan dan perseorangan untuk melakukan Verifikasi; dan <i>Conducting qualifications of the firm and individuals to perform verification; and</i>	Memberikan informasi yang dapat diketahui oleh publik tentang rencana pengadaan barang/jasa produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas <i>Provide information that can be known by the public about planned procurement of goods / services of domestic products in the upstream oil and gas business activities</i>	Menetapkan target capaian TKDN yang harus dicapai dalam setiap pengadaan barang/jasa <i>Set targets of local content to be achieved in any procurement of goods / services</i>	Meningkatkan TKDN barang dan atau jasa hasil produksinya yang dinyatakan dalam komitmen rencana peningkatan TKDN barang dan/atau jasa; dan <i>Increasing local content of goods and services specified in the production plans to increase local content commitment for goods and / atau jasa; and...</i>
Melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. <i>Conducting supervision over the use of goods, services, technology, engineering and design capabilities in the country.</i>	Mengkoordinasikan Kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri <i>Coordinate contractor in a joint effort to increase the use of domestic products / services</i>	Melakukan verifikasi untuk menentukan capaian TKDN pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa <i>Verifying achievement of local content in determining the procurement contract of goods / services</i>	Menyampaikan laporan kemampuan produksi barang/jasa kepada Direktorat Jenderal setiap 6 (enam) bulan <i>Provides reports on the ability of the production of goods / services to the Directorate General of every 6 months</i>
		Menyampaikan laporan hasil verifikasi capaian TKDN kepada Direktorat Jenderal dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi <i>Delivering local content performance verification reports to the Director General and Special Unit of Upstream Oil and Gas</i>	Produsen Dalam Negeri : • Memiliki SKUP Migas yang masih berlaku • Melakukan proses produksi di dalam negeri • Memenuhi TKDN Barang sesuai nilai yang tercantum dalam sertifikat TKDN Domestic Manufacturer • Have a valid license of SKUP • Production process in the country • Meet appropriate standards of local contents values listed in the certificate of TKDN

tenaga kerja nasional pada sub sektor migas mencapai 98,9% dari target 98,6%. Pengakuan terhadap upaya memanfaatkan TKDN yang dilakukan Kementerian ESDM juga telah mendapat pengakuan. Salah satunya datang dari Presiden Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Kementerian ESDM mendapat peringkat pertama Anugerah Cinta Karya Bangsa.

Industri sub sektor migas, khususnya hulu, telah lama menjadi sumber utama devisa negara. Bahkan, pada kurun waktu 1978 hingga 1984, kontribusinya terhadap penerimaan negara hampir menyentuh 70%. Penerimaan dari migas inilah yang digunakan membiayai pembangunan nasional. Seiring waktu, beberapa sub sektor lainnya telah tumbuh pesat mengisi pundi-pundi penerimaan negara. Peran migas mulai bergeser dari sumber utama devisa

the target of 98.6%. The Ministry of Energy and Mineral Resources' effort in utilizing the local content has been acknowledged by President of the Republic of Indonesia by receiving the first rank of Anugerah Cinta Karya Bangsa.

The oil and gas industry, especially the upstream activity, has been the main source of the state revenue. In 1978 to 1984, its contribution to the state revenue is almost 70%. The revenue from oil and gas is allocated for the national development. Through the years, other sub sectors grow fast and contribute to the state revenue. The oil and gas then shifted from the main source of state revenue to national economy supporter. The oil and gas sub sector runs this role maximally through

Nilai TKDN Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Local Content Value for Procurement of Goods and Services in the Upstream Oil and Gas Business



menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sub sektor migas menjalankan peran ini dengan memaksimalkan keikutsertaan perusahaan nasional dalam bisnis hulu migas. Kebijakan yang berpihak pada pelaku industri nasional ini kerap dikritik pihak luar yang menuduh diskriminatif. Tapi, perlu diingat, bisnis hulu migas adalah bisnis negara yang semua pengeluaran akan digantikan bila kegiatan itu menghasilkan migas yang komersial. Dengan demikian, sangatlah logis bila kebijakan yang dibuat juga memihak pada kepentingan nasional.

Di sisi lain, perusahaan dalam negeri yang berminat terlibat dalam kegiatan hulu migas harus memahami bahwa salah satu karakter industri ini adalah risikonya yang tinggi. Setiap kesalahan prosedur bisa berisiko terhentinya produksi, rusaknya fasilitas, kerusakan lingkungan, bahkan hilangnya nyawa manusia. Tidak heran jika kontraktor migas menetapkan standar yang sangat tinggi bagi rekanan yang menjadi mitranya. Dengan kata lain, pemain nasional perlu meningkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi standar kualitas industri hulu migas yang sangat tinggi, terutama terkait dengan faktor keamanan (*safety*). Apresiasi terhadap penggunaan produksi dalam negeri bukan bermaksud untuk menghambat masuknya perusahaan asing, namun justru diharapkan mampu mendorong investor asing melakukan

the participation of national companies in upstream business. The policy that gives favor on national industry has created a critique regarding discrimination. However, it needs to be noted that the oil and gas upstream business is a national business in which all the expenses and cost are reimbursed after the commercial stage. Thus, it is very logic to make the policy with the consideration on national interest.

On the other hand, the national companies interested to participate in upstream activity should understand that this industry is high risk. Any procedural failure is very risky in resulting on production shut down, facility damage, environmental damage, and loss of life. Thus, the oil and gas contractor determines a very high standard to its partner. In other word, the national company should develop its capacity to meet the high upstream industry quality standard, especially the safety factor. The domestic product appreciation is not intended to block the foreign company participation, but to promote foreign investor to invest in Indonesia. It also supports the government's program which is pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment. Furthermore, the

penanaman modalnya di dalam negeri. Hal ini sekaligus upaya untuk mendukung program Pemerintah yang *pro-growth, pro-job, pro-poor*, dan *pro-environment*. Tambah pula, peningkatan TKDN dalam industri migas akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan, tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya.

local content development in oil and gas industry will surely promote Indonesia into a country with excellences, not only a country which depends on natural resources.



2013





02

BAB
CHAPTER

Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Secretariat of Directorate General of Oil and Gas

Keuangan
Finance

Rencana dan laporan
Planning and Report

Hukum
Legal

Umum dan Kepegawaian
General Affairs and Human Resources

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**

KEUANGAN FINANCE

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pelaksana administrasi, Ditjen Migas sebagai satuan kerja yang memungut PNBP berkewajiban untuk mencatat dan menyampaikan laporan realisasi PNBP serta menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara pada tahun 2013.

Based on its administrative function, Directorate General of Oil and Gas as the institution that collects Non-tax Revenue, is mandated to record and submit the report of Non-tax Revenue realization and to deposit the Non-tax Revenue to State Treasury Account (Rekening Kas Umum Negara) 2013.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.265.506.250.349,- yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi Pendapatan dan Hibah tersebut terdiri dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN sebesar Rp.31.347.183.700,-. Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp.195.143.852.808,-, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp.1.248.853.800,-, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL sebesar Rp.750.639,-, Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp.3.453.689.946,- dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp.34.310.771.564,- serta Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp.1.147.892,-.

The Realization of State Revenue and Grant until 31 December 2013 is Rp 265,506,250,349.- as Non-tax Revenue. The realization of State Revenue and Grant consists of State Property Revenue and Transfer of Rp 31,347,183,700.-. There are also revenue from the oil and gas upstream activity of Rp 195,143,852,808.-, Fine from Government Work Delay of Rp 1,248,853,800.-, Civil Servant Salary Revenue of Rp 750,639,-, Other Expenses Revenue of Rp 3,453,689,946.-, Other Budgets Income of Rp 34,310,771,564.- and Giro Services Income of Rp 1,147,892.-.

Tabel Rincian Realisasi Pendapatan
Realization of State Revenue Table

Uraian Details	2013
1. Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Revenue and Transfer of BMN	Rp 31.347.183.700
2. Pendapatan dari Kegiatan Hulu Migas Revenue from Upstream Oil and Gas	Rp 195.143.852.808
3. Pendapatan Denda Revenue of Fines	Rp 1.248.853.800
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Civil Servant Salary Revenue	Rp 750.639
5. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL Other Expenses Revenue	Rp 3.453.689.946
6. Pendapatan Anggaran Lain-Lain Other Budgets Income	Rp 34.310.771.564
7. Pendapatan Jasa Giro Giro Services Income	Rp 1.147.892
Jumlah Total	Rp 265.506.250.349



Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada TA 2013 adalah sebesar Rp.1.620.054.395.874 atau sebesar 75,60 persen dari anggaran senilai Rp.2.142.806.734.000. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 tersaji pada Tabel berikut.

The expenditure realization of Directorate General of Oil and Gas in Fiscal Year 2013 is Rp 1,620,054,395,874.- or 75.60% from the budget of Rp 2,142,806,734,000.-. The detail of Expenditure Budget and Realization in Fiscal Year 2013 is shown in the Table.

Rincian Realisasi Belanja
Realization of Expenditure

Uraian Details	ANGGARAN Budget	REALISASI Realization	% Real thd Angg % Real against budget
Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	28.493.100.000	24.833.836.732	87,16
Belanja Barang <i>Goods Expenditure</i>	986.802.201.000	759.784.027.737	76,99
Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	1.127.511.433.000	835.630.402.727	74,11
Total Belanja Kotor Total Gross Expenditure	2.142.806.734.000	1.620.248.267.196	75,61
Pengembalian Belanja <i>Returns Expenditure</i>		193.871.322	0,00
Belanja Netto Net Expenditure	2.142.806.734.000	1.620.054.395.874	75,60

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengadministrasikan BMN, Bagian Keuangan melakukan kegiatan pencatatan, inventarisasi, labeling, dan permohonan penghapusan/pelepasan BMN.

To conduct its function and role in State Property administration, the Financial Division records, conducts inventory and labeling, and proposes state property disposal.

Pencatatan BMN dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

The State Property record is conducted through State Property Management and Accounting Information System (SIMAK-BMN) as the sub system of Institution Accounting System (SAI). SIMAK-BMN is purposed to give information as the accountability of the State Budget implementation and managerial report. SIMAK-BMN yields information as a basis for preparing the Ministry or Institution balance sheet and information for planning and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, assessment, removal, transfer, training, supervision and control.

Untuk menghasilkan pencatatan SIMAK-BMN yang akurat, maka dilakukan beberapa kegiatan, seperti pemeliharaan dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN, pelaksanaan labeling/penomoran pada barang inventaris negara, pembuatan DIR, KIB, dan DIL, rekonsiliasi internal maupun eksternal, serta pelaksanaan koreksi data.

To make an accurate SIMAK-BMN record, several activities are conducted such as source document and state property accounting document maintenance; labeling/numbering on state inventory goods; making of DIR, KIB, and DIL; internal and external reconciliation; and data correction.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.2.534.754.053.674,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.66.355.466.058,-, Aset Tetap sebesar Rp.1.671.989.932.148,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.796.408.655.468,-.

The total Asset is Rp 2,534,754,053,674.- consisted of Current Asset of Rp 66,355,466,058.-, Fixed Asset of Rp 1,671,989,932,148.- and Other Asset of Rp 796,408,655,468.-.



Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMN Ditjen Migas adalah pelaksanaan penomoran atau *labeling* pada BMN Ditjen Migas. Penomoran BMN diharapkan dapat membantu Kuasa Pengguna Barang untuk memantau dan menginventarisasi BMN. Pada tahun 2013, Ditjen Migas melakukan kegiatan Pelabelan Barang Milik Negara dengan Penggunaan *Barcode* (Lanjutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan tujuan agar semua Barang Milik Negara di lingkungan Ditjen Migas dapat diinventaris dengan mudah dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Sampai dengan akhir tahun 2013, Ditjen Migas telah melakukan *labeling* untuk 100% BMN di lingkungan Ditjen Migas.

One of the activities in state property management by Directorate General of Oil and Gas is numbering or labeling the state property in Directorate General of Oil and Gas. The labeling is expected to help Goods Power User (Kuasa Pengguna Barang) to monitor and to conduct inventory of state property. In 2013, Directorate General of Oil and Gas conducted State Property Labeling with Advance Barcode in Directorate General of Oil and Gas office to ease the inventory and to create orderly administration in state property management. Until the end of 2013, Directorate General of Oil and Gas has finished the labeling to all state property in Directorate General of Oil and Gas.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi urusan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, Bagian Keuangan telah melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pencatatan transaksi keuangan Ditjen Migas, rekonsiliasi data SIMAK-BMN dengan UAKPB, rekonsiliasi data dengan KPPN dan Biro Keuangan Kementerian ESDM, serta menyusun laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Bagian Keuangan menjalankan Aplikasi SAKPA 2012 sebagai aplikasi standar yang digunakan oleh Satker seluruh Kementerian/ Lembaga yang bersumber dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

In conducting its duty and function in financial accounting and report, the Financial Division uses Financial Accounting System (SAK) in financial transaction record of Directorate General of Oil and Gas, data reconciliation of SIMAK-BMN and UAKPB, data reconciliation of KPPN and Financial Bureau MEMR, financial report, and financial report record. The Financial Division runs SAKPA 2012 application as standard application used by all Ministries and Institutions which is sourced from Directorate General of Budget, Ministry of Finance.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2012, Kementerian ESDM telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditjen Migas sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM telah turut berkontribusi untuk dapat mendapatkan opini WTP tersebut pada pemeriksaan TA 2013. Bagian Keuangan telah dapat membantu dalam melakukan koordinasi dengan Unit serta Instansi terkait.

Based on BPK RI audit on 2012 Financial Report, Ministry of Energy and Mineral Resources receives unqualified opinion. Directorate General of Oil and Gas has made a contribution on the achievement of this opinion. In this case, the Financial Division has conducted the coordination with related units.

Bagian Keuangan telah melaksanakan penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk pemetaan Penilaian Resiko di lingkungan Ditjen Migas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna mewujudkan tujuan SPIP yaitu Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

The Financial Division has conducted the design of Government Internal Monitoring System (SPIP) and Focus Group Discussion to make risk assessment mapping in Directorate General of Oil and Gas based on Government Regulation Number 60 Year 2008 on SPIP to create effective and efficient SPIP, accurate financial report, state asset security, and regulations obedience.



RENCANA DAN LAPORAN PLANNING AND REPORT

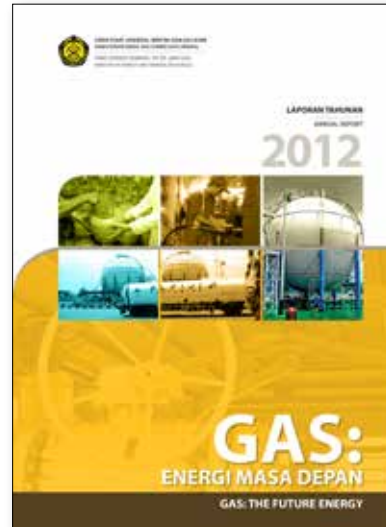
Sepanjang tahun 2013, dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan akuntabilitas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menyusun beberapa dokumen berikut :

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK-L) yang merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun menurut unit organisasi dan kegiatan berdasarkan Renja-KL yang telah disesuaikan dengan pagu sementara dan disusun dengan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran berbasis kinerja;
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagai komitmen bagi instansi pemerintah untuk pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun;
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya;
- Laporan Tahunan sub sektor Minyak dan Gas Bumi yang menyajikan data dan informasi sebagai rangkuman kegiatan/peristiwa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

In conducting the coordination and formulation of plan, program, budget, and accountability in 2013, Directorate General of Oil and Gas has formulated documents of:

- *Work Plan and Budget of Ministry/Institution (RKAK-L) as the plan and work plan and budget of organization units and activity based on work plan of Ministry/Institution in accordance with temporary budget and formulated with integrated budget approach, midterm expenditure framework, and performance-based budgeting.*
- *Annual Work Plan (RKT) as the elaboration of target and program stipulated in strategic plan as the government commitment in 1 year achievement.*
- *Performance Accountability Report of the Government Institution (LAKIP) as the monitoring and performance assessment to conduct clean and good governance as well as the feedback in work plan and implementation of the upcoming year.*
- *Annual Report of Oil and Gas sub sector that provides data and information as the review and summary of Directorate General of Oil and Gas in conducting its function.*





Jumlah Pengembangan Website Dan Peningkatan Keamanan Jaringan

Penyediaan website merupakan salah satu upaya untuk menyediakan pelayanan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang minyak dan gas bumi. Hingga akhir tahun 2012 website Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dibuka sekitar 2.452.000 pengunjung dimana hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah pengunjung di tahun sebelumnya yang mencapai 1.795.930 orang.

Website Development and Network Security Enhancement

Website is an effort to provide information services to all related stakeholders in oil and gas. Until the end of 2012, the Directorate General of Oil and Gas website has been accessed by 2,452,000 visitors. The number increased significantly up to 1,795,930 visitors from the previous year.

Website Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Directorate General of Oil and Gas Website

18 Februari 2014 [orta Lukas Seleksi CPNS Yang Mengundurkan Diri](#) [Pengumuman Hasil Ujian Penerimaan CPNS RESDM Tahun 2013](#) [Announcement](#)

Berita Utama

Kilang LNG Tangguh Tenang Tak Sufun
Masyarakat Kota Bintuni, Papua Barat, kini dapat menikmati listrik PLN yang mendapat pasokan bahan bakar dari kilang LNG Tangguh. Rencananya, akan disalurkan 4 Mega Watt (MW) lebih.

Proyek Muara Belau Sendal US\$ 4,136 Miliar Dimulai
SKK Migas telah menetapkan pemenang lelang rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (engineering, procurement, construction, installation (EPCI)) untuk dua lapangan gas bumi di Wilayah Kerja (WK) Muara.

PQH Rasmikan Proyek Jaringan Gas Rumah Tangga di Batam
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) meresmikan penyaluran gas bumi untuk rumah tangga di Kota Batam, Kepulauan Riau. Peresmian dilaksanakan di Rumah Kumis Djaya Jam, Batam.

Berita Lainnya

Tiap Hari, Indonesia Rongoh US\$ 100 Juta Untuk Impor Minyak dari BOP
Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri mencapai 1,4 juta barel per hari. Padahal, produksi minyak dalam negeri hanya sekitar 825.000 barel per hari. Untuk memenuhi

Investor Tertarik Tawaran Bangun Kilang di Indonesia
Selain lebih dari 30 perusahaan minyak terkemuka dan industri yang hadir dalam market consultation di Hotel Shengri-La Singapura, menyambut antusias rencana Pemerintah Indonesia untuk membangun

Bangun Pipa Minyak, Dik Takut Indonesia Berperilaku
Pemerintah Dik berencana membangun saluran pipa minyak mentah Bera-hadiba-Aqaba, untuk mengalirkan minyak mentah dari kota Bera di Irak hingga lepas pantai Aqaba, Yordania, menghubungkan ke Laut merah.

Informasi

Migasiana
Download

Statistik Minyak Dan Gas Bumi

Investasi Sub Sektor Migas

Tahun	Total (Miliar USD)
2007	5.919,33
2008	8.266,35
2009	9.862,35
2010	11.179,66
2011	13.524,87
2012	12.714,89
2013	12.482,82
2014	18.314,68
2015	20.173,00

Polling
Apakah Situs Web Migas membantu anda dalam mendapatkan informasi Kamigasan?
☐ Cukup Membantu
☐ Kurang Membantu
☐ Sangat Membantu
[Pilih](#) [Ulangi](#)

Pengunjung
Pengunjung s.d. Hari ini: 2.455.735
s.d. Bulan lalu: 2.452.580
Sejak 1 Maret 2007

Surat Pembaca
[Penerjemahan SKT MIGAS](#)
[Daftar Kantor](#)
[Sumber Informasi](#)
[Seri Simbol](#)
[SPU](#)
[Daftar](#)

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari upaya-upaya tim Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan agar website Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selalu memiliki informasi bidang minyak dan gas bumi yang *up to date* dan akurat, mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan serta mampu menampung masukan, saran dan pertanyaan yang diajukan oleh pembaca. Pengembangan website terus diupayakan agar tampilan tatap muka website Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi lebih menarik dan lebih mudah untuk digunakan dalam penyajian informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk peningkatan keamanan jaringan selalu diupayakan agar website dimaksud tidak diganggu oleh pihak-

The existence of Directorate General of Oil and Gas website is the result of the maintenance and improvement of the website to provide up to date, accurate, and accessible oil and gas information to all stakeholders as well as to obtain inputs, suggestions and questions from the visitors. The website is being developed to give a more interesting homepage and to be easily accessed in its function to give information to the public and all stakeholders. The network security is also enhanced to protect the website from the irresponsible sides. It is expected that the website will be

pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian diharapkan *website* tersebut mampu berfungsi sebagai media penyampaian informasi yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca *website* yang pada akhirnya akan dapat memberikan umpan balik kepada Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

a fruitful information media to the visitors. In the end, the website visitors are able to give inputs to the government in formulating the policies for the people's welfare.

Pelayanan Informasi Melalui Sistem Database Statistik Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi

Information Services through Oil and Gas Statistic Database System



Sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam menyediakan informasi terkait bidang minyak dan gas bumi di Indonesia, disusunlah sistem database statistik minyak dan gas bumi yang menyajikan data-data terkait kegiatan minyak dan gas bumi, diantaranya meliputi :investasi migas, produksi migas, harga minyak mentah, konsumsi BBM, penjualan LPG, peta cadangan migas, pengolahan migas, dan lain-lain. Statistik migas ini dapat diakses melalui link yang tersedia di *website* Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu www.migas.esdm.go.id. Diharapkan data-data yang disajikan dapat membantu para pemangku kepentingan di sub sektor migas untuk dapat turut serta berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan migas untuk mendukung pembangunan nasional.

As one of the efforts by Directorate General of Oil and Gas in providing the oil and gas information in Indonesia, the oil and gas statistic database system is established to provide oil and gas data that includes the oil and gas investment, production, crude oil price, fuel consumption, LPG sales, oil and gas reserve map, oil and gas processing, etc. The oil and gas statistic can be accessed through the link available in Directorate General of Oil and Gas website (www.migas.esdm.go.id). It is expected that the data will help the oil and gas stakeholders in managing and utilizing the oil and gas to support the national development.

HUKUM MIGAS LEGAL

Berikut daftar peraturan perundangan sebagai hasil koordinasi Ditjen Migas dengan *stakeholder* terkait di tahun 2013.

The list oil and gas regulations in 2013 are as follows.

NO	ANGGARAN	TENTANG
1	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31 TAHUN 2013	KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
2	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09 TAHUN 2013	ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
3	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2013	HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU
4	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15 TAHUN 2013	PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
5	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01 TAHUN 2013	PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
6	INTRUKSI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02 I/10/ MEM/ 2013	UJI COBA PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK NELAYAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2013
7	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 66 TAHUN 2013	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
8	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2013	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
9	INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 5 TAHUN 2013	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
10	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16 TAHUN 2013	TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH
11	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 0152K/73/MEM/2013	TIM HARGA MINYAK
12	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 280.K/12/DJM.B/2013	PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA SEMENTARA UNTUK JENIS MINYAK MENTAH BANYU URIP DAN JENIS MINYAK MENTAH GRISSIK MIX
13	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 0926K/12/MEM/2013	PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2012
14	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 3936K/73/MEM/2013	TIM KECIL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK DI INDONESIA
15	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 3794K/12/MEM/2013	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2046K/12/MEM/2013 TENTANG HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2013
16	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 3687K/73/MEM/2013	TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
17	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 3293K/73/MEM/2013	TIM PENGAWAS PENGEMBANGAN LAPANGAN KEPODANG DAN PEMBANGUNAN PIPA TRASMISI GAS BUMI KEPODANG-TAMBAK LOROK
18	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 0093K/73/MEM/2013	TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONVERSI BBM KE BBG

NO	ANGGARAN	TENTANG
19	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1732K/10/MEM/2013	PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PAKET PERDANA LIQUEFIED PETROLEUM GASTABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2013
20	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2838K/12/MEM/2013	PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JUNI 2013
21	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 3100K/12/MEM/2013	PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JULI 2013
22	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2047K/12/MEM/2013	HARGA PATOKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2013
23	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 576.K/12/DJM.B/2013	PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA SEMEN- TARA UNTUK JENIS KONDENSAT SENGKANG DAN KONDENSAT MKI
24	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 581.K/12/DJM.B/2013	PENETAPAN FORMULA MINYAK MENTAH INDONESIA SEMENTARA UNTUK JENIS MINYAK MENTAH BUDI
25	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2285K/73/MEM/2013	TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
26	INSTRUKTUR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
27	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2086K/73/MEM/2013	TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI SEKTOR DAYA MINERAL
28	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2027K/12/MEM/2013	PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MARET 2013
29	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 2046K/12/MEM/2013	HARGA PATOKAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PT PERTAMINA (PERSERO) TAHUN ANGGARAN 2013
30	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 334.K/12/DJM.B/2013	PENETAPAN FORMULA HAGA MINYAK MENTAH INDONESIA SEMEN- TARA UNTUK JENIS MINYAK MENTAH PANDAN, WUNUT, SANGATTA WESR CBM DAN KONDENSAT SUNGAI GERBONG
31	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 327.K/10.01/DJM.O/1U/2013	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 601.K/10.01/DJM.O/1U/2012 TANGGAL 27 NOVEMBER 2012 TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
32	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 328.K/10/DJM.S/2013	PENUGASAN PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN 2013
33	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 991.K/73/DJM/2013	DELEGASI DAN PANITIA PELAKSANAAN PERTEMUAN THE 3rd ENER- GY INVESTMENT ROUNDTABLE ANTARA PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2013
34	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 990.K/10/DJM.S/2013	STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR GAS JENIS DIMENTIL ETER UNTUK RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI
35	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 933.K/10/DJM.S/2013	STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BENSIN 88 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI
36	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 978.K/10/DJM.S/2013	STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK SOLAR 48 YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI
37	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 964.K/70/DJM.S/2013	HONORARIUM NARASUMBER PADA KEGIATAN SEMINAR KERJASAMA MINYAK DAN GAS BUMI DI ALJAZAIR DAN AUSTRALIA PADA SUB DIREKTORAT KERJASAMA MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
38	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 966.K/73/DJM.S/2013	PEMBANGUNAN KILANG MINI LPG DI MUSI BANYUASIN
39	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 614.K/73/DJM.T/2013	TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SPBG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	ANGGARAN	TENTANG
40	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 615.K/73/DJM.T/2013	TIM MONITORING DALAM RANGKA KESELAMATAN PENGGUNAAN BBG TAHUN ANGGARAN 2013
41	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 616.K/73/DJM.O/2013	PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2013
42	KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 11682.K/06/SDM/2013	PEMBENTTUKAN TIM EVALUASI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANG- GARAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM
43	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 645.K/73/DJM/2013	PANITIA PENYELENGGARAAN PARTNERSHIP PROGRAM KERJASAMA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
44	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 504.K/73/DJM/2013	HONONARIUM NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN DIPA TA 2013 BAGIAN RENCANA DAN LAPORAN DIREKTUR JENDER- AL MINYAK DAN GAS BUMI
45	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 460.K/73/DJM/2013	PELAKSANA KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 PADA BAGIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
46	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 461.K/73/DJM/2013	PELAKSANA KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 PADA BAGIAN HUKUM DIREKTORAT JEN- DERAL MINYAK DAN GAS BUMI
47	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 501.K/73/DJM.S/2013	TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
48	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU PENGUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 863.K/73/ DJM.T/2013	TIM PENDUKUNG KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STASI- UN PENGISIAN BAHAN BAKAR GAS DAN INFRASTRUKTUR SARANA BAHAN BAKAR GAS TAHUN ANGGARAN 2013
49	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 803.K/70/DJM.S/2013	PANITIA PENYELENGGARAAN SEMINAR KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN ASOSIASI DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013
50	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 717.K/73/DJM.S/2013	KOMITE RENCANA STANDAR KOMPETISI KERJA NASIONAL INDONE- SIA SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
51	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 738.K/73/DJM.S/2013	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 645.K/12/DJM/2013 TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN PARTNERSHIP PROGRAM KERJASAMA BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI
52	KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR 6862.K/73/SDM/2013	TIM PERSIAPAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BARANG MILIK NEGARA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KEPADA PT. PERTAMINA (PERSERO)
53	KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR 6864.K/73/SDM/2013	TIM PERSIAPAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BARANG MILIK NEGARA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KEPADA PT. PGN, TBK.
54	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 765.K/10/DJM.S/2013	PELIMPAHAN WEWENANG DARI DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI
55	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 671.K/73/DJM.O/2013	TIM PENILAIAN DAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KESELA- MATAN KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KATEGORI TANPA KEHILANGAN JAM KERJA SEBAGAI AKIBAT KECELAKAAN
56	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 583.K/10/DJM.S/2013	PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PEN- YALUR BAHAN BAKAR MINYAK DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
57	KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR 561.K/73/DJM.S/2013	TIM PERSIAPAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BARANG MILIK NEGARA JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KEPADA PT. PGN (PERSERO), TBK.

NO	ANGGARAN	TENTANG
58	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 553.K/10/DJM.S/2013	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INVESTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
59	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 484.K/73/DJM/2013	DELEGASI DAN PANITIA PENYELENGGARA A REGIONAL WORKSHOP ON THE CHANGING GLOBAL GAS MARKET AND UNCONVENTIONAL GAS TAHUN 2013
60	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 452.K/73/DJM.S/2013	TIM PERSIAPAN PEMBANGUNAN KILANG MINI LPG
61	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 433.K/73/DJM.S/2013	DELEGASI DAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN KERJASAMA SEKTOR ENERGI THE 6TH INDONESIA - KOREA ENERGY FORUM TAHUN 2013
62	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 414.K/73/DJM.S/2013	TIM INDEPENDEN PENGENDALIAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI
63	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 416.K/73/DJM.S/2013	SEKRETARIAT TIM INDEPENDEN PENGENDALIAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI
64	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 356.K/10/DJM.S/2013	TIM KOORDINATOR PROGRAM RENCANA AKSI PERCEPATAN PRIOR- ITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
65	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KETUA TIM HARGA MINYAK MENTAH NOMOR : 333.K/73/ DJM.S/2013	PERUBAHAN ATAS KEANGGOTAAN TIM HARGA MINYAK MENTAH
66	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 316.K/73/ DJM.S/2013	PENGANTIAN PENJABAT PENGADAAN DAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR MINYAK KE BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN PT PERTAMINA (PERSERO)
67	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR JENDER- AL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 235.K/10/DJM.S/2013	RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) KE II - KEGIATAN DIPADIREK- TORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013
68	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 237.K/73/DJM.S/2013	TIM PELAYANAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
69	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 236.K/73/DJM.S/2013	PENETAPAN TENAGA SATUAN PENGAMAN, PENGEMUDI DAN PRAMU DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
70	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR JENDER- AL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 231.K/80/DJM.S/2013	PENGELOLA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
71	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTUR JENDER- AL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 217.K/73/DJM.S/2013	TIM LELANG PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2012
72	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 01.K/73/DJM.S/2013	PENGANGKATAN TENAGA PURNABAKTI UNTUK DIPERBANTUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
73	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 02.K/73/DJM.S/2013	PERPANJANGAN TUGAS TENAGA PURNABAKTI UNTUK DIPERBANTU- KAN DALAM KEGIATAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN DIPADIREK- TORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
74	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR : 167.K/73/DJM.S/2013	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUN- GAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
75	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 215.K/73/ DJM.S/2013	PENGANTIAN ANGGOTA KELIOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
76	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 14.K/73/ DJM.S/2013	PENGELOLA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

LIST OF REGULATIONS IN 2013

NUM	REGULATION	SUBJECT
1	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NUMBER 31 YEAR 2013	RULES AND REGULATIONS OF FOREIGN WORKER EMPOWERMENT AND INDOONESIAN WORKER DEVELOPMENT IN OIL AND GAS BUSINESS ACTIVITY
2	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NUMBER 09 YEAR 2013	ORGANIZATION AND STRUCTURE OF SPECIAL TASK FORCE FOR UPSTREAM OIL AND GAS BUSINESS ACTIVITIES
3	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NUMBER 18 YEAR 2013	RETAIL PRICE OF CERTAIN OIL FUEL FOR CERTAIN CONSUMER
4	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NUMBER 15 YEAR 2013	DOMESTIC PRODUCT UTILIZATION IN OIL AND GAS UPSTREAM BUSINESS ACTIVITY
5	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NUMBER 01 YEAR 2013	OIL FUEL CONSUMPTION CONTROL
6	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL INSTRUCTION NUMBER 02 I/10/ MEM/ 2013	TRIAL OF 3 KG CYLINDER LPG FOR FISHERMEN IN BUDGET YEAR 2013
7	PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 66 YEAR 2013	THIRD AMANDMENT OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 67 YEAR 2005 ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITY IN INFRASTRUCTURE PROCUREMENT
8	PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 9 YEAR 2013	OIL AND GAS BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT
9	PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 5 YEAR 2013	SOCIALIZATION OF POLICY ON OIL FUEL SUBSIDY ADJUSTMENT
10	PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 16 YEAR 2013	RENEGOTIATION TEAM OF LNG TANGGUH SALES AND PURCHASE AGREEMENT
11	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 0152K/73/MEM/2013	OIL PRICE TEAM
12	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 280.K/12/DJM.B/2013	THE DETERMINATION OF TEMPORARY ICP FORMULA FOR BANYU URIP CRUDE OIL AND GRISSIK MIX CRUDE OIL
13	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 0926K/12/MEM/2013	THE DETERMINATION OF ICP DECEMBER 2012
14	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 3936K/73/MEM/2013	MINOR TEAM FOR OIL REFINERY ACCELERATION PROJECT IN INDOENSIA
15	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 3794K/12/MEM/2013	AMENDMENT OF MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2046K/12/MEM/2013 ON BENCHMARK PRICE OF CERTAIN OIL FUEL FOR PT PERTAMINA (PERSERO) FOR BDUGET YEAR 2013
16	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 3687K/73/MEM/2013	ORGANIZING TEAM OF PRESIDENTIAL REGULATION DRAFT ON AMENDMENT OF PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 9 YEAR 2013 CONCERNING THE OIL AND GAS UPSTREAM BUSINESS MANAGEMENT
17	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 3293K/73/MEM/2013	SUPERVISOR TEAM ON KEPODANG FIELD DEVELOPMENT AND KEPODANG-TAMBAK LOROK GAS TRANSMISSION PIPELINE PROJECT
18	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 0093K/73/MEM/2013	ACCELERATION TEAM OF NEW AND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AND OIL FUEL TO GAS CONVERSION
19	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 1732K/10/MEM/2013	THE ASSIGNMENT OF PT PERTAMINA (PERSERO) IN INNITIAL PACKAGE OF 3 KG LPG CYLINDER SUPPLY AND DISTRIBUTION YEAR 2013

NUM	REGULATION	SUBJECT
20	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2838K/12/MEM/2013	ICP JUNE 2013
21	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 3100K/12/MEM/2013	ICP JULY 2013
22	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2047K/12/MEM/2013	3 KG LIQUEFIED PETROLEUM GAS CYLINDER BENCHMARK PRICE FOR BUDGET YEAR 2013
23	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 576.K/12/DJM.B/2013	THE DETERMINATION OF TEMPORARY ICP FOR SENGKANG AND MKI CONDENSATE
24	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 581.K/12/DJM.B/2013	THE DETERMINATION OF TEMPORARY ICP FORMULA FOR BUDI CRUDE OIL
25	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2285K/73/MEM/2013	SOCIALIZATION TEAM OF OIL FUEL SUBSIDY ADJUSTMENT
26	PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 5 YEAR 2013	THE SOCIALIZATION OF POLICY ON OIL FUEL SUBSIDY ADJUSTMENT
27	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2086K/73/MEM/2013	SOLUTION TEAM IN MINERAL RESOURCES
28	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2027K/12/MEM/2013	ICP MARCH 2013
29	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 2046K/12/MEM/2013	THE BENCHMARK PRICE OF CERTAIN OIL FUEL FOR PT PERTAMINA (PERSERO) BUDGET YEAR 2013
30	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 334.K/12/DJM.B/2013	THE DETERMINATION OF TEMPORARY ICP FORMULA FOR PANDAN CRUDE OIL, SANGATTA WESR CBM CRUDE OIL AND SUNGAI GERBONG CONDENSATE
31	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 327.K/10.01/DJM.O/IU/2013	THE AMENDMENT OF MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 601.K/10.01/DJM.O/IU/2012 DATED 27 NOVEMBER 2012 ON OIL FUEL TRANSPORTATION BUSINESS LICENSE
32	MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES DECREE NUMBER 328.K/10/DJM.S/2013	THE ASSGNMENT OF PT PERTAMINA (PERSERO) IN 3 KG LPG CYLINDER SUPPLY AND DISTRIBUTION YEAR 2013
33	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 991.K/73/DJM/2013	DELEGATION AND COMMITTEE OF THE 3 RD INDONESIA-US ENERGY INVESTMENT ROUNDTABLE YEAR 2013
34	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 990.K/10/DJM.S/2013	STANDARD AND QUALITY (SPECIFICATION) OF DIMETHYL ETHER FOR DOMESTIC HOUSEHOLD AND INDUSTRY
35	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 933.K/10/DJM.S/2013	STANDARD AND QUALITY (SPECIFICATION) OF GASOLINE RON 88 FOR DOMESTIC MARKET
36	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 978.K/10/DJM.S/2013	STANDARD AND QUALITY (SPECIFICATION) OF DIESEL FUEL-48 FOR DOMESTIC MARKET
37	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 964.K/70/DJM.S/2013	HONORARIUM OF SPEAKERS AT OIL AND GAS SEMINAR IN ALGERIA AND AUSTRALIA AT SUB DIRECTORATE OF OIL AND GAS COOPERATION AFFAIRS OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
38	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 966.K/73/DJM.S/2013	MINI LPG REFINERY IN MUSI BANYUASIN

NUM	REGULATION	SUBJECT
39	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 614.K/73/DJM.T/2013	MONITORING AND EVALUATION TEAM OF GAS FILLING STATION DEVELOPMENT FOR BUDGET YEAR 2013
40	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 615.K/73/DJM.T/2013	MONITORING TEAM OF GAS UTILIZATION SAFETY FOR BUDGET YEAR 2013
41	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 616.K/73/DJM.O/2013	THE EXECUTING AGENCY OF GAS FOR HOUSEHOLDS DEVELOPMENT FOR BUDGET YEAR 2013
42	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 11682.K/06/SDM/2013	THE ESTABLISHMENT OF BUDGET IMPLEMENTATION LIST EVALUATION TEAM FOR BUDGET YEAR 2013 IN LEGAL DIVISION
43	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 645.K/73/DJM/2013	THE COMMITTEE OF INDONESIA'S OIL AND GAS PARTNERSHIP PROGRAM
44	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 504.K/73/DJM/2013	HONORARIUM OF SPEAKER AND MODERATOR FOR BUDGET YEAR 2013 IN PLANNING AND REPORT DIVISION OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
45	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 460.K/73/DJM/2013	THE EXECUTING AGENCY OF BUDGET IMPLEMENTATION LIST FOR BUDGET YEAR 2013 IN FINANCE DIVISION OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
46	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 461.K/73/DJM/2013	THE EXECUTING AGENCY OF BUDGET IMPLEMENTATION LIST FOR BUDGET YEAR 2013 IN LEGAL DIVISION OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
47	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 501.K/73/DJM.S/2013	SOCIALIZATION TEAM OF REGULATION IN OIL AND GAS SECTOR
48	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED BUDGET USER) DECREE NUMBER 863.K/73/DJM.T/2013	SUPPORTING TEAM OF GAS FILLING STATION INFRASTRUCTURE AND GAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR BUDGET YEAR 2013
49	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 803.K/70/DJM.S/2013	COMMITTEE OF COOPERATION SEMINAR BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS AND DOMESTIC ASSOCIATION FOR BUDGET YEAR 2013
50	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 717.K/73/DJM.S/2013	COMMITTEE OF INDONESIA NATIONAL WORKER COMPETITION STANDARD PLAN IN OIL AND GAS INDUSTRY
51	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 738.K/73/DJM.S/2013	THE AMENDMENT OF DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 645.K/12/DJM/2013 ON OIL AND GAS PARTNERSHIP PROGRAM
52	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED GOODS USER) DECREE NUMBER 6862.K/73/SDM/2013	PREPARATORY TEAM OF STATE CAPITAL FOR STATE PROPERTY IN GAS FOR HOUSEHOLD DISTRIBUTION PIPELINE TO PT. PERTAMINA (PERSERO)
53	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED GOODS USER) DECREE NUMBER 6864.K/73/SDM/2013	PREPARATORY TEAM OF STATE CAPITAL FOR STATE PROPERTY IN GAS FOR HOUSEHOLD DISTRIBUTION PIPELINE TO PT. PGN, TBK
54	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 765.K/10/DJM.S/2013	DELEGATION OF AUTHORITY FROM DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS TO DIRECTOR OF OIL AND GAS PROGRAM DEVELOPMENT TO LEGALIZE OIL AND GAS OPERATION GOODS IMPORT PLAN
55	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 671.K/73/DJM.O/2013	ASSESMENT TEAM OF OIL AND GAS SAFETY AWARD FOR CATEGORY MAINTAINING WORKING HOUR DUE TO ACCIDENT
56	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 583.K/10/DJM.S/2013	DELEGATION OF AUTHORITY FROM DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS TO DIRECTOR OF OIL AND GAS DOWNSTREAM BUSINESS DEVELOPMENT ON OIL FUEL DISTRIBUTION RECOMMENDATION
57	SECRETARY OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED GOODS USER) DECREE NUMBER 561.K/73/DJM.S/2013	PREPARATORY TEAM OF STATE CAPITAL FOR STATE PROPERTY IN GAS FOR HOUSEHOLD DISTRIBUTION PIPELINE TO PT. PGN (PERSERO), TBK

NUM	REGULATION	SUBJECT
58	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 553.K/10/DJM.S/2013	DETERMINATION OF INVESTMENT SERVICE STANDARD IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
59	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 484.K/73/DJM/2013	DELEGATION AND COMMITTEE OF A REGIONAL WORKSHOP ON THE CHANGING GLOBAL GAS MARKET AND UNCONVENTIONAL GAS YEAR 2013
60	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 452.K/73/DJM.S/2013	PREPARATORY TEAM OF MINI LPG CONSTRUCTION
61	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 433.K/73/DJM.S/2013	DELEGATION AND COMMITTEE OF THE 6 TH INDONESIA-KOREA ENERGY FORUM 2013
62	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 414.K/73/DJM.S/2013	INDEPENDENT TEAM OF OIL AND GAS SAFETY CONTROL
63	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 416.K/73/DJM.S/2013	SECRETARIAT OF INDEPENDENT TEAM ON OIL AND GAS SAFETY CONTROL
64	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 356.K/10/DJM.S/2013	COORDINATOR TEAM OF NATIONAL DEVELOPMENT PRIORITY ACCELERATION ACTION PLAN PROGRAM YEAR 2013 IN OIL AND GAS SUB SECTOR
65	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS AS TEAM LEADER OF KEROSENE PRICE DECREE NUMBER 333.K/73/DJM.S/2013	AMENDMENT OF CRUDE OIL PRICE TEAM MEMBER
66	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS AS AUTHORIZED BUDGET USER DECREE NUMBER 316.K/73/DJM.S/2013	REPLACEMENT OF PROCUREMENT OFFICIAL AND COMMITTEE OF OIL FUEL TO GAS DIVERSIFICATION FOR TRANSPORTATION IN PT PERTAMINA (PERSERO)
67	AUTHORIZED BUDGET USER OF DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 235.K/10/DJM.S/2013	GENERAL PLAN OF THE 2 ND PROCUREMENT IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS BUDGET YEAR 2013
68	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 237.K/73/DJM.S/2013	HEALTH SERVICE TEA, OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
69	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 236.K/73/DJM.S/2013	DETERMINATION OF SAFETY GUARD, DRIVER AND ATTENDANT OF DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
70	AUTHORIZED BUDGET USER OF DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 231.K/80/DJM.S/2013	MANAGEMENT OF BUDGET IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
71	AUTHORIZED BUDGET USER OF DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 217.K/73/DJM.S/2013	TEAM OF TENDER ON GAS FOR HOUSEHOLD DISTRIBUTION PIPELINE OPERATION BY GOVERNMENT YEAR 2012
72	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 01.K/73/DJM.S/2013	ASSIGNMENT OF PENSIONARY IN STRATEGIC ACTIVITY AT DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
73	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 02.K/73/DJM.S/2013	ASSIGNMENT EXTENSION OF PENSIONARY FOR BUDGET ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN DIRECTORATE OF OIL AND GAS UPSTREAM BUSINESS DEVELOPMENT, DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
74	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS DECREE NUMBER 167.K/73/DJM.S/2013	MANAGEMENT TEAM OF BUREAUCRACY REFORM IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
75	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED BUDGET USER) DECREE NUMBER 215.K/73/DJM.S/2013	REPLACEMENT OF WORKING GROUP MEMBER ON GOODS/SERVICE PROCUREMENT IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS
76	DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS (AS AUTHORIZED BUDGET USER) DECREE NUMBER 14.K/73/DJM.S/2013	BUDGET MANAGEMENT IN DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Awal tahun 2013 Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, yang memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan, dan sektor transportasi laut. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga volume BBM bersubsidi agar tidak melampaui pagu APBN sebesar 46,01 juta KL, Pemerintah berupaya terus menerus untuk melakukan langkah pengendalian BBM yang lebih meluas, sehingga perlu penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2012.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2013, diamanatkan :

Sektor yang terkena pengendalian BBM bersubsidi

1. Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD :
 - a) Dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali
 - b) Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan
 - c) Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi
2. Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD :
 - a) Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013, di Jabodetabek
 - b) Dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa Bali lainnya

The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 01 Year 2013 concerning Oil Fuel Consumption Control

In early 2013, Minister of Energy and Mineral Resources issued a Regulation Number 01 Year 2013 concerning Oil Fuel Consumption Control that regulates the additional of oil fuel control especially for premium and diesel fuel for official vehicles, forestry, and sea transportation. It is aimed at maintaining subsidized oil fuel volume not to exceed the State Budget allocation of 46.01 million KL. The government is trying to conduct wider oil fuel control. Thus, it requires the revision of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 12 Year 2012.

The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 01 Year 2013 mandates as follows:

The sectors affected by subsidized oil fuel control.

1. The limitation of gasoline RON 88 consumption for official, local government, State Own Enterprise and Local Own Enterprise vehicle:
 - a) Applied in Java and Bali
 - b) Effective on 1 February 2013 in Sumatera and Kalimantan
 - c) Effective on 1 July 2013 in Sulawesi
2. The limitation of diesel fuel consumption for official, local government, State Own Enterprise and Local Own Enterprise vehicle
 - a) Effective on 1 February 2013 in Jabodetabek
 - b) Effective on 1 March 2013 in Java and Bali



- | | |
|---|---|
| <p>3. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi</p> <p>4. Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.</p> <p>5. Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi</p> | <p>3. <i>Carrier vehicles with more than four wheels which transport plantation and mining product are prohibited to consume subsidized diesel fuel.</i></p> <p>4. <i>Carrier vehicles with more than four wheels which transport forestry product are prohibited to consume subsidized diesel fuel since 1 March 2013.</i></p> <p>5. <i>Sea Transportation including non-frontier and non-cruise ship are prohibited to consume subsidized diesel fuel since 1 February 2013</i></p> |
|---|---|

Namun, masih perlu ada pengecualian yaitu:

1. untuk Kendaraan Dinas berupa ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah.
2. untuk Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan:
 - usaha perkebunan rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
 - pertambangan rakyat dan komoditas batuan; dan
 - hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat,

However, an exception is applied to:

1. *Official vehicle including ambulance, hearse, fire truck and garbage car.*
2. *Carrier vehicle which are used to transport:*
 - *Public plantation with the business scale less than 25 hectare.*
 - *Public mining and rocks commodity; and*
 - *Public forestry.*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.

Bahwa dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan Negara dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (Subsidi). Bahwa besaran harga jual BBM Bersubsidi dimaksud berdasarkan hasil Sidang Kabinet;

Harga jual eceran BBM Bersubsidi untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut:

- Minyak tanah (*Kerosene*) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bensin (*Gasoline*) RON 88 sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Minyak Solar (*Gas Oil*) sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Harga jual eceran BBM Bersubsidi Minyak Tanah (*Kerosene*) telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Harga jual eceran BBM Bersubsidi bensin (*Gasoline*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5% (lima persen);

The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 Year 2013 concerning Particular Oil Fuel Retail Price for Particular Consumer.

By considering the national energy policy and state financial condition in providing effective subsidy to particular consumer and in increasing the State Budget efficiency, the adjustment of particular subsidized oil fuel retail price needs to be conducted.

The subsidized oil fuel retail price based on Cabinet Meeting is as follow:

- *Kerosene is Rp 2,500.00 (two thousand and five hundreds rupiah);*
- *Gasoline RON 88 is Rp 6,500.00 (six thousand and five hundreds rupiah);*
- *Gas oil is Rp 5,500.00 (five thousand and five hundreds rupiah);*

The subsidized kerosene retail price includes value added tax. The subsidized gasoline and gas oil retail price includes value added tax and 5% of Vehicle Fuel Tax (PBBKB).

Harga jual eceran BBM Bersubsidi dimaksud hanya berlaku konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 serta Kendaraan Dinas pada wilayah yang belum diberlakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;

The subsidized oil fuel retail price is applicable only for consumers as stated in the Annex of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 Year 2013 and official vehicle in the areas not yet included in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 1 Year 2013 concerning Oil Fuel Consumption Control.

Badan Usaha (BU) wajib menjamin harga jual eceran BBM Bersubsidi kepada Konsumen Pengguna di titik serah pada Terminal BBM, Depot, atau Penyalur sebagaimana tercantum dalam lampiran Permen ESDM No. 18 tahun 2013;

Business Entities are obliged to maintain subsidized oil fuel retail price to consumers in handover point in oil fuel terminal, depot or supplier as stated in the Annex of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 Year 2013.

Titik serah menjadi tempat berakhirnya tanggung jawab BU dalam menjamin harga jual eceran BBM Bersubsidi. Dalam hal titik serah adalah Penyalur pada wilayah tertentu tidak terdapat Penyalur, Penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan BBM Bersubsidi atau untuk konsumen langsung angkutan umum, BU dapat menyalurkan BBM Bersubsidi melalui Terminal BBM/Depot yang dimiliki;

The handover point becomes the final responsibility of the business entity in securing the subsidized oil fuel retail price. Handover point is provided due to the unavailability of supplier in particular areas and the available supplier does not have the capability in distributing subsidized oil fuel. As for direct consumer such as public transportation, business entity may distribute subsidized oil fuel through oil fuel terminal or depot.

Harga jual eceran BBM Bersubsidi dengan titik serah Terminal BBM/Depot tersebut diberlakukan sama dengan harga jual eceran pada titik serah Penyalur;

The subsidized oil fuel retail price in oil fuel terminal or depot handover point is same with the retail price of supplier handover point.

Pada saat Permen ESDM No. 18 tahun 2013 berlaku maka Permen ESDM No. 8 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permen ini berlaku pada tanggal 22 Juni 2013

The stipulation of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 8 Year 2013 automatically withdraws Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 8 Year 2012 on the Implementation of Presidential Regulation concerning Particular Oil Fuel Retail Price and Consumer. The new regulation entered into force on 22 June 2013.

Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 15 Year 2013 concerning Domestic Product Utilization in Oil and Gas Upstream Business Activity.

Pada Tahun 2013, Menteri ESDM juga mengesahkan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 11 ayat (3) huruf o, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 42 huruf h UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

In 2013, Minister of Energy and Mineral Resources stipulated Regulation Number 15 Year 2013 concerning Domestic Product Utilization in Oil and Gas Upstream Business Activity. This regulation is the implementation of Article 4 letter d, Article 11 Paragraph (3) letter o, Article 40 Paragraph (4), and Article 4 letter h of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001.

Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 ini dikeluarkan mengingat perlu dilakukan pengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan ini dibentuk sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengutamakan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 15 Year 2013 is stipulated to prioritize the utilization of domestic product in goods and services procurement in oil and gas upstream business activity. The regulation is the effort to optimize the domestic product utilization in oil and gas upstream activity.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada

The local content or commonly known as TKDN is the percentage of local component in goods,

barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam presentase.

Dalam mendukung kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri Dirjen Migas menetapkan *roadmap* pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen ini;

Setiap Kontraktor, Produsen dalam Negeri, dan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa pada Kegiatan usaha Hulu Migas, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam barang dan/atau jasa;

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa wajib menggunakan buku APDN (yang diterbitkan Ditjen Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan;

Dalam upaya mengutamakan Produk dalam negeri, SKK Migas wajib:

- Menetapkan kebutuhan target capaian TKDN yang harus dicapai oleh Kontraktor dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran dan/atau Daftar Rencana Pengadaan;
- membina Kontraktor untuk memenuhi target pencapaian;
- memberi informasi kepada publik mengenai rencana pengadaan barang dan/atau jasa Produk Dalam negeri;
- mengkoordinasikan Kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan penggunaan barang dan/atau jasa Produk Dalam Negeri;

Dalam upaya mengutamakan Produk Dalam Negeri, Kontraktor wajib mensyaratkan semaksimal mungkin produksi barang dan/atau jasa dalam negeri, menetapkan spesifikasi (mengacu buku APDN), menetapkan target capaian TKDN dan memverifikasi pencapaian TKDN, dan menyampaikan laporan verifikasi dimaksud kepada Ditjen Migas;

Dalam mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri, Produsen dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau jasa wajib memenuhi kualitas mutu, memenuhi komitmen TKDN, meningkatkan TKDN, menyampaikan laporan kemampuan produksi barang dan/atau jasa kepada Dirjen setiap enam bulan;

Produsen wajib memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) yang masih berlaku, melakukan proses produksi di dalam negeri memenuhi TKDN. Permen ESDM ini

services, and the combination of these two.

In order to support the local content utilization, Director General of Oil and Gas establishes roadmap of local content target achievement in oil and gas upstream activity as stated in Annex I of the Regulation Number 15 Year 2013.

All contractors, domestic producers, and Goods and Services Suppliers which conduct the goods and services procurement in oil and gas upstream activity are obliged to utilize, maximize and empower the domestic goods, services and engineering that meet the quantity, quality, delivery time, and price requirement.

It is a mandatory that the goods and services procurement should use Domestic Product Appreciation book (APDN) published by Directorate General of Oil and Gas as the reference to set up procurement strategy and to determine the procurement requirements.

In its effort to prioritize domestic product, SKK Migas is mandated to:

- *Set up local content target that should be achieved by Contractor's Work Program and Budget and/or Procurement Plan List;*
- *Supervise the contractor to meet the target;*
- *Provide information to public regarding the domestic goods and services procurement;*
- *Coordinate contractor in increasing the utilization of domestic goods and services.*

In the effort to prioritize domestic product, contractor is mandated to set up maximum requirement of domestic goods and services utilization, set up specification with reference to APDN book, set up local content achievement target, verify local content achievement, and report the verification to Directorate General of Oil and Gas.

Regarding the domestic product utilization, domestic producer and/or goods and services supplier are obliged to meet the quality requirement, to achieve local content commitment, to increase local content, to convey the report of goods and services production capability to Director General of Oil and Gas every six months.

Producer should have valid Supporting Business Capability Letter (SKUP) and conduct production in Indonesia to meet the local content requirement. The Minister of Energy and Mineral

berlaku setelah tiga bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Februari 2013.

Permen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan Tenaga Kerja Asing Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pada Tahun yang sama, Menteri ESDM juga mengeluarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan Tenaga Kerja Asing Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan ini terbit dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan pengembangan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Kegiatan Usaha Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

TKA adalah tenaga kerja WNA pendatang pemegang visa kerja yang dipekerjakan pada Kegiatan Usaha Migas di wilayah RI. Sedangkan yang dimaksud dengan TKI adalah tenaga kerja WNI yang dipekerjakan pada Kegiatan Usaha Migas.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Migas, Kontraktor, Badan Usaha Hilir (BU Hilir) atau Perusahaan Penunjang wajib mengutamakan penggunaan TKI. Namun dalam hal diperlukan, maka dapat menggunakan TKA dengan wajib:

- a) memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan manfaat; serta
- b) mendapat persetujuan Dirjen yang diberikan dalam bentuk rekomendasi RPTKA dan IMTA yang ditujukan kepada Menakertrans atau Pejabat yang ditunjuk, dengan berdasarkan pertimbangan tertentu, sebagai berikut:

- a) dalam rangka investasi untuk jabatan Direksi dan/atau Komisaris,
- b) dalam rangka pelaksanaan alih teknologi berkaitan dengan pengenalan teknologi baru,
- c) dalam rangka mengisi jabatan-jabatan tertentu yang belum dapat dipenuhi baik dari segi kompetensi maupun ketersediaan TKI.

Adapun bidang pekerjaan yang tidak dapat dijabat oleh TKA antara lain: personalia, legal, HSE, supply chain management (mencakup procurement, material dan logistic), quality control (termasuk inspection), jabatan structural pada kegiatan eskplorasi dan eksploitasi di bawah level superintendent atau jabatan structural yang setara.

Kontraktor atau BU Hilir dilarang mensyaratkan penggunaan TKA dalam kontrak kegiatan kepada Perusahaan Penunjang yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penunjang pada kegiatan usaha Migas, melainkan hanya menentukan kompetensi tenaga ahli yang harus dipenuhi.

Resources Regulation Number 15 Year 2013 is valid three months after the entry into force date on 22 February 2013.

Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 31 Year 2013 concerning the Requirement and Procedure of Foreign Worker Submission and Indonesian Worker Empowerment in Oil and Gas Activity.

In the same year, Minister of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 31 Year 2013 concerning the Requirement and Procedure of Foreign Worker Submission and Indonesian Worker Empowerment in Oil and Gas Activity.

The Regulation is purposed to supervise the foreign worker and Indonesian worker empowerment in oil and gas activity as regulated in Article 39 and Article 42 letter i and j of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001.

Foreign workers are immigrants with working visa in oil and gas activity in Indonesia, while Indonesian workers are Indonesian citizen working in oil and gas activity.

Contractors, Business Entity in Downstream Sector and Supporting Company are obliged to prioritize the empowerment of Indonesian workers in oil and gas industry. The exception is given with these obligations: a) to consider efficiency, effectiveness, and benefit; b) to obtain the approval from Director General of Oil and Gas in the form of RPTKA and IMTA recommendation addressed to Minister of Manpower and Transportation or the appointed officer based on certain consideration such as a) for the purpose of investment for Director and/or Commissioner position, b) technology transfer implementation to introduce new technology, c) to be hired in certain positions that can be fulfilled by Indonesian workers in terms of competency and availability.

The positions that are not allowed to be taken by foreign workers are human resources division, legal, HSE, supply chain management (including procurement, material, and logistic), quality control (including inspection), and structural position in exploration and exploitation under the superintendent level or equivalent position.

Contractor or Downstream Business Entity is prohibited to put the requirement of state foreign worker in the contract with supporting company that is appointed as supporting activity executive in oil and gas activity. They may only determine the requirements of expert competency.

TKA yang akan dipekerjakan oleh Kontraktor, BU Hilir dan Perusahaan Penunjang wajib memenuhi persyaratan:

- Pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- Pengalaman kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
- Usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
- Bersedia mengalihkan pengetahuan dan keterampilan kepada TKI khususnya TKI Pendamping;
- Memenuhi standar kompetensi kerja sesuai jabatan yang akan diduduki;
- Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia untuk memudahkan pelaksanaan alih pengetahuan dan keterampilan kepada TKI Pendamping.

Kewajiban persyaratan tersebut di atas dikecualikan untuk:

- Pimpinan tertinggi struktur organisasi Kontraktor, BU Hilir dan Perusahaan Penunjang yang dijabat oleh Presiden Direktur, General Manager dan Direktur Utama;
- Komisaris pada struktur organisasi Kontraktor, BU Hilir dan Perusahaan Penunjang;
- TKA dalam rangka pertukaran tenaga kerja internasional;
- TKA yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan.

Kontraktor, BU Hilir atau Perusahaan Penunjang dilarang mempekerjakan seorang TKA untuk lebih dari satu jabatan dan mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lain, kecuali TKA yang diangkat sebagai Direksi/Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan TKI Pendamping diantaranya: a) harus ditunjuk oleh Kontraktor, BU Hilir dan Perusahaan Penunjang dan dipersiapkan sebagai pendamping dan calon pengganti TKA, b) harus memiliki jabatan paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan TKA yang dipekerjakan, c) Kontraktor, BU Hilir dan Perusahaan Penunjang wajib menunjuk paling sedikit seorang TKI Pendamping untuk setiap TKA yang dipekerjakan agar pelaksanaan program alih teknologi terlaksana dengan baik, d) TKI Pendamping yang ditunjuk untuk mendampingi TKA tertentu tidak dapat ditunjuk sebagai TKI Pendamping oleh TKA lainnya, TKA yang dipekerjakan oleh Perusahaan Penunjang di bidang Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang ditempatkan pada Kontraktor atau BU Hilir wajib disediakan TKI Pendamping, e) Penunjukkan TKI Pendamping dikecualikan bagi TKA yang menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris pada Kontraktor, BU Hilir atau Perusahaan Penunjang.

Foreign worker hired by Contractor, Downstream Business Entity, and Supporting Company are obliged to meet the requirements of:

- *Educational background meets the work qualification;*
- *5 years working experience in the same position;*
- *Age between 30 to 55 years;*
- *Able to transfer knowledge and skill to Indonesian worker, especially the companion;*
- *Comply the standard of competence in accordance employment positions will be occupied;*
- *Able to communicate in Bahasa Indonesia to enable the transfer of knowledge and skill to Indonesian worker as companion.*

The above requirements are exceptional for:

- *Top leaders in contractor, downstream business entity and supporting company including President Director, General Manager, and Director;*
- *Commissioner in contractor, downstream business entity and supporting company;*
- *Foreign worker in international worker exchange program;*
- *Foreign worker with special skill.*

Contractor, downstream business entity and supporting company are prohibited to hire a foreign worker for more than one position and to hire a foreign worker who is already hired by other company, except the foreign worker who are appointed as Board of Directors or Commissioner in other company based on General Meeting of Shareholder (RUPS).

The requirements for Indonesian Worker as companion are: a) appointed by contractor, downstream business entity, and supporting company and trained as companion and substitute of foreign worker, b) having the position of at least one level under the position of the foreign worker, c) Contractor, downstream business entity, and supporting company must appoint at least one companion for one foreign worker to smooth the transfer of technology program, d) the appointed companion cannot be appointed as the companion for other foreign worker. Foreign worker hired by supporting company that supply foreign worker services to be placed in Contractor or Downstream business entity should have companion, e) the designation of companion is an exception for foreign worker hired for Board of Directors and/or Commissioner in Contractor, downstream business entity or supporting company.

UMUM DAN KEPEGAWAIAN MIGAS GENERAL AFFAIRS AND HUMAN RESOURCES

DUKUNGAN MANAJEMEN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan yang bersifat substantif, Ditjen Migas memerlukan dukungan manajemen yakni kegiatan yang bersifat fasilitatif. Salah satu dukungan manajemen tersebut yakni kepegawaian. Kekuatan pegawai negeri sipil yang bekerja di Ditjen Migas sampai dengan Bulan Desember 2013 sebanyak 408 pegawai. Kekuatan pegawai berdasarkan unit kerja, kualifikasi pendidikan, dan masa kerja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

MANAGEMENT SUPPORT TO DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

To carry out its substantive function, Directorate General of Oil and Gas requires management support in the form of facilitation. One of the management supports is human resources affairs. The number of civil servant in Directorate General of Oil and Gas until December 2013 is 408. Its distribution based on units, educational qualification, and years of service is shown in the table:

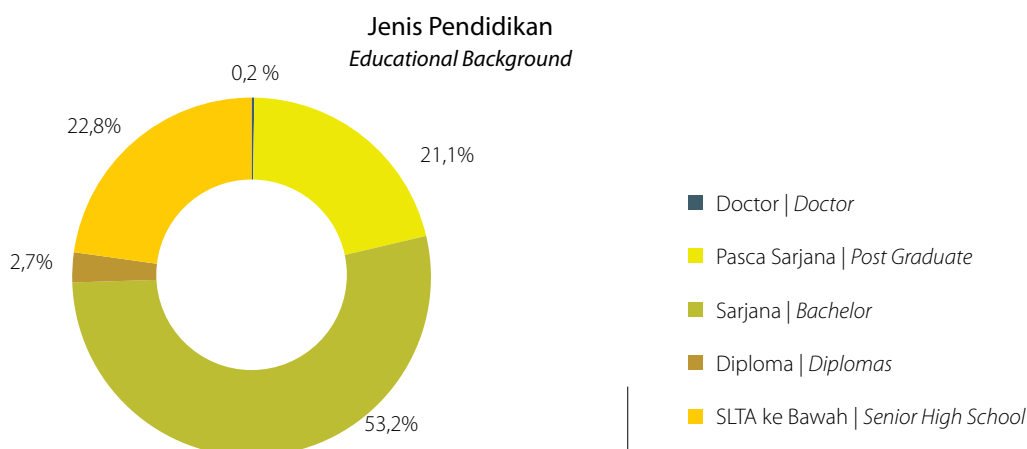
Kekuatan pegawai berdasarkan unit kerja disesuaikan dengan beban kerja pada unit kerja eselon II.

Distribution of civil servant based on workload in Directorates.

No.	Uraian Unit	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Migas <i>Secretariat of Directorate General of Oil and Gas</i>	84	35	119
2	Direktorat Pembinaan Program Migas <i>Directorate of Oil and Gas Program Development</i>	40	26	66
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas <i>Directorate of Oil and Gas Upstream Business Development</i>	61	9	70
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas <i>Directorate of Oil and Gas Downstream Business Development</i>	38	24	62
5	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas <i>Directorate of Oil and Gas Technique and Environment</i>	71	20	91

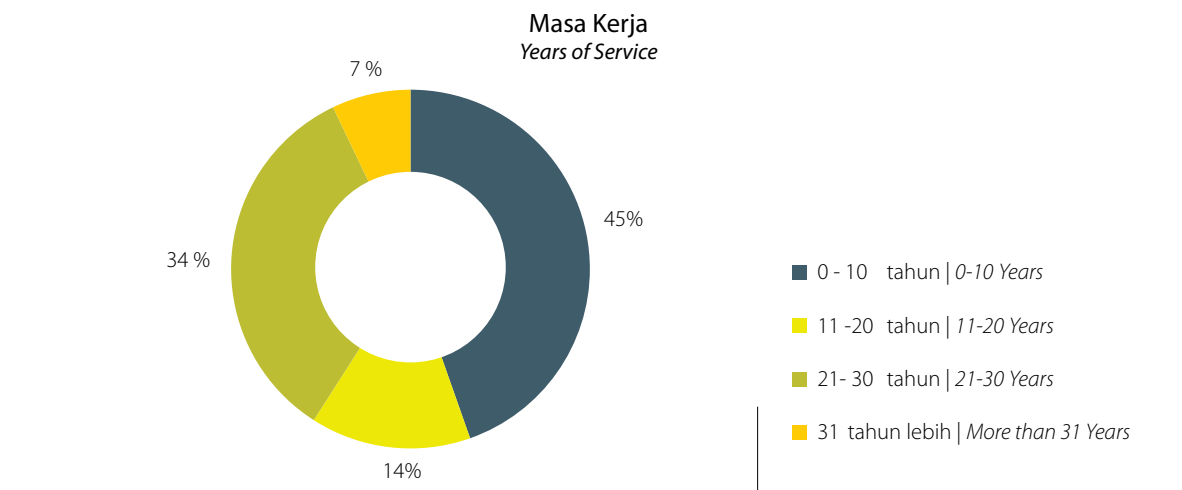
Pengembangan pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas substantif maupun fasilitatif yang dilaksanakan Ditjen Migas. Kebutuhan keahlian tersebut terpenuhi dari latar belakang pendidikan. Kekuatan pegawai berdasarkan jenis pendidikan dengan beban kerja pada unit kerja eselon II adalah sebagai berikut :

The civil servant management is based on skill to support the substantive and facilitative function of Directorate General of Oil and Gas. The skill requirement is fulfilled by the educational background. The educational background of civil servant in Directorates is as follow:



Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, dengan pengalaman maka jalan roda organisasi dapat berjalan sesuai ritme yang dinamis. Pengalaman kerja para pegawai negeri sipil di lingkungan Ditjen migas dapat terlihat dari kekuatan pegawai berdasarkan masa kerja pegawai berikut.

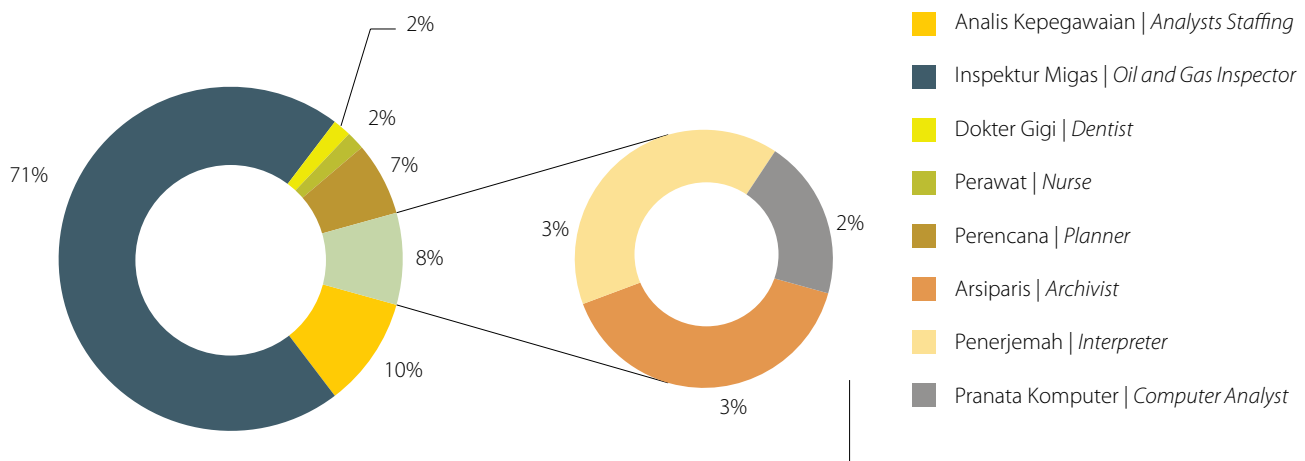
A proverb says that experience is the best teacher. Experience will run the organization in dynamic rhythm. The working experience of civil servant in Directorate General of Oil and Gas can be seen in the graphic of years of service below.



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Migas, maka dibentuk jabatan fungsional tertentu yang diharapkan dapat membuat kinerja para pegawai Ditjen Migas dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

In supporting the task and function of Directorate General of Oil and Gas, certain functional position is established to develop the performance of civil servant in Directorate General of Oil and Gas to be more professional in conducting its duty.

Jabatan Fungsional Tertentu di Ditjen Migas *Functional Position in Directorate General of Oil and Gas*



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2013





03

BAB
CHAPTER

Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Directorate of Oil and Gas Program Development

Investasi Migas

Oil and Gas Investment Development

Penerimaan Negara

Oil and Gas State Revenue

Kerjasama Migas

Oil and Gas Cooperation Affairs

Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri

Oil and Gas Domestic Potential Empowerment

Penyiapan Program

Oil and Gas Program Planning

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**

INVESTASI MIGAS OIL AND GAS INVESTMENT

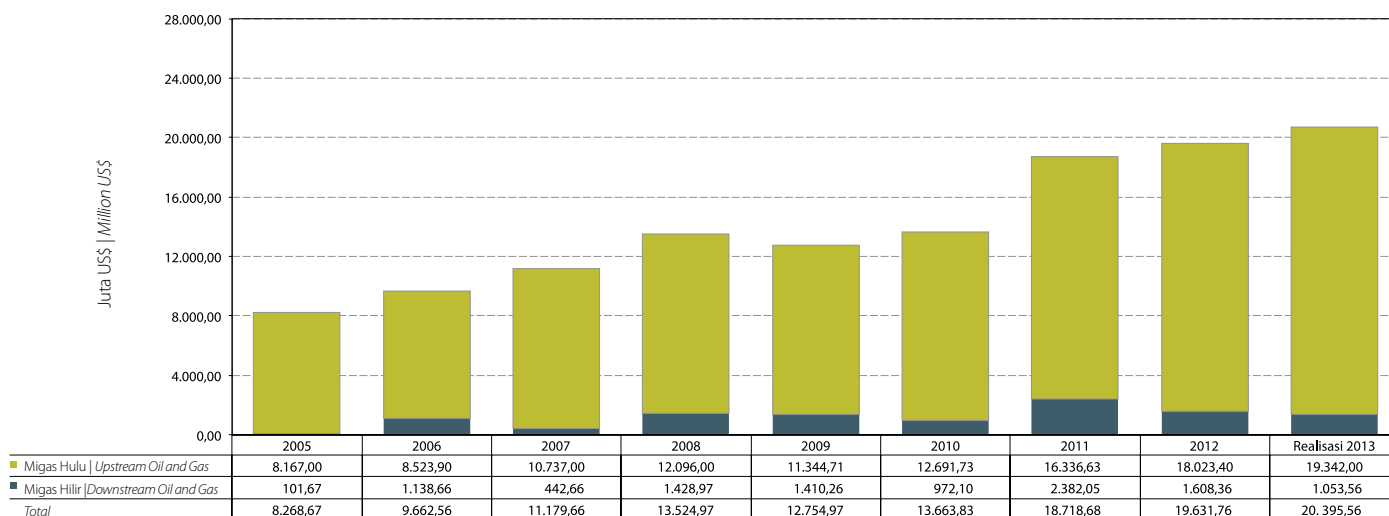
Pemantauan Investasi Migas

Oil and Gas Investment Monitoring

a. Pemantauan Realisasi dan Prognosa Investasi Migas

a. Monitoring of Oil and Gas Investment Realization and Prognosis

Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Oil and Gas Sub sector Investment Realization



Status : Hulu Desember 2013, Hilir 2013
Status: Upstream December 2013, Downstream 2013

Realisasi investasi di kegiatan Migas sampai dengan Desember 2013 sebesar US\$ 20.395,56 juta, pendapatan ini berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 19.342,00 juta nilai tersebut didapat dari *expenditure* KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi.

The investment realization in upstream activity until December 2013 is US\$ 20,395.56 million. The amount of US\$ 19,342.00 million from the upstream sector is derived from the expenditure of production and non-production Contractor of Cooperation Contract.

Sementara di sektor hilir realisasi investasi pada tahun 2013 diharapkan terjadi dengan terealisasinya rencana investasi untuk pembangunan kilang minyak baru, revitalisasi kilang, pembangunan Regasifikasi LNG di Arum, FSRU di Jawa Barat, jaringan gas kota, investasi di bidang pengangkutan darat dan laut serta sektor-sektor niaga yang tumbuh. Dan sampai dengan Desember 2013, investasi hilir migas mencapai US\$ 1.053,56 juta. Nilai ini di harapkan terus meningkat sampai akhir tahun dari target total investasi sebesar US\$ 27,203.2 juta.

The investment in downstream sector in 2013 is expected to be realized through the investment plan of new refinery development, refinery revitalization, LNG regasification development in Arun, FSRU in West Java, city gas, land and sea transportation investment, and commercial sectors. Until December 2013, the oil and gas downstream investment is US\$ 1,053.56 million. It is a temporary number since the investment is expected to increase until the end of 2013 with the investment target of US\$ 27,203.2 million.

b. Perbaikan Iklim Investasi Migas

b. Improvement on Oil and Gas Investment Climate

Terdapat beberapa permasalahan investasi dan telah dilakukan fasilitasi untuk memperbaiki iklim investasi, antara lain:

The efforts to improve the oil and gas climate due to investments issues are as follow:

1. Penyelesaian masalah penerapan asas *cabotage* pada kegiatan usaha migas
 - Evaluasi pelaksanaan Permenhub No. Pm 48 Tahun 2011 untuk kapal asing yang jangka waktu berlakunya berakhir sampai dengan 31 Desember 2013
2. Penyelesaian Permasalahan Tata Ruang pada kegiatan usaha hulu migas
 - Usulan Revisi Perpres No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Usulan rancangan Permen ESDM tentang kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan dan melampirkan peta cekungan migas
 - Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 pada lapangan Kenali Asam, Kota Jambi.

1. *The cabotage issue in oil and gas activity*
 - *Evaluation on Minister of Transportation Regulation Number Pm 48 Year 2011 concerning foreign ship which will end its period on 31 December 2013*
2. *The layout issue in oil and gas upstream activity.*
 - *The proposal to revise Presidential Regulation Number 26 Year 2008 concerning National Layout Plan*
 - *The draft proposal of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation concerning technical criteria of mining district with the annex of oil and gas basin map.*
 - *The proposal of Regional Layout Plan of Jambi Year 2013-2033 for Kenali-Asam field in Jambi*

Promosi Investasi Migas

a. Penerbitan Informasi Peluang Investasi Migas

Dalam rangka mendorong investasi industri minyak dan gas bumi, sebagai regulator yang berwenang mengatur kebijakan industri minyak dan gas bumi, Direktorat Jenderal Migas menerbitkan beberapa publikasi sebagai berikut:

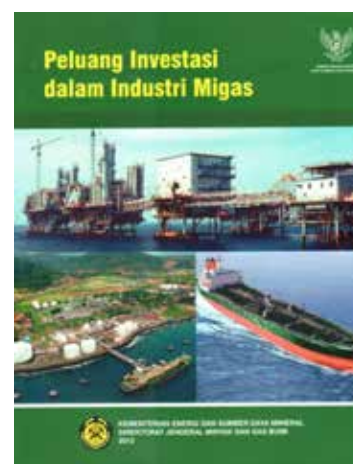
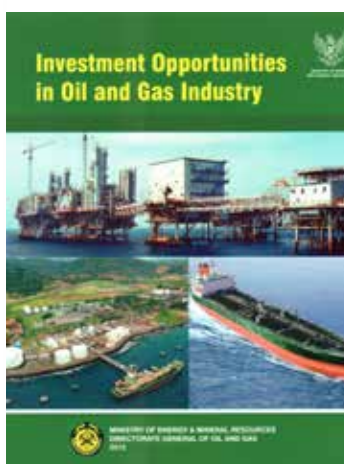
- Buku Peluang Investasi Dalam Industri Migas
- Leaflet Peluang Investasi Hulu
- Leaflet Peluang Investasi Hilir
- Leaflet *Invest Coal Bed Methane In Indonesia*
- Leaflet Pelayanan Investasi Migas Terpadu
- Peta Informasi Kegiatan Usaha Migas di Indonesia

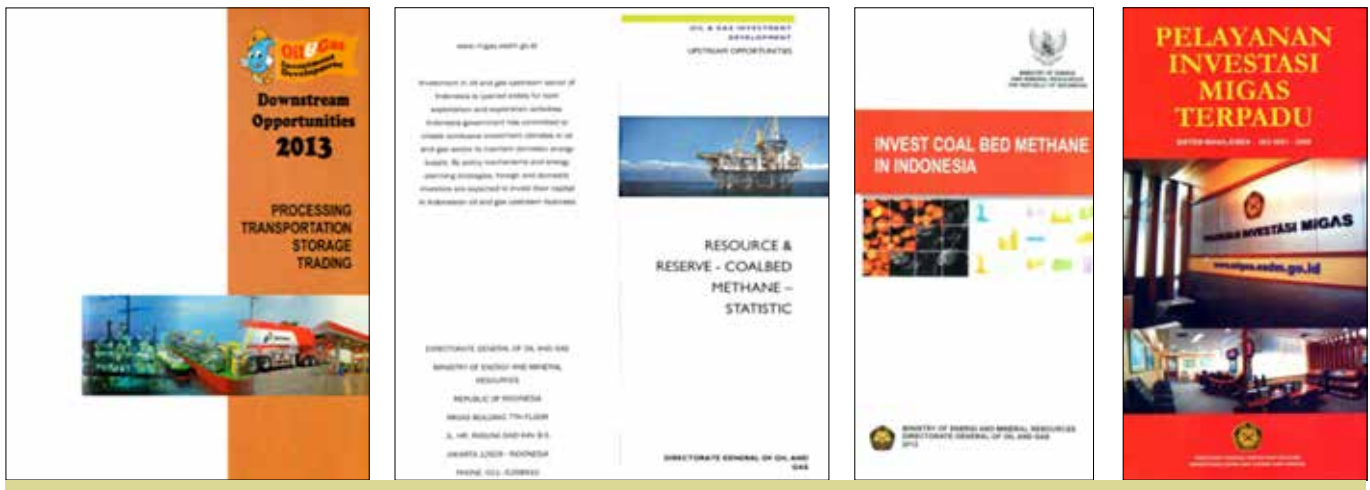
Oil and Gas Investment Promotion

a. Information on Oil and Gas Investment Opportunity

In the effort to promote oil and gas investment, Directorate General of Oil and Gas as the regulator in charge of formulating the oil and gas industry policy produces publications as follow:

- *Book entitled Oil and Gas Investment Opportunity*
- *Leaflet of Upstream Investment Opportunity*
- *Leaflet of Downstream Investment Opportunity*
- *Leaflet of Coal Bed Methane Investment in Indonesia*
- *Leaflet of Integrated Oil and Gas Investment Service*
- *Information Map on Oil and Gas Activity in Indonesia*





Kehadiran materi-materi publikasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi calon investor dalam memperoleh informasi berbagai peluang investasi di kegiatan industri minyak dan gas bumi, termasuk menjadi sarana untuk mengetahui wilayah-wilayah yang memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berpotensi.

b. Promosi Investasi Migas

Dalam upaya mempromosikan potensi investasi migas, Ditjen Migas menyelenggarakan kegiatan Promosi Investasi Migas melalui penyebaran data, informasi dan peluang usaha pada kegiatan migas di Indonesia dengan melakukan seminar dan pameran, baik di dalam maupun luar negeri.

Promosi investasi migas melalui kegiatan seminar dan pameran telah dilakukan di Alger, Aljazair dan Pameran Promosi Investasi "Borne's Largest Oil and Gas Expo & Conference di Malaysia.

Pertemuan Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aljazair pada bulan November 2013 didampingi oleh Perusahaan Migas Nasional dari masing-masing negara yang membahas antara lain :

- Masalah regulasi dan kebijakan migas di Indonesia, kondisi kemigasan Indonesia saat ini dan usaha untuk pengembangan migas dengan tujuan memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mengelola potensi migas di dalam negeri.
- Pengaturan bisnis migas di Aljazair.
- Roadmap bisnis Pertamina serta sasaran yang akan dicapai dengan kerja sama bersama Sonatrach di wilayah kerja Aljazair.
- Peluang kerja sama dengan stakeholder yang ada di Aljazair.

These publications are expected to be the references for investors in obtaining information regarding oil and gas investment opportunity and the areas with oil and gas potential.

b. Oil and Gas Investment Promotion

In promoting the oil and gas investment potential, Directorate General of Oil and Gas held Oil and Gas Investment Promotion through the dissemination of data, information and business opportunity in oil and gas industry in Indonesia in seminar and exhibition in the country and abroad.

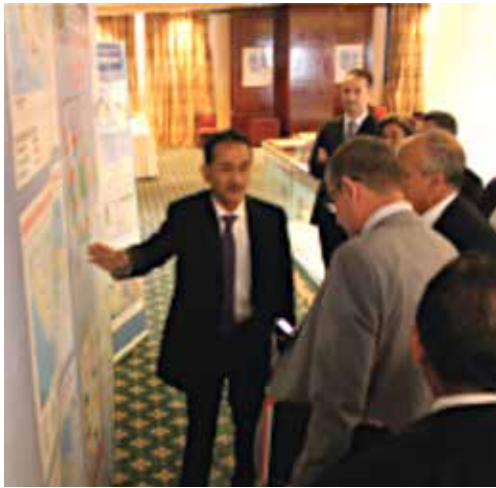
The oil and gas investment promotion through seminar and exhibition has been held in Alger, Algeria. Directorate General of Oil and Gas also participated in Borne's Largest Oil and Gas Expo & Conference in Malaysia.

The bilateral meeting between the Government of Indonesia and Algeria in November 2013 participated by national oil and gas company discussed the issues of:

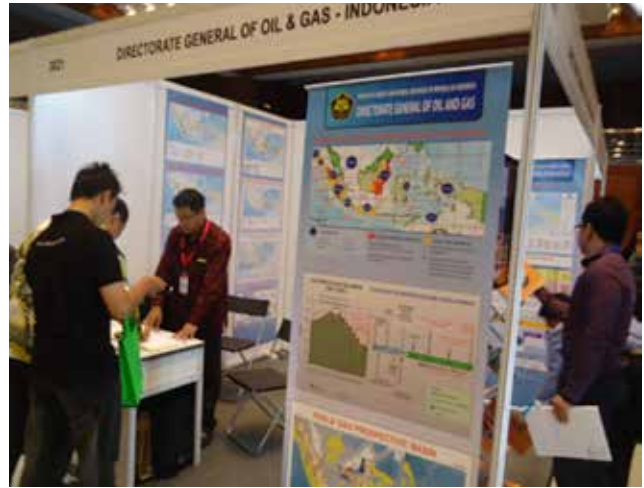
- The oil and gas regulation and policy in Indonesia, recent Indonesia oil and has condition, and the effort to develop oil and gas to give the overview how Indonesian Government regulates and manages oil and gas potential in the country.*
- Oil and gas business policy in Algeria.*
- Pertamina's business roadmap and target with Sonatrach in Algeria working area.*
- Cooperation opportunity with stakeholders in Algeria.*

Kegiatan Promosi Investasi Migas

Oil and Gas Investment Promotion



Algier, Aljazair, 11 November 2012



Pameran Promosi Investasi "Borne's Largest Oil and Gas Expo & Conference, 12 - 14 November 2013, Malaysia
(Investment Promotion Exhibition at Borne's Largest Oil and Gas Expo & Conference on 12 - 14 November 2013 in Malaysia)

- e. Harapan kerja sama yang baik antara Pertamina dan Sonatrach dengan dukungan kedua belah pihak pemerintah.

- e. *Cooperation between Pertamina and Sonatrach with the support from both governments.*

3. Peningkatan Pelayanan Investasi Migas Terpadu

3. Integrated Oil and Gas Investment Services

Guna peningkatan pelayanan investasi migas terpadu, telah dilakukan Audit *Surveillance* manajemen mutu ISO 9001:2008 pelayanan investasi migas yang bertujuan:

To enhance integrated oil and gas investment service, the Surveillance Audit on quality management of ISO 9001:2008 is conducted. The oil and gas investment service is aimed at:

- Meningkatkan mutu pelayanan publik dalam proses pelayanan investasi migas di seluruh unit di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima dan terpercaya dengan penerapan sistem manajemen mutu yang bersertifikat internasional

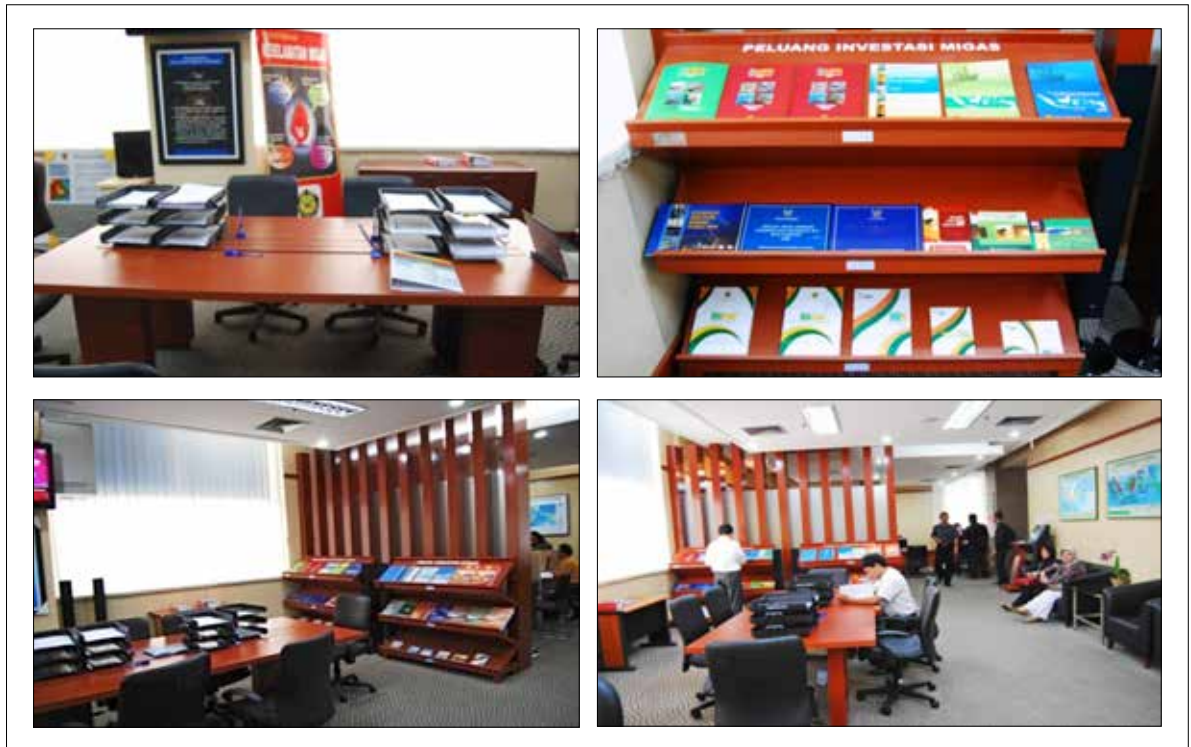
- Increasing public service quality in oil and gas investment service process in all units in Directorate General of Oil and Gas*
- Obtaining excellent and trusted public services by implementing quality management system with international certificate*

Sertifikat ISO 9001: 2008
Certificate of ISO 9001: 2008



c. Pengelolaan Sarana Pelayanan Investasi Migas Terpadu

c. Integrated Oil and Gas Investment Services Management



4. Penyusunan Rencana Investasi Terkait Reservation List Migas

4. Investment Roadmap on Oil and Gas Reservation List

PERSYARATAN INVESTASI BIDANG USAHA PENUNJANG MIGAS

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persetujuan										Urutan Persetujuan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Konstruksi dan Instalasi Minyak dan Gas Bumi :															
	a. Konstruksi Platform	09100				√							Max 75 %			
	b. Konstruksi Tanki Spherical	09100				√							Max 49 %			
	c. Konstruksi Tanki Horizontal/Vertikal	42914						√								
	d. Instalasi Pipa Penyalur di laut	42919				√							Max 49 %			
	e. Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42919						√								
	f. Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di darat	09100						√								
	g. Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di darat	42914						√								
2.	Jasa Kegiatan Usaha Penunjang : Minyak dan Gas Bumi :															
	a. Jasa Desain dan Engineering	71100						√								
	b. Jasa Survey	71100		√												
	c. Jasa Geologi dan Geofisika	71100			√								max 49 %			
	d. Jasa Pemboran di Darat	09100						√								
	e. Jasa Pemboran di laut	09100			√								max 75 %			
	f. Jasa Inspeksi Teknis	71204						√								
	g. Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100						√								

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana terdapat dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Dalam hal suatu bidang usaha yang terdapat dalam komitmen Indonesia pada ASEAN Economic Community tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanaman modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melaksanakan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lampiran tersebut.

PENERIMAAN NEGARA STATE REVENUE

1. Penghitungan Penerimaan Negara SDA Migas

1. The State Revenue from Oil and Gas

Penerimaan Negara sektor migas tahun 2013:

The state revenue from oil and gas sector in 2013:

Uraian Detail	APBN State Budget	2013 APBNP State Budget Revision	REALISASI Realization	% APBN State Budget	% APBNP State Budget Revision
Penerimaan dari keg.usaha hulu migas Income from upstream oil and gas business activities	257.279,25	267.118,73	305.569,84	119	114
a. Penerimaan Pajak Penghasilan a. Income from Tax Receipts	71.381,45	74.277,98	88.673,81	124	119
b. Penerimaan Bukan Pajak c. Income from Non-Tax Receipts	174.868,46	180.610,40	203.629,42	116	113
c. Penerimaan lainnya dari Minyak Bumi c. Other Income from Oil Business	11.029,34	12.230,35	13.266,61	120	108

Besaran jumlah penerimaan negara sektor migas dipengaruhi antara lain realisasi *lifting* migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah (kurs). Walaupun realisasi *lifting* migas tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBNP yaitu sebesar 840 MBOPD, dan harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP periode Desember 2012 - November 2013 sebesar US\$105,82/barel (98% dari asumsi dasar APBNP) namun karena terjadi perubahan kurs maka realisasi penerimaan negara menjadi 114% dari yang ditetapkan dalam APBNP 2013.

The state revenue from oil and gas sector is influenced by oil and gas *lifting* realization, ICP and exchange rate. The oil and gas *lifting* realization does not reach the target of 840 MBOPD in State Budget and Revenue with the ICP in December 2012 to November 2013 period of US\$ 105.82/barrel (98% from the basic assumption of State Budget Revision). However, the exchange rate fluctuation has changed the state revenue realization into 114% from the State Budget Revision 2013.

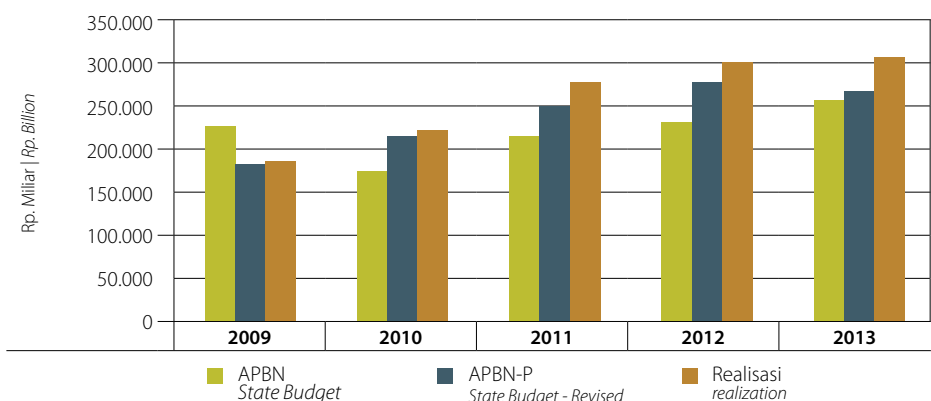
Perkembangan penerimaan negara sektor migas tahun 2009 – 2013 (Rp. Miliar):

The oil and gas state revenue year 2009-2013 (in Billion Rupiah):

Tahun Year	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision	REALISASI Realization	% (APBN State Budget)	% (APBNP State Budget Revision)
2009	226.791,04	183.607,02	184.689,60	81	101
2010	174.394,09	215.020,32	220.987,10	127	103
2011	215.335,95	249.594,60	278.389,50	129	112
2012	231.106,49	278.020,54	301.629,52	131	108
2013	257.279,25	267.118,73	305.569,85	119	114

Grafik Penerimaan Negara Tahun 2009 – 2013

State Revenue Graphic Year 2009-2013



Penerimaan negara sektor migas mengalami penurunan pada tahun 2009, hal ini sejalan dengan realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2009 yang hanya sebesar US\$61.58/barel akibat terjadinya resesi dan melemahnya perekonomian dunia sehingga menyebabkan permintaan minyak turun dan jumlah pengangguran yang mengalami peningkatan cukup tajam. Peningkatan harga minyak mentah tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 memberikan kontribusi dalam optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor migas. Peningkatan penerimaan negara sektor migas tahun 2013 disebabkan karena adanya peningkatan realisasi nilai tukar rupiah (kurs).

The state revenue from oil and gas sector declined in 2009. It is due to the ICP in 2009 of US\$61.58/barrel as the result of world economy recession which caused the decrease of crude oil demand and the significant increase of unemployment. The crude oil price increase in 2010 to 2012 has given the contribution to non-tax state revenue optimization from oil and gas sector. The increase of state revenue from oil and gas sector in 2013 is due to the increase of exchange rate realization.

2. Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia

Dalam perhitungan penerimaan negara sektor migas sesuai dengan mekanisme Kontrak Kerja Sama, harga minyak mentah dipergunakan untuk menghitung hak (*entitlement*) Pemerintah dan Kontraktor, pengembalian biaya kontraktor (*Cost Recovery*) serta penghitungan pajak kontraktor. Besar kecilnya penerimaan negara sub sektor migas akan sangat tergantung pada harga minyak mentah, realisasi *lifting* migas, dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika.

Selain dipergunakan untuk penghitungan *entitlement*, harga minyak mentah Indonesia juga dipergunakan sebagai dasar penghitungan beberapa formula harga ekspor *Liquid Natural Gas* (LNG) Indonesia, sehingga penetapan harga minyak mentah Indonesia berpengaruh terhadap penerimaan minyak dan gas bumi.

Harga minyak mentah yang ditetapkan berdasarkan formula harga minyak mentah menentukan dalam perhitungan penerimaan negara sektor migas. Pemerintah dalam hal ini perlu menetapkan formula harga minyak mentah yang lebih responsif terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia dan dapat diterima oleh pasar sehingga penerimaan negara sektor migas dapat lebih dioptimalkan serta mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam APBN secara keseluruhan.

Untuk menghitung harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) tersebut menggunakan formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia memiliki 52 jenis minyak mentah dengan karakteristik, nilai dan harga yang berbeda. Dari 52 jenis minyak mentah tersebut terdapat 8 jenis minyak mentah utama Indonesia (sebagai *benchmark* harga) yang harganya dipublikasi oleh pusat publikasi harga minyak mentah internasional. Sedangkan formula harga minyak mentah Indonesia jenis lainnya dikaitkan dengan 8 jenis minyak mentah utama sesuai dengan karakteristik minyak mentah yang bersangkutan.

2. Indonesian Crude oil Price

In calculating the state revenue from oil and gas sector based on Cooperation Contract mechanism, the crude oil price is used to calculate the entitlement for the government and contractor, cost recovery, and contractor tax. The revenue from oil and gas is highly dependent on crude oil price, oil and gas lifting realization, and rupiah to dollar exchange rate.

Besides being used as entitlement calculation, Indonesian Crude oil Price (ICP) is also used to calculate the formula of Indonesia LNG export price. Thus, ICP will influence the revenue from oil and gas.

ICP is derived based on crude oil price formula that will influence the state revenue from oil and gas sector. The government determines the crude oil price formula that is more responsive to the development of world crude oil price and acceptable by the market. It is aimed at optimizing the state revenue from oil and gas sector and to contribute more to State Budget and Revenue.

ICP is calculated by the government's formula. Indonesia has 52 crude oil types with different characteristics, value and price. From these 52 types, there are 8 Indonesia main crude oil as price benchmark in which its price is published by international crude oil price publication center. The other Indonesia crude oil price is formulated based on the similarity of characteristics with the above 8 Indonesia main crude oil.

Untuk menjaga akurasi Formula ICP maka secara berkala harus dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP. Evaluasi kinerja Formula ICP tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai Keputusan MESDM No.3498 K/12/MEM/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 2013.
 - Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya periode Januari sampai dengan Juni 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri termaksud.
- b. Sesuai Keputusan MESDM No.2704 K/12/MEM/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia periode Juli sampai dengan Desember 2013.

Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya periode Juli sampai dengan Desember 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri termaksud.

To maintain the accuracy of ICP formula, the performance evaluation on ICP formula is conducted periodically. The performance evaluation on ICP formula in 2013 is as follow:

- a. Based on Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 3498K/12/MEM/2012 dated 28 December 2012 concerning ICP Formula for January to June 2013 period.
 - ICP Formula for each type of main crude oil and other crude oil for the period of January to June 2013 is determined as stated in the Annex of the above Decree.
- b. Based on Minister of Energy and Mineral Resources Decree Number 2704K/12/MEM/2013 dated 28 June 2013 concerning ICP Formula for the period of July to December 2013

ICP Formula for each type of main crude oil and other crude oil for the period of July to December 2013 is determined as stated in the Annex of the above Decree.

Perkembangan harga minyak mentah Indonesia (ICP):

ICP Development

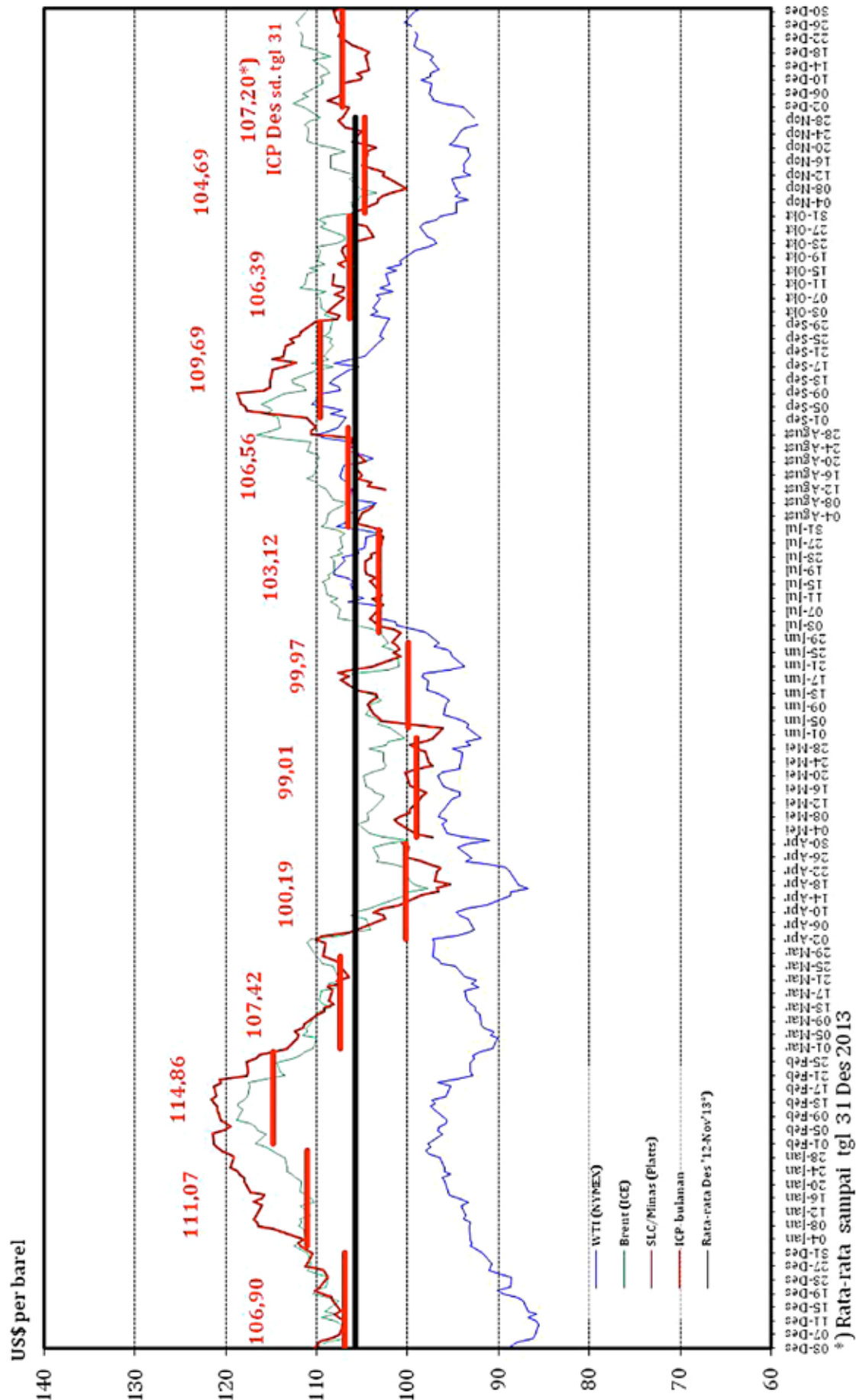
(US\$/barrel)

Tahun Year	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision	Realisasi Realization		% Real Jan-Des thdp		% Real Des-Nov thdp	
			Jan-Des	Des-Nov	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision
2009	80	61	61,58	58,55	77	101	73	96
2010	65	80	79,40	78,07	122	99	120	98
2011	80	95	111,55	109,94	139	117	137	116
2012	90	105	112,73	113,05	125	107	126	108
2013	100	108	105,85	105,82	106	98	106	98

- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) tahun 2013 berdasarkan APBN 2013 diperkirakan sebesar US\$100/barrel dan mengalami perubahan berdasarkan APBN-P 2013 menjadi sebesar US\$108/barrel.
- Realisasi ICP rata-rata periode Januari - Desember Tahun 2013 sebesar US\$105,85/barrel atau mencapai 98% dari APBN-P 2013.
- Trend harga minyak mentah tahun 2013 mengalami penurunan, hal ini antara lain disebabkan karena melemahnya kondisi perekonomian di kawasan Eropa dan AS, kenaikan pasokan minyak mentah global yang berasal baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC, menurunnya permintaan minyak global dan potensi penghentian sanksi larangan ekspor minyak dari Iran setelah diperolehnya sejumlah kemajuan dalam pembahasan isu nuklir.

- ICP Year 2013 based on State Budget and Revenue Year 2013 is predicted of US\$ 100/barrel and amended based on State Budget Revision Year 2013 of US\$ 108/barrel.
- The average ICP realization for the period of January to December Year 2013 of US\$ 105.85/ barrel or 98% from the State Budget Revision 2013.
- The crude oil price trend in 2013 decreased due to the worsening economic condition in Europe and USA, the increase of global crude oil supply from OPEC and non-OPEC countries, the decrease of global oil demand, and the potential of sanction termination on oil export ban from Iran after the progress of nuclear consultation.

Grafik Perkembangan Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2013
Graphic of ICP development in 2013



3. Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil SDA Migas

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kementerian ESDM memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam migas.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyiapkan bahan penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam migas, baik berdasarkan APBN maupun APBN-P.

Dengan telah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

Fenomena pelaksanaan otonomi daerah telah diikuti dengan adanya perubahan pola pikir antara, khususnya di jajaran aparat Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana bagi hasil sumber daya alam migas merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama bagi beberapa daerah penghasil migas. Seiring dengan hal tersebut diatas, maka transparansi penghitungan dana bagi hasil migas menjadi tuntutan oleh berbagai pihak.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas khususnya yang terkait dengan penghitungan dan penyaluran dana bagi hasil migas melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SKK MIGAS, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta seluruh Daerah Penghasil.

Beberapa kewenangan dan tugas yang menjadi tanggungjawab Kementerian Teknis dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain adalah menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan (*lifting*) bagian dana daerah penghasil migas. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang antara lain menyatakan bahwa Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta hasil pembahasan RAPBN 2013 di Badan Anggaran DPR-RI, maka

3. The Determination of Producing Area and Oil and Gas Lifting Calculation

Based on the laws and regulations, Ministry of Energy and Mineral Resources has the authority and responsibility in determining the producing area and oil and gas lifting calculation.

Directorate General of Oil and Gas is the government institution having the authority to determine the producing area and oil and gas lifting calculation based on State Budget and State Budget Revision.

The Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 Year 2004 concerning the Financial Balance between Central Government and Regional Government has changed the paradigm in governmental system and financial management.

The regional autonomy phenomenon has changed the way of thinking of the regional government officials having the authority to manage the regional budget. The oil and gas split is one of the revenue sources in Regional Budget especially for oil and gas producing areas. The transparency of oil and gas lifting calculation has becomes the challenges for all related parties.

Based on the regulations, the state revenue management from oil and gas especially the oil and gas calculation and lifting involves several institutions namely Ministry of Energy and Mineral Resources Ministry of Finance, Ministry of Domestic Affairs, SKK Migas, Contractor of Cooperation Contract and producing areas.

The authority and responsibility of technical ministry, in this case Ministry of Energy and Mineral Resources is to determine the producing area and oil and gas lifting calculation. The Article 27 of the Government Regulation Number 55 Year 2005 concerning balancing financial states that technical minister determines the producing area and oil and gas lifting in less than 60 days before the current fiscal year after consulting with Ministry of Domestic Affairs and the result of State Budget Revision 2013 in Budget Agency of the House of Representatives. Thus, Directorate General of Oil and Gas has conducted coordination with related central institution to prepare the draft of Annex of Minister

Ditjen Migas telah melaksanakan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam rangka menyiapkan konsep lampiran SK MESDM tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil migas.

of energy and Mineral Resources Decree Letter concerning the determination of producing area and oil and gas lifting calculation.

Dalam proses penyusunan usulan penetapan daerah penghasil migas, Ditjen Migas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan SKK MIGAS terkait dengan asumsi *lifting* migas, ICP dan bagi hasil SDA migas, dengan Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu penegasan batas wilayah daerah khususnya daerah penghasil migas dan pemekaran daerah serta dengan Kontraktor KKS terkait perkiraan angka *lifting* migas dan justifikasi produksi.

In the process of determining the oil and gas producing area, Directorate General of Oil and Gas conducts the coordination with Directorate General of Budget, Directorate of Financial Balance of the Ministry of Finance and SKK Migas regarding the oil and gas lifting assumption, ICP, and oil and gas lifting. The issue on regional border and expansion is being consulted with Ministry of Domestic Affairs. While the issue of oil and gas lifting assumption and production justification are being coordinated with Contractor of Cooperation Contract.

Adapun SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan (*lifting*) migas yang telah diterbitkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

The Decree Letter of Minister of Energy and Mineral Resources concerning the determination of producing area and oil and gas lifting calculation stipulated in 2013 are as follow:

- SK MESDM No. 3296 K/80/MEM/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK MESDM No. 3124 K/80/MEM/2012 perihal penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum (pertambangan mineral dan batubara) untuk tahun 2013
- SK MESDM No. 3952 K/80/MEM/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam pertambangan umum, minyak bumi dan gas bumi untuk tahun 2014.

- Decree Letter Number 3296K/80/MEM/2013 dated 13 September 2013 concerning the Second Amendment of Decree Letter number 3124K/80/MEM/2012 concerning the determination of producing area and the lifting of oil and gas, geothermal, and mineral and coal in 2013.*
- Decree Letter Number 3952K/80/MEM/2013 dated 11 December 2013 concerning the determination of producing area and oil and gas lifting in 2014.*

SK MESDM tentang penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan *lifting* migas yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan Menteri Keuangan untuk penetapan perkiraan dana bagi hasil daerah SDA migasnya.

These Minister of Energy and Mineral Resources Decree Letters concerning the determination of producing area and oil and gas lifting are delivered to Ministry of Finance as the basis to formulate Minister of Finance Regulation concerning oil and gas lifting assumption.

Jumlah daerah penghasil migas tahun 2013 dan 2014:

The oil and gas producing area in 2013 and 2014:

a. Daerah Penghasil Minyak Bumi

b. Daerah Penghasil Gas Bumi

a. The oil producing area

b. The gas producing area

Daerah Penghasil Producing Area	Tahun Year 2013		Tahun Year 2014
	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision	APBN State Budget
Provinsi Province	7	7	7
Kabupaten Regency	57	54	55
Kota City	5	6	6
Total	69	67	68

Daerah Penghasil Producing Area	Tahun Year 2013		Tahun Year 2014
	APBN State Budget	APBNP State Budget Revision	APBN State Budget
Provinsi Province	6	6	6
Kabupaten Regency	37	35	37
Kota City	6	7	6
Total	49	48	49

Penambahan daerah penghasil migas disebabkan adanya realisasi produksi/lifting migas oleh KKKS tertentu yang semula tidak ditargetkan atau pada tahun yang bersangkutan direncanakan ada potensi produksi/lifting dari KKKS baru. Sebaliknya pengurangan daerah penghasil migas disebabkan target produksi/lifting migas yang telah ditetapkan untuk KKKS tertentu tidak dapat direalisasikan sehingga pada tahun yang bersangkutan, daerah tersebut di hapuskan sebagai daerah penghasil migas.

The addition in oil and gas producing area is due to oil and gas production/lifting realization by certain Contractor of Cooperation Contract that was not targeted before or not planned to make a production in new contract in the current year. On the other hand, the decline of oil and gas producing area happens since certain Contractor of Cooperation Contract is not able to meet the target in the current year. Thus, the area will be removed from the list of oil and gas producing area.

4. Perhitungan Lifting Migas dalam rangka bagi hasil SDA Migas

Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005, antara lain menyebutkan bahwa :

- Penghitungan realisasi DBH dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali DBH SDA perikanan.
- Dalam hal realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan atau gas bumi dari Kementerian Teknis.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, selama tahun 2013 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan rapat rekonsiliasi penghitungan realisasi *lifting* migas sebagai dasar penghitungan dana bagi hasil SDA migas bersama dengan daerah penghasil migas seluruh Indonesia. Rapat rekonsiliasi tersebut selain dihadiri seluruh Daerah Penghasil Migas juga melibatkan instansi pusat terkait (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SKK MIGAS dan Kontraktor KKS).

4. Oil and Gas Lifting Calculation to Determine Oil and Gas Lifting

Article 28 of the Government Regulation Number 55 Year 2005 states that:

- The calculation of lifting realization is conducted quarterly through data reconciliation mechanism between central government and producing area, except for fishery lifting
- The lifting realization from oil and gas is based on the calculation from technical ministry.

In conducting Article 28 of the government Regulation Number 55 Year 2005 concerning Balancing Financial, Directorate General of Oil and Gas held reconciliation meeting to calculate oil and gas realization as the basis of oil and gas lifting with all producing areas in Indonesia in 2013. The reconciliation meeting was also attended by Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Finance, Ministry of Domestic Affairs, SKK Migas and Contractor of Cooperation Contract.

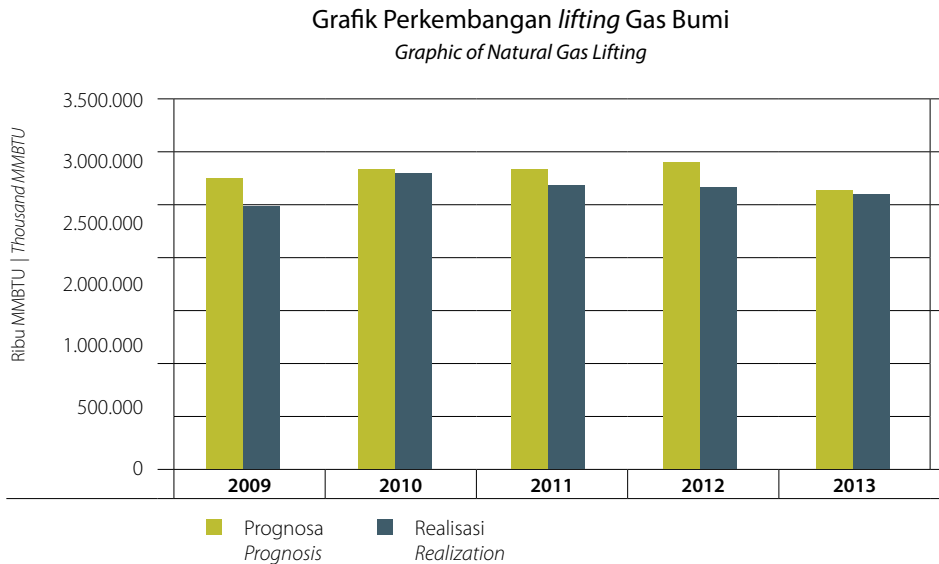
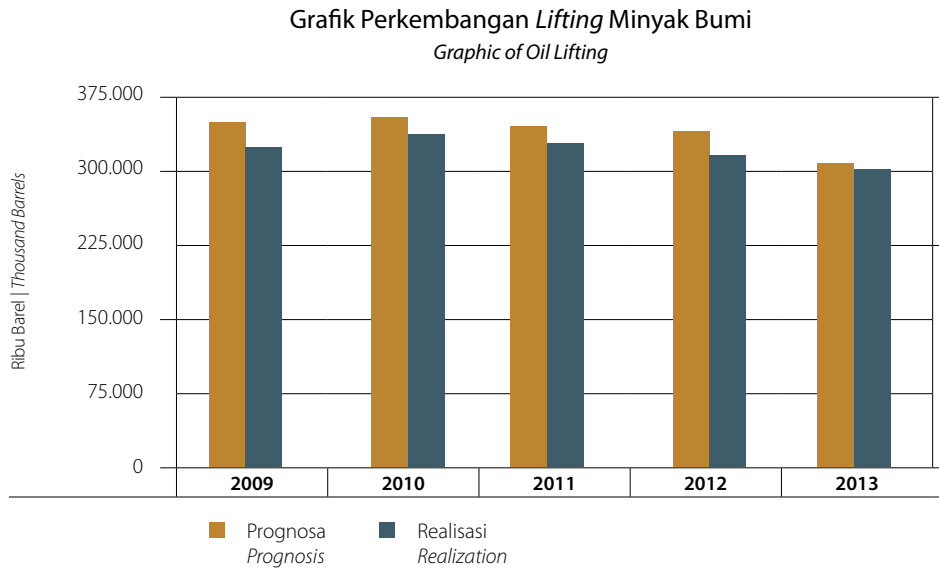
Perkembangan *lifting* migas tahun 2009 - 2013:
The progress of oil and gas lifting from 2009 to 2013:

Tahun Year	Minyak Bumi Oil (ribu Barel)			%	Gas Bumi Gas (ribu MMBTU)			%
	Prognosa Prognosis	Realisasi Realization*)			Prognosa Prognosis	Realisasi Realization*)		
2009	350.400,09	323.852,12		92,42	2.747.107,60	2.482.668,13		90,37
2010	352.225,00	334.875,78		95,07	2.831.668,90	2.796.886,65		98,77
2011	344.925,00	327.813,80		95,00	2.835.685,00	2.685.568,61		94,70
2012	340.380,03	315.011,09		92,55	2.896.890,00	2.660.416,50		91,84
2013	306.600,00	301.216,91		98,24	2.618.847,99	2.600.708,62		99,31

*) Periode Desember – November

*) December to November period

Grafik Perkembangan *lifting* Migas tahun 2009 – 2013 *Graphic of oil and gas lifting in 2009 to 2013*



Realisasi *lifting* minyak dan gas bumi dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi. Sejak tahun 2009 – 2013 realisasi berkisar antara 90% - 95% dibandingkan target. Hal ini dikarenakan di dalam pelaksanaannya menemui kendala-kendala antara lain :

- Jadwal proyek *Onstream* mundur
- *Decline rate* di lapangan eksisting mencapai rata-rata 4,1%
- Kendala teknis operasi produksi
- Keterlambatan pengadaan fasilitas dan peralatan produksi

The oil and gas lifting realization these years experiences fluctuation. In 2009 to 2013, the realization is between 90% to 95% from the target due to the challenges as follow:

- *The onstream project schedule is delayed*
- *The decline rate in the existing field is around 4.1%*
- *Technical issue in production operation*
- *The delay in production facility and tools procurement*



- Masalah perijinan
- Gangguan pencurian dan keamanan, serta illegal tapping
- Penyerapan gas oleh pembeli gas lebih rendah dari kontrak
- *Unplanned Shutdown*

Untuk mempertahankan produksi/*lifting* migas tersebut dilakukan upaya-upaya meliputi :

- Mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran
- Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi
- Optimalisasi proses pengembangan
- Mempercepat proses pembebasan lahan
- Menyederhanakan proses perijinan
- Pemutakhiran proses pengadaan barang dan jasa
- Meningkatkan akuntabilitas dan *good corporate governance*
- Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/ *lifting* migas serta responsif dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.
- Berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait dalam hal program peningkatan produksi migas sesuai INPRES No.2/2012.

- *Licensing issue*
- *Theft and safety as well as illegal tapping*
- *Gas use by gas consumer is lower than the contract*
- *Unplanned shutdown*

The efforts to maintain the oil and gas production or lifting are such as:

- *Decreasing the production operation and drilling failure*
- *Increasing the production facility supervision*
- *Optimizing development process*
- *Accelerating land acquisition process*
- *Simplifying the licensing process*
- *Updating the process of goods and services procurement*
- *Increasing the accountability and good corporate governance*
- *Conducting monitoring and evaluation on oil and gas production or lifting and being responsive in handling the operational obstacles and problems*
- *Coordinating intensively with related parties in increasing the oil and gas production program based on Presidential Instruction Number 2 Year 2012.*

KERJASAMA MIGAS OIL AND GAS COOPERATION

Sepanjang tahun 2013, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan ataupun seminar di dalam maupun di luar negeri. Secara ringkas, kegiatan-kegiatan kerja sama yang melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat disampaikan pada tabel di bawah ini:

In 2013, Directorate General of Oil and Gas has actively participated in meetings and seminars in the country and abroad as listed in the table below:

Kegiatan Pertemuan Bilateral/Regional/Multilateral: *Bilateral/Regional/Multilateral Meeting:*

No.	Pertemuan Meeting	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Venue
1.	Pertemuan a Series of ASEAN+3 Fora Meeting.	11 – 14 Maret 2013	Seoul, Korea Selatan
2.	Penandatanganan MoU Kerja Sama Sektor ESDM antara Indonesia – Irak	13 – 15 Maret 2013	Baghdad, Irak
3.	Pertemuan ke-45 APEC Energy Working Group.	18 – 23 Maret 2013	Koh Samui, Thailand
4.	Pertemuan ke-1 Indonesia Japan Energy Forum (IJEFF) dan Pertemuan ke-4 Indonesia Japan Energy Policy Dialogue (IJEPPD).	24 – 30 Maret 2013	Tokyo, Jepang
5.	The 3 rd Indonesia – Korea Working Group on Gas	29 April 2013	Bali
6.	Pertemuan ke-6 Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF).	30 April 2013	Kuta, Bali
7.	A regional workshop on the Changing Global Gas Market and Unconventional Gas	6 – 8 Mei 2013	Jakarta
8.	Pertemuan ke-4 Indonesia – Thailand Energy Forum (ITEF).	23 – 24 Mei 2013	Kuta, Bali
9.	IEA Governing Board Meeting 2013.	5 – 6 Juni 2013	Paris, Perancis
10.	Penyelenggaraan Partnership Program Minyak dan Gas Bumi 2013.	9 – 22 Juni 2013	Jakarta, Palembang, Bali, Surabaya, Cepu
11.	Pertemuan ke-31 ASEAN Senior Official Meeting on Energy (SOME).	24 – 28 Juni 2013	Nusa Dua, Bali
12.	Kunjungan Resmi Perwakilan Ministry of Oil of the Republic of Iraq	1 – 4 Juli 2013	Jakarta
13.	Pertemuan ke-31 ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and its Associated Meetings.	23 – 27 September 2013	Nusa Dua, Bali
14.	Pertemuan Bilateral Indonesia - Aljazair	10 – 11 November 2013	Alger, Aljazair
15.	G to G meeting Indonesia – US Energy Investment Roundtable (EIR)	27 November 2013	Jakarta
16.	Pertemuan SOME Special Meeting and 16 th ACE Governing Council Meeting.	9 – 11 Desember 2013	Manado, Sulawesi Utara

Kegiatan Seminar: *Seminars:*

No.	Pameran / Seminar Exhibition / Seminar	Tanggal Pelaksanaan Date	Tempat Venue
1.	Pelaksanaan Seminar Ditjen Migas – Perwaku Directorate General of Oil and Gas Seminar	10 Oktober 2013	Jakarta
2.	Pelaksanaan Seminar di Melbourne, Australia Seminar in Melbourne, Australia	15 November 2013	Melbourne, Australia

Hingga tahun 2013, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara intensif telah melakukan hubungan kerja sama dengan beberapa negara sahabat dan juga dengan organisasi internasional dalam lingkup kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral. Adapun penugasan sebagai focal point oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilaksanakan dengan baik melalui peningkatan hubungan kerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Norwegia melalui berbagai pertemuan-pertemuan bilateral baik di dalam maupun di luar negeri dan telah menghasilkan beberapa program penting yang dapat diterapkan di Indonesia.

Kerja sama baru dengan pemerintah Irak juga telah dikembangkan hingga tahun 2013 yang lalu. Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU) between The Ministry of energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and The Ministry of Oil of the Republic of Iraq on Cooperation in the Field of Energy and Mineral Resources* yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013 yang lalu, merupakan tonggak kerja sama sektor ESDM antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Irak di era sistem pemerintahan baru di Irak.

Dengan MoU tersebut, kedua pihak dapat meningkatkan jalinan kerja sama yang lebih intensif di sektor energi dan sumber daya mineral, baik di tingkat Pemerintah maupun swasta. Penandatanganan MoU ini juga dimaksudkan untuk mendukung usaha yang telah dirintis oleh Indonesia Incorporated di Irak, khususnya PT Pertamina yang sedang berupaya mendapatkan pengelolaan lapangan hulu minyak di Irak. Tujuan yang lebih besarnya adalah dimasa yang akan datang, produksi minyak Irak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan minyak Indonesia serta membuka peluang bagi BUMN Indonesia untuk berinvestasi di negara Irak.

Perjanjian kerja sama lain yang ditandatangani pada tahun 2013 adalah *Memorandum of Understanding* antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – KESDM dengan Korea Gas Safety Corporation - MOTIE dalam *Joint Cooperation in Exchange of Technical Information of Gas Safety Standard*. Perjanjian ini ditujukan untuk membentuk kerangka umum keselamatan penggunaan gas, diantaranya dalam penyiapan standar dan pedoman teknis keselamatan gas dan juga dalam pemberian dukungan teknis.

Disamping pelaksanaan kerja sama luar negeri, pada tahun 2013, kerja sama dalam negeri yang dilakukan oleh Ditjen Migas adalah pelaksanaan seminar dengan salah satu asosiasi dalam negeri yakni dengan Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU). Adapun

Directorate General of Oil and Gas has intensively conducted cooperation in the field of energy and mineral resources with friend countries and international organization during 2013. The mandate from Minister of Energy and Mineral Resources concerning the focal point of cooperation has been conducted well by enhancing the cooperation with US, Thailand, Japan, South Korea and Norway through bilateral meetings in the county and abroad which have resulted in important programs to be implemented in Indonesia.

The cooperation with the government of Iraq has been enhanced in 2013. The signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Oil of the Republic of Iraq in the Field of Energy and Mineral Resources on 14 March 2013 is a milestone in the cooperation in the field of energy and mineral resources between Indonesia and Iraq in Iraq's new governmental system.

The MoU is expected to be the tool to enhance intensive cooperation in energy and mineral resources, not only between the two governments but also private sectors. The signing of MoU is also purposed to support the business initiation by Indonesia Incorporated in Iraq especially PT Pertamina in its effort to obtain upstream oil field in Iraq. The main goal of this MoU is to obtain crude oil supply from Iraq to Indonesia in the future and to widely open the opportunity for Indonesian State Owned Enterprises to invest in Iraq.

Another MoU signed in 2013 is the Memorandum of Understanding between Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources and Korea Gas Safety Corporation of MOTIE on Joint Cooperation in Exchange of Technical Information of Gas Safety Standard. The objective of this MoU is to establish general framework of gas utilization safety including the formulation of gas safety technical standard and principle as well as technical support.

Besides conducting meetings abroad, there was also domestic cooperation in the form of seminar in 2013. One of them is the seminar in cooperation between Directorate General of Oil and Gas and a domestic association called PERWAKU (Indonesian Environmental Intellectual). The

topik seminar tersebut adalah "Antara Tantangan dan Peluang Industri Migas: Kesiapan dalam Pengurangan Emisi GRK & Pengembangan Migas Non Konvensional". Narasumber yang hadir melibatkan unsur pemerintah, akademisi dan juga pelaku usaha.

topic of the seminar is "Between the Oil and Gas Industry Challenges and Opportunity: Green House Gas Emission Reduction Preparation and Unconventional Oil and Gas Development." The speakers of the seminar were government officials, academicians, and businessmen.

Salah satu manfaat dari keterlibatan delegasi dari lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dilakukan pada tahun 2013 adalah diperolehnya informasi mengenai perkembangan dan isu-isu penting yang terjadi di sektor energi global. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan energi Indonesia di masa-masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa informasi sebagai hasil diskusi dari pertemuan-pertemuan kerja sama sektor energi.

One of the benefits from the participation of Directorate General of Oil and Gas in many events in 2013 is to be able to gather information regarding the significant issues in global energy sector. The information will be the references in formulating Indonesia energy policy in the future. The results of the energy meetings are as follow:

1. *Oil stockpiling.* Menurut beberapa narasumber, *oil stockpiling* merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas dan kemandirian energi suatu negara serta dapat mengurangi dampak gangguan yang menghambat laju perekonomian. Meskipun demikian, pembangunan *oil stockpiling* di suatu negara akan berbeda-beda mengingat situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Indonesia sendiri hingga saat ini belum mempunyai fasilitas *stockpiling*. Fasilitas cadangan BBM nasional yang dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah setara dengan 23 hari konsumsi.
1. *Oil stockpiling.* According to many sources, *oil stockpiling* is one of the efforts to maintain energy stability and independence in a country and to reduce the constraints that may slow down the economy. However, *oil stockpiling* in one country is different with other countries based on each country condition and demand. Until today, Indonesia does not have *stockpiling* facility. The national oil fuel stock in Indonesia at present is equivalent to 23 days of consumption.
2. Harga gas. Pengaruh revolusi *shale gas* di Amerika Serikat (AS) terhadap harga gas alam untuk jangka pendek belum mempengaruhi harga gas di kawasan lain. Khusus untuk di wilayah Asia, harga gas diperkirakan akan tetap tinggi mengingat biaya pengangkutan gas yang mahal. Hal lain yang mempengaruhi adalah kebijakan Amerika Serikat yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri dan banyaknya persyaratan otoritas Amerika Serikat yang diperlukan untuk dapat mengimpor gas dari Amerika Serikat.
2. *Gas price.* The short term influence of *shale gas* revolution in US to gas price has not affected the gas price in other regions. For Asia, the gas price is predicted stay high by considering the high gas transportation cost. Another factor is the US policy that prioritizes the domestic gas demand and the numbers of US authority requirements in importing gas from US.
3. Permintaan Bahan Bakar. Permintaan bahan bakar yang berasal dari fosil masih sangat vital dan terus meningkat dimasa yang akan datang dimana batubara masih berperan paling besar sebagai bahan bakar di Asia. Namun demikian, peningkatan paling besar adalah gas alam. Indonesia yang merupakan salah satu produsen gas, perlu mengantisipasi permintaan gas global tersebut dengan tetap memperhatikan permintaan gas domestik. Peningkatan pemanfaatan yang berasal dari sumber energi terbarukan, diharapkan juga akan semakin meningkat
3. *Fuel demand.* The fossil fuel demand is still very vital and keeps increasing in the future in which coal is the biggest fuel sources in Asia. However, the biggest increase happens in gas. Indonesia is one of the gas producers that need to anticipate the global gas demand by considering the domestic gas demand. The renewable energy utilization is expected to increase as well.
4. *Global Energy Outlook.* International Energy Agency (IEA) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 Amerika Serikat akan menjadi negara produsen minyak terbesar.
4. *Global Energy Outlook,* International Energy Agency (IEA) predicted that in 2020 US will be the biggest oil producer. Iraq will be the main supplier of global



Adapun sebagai penyumbang utama pertumbuhan produksi minyak global adalah Irak. Terkait dengan hal ini, dirasakan cukup tepat bagi Indonesia yang telah membuka hubungan kerja sama dengan Pemerintah Irak terutama dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak mentah di masa yang akan datang.

5. *ASEAN Energy Outlook*. Secara global kebutuhan energi di wilayah Asia Tenggara terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan perkiraan pertumbuhan GDP hingga tiga kali lipat pada tahun 2035. IEA memprediksikan bahwa pada tahun 2035, ASEAN akan mengimpor minyak hingga mencapai 75% dan belanja untuk impor tersebut akan mencapai 3 kali lipat (US\$ 240 miliar). ASEAN akan tetap menjadi negara pengekspor gas meskipun pendapatan dari ekspor tersebut akan menurun lebih dari 3/4-nya. Khusus untuk Indonesia, IEA juga memperkirakan bahwa biaya impor minyak Indonesia akan semakin besar.

oil production growth. Thus, it is a precise policy for Indonesia that has opened the cooperation with the Government of Iraq especially in crude oil supply in the future.

5. *ASEAN Energy Outlook*. Globally, the energy demand in South East Asia is growing based on the prediction that the GDP growth will be three times higher in 2035. IEA predicted that in 2035, ASEAN will import oil up to 7% and the import budget will three times bigger up to US\$ 240 billion. ASEAN will remain gas exporting countries despite that the export revenue will decline more than three fourth. For Indonesia, IEA also predicted that its oil import will be higher.

PEMBERDAYAAN POTENSI DALAM NEGERI LOCAL CONTENT EMPOWERMENT

Barang Operasi Migas

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ditjen Migas dalam upaya pengendalian impor barang operasi perminyakan dan mendukung capaian penggunaan barang dan jasa dalam negeri sub sektor migas sebesar 65% pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemanfaatan Barang dan Jasa, Teknologi dan Kemampuan Rekayasa Rancang Bangun Dalam Negeri pada Industri Migas.
2. Pengawasan Pemanfaatan Fasilitas Impor Barang Operasi Migas.
3. Inventarisasi Penggunaan Barang Sewa.
4. Pemantauan Penggunaan Insentif Fiskal.
5. Evaluasi Kebijakan Tata Cara Impor Barang Operasi Perminyakan.
6. Pemutakhiran Data dan Informasi Sistem Pendataan Rencana Impor Barang.
7. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri berdasarkan Rencana Impor Barang (RIB).

Realisasi hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian impor barang operasi perminyakan selama 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Oil and Gas Operation Goods

Directorate General of Oil and Gas conducts the import supervision on oil and gas operation goods and supports the local goods and services utilization up to 65% in 2013 though the following activities:

1. The supervision on local goods and services, technology and engineering utilization in oil and gas industry.
2. The supervision on oil and gas operation goods import.
3. The inventory of rent goods.
4. The monitoring of fiscal incentive.
5. The evaluation of policy regarding the procedure of oil operation goods import .
6. The updating of data and information on the procurement system of goods import plan.
7. The supervision of local production utilization based on Goods Import Plan (RIB).

The realization of the operation goods import supervision for the last two years can be seen in the table;

Pameran / Seminar Exhibition / Seminar	2012	2013
Nilai RKBI RKBI Value	4.773,34	5.165,91
Nilai RIB RIB Value	3.773,84	4.789,16
RIB barang sewa RIB Rental Goods	2.484,94	2.845,72
RIB Impor Import RIB	1.535,14	1.327,66
MFG BATAM	486,89	403,24
FAB LOKAL FAB LOCAL	108,35	212,53
ADP	3,05	25,99
Non operasi Non operation	5,41	2,28
quota impor Import quota	353,66	6,72
intervensi** intervention**	957,36	650,76

Tabel 1, **data per Desember 2013, dalam satuan Juta USD
Table 1, **data as of December 2013, in million USD

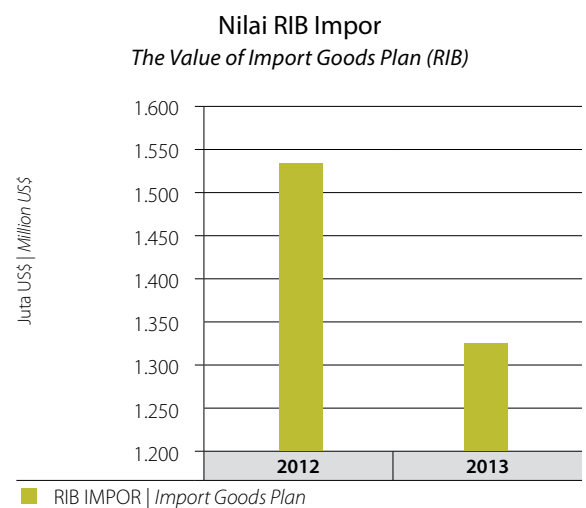
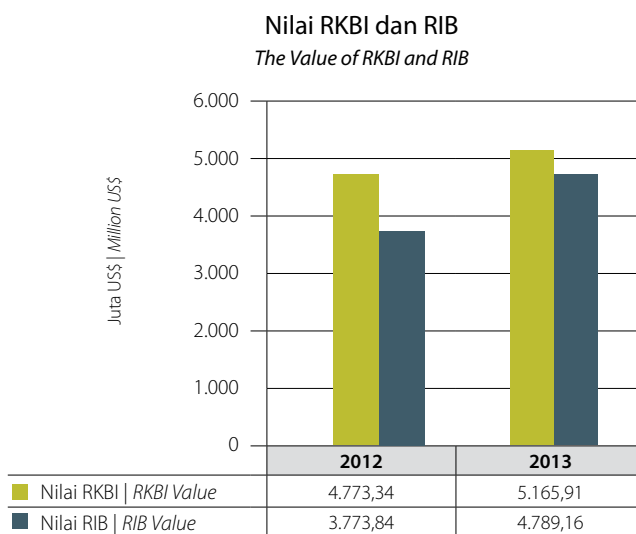


Terjadi peningkatan pengajuan Nilai RKBI pada tahun 2013 dari US\$ 4.773,34 Juta menjadi US\$ 5.165,91 Juta. Peningkatan ini dipengaruhi adanya rencana importasi penggunaan barang sewa dengan total nilai barang sewa sebesar US\$ 2.845,72 Juta. Peningkatan impor barang sewa ini sebagai konsekuensi meningkatnya aktifitas kegiatan / proyek-proyek yang ada. Barang – barang sewa antara lain Rig offshore, kapal, dan lain-lain yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pengeboran di lepas pantai, belum tersedia di dalam negeri.

Ditjen Migas telah melakukan evaluasi atas pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang meliputi aspek legal, teknis, dan pemberdayaan potensi dalam negeri, dengan hasil prosentase intervensi pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap penggunaan barang dalam negeri (TKDN) sebesar 49%.

There has been an increase of RKBI proposal in 2013 from US\$ 4,773.4 million to US\$ 5,165.91 million. The increase is influenced by the import plan of rent goods with the total amount of US\$ 2,845.72 million. The increase of rent goods import is due to the increasing activity or projects. The rent goods such as offshore rig, ship, and others are used to support drilling in offshore since they are not yet available in the country.

Directorate General of Oil and Gas has evaluated the proposal of import goods plan based on legal, technical, and local potential empowerment aspects. It resulted that the Import Goods Plan (RKBI) toward the local goods utilization is 49%.



Dari Grafik di atas, dapat dilihat bahwa Nilai RIB Impor tahun 2013 mengalami penurunan nilai sampai dengan 13,5% dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian impor barang operasi melalui mekanisme Rencana Impor Barang (RIB) memberikan pengaruh terhadap penekanan biaya nilai impor yang sekaligus dapat mempengaruhi peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri pada pengadaan barang operasi di KKKS.

It can be seen in the graphic that RIB in 2013 was declining up to 13.5% compared to 2012. It shows that the operation goods import through RIB mechanism has influenced the import cost suppression which affects the increase of local product utilization in operation goods procurement in the Contractor of Cooperation Contract.

Ketenagakerjaan Migas

Program pembinaan, pengawasan penggunaan TKA dan TKI di sub sektor migas yang bertujuan supaya penggunaan TKA di sub sektor migas dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka alih teknologi kepada TKI. Kegiatan-kegiatan

Oil and Gas Workers

The supervision program of foreign worker and Indonesian worker empowerment in oil and gas sub sector is conducted to ensure that the foreign worker empowerment is effective and efficient in obtaining technology transfer to Indonesian

yang dilakukan dalam upaya pengendalian penggunaan TKA pada kegiatan sub sektor minyak dan gas bumi serta mendukung capaian penggunaan tenaga kerja nasional dalam negeri sub sektor migas sebesar 98,6% pada tahun 2013 meliputi :

- Pembinaan pengawasan penggunaan tenaga kerja dan hubungan industrial tenaga kerja sub sektor migas,
- Monitoring program pengembangan tenaga kerja nasional,
- Mentoring* program tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping,
- Pembuatan sistem informasi data penggunaan tenaga kerja di sub sektor migas.

Hasil konsultasi teknis yang dilaksanakan selama tahun 2013 adalah:

- Rekomendasi RPTKA :
Telah diproses sebanyak 474 rekomendasi RPTKA, yang terdiri dari:
 - Rekomendasi persetujuan sebanyak = 370 untuk 3.892 posisi
 - Rekomendasi penolakan sebanyak = 104 untuk 1.814 posisi.
- Rekomendasi IMTA :
Telah di proses sebanyak 1.012 rekomendasi IMTA, yang terdiri dari :
 - Rekomendasi persetujuan IMTA = 859 untuk 2.395 Orang
 - Rekomendasi penolakan IMTA = 153 untuk 311 Orang.

Realisasi hasil pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sub Sektor Migas selama 2 tahun terakhir terangkum dalam tabel sebagai berikut :

worker. The activities to control the empowerment of foreign worker in oil and gas sub sector and to support the national workers in oil and gas sub sector up to 98.6% in 2013 are:

- The supervision of worker and worker industrial relation in oil and gas sub sector;*
- The monitoring of national worker empowerment program;*
- The mentoring of foreign worker to companion program;*
- The establishment of worker data formation system in oil and gas sub sector.*

The results of technical consultation in 201 3 are:

- RPTKA Recommendation :
The number of 474 RPTKA recommendations have been processed which consist of:*
 - 370 approval recommendations for 3,892 positions.*
 - 104 refusal recommendations for 1,814 positions.*
- IMTA Recommendation
Around 1,012 IMTA recommendations have been processed which consists of:*
 - 859 approval recommendations for 2,395 persons.*
 - 153 refusal recommendations for 311 persons*

The realization Foreign Workers control in oil and gas sub sector in the last 2 years is described in the table

Rekomendasi Recommendation	TAHUN 2012 Year 2012			TAHUN 2013 Year 2013		
	Pengajuan (surat) Submission letter	Persetujuan Approved	Penolakan Declined	Pengajuan (surat) Submission letter	Persetujuan Approved	Penolakan Declined
RPTKA	429 (4.238 posisi position)	3.195 posisi position	1.043 posisi position	474 (5.706 posisi position)	3.892 posisi position	1.814 posisi position
IMTA	1.324 (2.751 orang employees)	2.618 orang employees	113 orang employees	1.012 (2.706 orang employees)	2.395 orang employees	311 orang employees

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa telah terjadi penurunan penggunaan tenaga kerja asing sebesar 223 orang atau turun 9% dibandingkan tahun lalu. Hal ini berarti bahwa Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sub Sektor Migas memberikan pengaruh peningkatan penggunaan tenaga kerja nasional di subsektor migas.

Pelayanan Pembukaan dan Pembaharuan Kantor Perwakilan Usaha Migas

Pelayanan bagi Kantor Perwakilan Usaha Migas mencakup pemberian rekomendasi pembukaan dan pembaharuan Kantor Perwakilan di sub sektor minyak dan gas bumi.

Pelayanan yang telah diberikan selama tahun 2013 adalah pemberian rekomendasi pembukaan bagi 1 (Satu) Kantor Perwakilan Migas dan rekomendasi pembaharuan bagi 22 (Dua Puluh Dua) Kantor Perwakilan Migas.

Selain pemberian rekomendasi dan hasil konsultasi teknis, telah dilaksanakan juga monitoring terhadap kegiatan Kantor Perwakilan.

Pembinaan Hubungan Industrial Sub Sektor Migas

Pembinaan hubungan industrial sub sektor migas selama tahun 2013 telah dilaksanakan dengan cara menampung dan memberi saran mengenai tindak lanjut pemecahan permasalahan hubungan industrial yang terjadi di KKKS dan Perusahaan Jasa Penunjang, diantaranya yaitu saran penyelesaian masalah perselisihan antara TKDN, TKA dan LO Ditjen Migas.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pengembangan tenaga kerja nasional pada perusahaan-perusahaan (KKKS dan Jasa Penunjang di Sub Sektor Migas) ditemukan fakta bahwa:

- Pada sebagian besar KKKS yang disurvei terutama pada 4 KKKS besar ditemukan bahwa perusahaan telah memberikan pelatihan dan pendidikan secara terencana/terstruktur bagi tenaga kerja nasional sesuai dengan bidang dan keahlian mereka. Pada KKKS dalam tahap eksplorasi, pengembangan tenaga kerja nasional belum terlalu baik meskipun telah dilaksanakan;
- Pada Perusahaan Jasa Penunjang yang disurvei terutama perusahaan besar dan merupakan perusahaan multinasional ditemukan bahwa perusahaan telah memberikan pelatihan dan pendidikan secara terencana/terstruktur bagi tenaga kerja nasional sesuai dengan bidang dan keahlian mereka. Pada perusahaan jasa penunjang yang berskala kecil dan Perusahaan *Labour Supply* yang disurvei ditemukan bahwa pengembangan tenaga kerja nasional belum terlalu baik meskipun telah dilaksanakan;

Based on the above data, there has been a decrease of foreign workers of 223 persons or 9% compared to the previous year. It means that the foreign worker control gives impact on the increase of national worker in oil and gas sub sector.

The Opening and Renewal of Oil and Gas Representative Office Services

The services for Oil and Gas Representative Office include the recommendation on opening and renewal of representative office in oil and gas sub sector.

In 2013, one recommendation for oil and gas representative office opening and 22 oil and gas representative office renewal were issued.

Besides recommendation and technical consultation, Directorate General of Oil and Gas also monitors the activity of representative office.

The Supervision on Oil and Gas Industrial Relation

The supervision on oil and gas industrial relation in 2013 was conducted by sharing the suggestion and solution on the issues of industrial relation solution Contractor of Cooperation Contract and Services Company. The suggestions include the solution on the issue of local content, foreign worker and liaison officer of Directorate General of Oil and Gas.

Based on the monitoring of national worker development in Contractor of Cooperation Contract and Services Company, there are several facts as follow:

- *Based on the survey, most of Contractor of Cooperation Contract especially four biggest Contractors of Cooperation Contract have given scheduled training and education for national worker based on their field and skill. In exploration Contractor of Cooperation Contract, the national worker development has been conducted, but not yet well conducted.*
- *Based on the survey to Services Company, especially big and multinational companies, the company has given scheduled training and education for national worker based on their field and skill. Meanwhile, the national worker development in small services company or in labor supply company has been conducted, but not yet well conducted.*

Dari hasil dari pelaksanaan kegiatan Monitoring Penggunaan Alih Teknologi TKA serta Pengembangan TKN di Sub Sektor Migas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penggunaan TKA pada KKKS dan Perusahaan Jasa Penunjang Sub Sektor Migas:
 - Berdasarkan monitoring dan verifikasi penggunaan TKA sub sektor migas secara umum dapat disimpulkan bahwa perusahaan (KKKS dan Jasa Penunjang) menggunakan TKA sesuai dengan rekomendasi RPTKA dan IMTA dari Ditjen Migas.
- b. Pelaksanaan Alih Teknologi dari TKA kepada TKI Pendamping:
 - Pada sebagian besar perusahaan yang disurvei ditemukan fakta bahwa program alih teknologi telah dilaksanakan akan tetapi belum dilakukan secara terstruktur dan belum terdokumentasi secara baik.
 - Selain itu juga ditemukan fakta bahwa pada beberapa perusahaan, pelaksanaan alih teknologi mengalami beberapa kendala antara lain disebabkan karena tidak adanya sosialisasi yang baik dari pihak HRD/management, baik kepada para TKA mengenai kewajibannya untuk melaksanakan alih teknologi, maupun kepada TKI Pendamping mengenai hak-hak mereka untuk mendapatkan alih teknologi dari TKA serta pendidikan/pelatihan yang difasilitasi perusahaan.

Mentoring program tenaga kerja asing kepada tenaga kerja pendamping

Mentoring program digunakan sebagai pedoman dalam rangka mempercepat proses Peng-Indonesiaan tenaga kerja warga negara asing pendatang yang bekerja di sub sektor migas pada perusahaan minyak yang masih mempekerjakan tenaga kerja asing. Mentoring program adalah mempercepat alih teknologi dengan pembinaan sumber daya manusia melalui berbagai metode yang lebih terarah dan efektif yang meliputi seluruh keahlian dan keterampilan untuk pengembangan tenaga kerja Indonesia. Mentoring program ini ditujukan untuk menjawab tuntutan para profesional yang harus tanggap dan mampu menggunakan teknologi baru melalui transfer teknologi dari TKA kepada TKI pendampingnya.

Based on monitoring of foreign worker technology transfer and national worker development in oil and gas sector, the summary is as follow:

- a. *The foreign worker empowerment in Contractor of Cooperation Contract and Services Company in oil and gas sub sector:*
 - *Based on monitoring and verification of foreign worker in oil and gas sub sector, generally it can be concluded that Contractor of Cooperation Contract and Services Company hire foreign worker based on the RPTKA and IMTA recommendation from Directorate General of Oil and Gas.*
- b. *The technology transfer from foreign worker to national worker as companion:*
 - *The survey in many companies shows that the technology transfer program has been conducted. However, it has not been conducted orderly and well documented.*
 - *In several companies, the technology transfer has to deal with several obstacles due to the lack of information sharing session from HRD/management to foreign worker concerning the obligation to transfer the technology as well as to national worker as companion concerning their rights to obtain technology transfer from foreign worker as to get education and training from the company.*

Monitoring Program of Foreign Worker to National Worker as Companion

The monitoring program is purposed as principle in accelerating the localization of foreign worker in oil and gas company hiring foreign worker. The monitoring program will accelerate technology transfer through human resources monitoring with effective method to develop Indonesian worker's expertise and skill. The mentoring program is aimed at answering the professional demand to have the skill in using the new technology through technology transfer from foreign worker to national worker as companion.



PENYIAPAN PROGRAM PROGRAM PLANNING

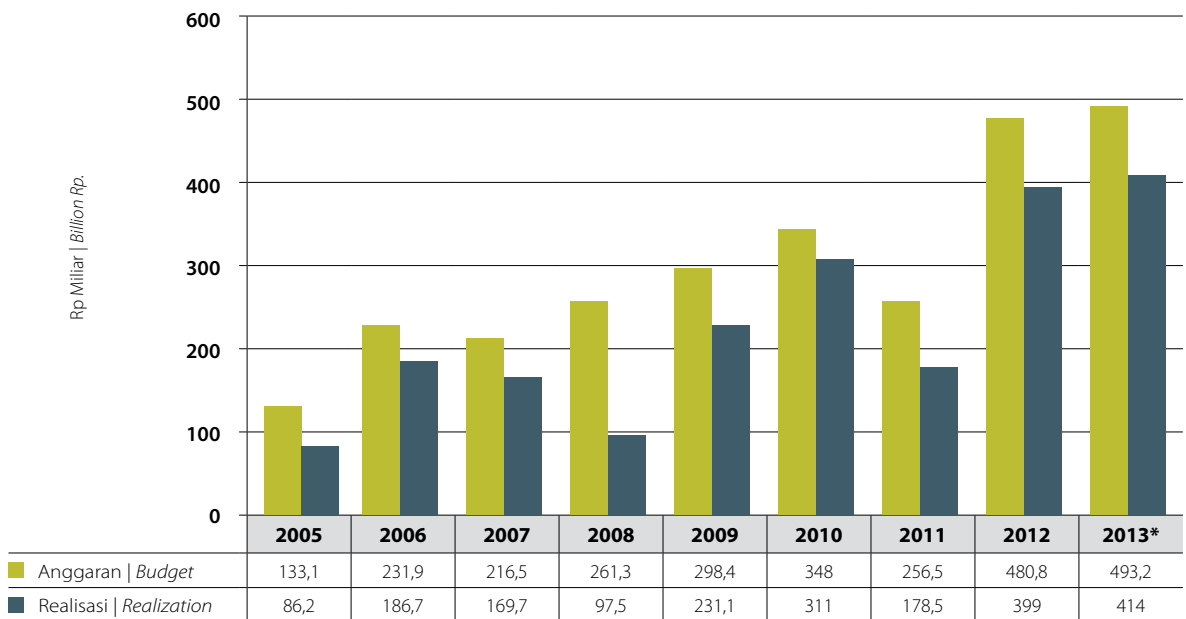
Monitoring Pelaksanaan *Community Development*

Dalam ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terlihat bahwa pengelolaan sektor migas haruslah berorientasi pada kemakmuran rakyat. Keberadaan korporasi sudah selayaknya memberikan manfaat terutama bagi masyarakat sekitar dimana korporasi tersebut menjalankan aktivitas usahanya.

Community Development Monitoring

The 1945 Constitution and Oil and Gas Law Number 22 Year 2001 state that the oil and gas management should be people's welfare oriented. The corporation should contribute benefit for the local people.

Realisasi Anggaran *Community Development* Perusahaan Migas
The Community Development Budget Realization of Oil and Gas Company



*Capaian pelaksanaan anggaran tahun 2013 berdasarkan outlook realisasi per 31 Desember 2013
*The realization of Budget Year 2013 based on realization outlook as of 31 December 2013

Berdasarkan grafik diatas, anggaran program *Community Development* perusahaan migas dianggarkan Rp 493,2 Miliar pada tahun 2013. Anggaran tersebut dapat terealisasi sekitar Rp 414 miliar atau sekitar 83%. Anggaran Program *Community Development* tersebut digunakan dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan fasilitas umum dan lingkungan pada masyarakat sekitar usaha migas.

Based on the above graphic, the community development program budget of the oil and gas company is Rp 493.2 billion in 2013. The budget is realized of about Rp 414 billion or 83%. The Community Development Program Budget is utilized for the development programs of public economy, health, education, public facility and environment in the area around the oil and gas company.

Manfaat *Community Development* ini sebagai sesuatu yang wajar atas berbagai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dari Pelaksanaan program *Community Development* yang efektif dan efisien ada 3 unsur yang memperoleh manfaat:

It is fair for the local people to obtain the benefits of Community Development as the effect of the company's business activity from the economy, social and environment factor. The effective and efficient Community Development program contributes 3 benefits. They are:

A. Manfaat program pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat

A. The Benefits of the environment and local people development program

1. Bagi Perusahaan

Melalui program pengembangan lingkungan dan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. CSR melalui pengembangan lingkungan dan masyarakat dapat memberi banyak keuntungan yaitu :

- (1) Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengimplementasikan program CSR menunjukkan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham;
- (2) Menurunkan resiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar, karena sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait;
- (3) Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai *social marketing* bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (*corporate image building*).

Social Marketing melalui program tersebut juga akan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan *brand image* suatu perusahaan dalam kaitannya dengan kemampuan perusahaan terhadap komitmen yang tinggi terhadap lingkungan selain memiliki produk yang berkualitas tinggi. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak positif terhadap volume unit produksi yang terserap pasar yang akhirnya akan mendatangkan keuntungan yang besar terhadap peningkatan laba perusahaan. Kegiatan CSR yang diarahkan memperbaiki konteks korporat inilah yang memungkinkan *alignment* antara manfaat sosial dan bisnis yang muaranya untuk meraih keuntungan materi dan sosial dalam jangka panjang.

Perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan karena menerapkan tanggungjawab sosialnya antara lain: untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan; layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (*social license to operate*), mereduksi risiko bisnis perusahaan; melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju market; mereduksi biaya; memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator; dan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

1. For the company

Through the environment and local people development program, the company will be able to contribute to the development of public life quality. The benefits of the program are such as:

- (1) *The profitability increase for better company's financial performance. Major companies with CSR program show significant profit in the form of stock exchange escalation.*
- (2) *The decrease of impact risk with the local people since the CSR is aimed at enhancing the company's sustainability in the local area. It can be achieved by building cooperation between stakeholders facilitated by the company through local people development programs. CSR is also about the company's ability to adapt with the local environment, community and related stakeholder.*
- (3) *CSR is able to increase the company's reputation as a social marketing as part of corporate image building.*

Social Marketing through CSR will be beneficial in creating brand image to build the company's ability upon high commitment to the environment besides its commitment to produce high quality product. This will give positive impact to the production volume which will result in the major profit. CSR purposed to fix corporate context will enable alignment between social and business benefit that will give long term material and social benefit.

Company will obtain several benefits in implementing the social responsibility such as maintaining and increasing the company's reputation and brand image, obtaining social license to operate; reducing business risk; expanding access to resources; expanding access to market; reducing cost; maintaining relationship with stakeholders; maintaining relationship with regulator; and enhancing the employee's spirit and productivity.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat

Program CSR dalam bentuk pengembangan lingkungan dan masyarakat dapat memberikan alternative terobosan baru untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit dalam dekade terakhir. Adanya sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah untuk secara terus menerus membangun dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan lingkungan yang berkualitas akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa.

Lebih terperinci manfaat program tanggungjawab sosial ini bagi pemerintah dan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- Komplementer dari program pembangunan oleh pemerintah
- Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan akan relatif teratasi.
- Termanfaatkannya potensi dan sumber daya lokal
- Bekerjasama dengan mengembangkan hubungan mutual benefit dengan pihak lain
- Adanya penguatan kapasitas (individu maupun organisasi)
- Proses *lesson learned* dalam setiap tahapan program
- Kehidupan ekonomi menjadi lebih baik menuju kemandirian.

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Untuk dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan gas bumi di dalam negeri diperlukan suatu perencanaan yang terpadu baik dari segi penyediaan gas bumi (produksi), pengembangan infrastrukturnya, serta pengalokasian gas bumi itu sendiri mengingat jumlahnya yang sangat terbatas dan besarnya kebutuhan akan gas bumi.

Dalam rangka perencanaan penyediaan gas bumi nasional, disusunlah Neraca Gas Bumi Indonesia setiap tahunnya, yang memuat informasi mengenai kondisi ketersediaan dan kebutuhan gas bumi termasuk potensi dan kebutuhan gas bumi.

Dalam penyaluran gas bumi dari produsen gas sampai kepada konsumen dalam negeri perlu dilakukan suatu monitoring pasokan gas bumi baik melalui pipa maupun LNG melalui FSRU, yang meliputi konsumen untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pabrik pupuk, pembangkit listrik, industri lain, rumah tangga dan transportasi. Monitoring pasokan gas bumi dilakukan sebagai upaya dalam mempertahankan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri, sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan

2. For the government and public

CSR as the form of environment and public development will give new breakthrough alternative in empowering the public to overcome the complex and complicated social and environment issues this last decade. The synergy between business, public and government to continuously develop and create prosperous life and qualified environment will determine the nation development succes.

The benefits of CSR program for the government and public are as follows:

- *Complementing the government's development program*
- *Overcoming the issues on poverty, unemployment, and social inequality*
- *Utilizing local potential and resources*
- *Conducting cooperation by developing the mutual benefit relationship with other parties*
- *Enhancing the capacity (individual and organization)*
- *Being the lesson learned process in every stage of the program*
- *Building better economy life toward the independency*

Gas Utilization for Domestic Demand

In order to secure the efficiency and effectiveness of domestic gas supply, an integrated plan from the gas production and supply, infrastructure development, and allocation is required by considering that the volume is very limited and the gas demand is very high.

In the national gas supply plan, Indonesia Gas Balance is formulated annually which gives the information concerning gas supply, demand, and potential.

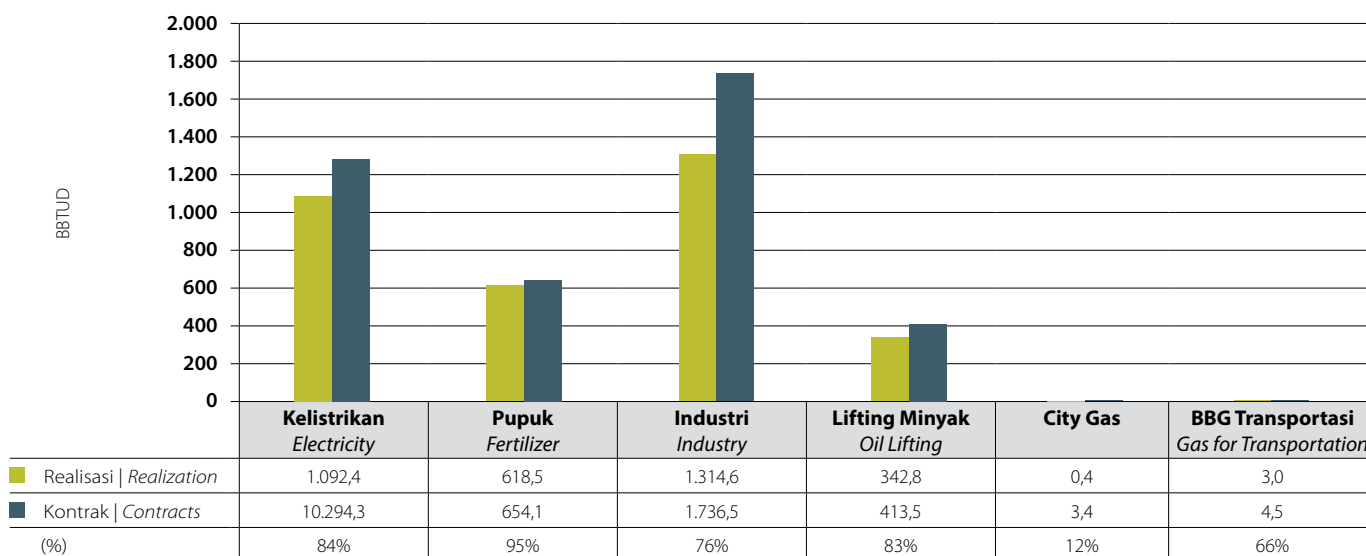
The gas distribution from producer to domestic consumers requires monitoring of gas supply through pipeline and LNG through FSRU including the consumer for oil and gas production increase, fertilizer factory, power plant, other industry, household and transportation. The gas supply monitoring is conducted by maintaining domestic gas

permasalahan apabila terjadi hambatan dalam perjalanan pengaliran gas dari produsen kepada konsumen.

demand fulfillment. Thus, it may give a solution upon the obstacle in transporting the gas from producer to consumer.

Realisasi Penyaluran Gas untuk Domestik Tahun 2013

Realization of Gas Distribution for Domestic Demand in 2014



Sampai dengan bulan Agustus 2013, realisasi penyaluran gas bumi untuk domestik adalah kurang lebih sebesar 3.625 BBTUD, atau sebesar 53% dibanding dengan realisasi penyaluran gas ke ekspor sebesar 47% atau 3.260 BBTUD. Realisasi penyaluran gas tersebut meliputi:

Until August 2013, the gas distribution realization for domestic is about 3,625 BBTUD or 53% compared to the gas distribution realization for export of about 47% or 3,260 BBTUD. The gas distribution realization includes:

- Penyaluran gas untuk peningkatan produksi minyak bumi yang sebagian besar dimanfaatkan di Chevron adalah sebesar 342,81 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk pemenuhan kebutuhan pupuk yang dimanfaatkan di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang Cikampek, Petrokimia Gresik dan Pupuk Kalimantan Timur, adalah sebesar 618 BBTUD atau terealisasi sebesar 95% terhadap kontrak.
- Penyaluran gas untuk kelistrikan, baik melalui gas pipa maupun LNG melalui FSRU Nusantara Regas sebesar 1.092 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk pemenuhan kebutuhan industri, baik yang melalui PGN, Pertagas, maupun Badan Usaha lain adalah sebesar 1.314 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk gas rumah tangga dan BBG transportasi adalah sebesar 3,36 BBTUD.

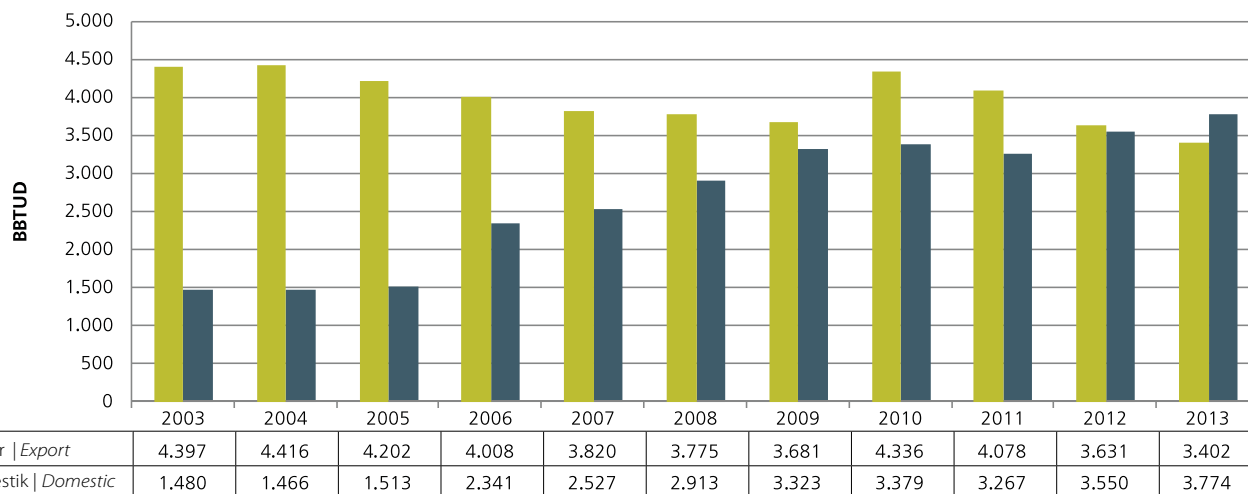
- Gas distribution for oil production increase that is mostly utilized by Chevron of about 342.81 BBTUD.*
- Gas distribution for fertilizer utilized in Factory of Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang Cikampek, Petrokimia Gresik and Pupuk Kalimantan Timur of about 618 BBTUD or 95% from the contract.*
- The gas distribution for electricity, both through pipeline or LNG through FSRU Nusantara Regas up to 1092 BBTUD.*
- The gas distribution for industrial demand both through PGN, Pertagas, and other Business Entity up to 1,314 BBTUD.*
- The gas distribution for household and gas for transportation of about 3.36 BBTUD.*

Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri pada tahun 2013 dipengaruhi salah satunya karena adanya beberapa penambahan ekspor LNG ke pembeli Jepang disebabkan keterbatasan infrastruktur domestik dalam negeri sehingga belum dapat menyerap gas bumi tersebut.

The gas utilization for domestic demand in 2013 is influenced by the increase of LNG export to Japanese buyer due to the lack of domestic infrastructure to use the gas.

Komposisi Penggunaan Gas Bumi

Composition of Natural Gas utilization



Bila dilihat dari perkembangan penyaluran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terlihat bahwa dari tahun ke tahun volumenya semakin bertambah, untuk tahun 2013 peningkatannya sudah lebih dari 100% bila dibandingkan dengan tahun 2003. Diharapkan dengan beroperasinya infrastruktur FSRU di tahun-tahun mendatang volume penyaluran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan semakin meningkat, sehingga mengurangi defisit gas bumi.

The development of gas for domestic demand distribution shows that its volume is increasing these years. In 2013, the increase is more than 100% compared to 2003. It is expected that through the operation of FSRU in the future, the volume of gas distribution for domestic demand will be increasing. Thus, it will decrease the gas deficit.



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2013





04

BAB
CHAPTER

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

***Directorate of Oil and Gas
Upstream Business Development***

Wilayah Kerja Konvensional Migas
Conventional Oil and Gas Working Area

Wilayah Kerja Non Konvensional Migas
Unconventional Oil and Gas Working Area

Eksplorasi Migas
Oil and Gas Exploration

Eksplotasi Migas
Oil and Gas Exploitation

Pengembangan Hulu Migas
*Oil and Gas Upstream Business
Development*

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**

WILAYAH KERJA KONVENSIIONAL MIGAS OIL AND GAS CONVENTIONAL WORKING AREA

a. Persetujuan Survei Umum

Survei umum diperlukan guna mendapatkan data teknis geologi dan geofisika untuk penawaran Wilayah Kerja baru Migas. Pada tahun 2013 terdapat 6 persetujuan survei umum meliputi:

- Seismik 2D sepanjang + 21.285 km
- Seismik 3D seluas + 13.434 km²
- Selain itu telah dilaksanakan Survei Umum menggunakan DIPA tahun 2013 di Teluk Cendrawasih dengan panjang lintasan 2.950 Km.

a. General Survey Approval

General survey is conducted to obtain geological and geophysical technical data for oil and gas new working area offer. In 2013, there were 6 general survey approvals. They are:

- 2D seismic along 21,285 km
- 3D seismic in the area of 13,434 km²
- General survey with 2013 budget in Teluk Cendrawasih along 2,950 km

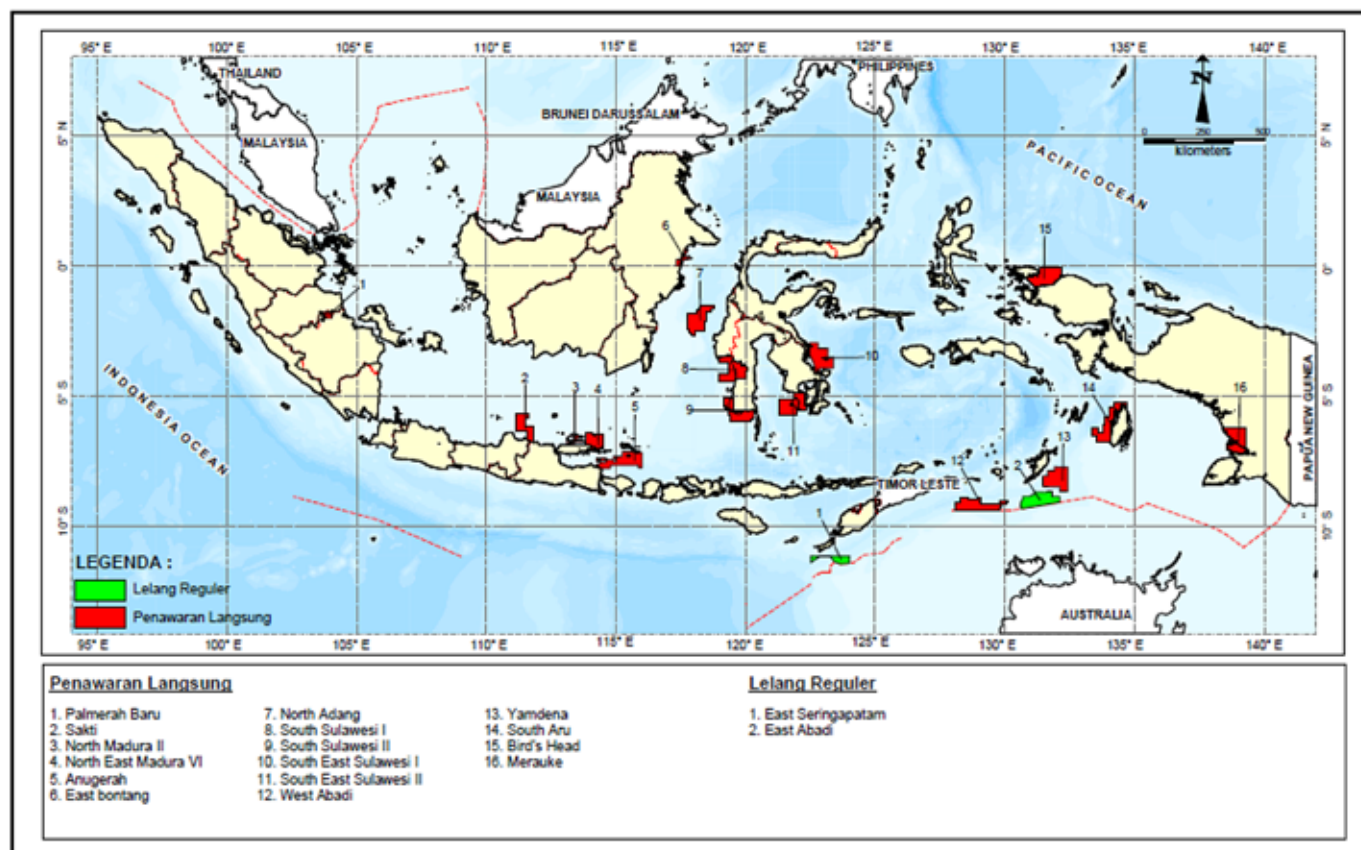
b. Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja dibagi menjadi dua yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Pada Tahun 2013 ditawarkan sebanyak 18 Wilayah Kerja yaitu Lelang Reguler sebanyak 2 Wilayah Kerja dan Penawaran Langsung sebanyak 16 Wilayah Kerja.

b. Oil and Gas Conventional Working Area Offer

The mechanism of working area offer is divided into two; regular tender and direct offer. In 2013, 18 working areas were offered consisted of 2 working areas in regular tender and 16 working areas in direct offer.

Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2013
Oil and Gas Working Area Offer in 2013 (map of working area offer)



Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Tahap I 2013 dilaksanakan pada 16 September 2013 – 27 Januari 2014, Wilayah Kerja yang ditawarkan yaitu East Seringapatam dan East Abadi.

The regular tender of oil and gas working area Phase I Year 2013 was opened on 16 September 2013 to 27 January 2014. The offered working areas are East Seringapatam and East Abadi.

Lelang Penawaran Langsung Tahap I Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013 - 31 Oktober 2013. Jumlah Wilayah Kerja yang ditawarkan ada 16 Wilayah Kerja yaitu: Palmerah Baru, Sakti, North Madura II, North Madura VI, Anugerah, East Bontang, North Adang, South Sulawesi I, South Sulawesi II, South East Sulawesi I, South East Sulawesi II, West Abadi, Yamdena, South Aru, Bird's Head dan Merauke.

The Direct Offer Phase I Year 2013 was opened on 16 September 2013 to 31 October 2013. The offered working areas are Palmerah Baru, Sakti, North Madura II, North Madura VI, Anugerah, East Bontang, North Adang, South Sulawesi I, South Sulawesi II, South East Sulawesi I, South East Sulawesi II, West Abadi, Yamdena, South Aru, Bird's Head and Merauke.

Pada tanggal 19 Desember 2013, diumumkan pemenang Lelang Penawaran Langsung WK Migas Tahap I Tahun 2013 sebanyak 5 Wilayah Kerja yaitu :

The winner of Direct Offer Phase I Year 2013 in 5 working areas was announced on 19 December 2013.

NO	WILAYAH KERJA WORKING AREA	LOKASI LOCATION	PEMENANG LELANG TENDER WINNER
1.	Palmerah Baru	Daratan (<i>Onshore</i>) Sumatra Selatan & Jambi	Konsorsium Bukit Energy Palmerah Baru Pte. Ltd. - New Zealand Oil And Gas Ltd – PT. SNP Indonesia
2.	Sakti	Lepas Pantai (<i>Offshore</i>) Jawa Tengah & Jawa Timur	Konsorsium Krisenergy (Sakti) B.V - PT Golden Heaven Jaya
3.	North East Madura VI	Lepas Pantai (<i>Offshore</i>) Jawa Timur	Golden Code Commercial Ltd
4.	Anugerah	Lepas Pantai (<i>Offshore</i>) Jawa Timur	Husky Energy International Corporation
5.	East Bontang	Daratan dan Lepas Pantai (<i>onshore and Offshore</i>) Kalimantan Timur	PT Innovare Gas

Komitmen pasti eksplorasi dari 5 pemenang lelang untuk 3 (tiga) tahun masa eksplorasi berupa studi G&G sebesar US\$ 4,48 juta, survei seismik 2D sepanjang 3.050 km, survei seismik 3D seluas 965 km² dan pemboran 3 sumur eksplorasi. Total investasi komitmen eksplorasi adalah sebesar US\$ 56,43 juta. Sedangkan bonus tandatangan (*Signature Bonus*) yang akan diterima langsung oleh pemerintah, sebesar US\$ 5,5 juta.

The exploration firm commitment from 5 tender winners for 3 year of exploration period is the form of G to G study of US\$ 4.48 million, 2D seismic survey along 3,050 km, 3D seismic survey in the area of 965 km², and the drilling of 3 exploration wells. The total of exploration commitment investment is US\$ 56.43 million, while the signature bonus for the government is US\$ 5.5 million.

c. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas Konvensional

c. Signing of Oil and Gas Conventional Cooperation Contract

Selama tahun 2013 telah ditandatangani 13 KKS yang merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja migas putaran II tahun 2012 dengan total investasi komitmen eksplorasi sebesar US\$ 77,29 juta dan Bonus Tandatangan sebesar US\$ 14,5 juta, yaitu:

In 2013, there were 13 Cooperation Contracts signed from the oil and gas working area tender phase II Year 2012 with the total of exploration commitment investment up to US\$ 77.29 million and the signature bonus is US\$ 14.5 million.

NO	PERUSAHAAN COMPANY	WILAYAH KERJA WORKING AREA	INVESTASI + SIGN BONUS (US \$) INVESTMENT + SIGN BONUS (US \$)
1	COOPER MERANGIN III LTD.	MERANGIN III	11.700.000
2	PT BINTANG BERLIAN AIR SUGIHAN	AIR SUGIHAN	5.100.000
3	PT BIMA SAKTI ENERGI INDONESIA	BIMA SAKTI	4.550.000
4	CONRAD PETROLEUM (V) LTD.	OFFSHORE NORTH X-RAY	3.950.000
5	PT BINTANG BERLIAN SANGGAU	SANGGAU	5.100.000
6	CHALLEDON SERVICES LTD.	MENDUWAI	4.900.000
7	PT MANDIRA MAHESA ENERGI	KAHAYAN	11.150.000
8	SALAMANDER ENERGY (WEST BANGKANAI) LTD.	WEST BANGKANAI	7.300.000
9	PT. ANUGRAHTRIMATA KALTIM ENERGI	NORTH EAST TANJUNG	9.870.000
10	SALAMANDER ENERGY (NORTH EAST BANGKANAI) LTD.	NORTH EAST BANGKANAI	6.700.000
11	KONSORSIUM SAMUDRA ENERGY MANGKALIHAT LTD. - CAELUS ENERGY MANGKALIHAT PTE. LTD.	OFFSHORE MANGKALIHAT	7.500.000
12	PT PERCIE MAHAKAM PETROLEUM	CENTRAL MAHAKAM	11.000.000
13	KONSORSIUM MP INDONESIA (WEST SEBUKU) LTD. - INPEX WEST SEBUKU LTD.	WEST SEBUKU	2.975.000

d. Penawaran Langsung (Studi Bersama)

Dalam Penawaran Langsung pada tahun 2013 terdapat:

- Usulan studi bersama sebanyak 27;
- 13 usulan sudah disetujui (3 usulan tahun 2013 dan 10 usulan sebelum tahun 2013)
- 3 usulan ditolak.
- 1 usulan telah dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan
- 20 dalam proses evaluasi dan kelengkapan dokumen

d. Direct Offer (Joint Study)

In Direct offer in 2013 there were:

- 27 joint study proposals
- 13 approved proposals (3 proposals in 2013 and 10 proposals before 2013)
- 3 rejected proposals
- 1 presented proposal to obtain the approval
- 20 proposals in evaluation and document completeness process



WILAYAH KERJA NON KONVENSIONAL MIGAS UNCONVENTIONAL OIL AND GAS WORKING AREA

a. Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Mekanisme penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dibagi menjadi dua yaitu melalui Lelang Reguler dan Penawaran Langsung. Pada Tahun 2013 dilakukan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, yaitu :

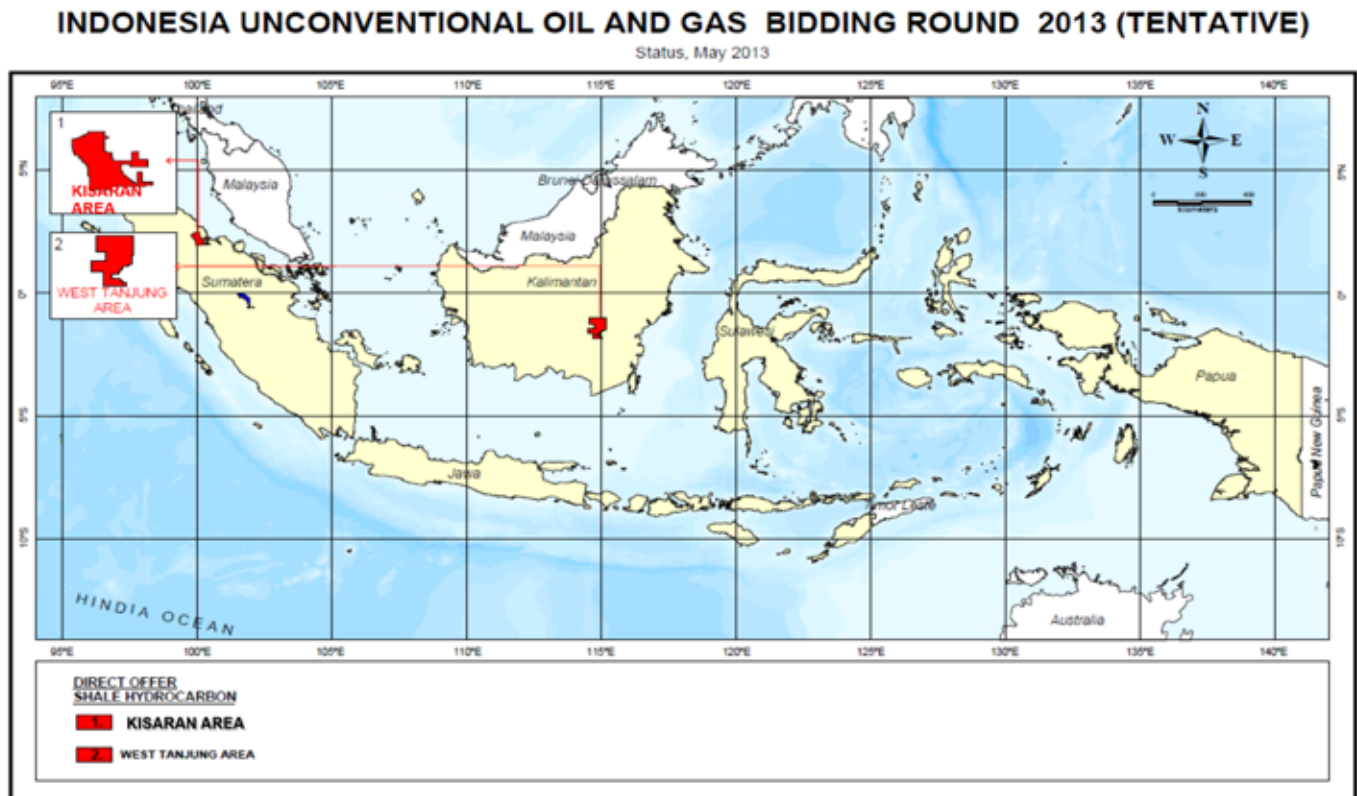
- Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional periode 10 Desember 2013 – 30 Januari 2014, ditawarkan 2 Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK) (Gambar 1) yang terdiri dari :
 1. MNK Kisaran
 2. MNK west Tanjung

a. Unconventional oil and gas working area offer

The mechanism of unconventional oil and gas working area offer is divided into two; regular tender and direct offer. The unconventional oil and gas working area offer in 2013 consisted of:

- Unconventional oil and gas working area direct offer for the period of 10 December 2013 to 30 January 2014 offered 2 unconventional oil and gas working areas namely:
 1. MNK Kisaran
 2. MNK West Tanjung

Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditawarkan dalam Lelang Penawaran Langsung 2013
Unconventional oil and gas working area offered through direct offer in 2013



b. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas Non Konvensional

Selama tahun 2013 telah ditandatangani 1 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang merupakan hasil Lelang Penawaran Langsung tahun 2012.

b. Unconventional Oil and Gas Cooperation Contract Signing

In 2013, one unconventional oil and gas working area contract was signed as the result of direct offer in 2012.

Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2013 *The signing of Unconventional Oil and Gas Working Area Cooperation Contract in 2013*

NO	KONTRAKTOR CONTRACTOR	WILAYAH KERJA WORKING AREA	CONTRACT SIGNING
1	PHE Sumatera Utara	Blok MNK Sumbagut	15 Mei 2013

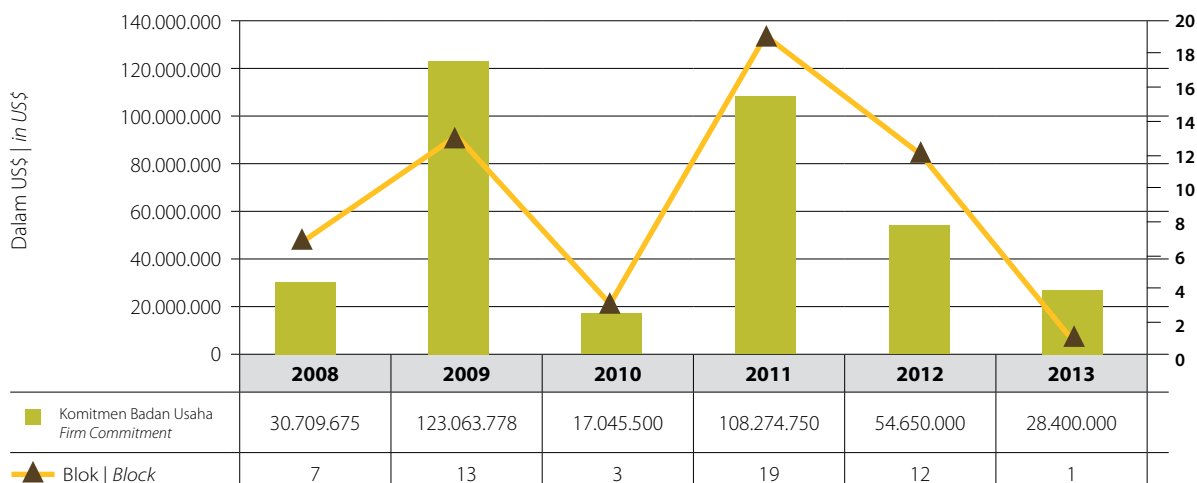
Hingga akhir tahun 2013 telah ditandatangani 54 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan 1 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Non konvensional dengan total investasi hulu migas (*firm commitment*) sebesar US\$ 362.143.703.

Until the end of 2013, 54 CBM working area contracts and 1 unconventional oil and gas working area cooperation contract have been signed with the firm commitment of US\$ 362,143,703.

Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan Migas Non Konvensional yang telah ditandatangani *The signed CBM and Unconventional Oil and Gas Working Area*



Investasi Hulu (*Firm Commitment*) Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional *Firm commitment in upstream investment of CBM and Unconventional working area*



c. Persetujuan Studi Bersama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Selama tahun 2013 telah disetujui pelaksanaan Studi Bersama Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebanyak 4 (empat) persetujuan, yaitu :

c. Joint Study Approval on Unconventional Oil and Gas Working Area

In 2013, there were 4 unconventional oil and gas working area joint studies.

Persetujuan Studi Bersama *Shale* Hidrokarbon Tahun 2013

Joint Study on Shale Hydrocarbon in 2013

NO	AREA	APLIKAN APPLICANT	PERGURUAN TINGGI UNIVERSITY
1	Eksisting WK Migas Area Jambi	PT. Pertamina (Persero)	UPN
2	Central Bangkanai	PT. Sugico	USAKTI
3	East Bangkanai	PT. Graha Energi Utama	UNPAD
4	Blora Deep	Konsorsium PT Sele Raya Energi- Bukit Energy Resources Indonesia Pte Ltd	UGM



EKSPLORASI MIGAS OIL AND GAS EXPLORATION

1. Pemutakhiran Data Hasil Kegiatan Eksplorasi

Survei Seismik 2D dan 3D

Pada tahun 2013, KKS merealisasi survei seismik 2D sepanjang 12.989 km dan 3D seluas 13.436 km². Dibandingkan tahun 2012, pelaksanaan kegiatan survei seismik 2D mengalami penurunan sebanyak 7,75% dan survei seismik 3D mengalami kenaikan 54,12%. Penurunan survei seismik disebabkan karena adanya alasan keamanan, tumpang tindih lahan, perubahan lintasan, konsep eksplorasi dan pengalihan kegiatan survei seismik 2D ke tahun 2014.

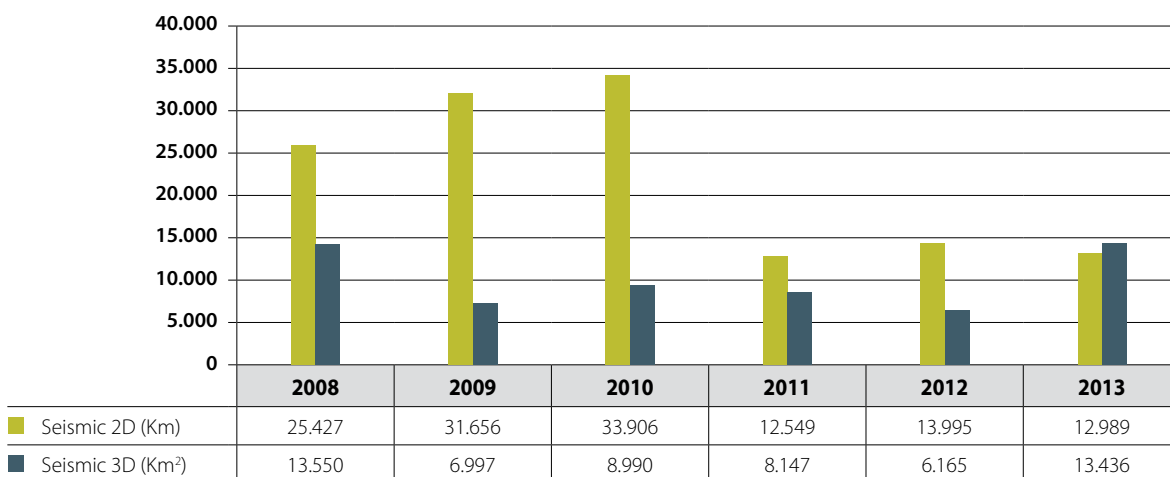
1. The update of exploration data Survei

2D and 3D Seismic Survey

In 2013, Contractor of Cooperation Contract has realized 2D seismic survey along 12,989 km and in the area of 13,436km². Compared to 2012, the 2D seismic survey has declined 7.75% and the 3D seismic survey has increased 54.12%. The decline of seismic survey occurred due to security issue, land overlapping, route change, exploration concept and 2D seismic survey diversion to 2014.

Realisasi Survei Seismik 2D & 3D, Tahun 2008-2013

Realization of 2D and 3D Seismic Survey Year 2008 to 2013



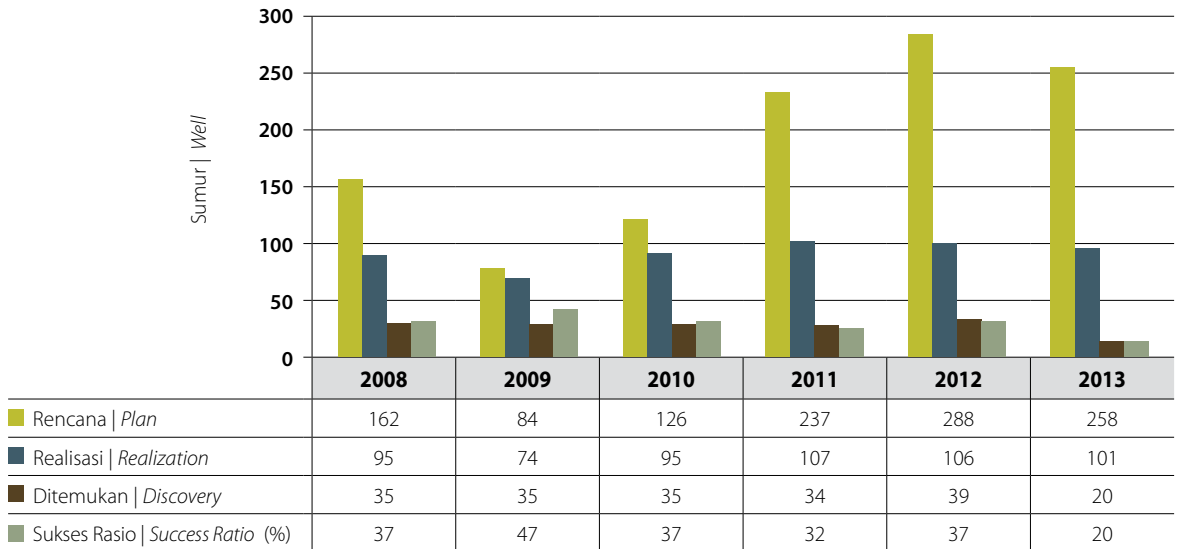
Pemboran Sumur Eksplorasi

Realisasi pemboran sumur eksplorasi pada tahun 2013 adalah 101 sumur. Dibandingkan tahun 2012 terjadi kenaikan dalam jumlah sumur yang telah dibor sebesar 4,95% seperti yang terlihat pada gambar. Dari 106 sumur yang telah dibor selama tahun 2013 diantaranya 20 sumur menemukan hidrokarbon (discovery) dengan sukses ratio 20%.

Exploration Well Drilling

The realization of exploration well drilling in 2013 is 101 wells. Compared to 2012, there has been an increase of drilled well up to 4.95% as seen in the picture. From 106 drilled wells in 2013, 20 wells discovered hydrocarbon with 20% of success ration.

Pemboran Sumur Eksplorasi Tahun 2008-2013 *Well Drilling Exploration Year 2008-2013*



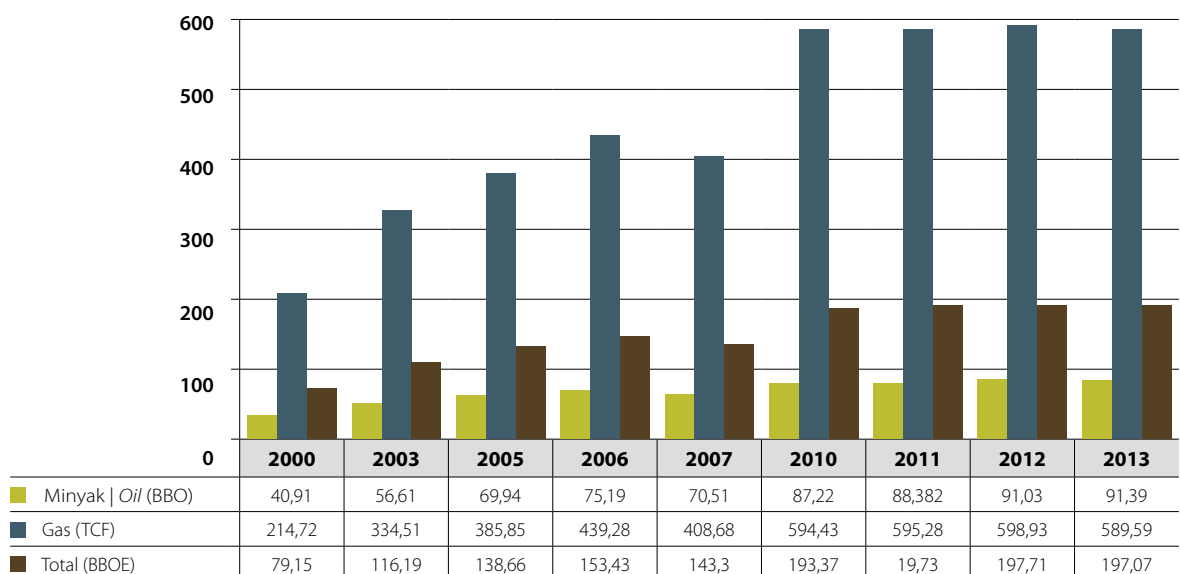
Sumber Daya Migas

Total sumber daya minyak bumi terambil sebesar 91,03 milyar barel dan sumber daya gas bumi terambil sebesar 598,93 TCF. Di Indonesia terdapat 60 cekungan migas di Indonesia yang dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu 22 cekungan belum dibor, 13 cekungan sudah dibor belum ada penemuan, 8 cekungan dengan penemuan belum berproduksi, dan 16 cekungan produksi.

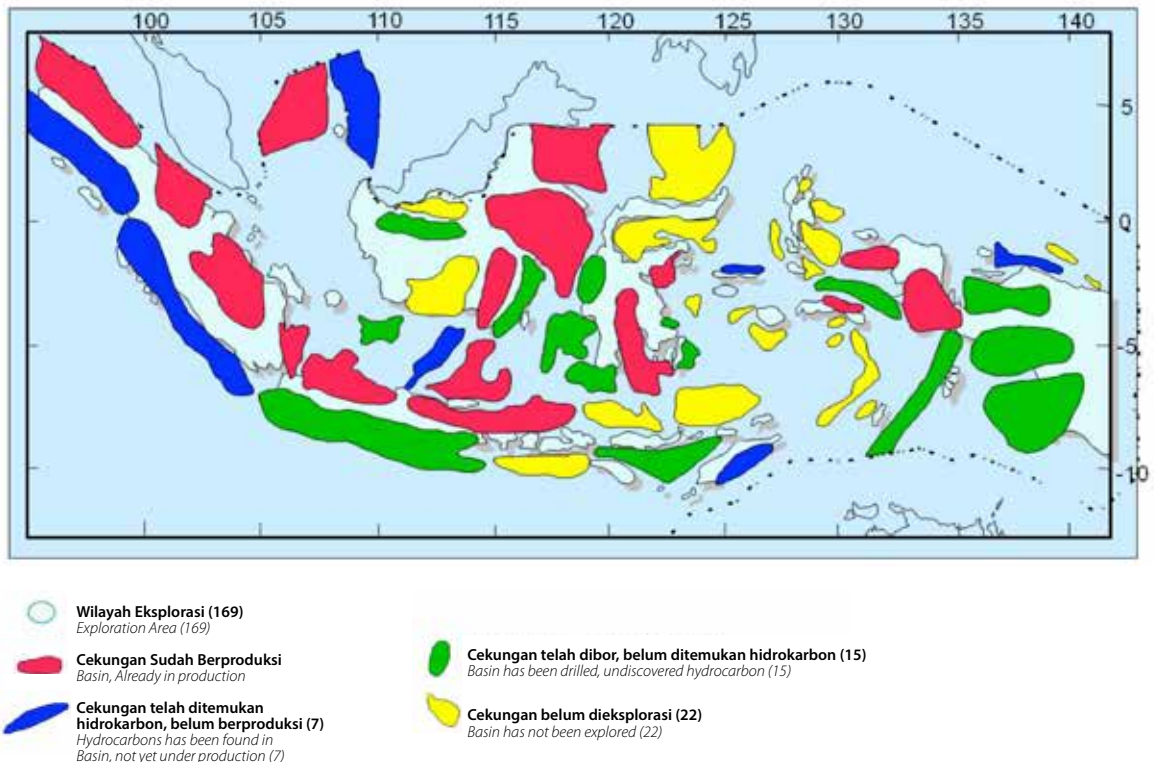
Oil and Gas Resources

The total exploited oil resources is 91.03 billion barrel and exploited gas resources is 598.93 TCF. Indonesia has 60 oil and gas basins which are divided in 4 groups. They are 22 undrilled basins, 13 drilled basins with no discovery, 8 basins with discovery but not yet producing, and 16 production basins.

Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi tahun 2002-2013 *Oil and Gas Resources in 2002 to 2013*



Peta Cekungan Hidrokarbon Indonesia
Map of Hydrocarbon Basin in Indonesia



2. Kebijakan Dalam Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas Konvensional dan Non Konvensional

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja Sama dilakukan antara pemerintah dengan kontraktor yang merupakan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang dalam perkembangannya Kontrak Kerja Sama ini menjadi hal krusial karena disebabkan banyaknya pihak yang memiliki kepentingan terhadap minyak dan gas bumi.

Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi migas dan Gas Metana Batubara di Indonesia tahun 2013, Ditjen Migas telah menerbitkan beberapa persetujuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pelayanan Usaha Eksplorasi terdiri dari:
 - a. Penyisihan Sebagian Wilayah Kerja (43 disetujui)
 - b. Penundaan Penyisihan Sebagian Wilayah Kerja (25 disetujui)
 - c. Pengakhiran Kontrak / Terminasi (1 disetujui)
 - d. Pemanfaatan data (120 disetujui)
 - Penggunaan Data (11 disetujui)

2. The policy to support conventional and unconventional oil and gas exploration activity

The oil and gas upstream activity is conducted and controlled through Cooperation Contract as the sharing contract or other form of cooperation contract in exploration and exploitation to contribute benefits for the country and the people welfare. The Cooperation Contract is conducted between the government and business entity or permanent business establishment. This Cooperation Contract is crucial since many parties are interested in oil and gas.

To support oil and gas and CBM exploration in Indonesia in 2013, Directorate General of Oil and Gas has issued several approvals and recommendations with the details as follow:

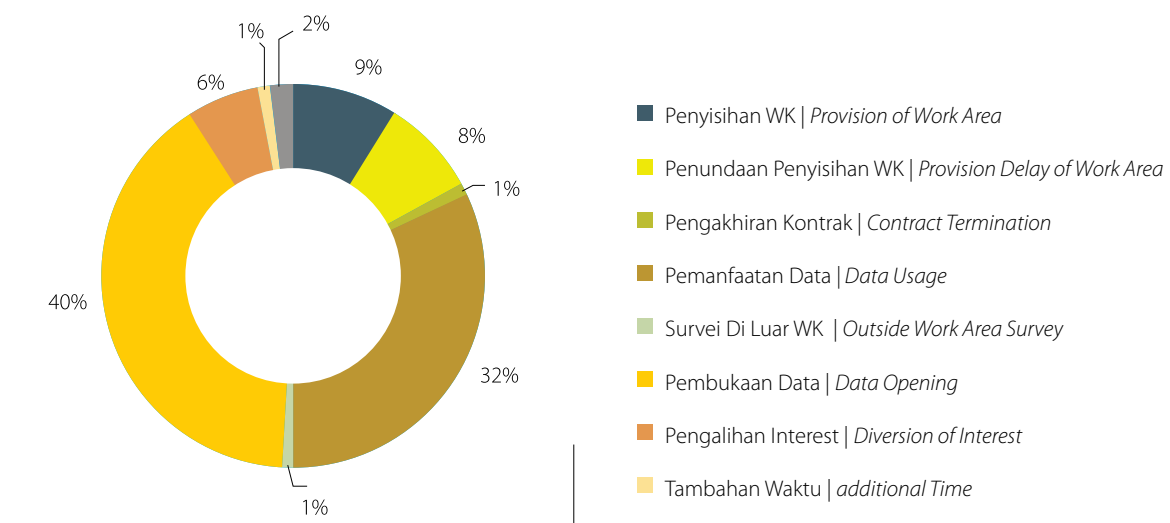
1. Exploration Business Services, consists of:
 - a. The elimination of half of working area (43 are approved)
 - b. The postpone of half of working area (25 approved)
 - c. Contract termination (1 approved)
 - d. Data utilization (120 approved)
 - Data Transfer (22 approved)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman Data (22 disetujui) - Pertukaran Data (1 disetujui) - Peminjaman Data (1 disetujui) - Izin Makalah (85 disetujui) <p>e. Survei Keluar Wilayah Kerja (8 disetujui)</p> <p>2. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Eksplorasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan data (127 disetujui) b. Pengalihan Interest (28 disetujui) c. Tambahan Waktu Dalam Rangka Komersialisasi (4 disetujui) d. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan (9 disetujui) | <ul style="list-style-type: none"> - Data Exchange (1 approved) - Data Borrowing (1 approved) - Analysis License (85 approved) <p>e. Working Area Exit Survey (8 approved)</p> <p>2. Exploration Monitoring and Evaluation, consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data access (127 approved) b. Interest diversion (28 approved) c. Time extension in commercialization (4 approved) d. Implementation guarantee return (9 approved) |
|---|--|

Gambar berikut memperlihatkan persetujuan dalam kegiatan eksplorasi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2013.

Picture shows the approval of exploration in 2013

Grafik Persetujuan dalam rangka menunjang kegiatan eksplorasi 2013
Graphic of Exploration Approval in 2013



3. Kegiatan Dalam Menunjang Kegiatan Eksplorasi Migas Konvensional dan Non Konvensional

Dalam mendorong kegiatan eksplorasi di Indonesia, Pemerintah berkepentingan untuk memfasilitasi kegiatan *Farm-in* dan *Farm-out* guna mendorong kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) serta meningkatkan kerja sama yang lebih optimal antar pemangku kepentingan serta menjalin iklim investasi yang lebih terbuka dan transparan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Ditjen MIGAS dan SKKMIGAS bekerjasama dengan The Jakarta Scout Check forum (JSC) telah mengadakan kegiatan yaitu "*Farmout Forum*" pada hari Kamis dan Jumat tanggal 12-13 September 2013 di Yogyakarta yang dibuka oleh Direktur Pembinaan Usaha Hulu.

3. The Activity to support conventional and unconventional oil and gas exploration

To support the exploration activity in Indonesia, the government facilitates *farm-in* and *farm-out* to support oil and gas upstream activity, to optimize the cooperation between stakeholders, and to create a more open and transparent investment climate. Thus, the government cq Directorate General of Oil and Gas and SKK Migas in cooperation with The Jakarta Scout Check forum have conducted *Farmout Forum* on Thursday, 12-13 September 2013 in Yogyakarta. The forum was opened by Director of Upstream Business Development.

Pembukaan acara Farmout 2013 di Yogyakarta, 12-13 September 2013

Farmout 2013 in Yogyakarta, 12-13 September 2013



Farmout Forum ini merupakan program kerja Tahunan Ditjen Migas sebagai sebuah wadah pertemuan para pelaku usaha hulu migas untuk kepentingan berbagi pengalaman, berbagi kesempatan berkerjasama, serta berbagi resiko dalam industri migas konvensional, Gas Metana Batubara serta non-konvensional di Indonesia.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mempertemukan calon investor dengan pemangku kepentingan.
2. Mempromosikan potensi blok di Indonesia.
3. Menjalin kerjasama antar pemerintah dengan perusahaan Migas.
4. Menjalin hubungan bisnis dan kerjasama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan.

Farmout Forum Ke-3 dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 12-13 September 2013. Dengan total jumlah keseluruhan peserta adalah peserta yang terbagi menjadi Peserta (*Partisipant*) berjumlah 183 orang dan *Booth Asistant* berjumlah 19 orang (16 *farmout*, 3 *service company*).

The Farmout Forum is an annual program of Directorate General of Oil and Gas as a meeting forum to share experience, cooperation opportunity and risk in conventional oil and gas, CBM and unconventional oil and gas in Indonesia.

The purpose of this activity is:

1. *Bringing together potential investors with stakeholders.*
2. *Promoting potential blocks in Indonesia.*
3. *Establish cooperation between the government and the oil and gas companies.*
4. *Establish business relations and good cooperation between all stakeholders.*

The 3rd Farmout Forum was held in Yogyakarta on 12-13 September 2013 attended by 183 participants and 19 Booth Assistant (16 farmout, 3 service company).

EKSPLOITASI MIGAS OIL AND GAS EXPLOITATION

a. Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Survei Seismik 2D dan 3D

• Cadangan Minyak Bumi

Total Cadangan minyak bumi status 1.1.2013 adalah sebesar 7.549 milyar barel. Cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,142 milyar barel (1,91%) dibandingkan cadangan minyak bumi status 1 Januari 2012 sebesar 7,408 milyar barel.

Kenaikan cadangan tersebut terutama berasal dari beberapa KKKS seperti AWE (NW Natuna) NZ LTD., KSO-Benakat Barat Pet., Pertamina Region Sumatera, Golden Spike, UBEP Limau, PT. Eksindo TSD, Binatek R. Kruh, KSO-Pacific Oil And Gas, Prakarsa BMS, Petrochina INT., PT. Bumi Siak Pusako, UBEP Tanjung.

a. The exploitation monitoring and supervision of 2D and 3D seismic survey

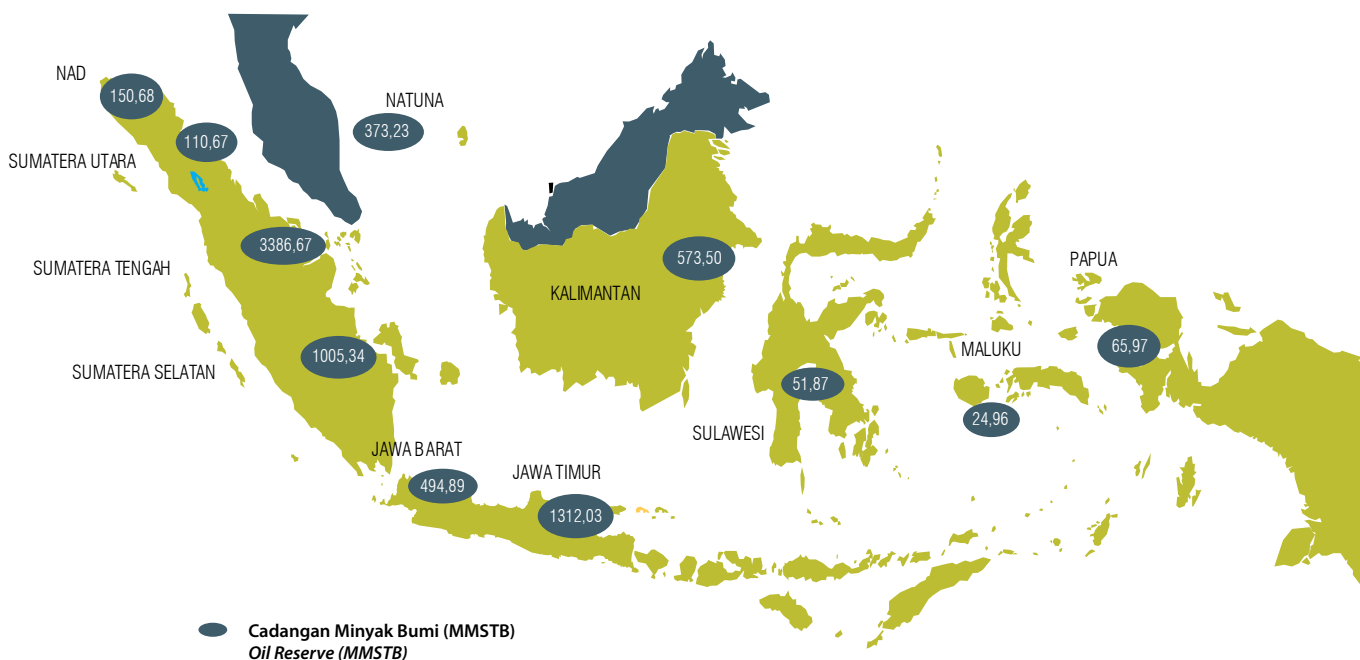
• Oil Reserve

The total of oil reserve as of 1 January 2013 is 7,549 billion barrel. The reserve increased 0.142 billion barrel (1.91%) compared to oil reserve as of 1 January 2012 of 7,408 billion barrel.

The increase of reserve is mostly derived from Contractor of Cooperation Contract such as AWE (NW Natuna) NZ LTD., KSO-Benakat Barat Pet., Pertamina Region Sumatera, Golden Spike, UBEP Limau, PT. Eksindo TSD, Binatek R. Kruh, KSO-Pacific Oil and Gas, Prakarsa BMS, Petrochina INT., PT. Bumi Siak Pusako, and UBEP Tanjung.

Cadangan Minyak Bumi (Status 1.1.2013)

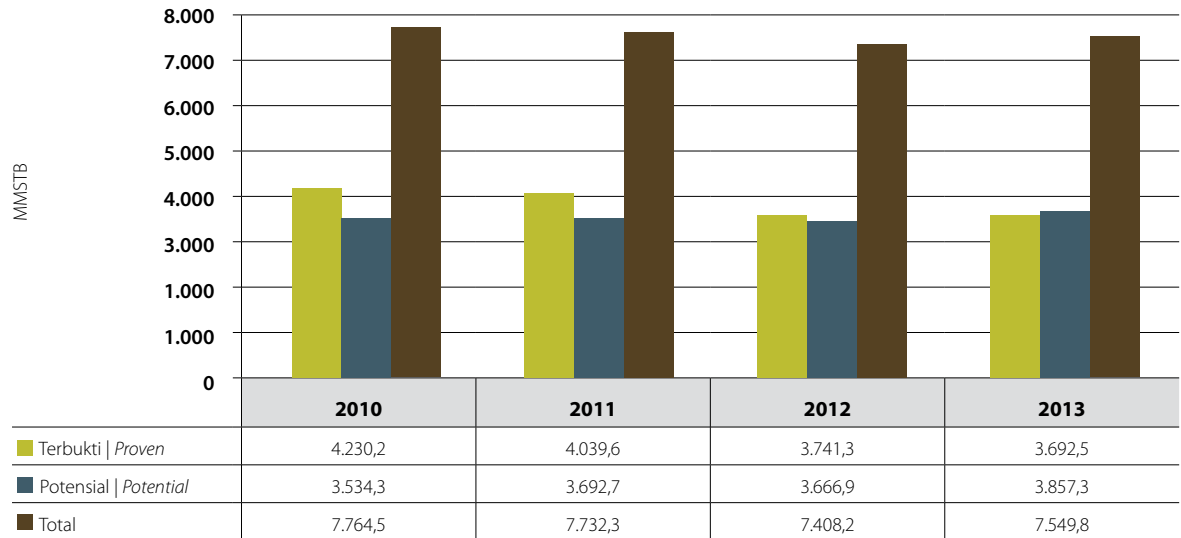
Oil Reserve (Status as of 1 January 2013)



TERBUKTI PROVEN	3.692,50 MMSTB
POTENSIAL POTENTIAL	3.857,31 MMSTB
TOTAL	7.549,81 MMSTB

Perkembangan Cadangan Minyak Bumi Dari Tahun 2009 – 2013

Oil Reserve Development from 2010 to 2013



• Cadangan Gas Bumi

Cadangan gas bumi status 1 Januari 2013 adalah sebesar 150,391 TSCF. Cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar 0,308 TSCF (0,20%) dibandingkan cadangan gas bumi status 1 Januari 2012 sebesar 150,699 TSCF.

Penurunan cadangan terutama terjadi pada beberapa KKKS seperti UBEP Jambi, Total Indonesia, Chevron Ind.Inc., BP Muturi NBV, BP Berau LTD., Hess Pangkah Limited, Elnusa Bangkanai, Kangean Energy Ind., VICO, ENI, PHE ONWJ.

• Gas Reserve

The gas reserve as of 1 January 2013 is 150.391 TSCF. The reserve declined 0.308 TSCF (0.20%) compared to oil reserve as of 1 January 2012 of about 150.699 TSCF.

The decline of reserve occurred in several contractors of cooperation contract such as UBEP Jambi, Total Indonesia, Chevron Ind.Inc., BP Muturi NBV, BP Berau LTD., Hess Pangkah Limited, Elnusa Bangkanai, Kangean Energy Ind., VICO, ENI, PHE ONWJ.

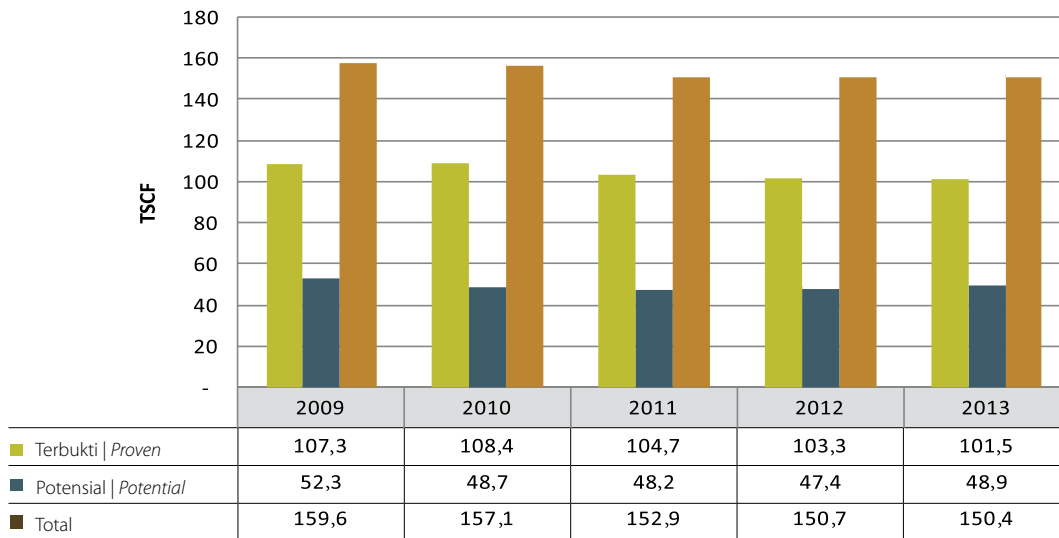
Cadangan Gas Bumi (Status 1.1.2013)

Gas Reserve (Status 1 January 2013)



Perkembangan Cadangan Gas Bumi Dari Tahun 2009 – 2013

Gas Reserve Development from 2010 to 2013



• Produksi Minyak Bumi dan Kondensat

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2013 adalah sebesar 825 ribu bph, mengalami penurunan sebesar 35 ribu bph dibandingkan produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2012 sebesar 860 ribu bph.

Penurunan produksi minyak bumi tersebut disebabkan antara lain:

- Gangguan produksi yang disebabkan antara lain:
Kebocoran pipa salur
Masalah peralatan, seperti kerusakan kompresor
Kejadian alam, seperti hujan lebat yang menyebabkan pengentalan minyak/*congeal* dan gangguan petir yang menyebabkan *power tripped*
- Kendala *subsurface/reservoir*
- Faktor non teknis: tumpang tindih lahan, kendala perijinan (a.l. ijin pemboran sumur), & kendala sosial (pemblokiran jalan/lokasi, faktor keamanan dan pencurian)

• Oil and Condensate Production

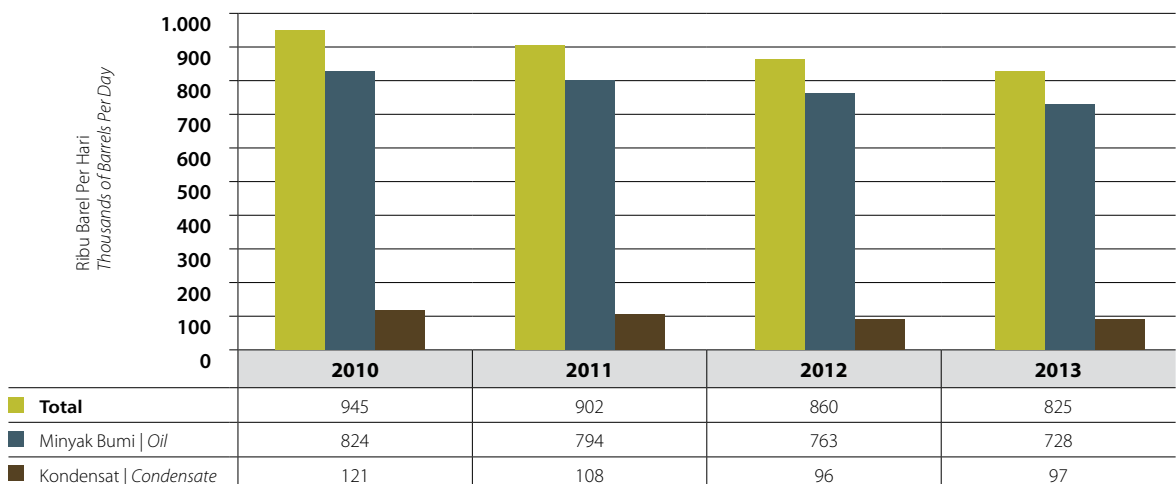
The oil and condensate production in 2013 is 825 thousand bph. It decreased 35 thousand bph compared to oil and condensate production in 2012 of 860 thousand bph.

The oil production decline is due to:

- Production disturbance such as pipeline leakage, tools problem (compressor damage), natural factor (heavy rain that causes *congeal* and thunder that causes power tripped)
- Subsurface or reservoir constraints
- Non-technical factor: land overlapping, licensing constraint (well drilling license) and social constraint (land/location blockade, security and thievery)

Produksi minyak bumi dan kondensat tahun 2010 – 2013.

Oil and condensate production from 2010 to 2013



• Produksi Gas Bumi

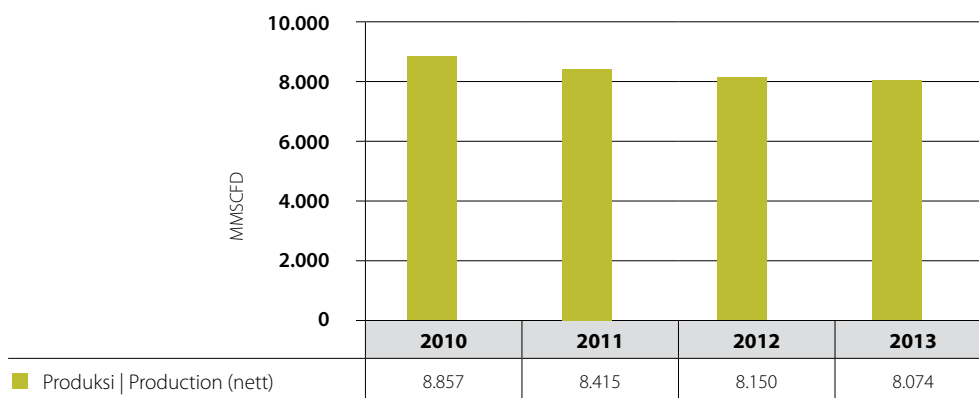
Produksi gas bumi net pada tahun 2013 sebesar 8.074 MMSCFD, mengalami penurunan sebesar 76 MMSCFD dari 8.150 MMSCFD pada tahun 2012.

• Gas Production

The net gas production in 2013 is 8,074 MMSCFD. It decreased 76 MMSCFD from 8,150 MMSCFD in 2012.

Produksi gas bumi tahun 2010 – 2013

Gas production from 2010 to 2013



Penurunan produksi gas bumi tersebut disebabkan antara lain:

- Kehilangan peluang produksi karena *unplanned shutdown*:
Masalah peralatan (kerusakan pipa, gangguan pompa),
- Kehilangan produksi karena kendala lain:
Keterlambatan penyelesaian pengembangan lapangan
 - Permasalahan *offtaker*
 - Kendala *subsurface* (a.l. permasalahan tekanan *reservoir*, problem kepasiran)
 - Perpanjangan *planned shutdown*

The gas production decline is caused by several factors:

- Production loss due to *unplanned shutdown*:
Tools problems (pipe and pump damage)
- Production loss due to other factors:
The tardiness of field development,
 - Offtaker issue,
 - Subsurface constraint (reservoir pressure and sand problem)
 - The extension of planned shutdown

• Pemboran Sumur Pengembangan dan Workover

Jumlah pemboran sumur pengembangan pada tahun 2013 sebanyak 1.051 sumur pengembangan yang terdiri dari sumur minyak, sumur gas, dan sumur lainnya (sumur injeksi, observasi, dan lain-lain) dan 837 sumur *workover*. Adapun rincian KKKS yang melakukan kegiatan pemboran pengembangan antara lain sebagai berikut :

- PT CPI sebanyak 574 sumur pengembangan
- Pertamina EP sebanyak 133 sumur pengembangan
- Total E&P Indonesia sebanyak 107 sumur pengembangan
- KKKS lainnya sebanyak 169 sumur pengembangan

• The development and workover well drilling

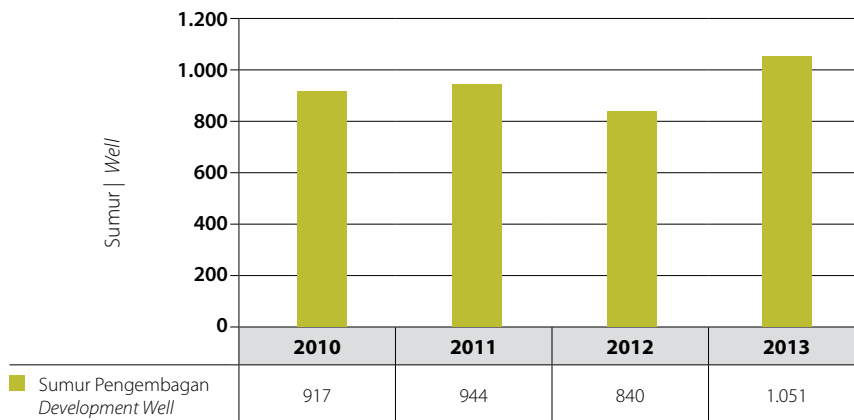
There were 1,051 development well drillings consisted of oil well, gas well, and other wells (injection well, observation, etc) and 837 workover well drillings in 2013. The Contractors of Cooperation Contract conducting development well drilling are as follow:

- PT CPI with 574 development wells
- Pertamina EP with 133 development wells
- Total E&P Indonesia with 107 development wells
- other Contractors of Cooperation Contract with 169 development wells

No	Program Kerja Work Program	Sasaran Target	Realisasi Realization	%	Keterangan Note
1	Pemboran Pengembangan Drilling Development	1.178	1.051	89 %	Belum semua sumur selesai dan siap untuk diproduksi Not all wells completed and ready to produce
2	Workover	1.094	837	76 %	

Perkembangan Sumur Pemboran Pengembangan tahun 2010 – 2013

Development Well Drilling in 2010 to 2013



Program kerja KKKS tahun 2013 belum terlaksana sepenuhnya, kendala utama meliputi masalah tumpang tindih lahan, ketersediaan rig, perijinan Pemda dan instansi terkait (Kehutanan).

The working program of Contractor of Cooperation Contract in 2013 has not fully implemented. The main obstacles are the issue of land overlapping, rig availability, licensing from local government and related institution such as Ministry of Forestry.

b. Persetujuan Untuk Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua

Pada tahun 2012 Pemerintah telah menerbitkan persetujuan bagi 5 Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Total sumur yang akan dikelola sebanyak 280 buah.

b. The approval to produce oil from mature well

In 2012, the government has issued the approval for 5 Village Cooperation Unit (Koperasi Unit Desa/KUD) to produce oil from mature well. There will be 280 mature wells.

KUD yang mendapat persetujuan tersebut adalah KUD Mitra Sawit di Desa Kaliorang, Sangatta, Kalimantan Timur, dengan jumlah sumur sebanyak 11 buah, KUD Serba Usaha Pribumi Mandiri Mineral dan Energi di Desa Klamogoen, Kabupaten Sorong, Papua Barat, dengan jumlah sumur tua sebanyak 23 buah.

KUD Mitra Sawit in Kaliorang Village, Sangatta, East Kalimantan obtains the approval to produce oil in 11 wells. KUD Serba Usaha Pribumi Mandiri Mineral dan Energi in Klamogoen Village, Sorong Regency, West Papua obtains the approval to produce oil in 23 wells.

Selain itu, KUD Sumber Pangan di Desa Kedewan, Beji, Hargomulyo, dan Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan jumlah sumur tua sebanyak 110 buah, KUD Usaha Jaya Bersama di Desa Kedewan, Beji, Hargomulyo, dan Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan jumlah sumur tua sebanyak 114 buah dan KUD Langkat Oil Resources di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan jumlah sumur tua sebanyak 22 buah.

Besides that, KUD Sumber Pangan in Kedewan, Beji, Hargomulyo, and Wonocolo, Kedewan Sub-district, Bojonegoro Regency, East Timur, obtains the approval to produce oil in 110 wells. KUD Usaha Jaya Bersama in Kedewan, Beji, Hargomulyo, dan Wonocolo, Kedewan Sub-district, Bojonegoro Regency, East Timur obtains the approval to produce oil in 114 wells. KUD Langkat Oil Resources in Buluh Telang Village, Padang Tualang sub-district, Langkat Regency, North Sumatera obtains the approval to produce oil in 22 wells.

Pada Tahun 2013 telah terbit persetujuan Dirjen Migas a.n. MESDM tentang pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua kepada :

- KUD Tani Makmur di Desa Lama baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

In 2013, approval of the Director General of Oil and Gas has been published on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources on petroleum mining operations on old wells to:

- KUD Tani Makmur, Lama Baru Village, Sei Lapan sub-district, Langkat Regency, North Sumatera in Telaga

di Lapangan Telaga Said Wilayah kerja TAC Pertamina–Eksindo Telaga Said Darat dengan jumlah sumur tua sebanyak 22 buah sumur;

- b. Perusahaan Daerah Aneka Tambang di Desa Margoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur di Lapangan Gegunung Wilayah Kerja KSO Pertamina Tawun Gegunung Energi dengan jumlah sumur tua sebanyak 10 buah sumur.

Said Field of TAC Pertamina Working Area – Eksindo Telaga Said Darat to produce oil in 22 mature well.

- b. Local company Aneka Tambang Margoagung Village, District Singgahan, Tuban, East Java Province in Field Work Area Gegunung KSO Pertamina Energy Tawun Gegunung the number of old wells 10 wells.

c. Perijinan Pemanfaatan Data Hasil Kegiatan Eksploitasi

Pada tahun 2013 telah diterbitkan 30 ijin pemanfaatan data hasil kegiatan eksploitasi migas.

c. The license to Data Utilization of Exploitation Activity Result

In 2013, the government issued 30 licenses to data utilization of oil and gas exploitation activity. They are:

NO.	IZIN	PENERIMA IZIN
1	Makalah dengan judul <i>Incident Command System (ICS) Base Emergency Management</i> oleh Yong Ardinal pada International HSE Seminar : <i>Safety Leadership, Disaster & Crisis Management</i> 2013 pada tanggal 26 – 27 Maret 2013 di Universitas Indonesia	Chevron Pacific Indonesia
2	1. Makalah dengan judul <i>“Real-time Facility optimization (RTFO) of Heavy Oil Steam Flood, Steam Generation, Distribution and Injection with Fleet Management”</i> oleh Teguh Handjojo D. 2. Makalah dengan judul <i>“Enterprise Upstream Data Visualisation Optimisation In IBU”</i> oleh Hasballah. 3. <i>Heterogenous Implemetation of a huge real time data historian”</i> oleh Endang A D Nasution. pada forum internal Chevron yang bertajuk SCADA/Round table 2013 pada tanggal 24 – 29 Maret 2013 di Bangkok Thailand	Chevron Pacific Indonesia
3	1. Makalah dengan judul <i>“Duri-HO Control System Integration Throug OSI PI and XHQ Implementation”</i> oleh Ginomgom Simanjuntak. 2. Makalah dengan judul <i>“Trunking Radio & Fiber Optic : A Lesson Learned from SMO SCADA Recloser Pilot Projects”</i> oleh Bobby M Hariandja. pada forum internal Chevron yang bertajuk SCADA/Round table 2013 pada tanggal 24 – 29 Maret 2013 di Bangkok Thailand	Chevron Pacific Indonesia
4	Pengiriman contoh batuan Alas Tua West 1, Alas Tua East dan Kedung Keris 1 Blok Cepu ke ExxonMobil – <i>Upstream Research Center (URC)</i> di Houston, Texas, USA	Mobil Cepu Limited
5	Makalah dengan judul <i>“An Innovative Technique to Eliminate Shoe Track and Maximize Access to Adjacent Target Reservoir to Tubing Shoe for Horizontal Multi-Frac Wells”</i> .	Total E&P Indonesia
6	Makalah dengan judul <i>“Experience, Innovations and Best Practices of Hydraulic Jet Pump (HJP) Application at Remote and Swampy Brown Field in Sembakung Block”</i> .	Medco E&P Indonesia
7	Pengiriman data dari Lapangan Suban Block Corridor PSC Sumatera Selatan ke Kantor LAPI ITB Bandung untuk keperluan Studi Basement Water Injection Lapangan Suban selama Periode Agustus- December 2013.	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
8	Makalah dengan Judul <i>“Integrated Reservoir Characterization and Static Geomodelling of Senoro Field, Senoro-Toili Block, Sulawesi Indonesia”</i> pada acara EAGE PGCE 2013 pada tanggal 18-19 Maret 2013 di Kuala Lumpur Malaysia.	JOB P – Medco E&P Tomori Sulawesi
9	13 makalah untuk dipresentasikan dalam acara Konvensi dan Pameran ke-37 Indonesian Petroleum Association (IPA) pada tanggal 14-16 Mei 2013 di Jakarta Indonesia.	ConocoPhillips Indonesia
10	Makalah dengan judul <i>“Cracking New CBM Potential in South Sumatera: Current Progress, Obstacles and Opportunity”</i> pada acara Konvensi dan Pameran ke-37 Indonesian Petroleum Association (IPA) pada tanggal 14-16 Mei 2013 di Jakarta Indonesia.	Medco E&P Indonesia
11	Pengiriman data G&G Lapangan AAL KKKS AWE (Northwest Natuna) Pte. Ltd ke RPS Energy di Perth, Australia untuk keperluan sertifikasi cadangan	AWE (Northwest Natuna) PTE Ltd.
12	6 makalah untuk dipresentasikan pada <i>“2013 Reservoir Management Forum”</i> di The Woodlands, Texas – Amerika Serikat pada tanggal 14 – 19 April 2013	Chevron Pacific Indonesia
13	5 makalah untuk dipresentasikan pada <i>“2013 Reservoir Management Forum”</i> di The Woodlands, Texas – Amerika Serikat pada tanggal 14 – 19 April 2013	Chevron Indonesia Company
14	Makalah dengan judul <i>“Central Sumatera-West Java Gas Swap Arrangement”</i> oleh Gadang Marpaung pada acara Konvensi dan Pameran ke-37 Indonesian Petroleum Association (IPA) pada tanggal 14-16 Mei 2013 di Jakarta Indonesia.	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.

NO.	IZIN	PENERIMA IZIN
15	Izin pemanfaatan data-data Lapangan Tempino, KKKS PT. Pertamina EP UBEP Jambi untuk keperluan penelitian Tugas Akhir (Tesis) mahasiswa FITB-ITB a.n. Ginanjar Rahmat.	PT. Pertamina EP
16	Makalah dengan judul <i>"Combining Contemporary and Tested Technologies to Achieve Successful Deepwater Extended Reach Completions"</i> pada Forum <i>2013 Offshore Technology Conference</i> pada tanggal 06-09 Mei 2013 di Houston, Texas, Amerika Serikat.	Chevron Indonesia Company
17	Izin Pemanfaatan data untuk kegiatan <i>Reprocessing Seismic 2D</i> dengan metode <i>Multi Dip Reflection Surface</i> (MDRS) area North Sangatta, Kalimantan Timur dan area Nona, Jawa Timur antara PT. Pertamina EP dengan PT. Energi Consulting Indonesia (ECI) / Japan Geoscience Institute.	PT. Pertamina EP
18	Izin pemanfaatan data subsurface Chevron West Papua I & III untuk Studi Regional Indonesia Timur di Pusat Teknologi Chevron Perth, Australia	Chevron West Papua I & III
19	1. Makalah dengan judul <i>"Improve Plug Abandon Process for Slim hole Steam Injector Well in Duri Field, Sumatera, Indonesia"</i> oleh Rahmat Saleh Pulungan. 2. Makalah dengan judul <i>"Lossal W and Lite CRETE Application for Cementing 9-5/8" Casing in Duri Horizontal Well"</i> oleh Yudy Fitryansyah. 3. <i>"Rig Moving Efficiency"</i> oleh Bob Carver pada acara Konferensi Pengeboran dan Kompleksi 2013 di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 13 – 18 Oktober 2013	Chevron Pacific Indonesia
20	Izin pengiriman contoh <i>core</i> lapangan minyak Duri ke laboratorium di Salt Lake City – Amerika Serikat dalam rangka proyek Duri <i>Disposal Coring Analysis</i>	Chevron Pacific Indonesia
21	7 makalah untuk dipresentasikan pada acara <i>"2013 Facility Engineering & CPDEP Forum"</i> di Houston, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 13-17 Oktober 2013.	Chevron Indonesia Company
22	14 makalah untuk dipresentasikan pada acara <i>"2013 Facility Engineering & CPDEP Forum"</i> di Houston, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 13-17 Oktober 2013.	Chevron Pacific Indonesia
23	1. Makalah dengan judul <i>"Managing Diversity in Multicultural Work Environment through E-Colors"</i> oleh Iwan Ardian. 2. Makalah dengan judul <i>"Extending the Life of West Seno Field Utilizing Extended Reach Drilling Technology and Simplified ICD Screen and Well Packer Completions"</i> oleh Ridwan Durachman. 3. <i>"KLO Workover/Wellservice Cost Reduction thru QA/QC Process Improvement"</i> oleh M. Abdunnasir H. pada acara Konferensi Pengeboran dan Kompleksi 2013 di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 13 – 18 Oktober 2013	Chevron Pacific Indonesia
24	Makalah dengan judul <i>"Extend mature Field Life by Drilling & Completing ERD wells with ICD Screens and Swell & Completing ERD wells ICD Screens and Swell Packer"</i> pada forum Beijing 2013 – An API Conference and Exhibition pada tanggal 9 – 12 September 2013 di Beijing, China.	Chevron Indonesia Company
25	1. Makalah dengan judul <i>"Improving Reserves and Production of Bangko Field (Region I) Through Better Reservoir Management – A Case Study to Improve Production from Mature Waterflood"</i> oleh Wandy Hendrawan. 2. Makalah dengan judul <i>"Selection Criteria for Successful Water Shut-Off Treatment – Brown Field Success Story"</i> oleh Dimas Permana. pada forum Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition 2013 pada tanggal 22-24 Oktober 2013 di Jakarta.	Chevron Pacific Indonesia
26	Makalah dengan judul <i>"Sand Management in Tangguh Big Gas Wells"</i> oleh Dean Warnken, Fitria Nila Asri, Ferry Anantokusumo, Randy Lester S dan Obigesto Ichwan pada forum Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition 2013 pada tanggal 22-24 Oktober 2013 di Jakarta.	BP Berau Ltd.
27	Pengiriman <i>core plug</i> , contoh fluida dan data produksi/ <i>reservoir</i> dari kegiatan eksploitasi ke kantor pusat Chevron di Houston, Texas Amerika Serikat untuk keperluan Studi Proyek Injeksi Surfaktan Polymer – Lapangan Minas	Chevron Pacific Indonesia
28	Izin pembukaan dan penggunaan data Blok A PT. Medco E&P Malaka terkait dengan proses farm in/out di Wilayah Kerja Blok A.	Medco E&P Malaka
29	Izin pengiriman data-data teknis G&G ke Kantor DeGolyer and MacNaughton di Amerika Serikat dalam rangka sertifikasi cadangan minyak bumi 2013 di Wilayah Kerja Seram Non Bula.	CITIC Seram Energy Ltd.
30	Poster dengan judul <i>"Artificial Lift Systems: Get the Maximum from your Wells"</i> dengan topic <i>"ESP Application in Low Productivity and High GLR Wells"</i> pada tanggal 24-27 November 2013 di Phuket, Thailand.	Medco E&P Indonesia

NO.	LICENSE	LICENSE RECIPIENT
1	A paper entitled "Incident Command System (ICS) Base Emergency Management" by Yong Ardinal at International HSE Seminar: Safety Leadership, Disaster & Crisis Management 2013 on 26-27 March 2013 in University of Indonesia	Chevron Pacific Indonesia
2	1. A paper entitled "Real-time facility optimization (RTFO) of heavy oil steam flood, steam generation, distribution and injection with fleet management" by Teguh Handjojo D 2. A paper entitled "Enterprise upstream data visualization optimization in IBU" by Hasballah 3. "Heterogeneous implementation of a huge real time data historian" by Endang A D Nasution at Chevron internal forum entitled SCADA/Round table 2013 on 24-29 March 2013 in Bangkok, Thailand	Chevron Pacific Indonesia
3	1. A paper entitled "Duri-HO control system integration through OSI PI and XHQ implementation" by Ginomgom Simajuntak 2. A paper entitled "Trunking radio and fiber optic: a lesson learned from SMO SCADA recloser pilot projects" by Bobby M Hariandja at Chevron internal forum entitled SCADA/Round table 2013 on 24-29 March 2013 in Bangkok, Thailand	Chevron Pacific Indonesia
4	The delivery of rock example of Alas Tua West 1, Alas Tua East and Kedung Keris 1 Cepu Block to ExxonMobil-Upstream Research Center (URC) in Houston, Texas, USA	Mobil Cepu Limited
5	A paper entitled "An innovative technique to eliminate shoe track and maximize access to adjacent target reservoir to tubbing shoe for horizontal multi-frac wells"	Total E&P Indonesia
6	A paper entitled "Experience, innovations and best practices of hydraulic jet pump (HJP) application at remote and swampy brown field in Sembakung Block"	Medco E&P Indonesia
7	Data delivery from Suban Block Corridor PSC South Sumatera to LAPI ITB Bandung for Basement water injection study in Suban Field for the period of August – December 2013	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
8	A paper entitled "Integrated reservoir characterization and static geomodelling of Senoro field, Senoro-Toili Block, Selawesi Indonesia" at EAGE PGCE 2013 on 18-19 March 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia	JOB P – Medco E&P Tomori Sulawesi
9	Thirteen (13) papers to be presented at the 37 th IPA convention and exhibition on 14-16 May 2013 in Jakarta, Indonesia	ConocoPhillips Indonesia
10	A paper entitled "Cracking New CBM Potential in South Sumatera: Current Progress, Obstacles and Opportunity at the 37th IPA Convention and Exhibition on 14-16 May 2013 in Jakarta Indonesia	Medco E&P Indonesia
11	G&G data delivery of AAL KKKS AWE field (Northwest Natuna) Pte. Ltd to RPS Energy in Perth Australia for reserve certification	AWE (Northwest Natuna) PTE Ltd.
12	Six (6) papers to be presented at "2013 Reservoir Management Forum" in The Woodlands, Texas, USA on 14-19 April 2013	Chevron Pacific Indonesia
13	Five (5) papers to be presented at "2013 Reservoir Management Forum" in the Woodlands, Texas USA on 14-19 April 2013	Chevron Indonesia Company
14	A paper entitled "Central Sumatera-West Java Gas Swap Arrangement" by Gadang Marpaung at the 37th IPA Convention and Exhibition on 14-16 May 2013 in Jakarta, Indonesia	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
15	The license of data utilization of Tempino field, KKKS PT Pertamina EP UBEP Jambi for the purpose of thesis by the student of FITB-ITB named Ginanjar Rahmat	PT. Pertamina EP
16	A paper entitled "Combining Contemporary and Tested Technologies to Achieve Successful Deepwater Extended Reach Completions" at 2013 Offshore Technology Conference on 6-9 May 2013 in Houston, Texas USA	Chevron Indonesia Company
17	Data utilization license of 2D seismic reprocessing with multi dip reflection surface (MDRS) method of North Sangatta area, East Kalimantan and Nona area, Esat Java between PT Pertamina EP and PT Energi Consulting Indonesia (ECI)/Japan Geoscience Institute	PT. Pertamina EP
18	Data utilization license of Chevron West Papua I&II sub surface for East Indonesia Regional Study at Chevron Technology Center in Perth, Australia	Chevron West Papua I & II
19	1. A paper entitled "Improve plug abandon process for slim hole steam injector well in Duri Field, Sumatera, Indonesia" by Rahmat Saleh Pulungan 2. A paper entitled "Lossal W and Lite CRETE Application for Cementing 9-5/8" casing in Duri Horizontal Well" by Yudy Fitriyansyah 3. "Rig Moving Efficiency" by Bob Carver at the Drilling and Completion Conference 2013 in Cape Town, South Africa on 13-18 October 2013	Chevron Pacific Indonesia

NO.	LICENSE	LICENSE RECIPIENT
20	License for core example delivery from Duri Field to laboratory in Salt Lake City USA for Duri Disposal Coring Analysis project	Chevron Pacific Indonesia
21	Seven (7) papers to be presented at "2013 facility Engineering & CPDEP Forum" in Houston, Texas, USA on 13-17 October 2013	Chevron Indonesia Company
22	Fourteen (14) papers to be presented at "2013 facility Engineering & CPDEP Forum" in Houston, Texas, USA on 13-17 October 2013	Chevron Pacific Indonesia
23	1. A paper entitled "Managing Diversity in Multicultural Work Environment through E-Colors" by Iwan Ardian 2. A paper entitled "Extending the life of West Seno field Extended Reach Drilling Technology and Simplified ICD Screen and Well Packer Completion" by Ridwan Durachman 3. "KLO Worover/wellservice Cost Reduction thru QA/QC process improvement" by M. Abdunnasir H at the 2013 Drilling and Completion Conference in Cape Town, South Africa on 13-18 October 2013	Chevron Pacific Indonesia
24	A paper entitled "Extend mature field life by drilling and completing ERD wells with ICD screens and swell & completing ERD wells ICD screens and swell packer" at 2013 Beijing Forum-API Conference and Exhibition on 9-12 September 2013 in Beijing, china	Chevron Indonesia Company
25	1. A paper entitled "Improving reserves and production of bangko field (Region I) through better reservoir management-a case study to improve production from mature waterflood" by Wandy Hendrawan 2. A paper entitled "Selection Criteria for successful water shut off treatment-Brown Field Success story" by Dimas Permana at Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition 2013 on 22-24 October 2013 in Jakarta	Chevron Pacific Indonesia
26	A paper entitled "Sand Management in Tangguh Big Gas Wells" by Dean Warnken, Fitria Nila Asri, Ferry Anantokusumo, Randy Lester S and Obigesto Ichwan at Asia Pacific Oil and gas Conference and Exhibition 2013 on 22-24 October 2013 in Jakarta	BP Berau Ltd.
27	Core plug delivery, fluid example and production/reservoir data from exploitation activity to Chevron head quarter in Houston, Texas USA for the purpose of polymer surfactant injection project study in Minas field	Chevron Pacific Indonesia
28	The license of data utilization of Blok A Pt Medco E&P Malaka in farm in/out process in Block A Working Area	Medco E&P Malaka
29	G&G technical data delivery to DeGolyer and MacNaughton office in USA for 2013 oil reserve certification in Seram Non Bula working area	CITIC Seram Energy Ltd.
30	A poster entitled "Artificial Lift Systems: Get the maximum from your wells" with the topic of "ESP Application in Low Productivity and High GLR Wells" on 24-27 November 2013 in Phuket, Thailand	Medco E&P Indonesia



PENGEMBANGAN HULU MIGAS OIL AND GAS UPSTREAM DEVELOPMENT

1. Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (Plant of Development/POD I) Survei Seismik 2D dan 3D

Pada tahun 2013 terdapat 4 KKKS yang telah mengajukan permohonan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

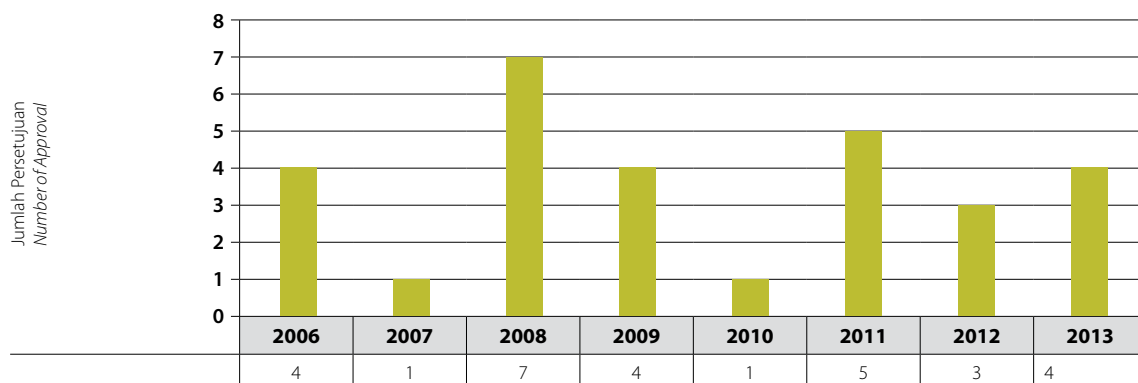
1. First Plant of Development (POD I) of 2D and 3D Seismic Survey

In 2013, four Contractors of cooperation Contract have submitted the proposals of POD I to Minister of Energy and Mineral Resources through SKK Migas. The proposals have been approved by the Minister.

NO	KONTRAKTOR CONTRACTOR	JENIS POD TYPE OF POD	LAPANGAN FIELD	WILAYAH KERJA WORKING AREA
1	PT. Medco E&P Bengara	Pertama	Lapangan South Sebuku	Wilayah Kerja Bengara-I
2	PT Tropik Energi Pandan.	Pertama	Lapangan Ario Damar-Sriwijaya	Pandan
3	Petronas Carigali Muriah Ltd.	Pertama	Lapangan Sungai Anggur	Belida
4	Komerling PT Tiara Bumi Petroleum	Pertama	Lapangan Sampoerna	West Air Komerling

Grafik Persetujuan POD I 2008-2013

Graphic of POD I Approval in 2008-2013



Manfaat dari Persetujuan POD I

Dari penandatanganan persetujuan POD I pada tahun 2013 tersebut didapatkan beberapa manfaat diantaranya :

1. Meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.
2. Meningkatkan pendapatan Negara melalui hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara
3. Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri untuk menunjang kebutuhan energi bagi industri sehingga dapat memajukan sektor industri dan pertumbuhan ekonomi.
4. Terserapnya tenaga kerja dalam negeri yang optimal.

Perpanjangan Kontrak

Sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan

Benefit of POD I Approval

The POD I approval signing in 2013 gives the benefits as follow:

1. Increasing oil and gas production
2. Increasing the state revenue from state oil and gas sales
3. Supplying domestic oil and gas demand to meet the industry's energy demand in the effort to promote industry and economy growth.
4. Optimizing domestic worker empowerment

Contract extension

Article 14 Paragraph 2 of Oil and gas Law Number 22 Year 2001 states that Business Entity and Permanent Business

perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada tahun 2013 telah di keluarkan Keputusan Menteri ESDM terkait pengelolaan Wilayah Kerja yang habis masa Kontraknya sebanyak 3 Wilayah Kerja yaitu:

- Perpanjangan Kontrak Wilayah Kerja Muriah, KKKS Petronas Carigali Muriah Ltd.
- Pengakhiran Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Siak KKKS Chevron Siak Inc. untuk pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina
- Pengakhiran Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Central Sumatera Kampar Area pengelolaan sementara oleh KKKS Medco E&P Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait KKKS yang telah mendapatkan Keputusan Perpanjangan Kontrak atau Pengakhiran Kontrak Kerja Sama pada tahun 2013

Entity may propose contract extension up to 20 years.

In 2013, a Minister of Energy and Mineral Resources Decree concerning the operation of working areas with expired contract was issued. The details are:

- The extension of Muriah Working Area cooperation contract with Petronas Carigali Muriah Ltd. as the contractor*
- The termination of Siak Working Area cooperation contract with Chevron Siak Inc as contractor and Pertamina as operator.*
- The termination of Central Sumatera Kampar Area working area cooperation contract with Medco E&P Indonesia as the temporary contractor.*

This table shows the information regarding the contractor of cooperation contract obtaining the approval of contract extension or contract termination in 2013

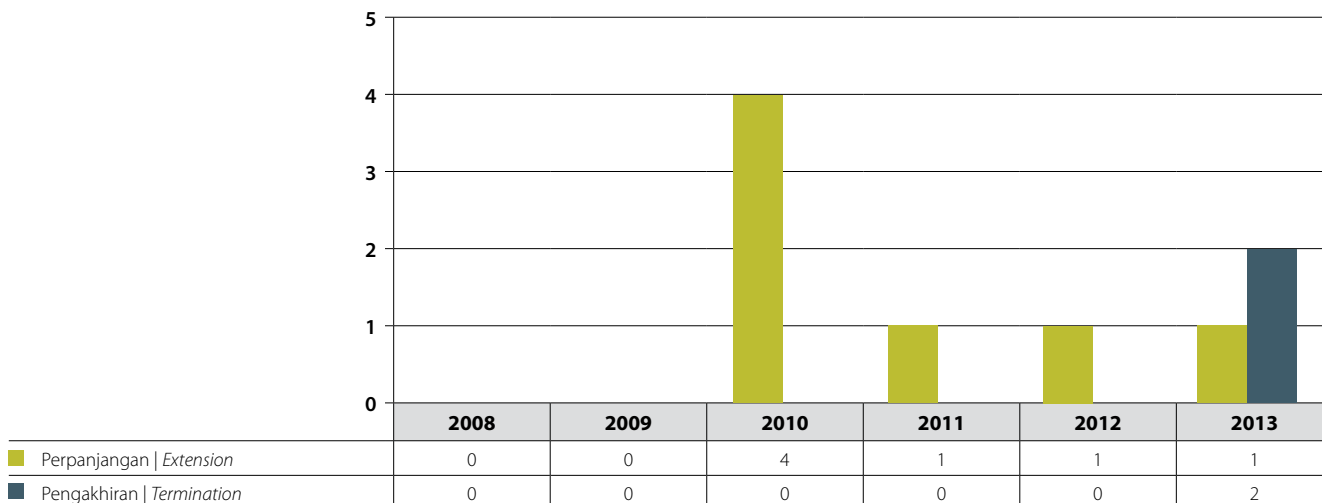
KKKS Yang Telah Mendapatkan Persetujuan Perpanjangan/Pengakhiran Kontrak Tahun 2013

Contractor of Cooperation Contract with Approved Contract Extension/Termination in 2013

No.	KKKS Contractor	Wilayah Kerja Working Area	Status Kontrak Contract Status
1	Petronas Carigali Muriah Ltd.	Muriah	Perpanjangan Extension
2	Chevron Siak Inc.	Siak	Tidak Diperpanjang Termination
3	Medco E&P Indonesia	Central Sumatera Kampar Area	Tidak Diperpanjang Termination

Berikut Grafik Perpanjangan Kontrak dari tahun 2008-2013

This graphic shows contract extension from 2008 to 2013.



5. Participating Interest (PI) 10%

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Pasal 34 menyebutkan bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini merupakan kelanjutan dari persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali diproduksi.

Pada tahun 2013 terdapat 8 KKKS yang telah siap ditawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada BUMD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Wilayah Kerja tersebut berada. Dari 8 usulan penawaran Participating Interest tersebut semua belum mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM hal ini disebabkan karena belum mendapatkan kesepakatan antar BUMD.

Dari ke 8 usulan penawaran PI tersebut adalah sebagai berikut :

NO	LAPANGAN FIELD	WILAYAH KERJA WORKING AREA	KKKS CONTRACTOR
1	Bukit Tua	Ketapang	Petronas Carigali (Ketapang) Ltd.
2	Ruby	Sebuku	PearlOil (Sebuku) Ltd
3	Abadi,	Masela	Inpex Masela Ltd
4	Ande-Ande Lumut	North West Natuna	Genting Oil Natuna Pte. Ltd.
5	Jangkrik	Muara Bakau	Eni Muara Bakau B.V.
6	Jambu Aye Utara	Krueng Mane	Eni Krueng Mane Ltd.
7	Karendan	Bengkanai	Elnusa Bengkanai Energi Ltd.
8	Sungai Anggur	Kerja Belida	PT Seleraya Belida.

6. Persetujuan Harga Gas

Gas bumi mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai sumber energi, bahan baku dan sebagai sumber penerimaan dan devisa negara. Sebagai sumber penerimaan dan devisa negara, gas bumi telah memberikan kontribusi yang cukup berarti setiap tahunnya yang diperoleh baik dari ekspor LNG ke luar negeri maupun pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Mengingat pentingnya peranan gas bumi di dalam pembangunan nasional, maka pengusahaan gas bumi akan terus dikembangkan dengan mempertimbangkan azas manfaat yaitu pengusahaannya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengingat gas bumi merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka harga gas bumi dari suatu lapangan gas bumi harus ditetapkan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

5. Participating Interest (PI) 10%

Based on Article 34 of the Government Regulation Number 35 Year 2004, contractor is obliged to offer its 10% participating interest to the Local Owned Enterprise after the approval of POD I. It is the follow up of the Minister approval on POD I.

In 2013, eight Contractors of Cooperation Contract were ready to offer the 10% PI to Local Owned Enterprise in the local Province/Regency/City where the working area is located. These eight PI offers are not yet approved by Minister of Energy and Mineral Resources since the agreement between the Local Owned Enterprises is not yet achieved.

The eight PI offers are as follow:

6. Gas Price Approval

Gas plays an important role in national development as the energy sources, raw material, and state income sources. As the state income sources, gas has given significant contribution each year both from LNG export and gas for domestic utilization. Considering the gas role in national development, gas utilization is developed based on benefit principle in which its utilization is for the sake of people's welfare.

Based on the fact that gas is natural resources controlled by the state and utilized for the people's welfare and based on the regulations, gas price from a gas field is determined by the government through Minister of Energy and Mineral Resources Decree Letter.

Pengembangan lapangan gas bumi memiliki perbedaan dengan pengembangan lapangan minyak bumi. Perbedaan tersebut adalah lapangan minyak bumi dapat segera dikembangkan setelah lapangan tersebut dianggap memiliki komersialitas dan rencana pengembangan lapangan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemerintah tanpa melihat adanya konsumen yang akan memanfaatkan minyak bumi tersebut. Sedangkan untuk lapangan gas bumi, pengembangan lapangan tersebut baru dapat dilakukan apabila sudah ada konsumen gas bumi yang terikat dalam suatu kontrak jual beli gas bumi yang biasanya meliputi periode kontrak yang cukup panjang seperti 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau bahkan 30 tahun. Didalam kontrak jual beli gas bumi tersebut telah termuat harga dan volume gas bumi yang akan berlaku selama periode kontrak.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2011 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004, yang antara lain mengatur bahwa Pemerintah saat ini memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan potensi dalam negeri. Oleh karenanya Pemerintah Cq. Kementerian ESDM tetap memegang prinsip bahwa pada dasarnya pemanfaatan gas bumi diprioritaskan seoptimal mungkin untuk penggunaan dalam negeri, dan hanya dimungkinkan untuk penggunaan lain (termasuk ekspor) apabila kebutuhan dalam negeri tidak dapat menyerap. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kebutuhan dalam negeri adalah kebutuhan dari pasar sumber gas yang bersangkutan (yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan).

Pada tahun 2013 ini telah ditanda tangani sebanyak 7 persetujuan Harga Gas. Dari 7 persetujuan yang dikeluarkan tersebut, 4 diantaranya merupakan persetujuan harga untuk kebutuhan gas dalam negeri dan 3 diantaranya merupakan persetujuan harga gas ekspor.

Tabel berikut menunjukkan jumlah persetujuan harga gas per sektor.

The development of gas field is different with the development of oil field. The oil field is able to be developed after the commercialization and the POD is approved by the government without considering the consumer that will utilize the gas. Meanwhile, gas field is developed after the consumer has signed the long term gas selling purchase contract for the period of 10 years, 15 years, 20 years, or 30 years. The gas selling purchase contract regulates the gas price and volume for the period of the contract.

Based on Law Number 22 Year 2011 Jo Government Regulation Number 35 Year 2004, the government is prioritizing the gas utilization for domestic demand. Thus, the government cq Ministry of Energy and Mineral Resources holds the principle that the gas utilization is prioritized optimally for domestic demand. The gas possible to be export provided that the domestic demand is not able to utilize it. In this case, the domestic demand is the demand from the related gas resources market that technically and economically is possible.

In 2013, seven gas price approvals were signed in which four of them are domestic gas price approvals and three of them are exported gas price approvals.

The following table shows the number of approved gas price per sector.

Persetujuan Harga Gas MESDM Gas Price Approval by Minister of Energy and Mineral Resources	
Industri <i>Industry</i>	1
Listrik <i>Electricity</i>	1
PGN	1
Ekspor <i>Export</i>	4

Jumlah Persetujuan Harga Gas di tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah pengajuan permohonan persetujuan harga gas yang diajukan oleh SK Migas kepada Menteri ESDM pada tahun 2013 juga menurun dari tahun sebelumnya berjumlah 13 persetujuan.

The number of gas price approval in 2013 is declining compared to the previous year since the gas price approval proposal from SKK Migas to Minister of Energy and Mineral Resources in 2013 is declining compared to the previous year with 13 proposals.

Berikut adalah jumlah permohonan persetujuan harga gas yang telah disetujui oleh Menteri ESDM pada tahun 2013.

The table shows the number of gas price proposal approved by Minister of Energy and Mineral Resources in 2013

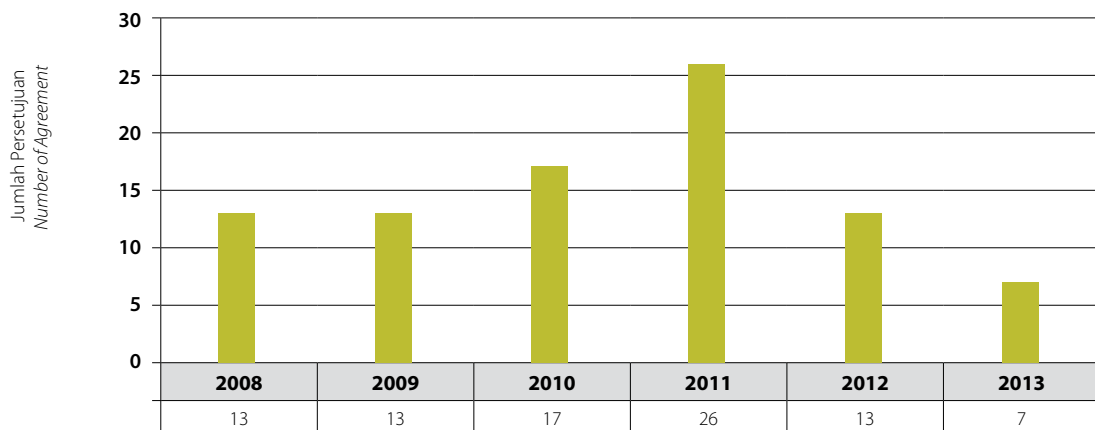
No.	KONSUMEN CONSUMER	SUMBER GAS GAS SOURCES
1	KOGAS	LNG Tangguh
2	Kansai Electric Power Co. Inc.	LNG Tangguh
3	PT. PIM	LNG Tangguh
4	PT. PGN (Persero)	Santos (Madura Offshore) Pty Ltd.
5	Kyusu dan TEPCO	PC Madura Ltd.
6	PT. PLN	PT Petrogas Pantai Madura
7	TEPCO	LNG Tangguh
6	PT. PLN	LNG Tangguh
7	TEPCO	LNG Tangguh

Grafik berikut menunjukkan jumlah persetujuan harga gas yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2008.

The graphic shows the number of gas price approvals issued by Minister of Energy and Mineral Resources since 2008.

Persetujuan Harga Gas Bumi 2008 - 2013

Natural Gas Prices Agreement 2008 - 2013



Dari penandatanganan persetujuan harga gas 2013 tersebut didapatkan beberapa manfaat diantaranya :

The benefits of the gas price approval signing in 2013 are:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya kebutuhan gas bahan bakar pembangkit listrik untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat di daerah sekitarnya 2. Terpenuhinya kebutuhan gas bumi untuk mendukung kegiatan operasi di lapangan dalam memproduksi minyak bumi. 3. Terpenuhinya kebutuhan gas bumi untuk menunjang kebutuhan energi bagi industri sehingga mengakibatkan kemajuan sektor industri dan pertumbuhan ekonomi 4. Terpenuhinya kebutuhan gas rumah tangga dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. 5. Terpenuhinya kebutuhan gas bumi Industri pupuk untuk mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Providing gas fuel for power plant to provide electricity for local people. 2. Providing gas to support operation in the field to produce oil 3. Providing gas to support energy for industry in the effort to develop industry and economy growth. 4. Providing gas for households with affordable price and accessibility. 5. Providing gas for fertilizer industry to provide fertilizer for people. |
|---|--|

6. Termanfaatkannya Produksi gas dari lapangan-lapangan yang memproduksi gas bumi
7. Meningkatnya pendapatan negara melalui hasil penjualan gas bumi bagian negara
8. Terserapnya tenaga kerja dalam negeri yang optimal

7. TUMPANG TINDIH LAHAN

Sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi dapat digunakan untuk kegiatan selain eksplorasi dan eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapat rekomendasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat.

Pada tahun 2013 terdapat tujuh (7) kuasa pertambangan yang telah mengajukan permohonan rekomendasi penggunaan lahan migas untuk kegiatan batubara. Namun dari ke tujuh pemohon tersebut baru empat (4) yang telah mendapat rekomendasi persetujuan. Adapun tiga (3) pemohon ijin rekomendasi lainnya belum mendapat ijin rekomendasi karena kurang persyaratan administrasi. Sedang ke empat pemohon ijin rekomendasi penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

6. Utilizing gas production from the producing fields.
7. Increasing the state revenue from gas sales.
8. Optimizing domestic worker empowerment.

7. LAND OVERLAPPING

Based on Article 33 Paragraph 2 of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001, the rights on working area does not include the rights of the surface. Besides that, Article 68 Paragraph 1 of the Government Regulation Number 35 Year 2004 concerning upstream business states that the contractor working area which is not yet utilized for exploration and exploitation is allowed to be utilized for activities other than exploration and exploitation by other party after obtaining the recommendation from Minister of Energy and Mineral Resources and acquiring the license from the local government.

In 2013, seven mining working contracts have proposed recommendation to use oil and gas land for coal business. From the seven proposals, four of them have obtained the recommendation, while the other three have not obtained the recommendation due to incomplete administration requirements. The four proposals which obtained the recommendation are:



REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MIGAS UNTUK KEGIATAN LAINNYA

Recommendation to use oil and gas working area for other activity

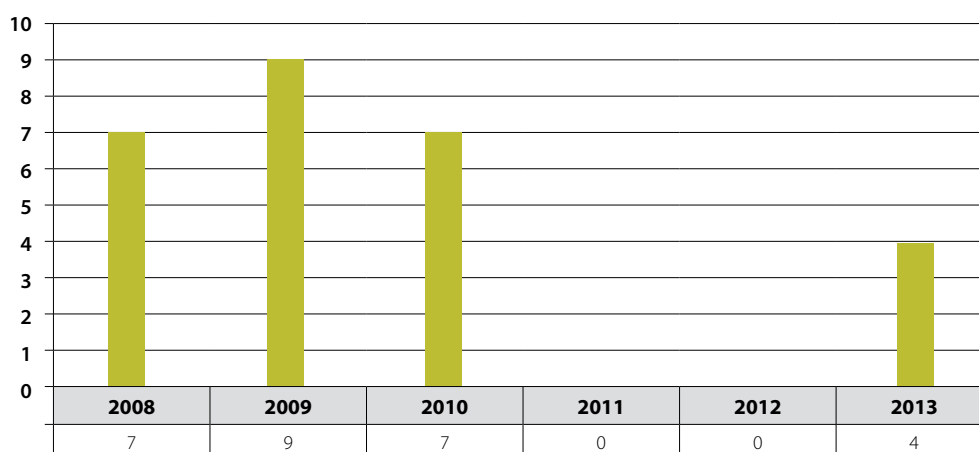
No.	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA CONTRACTOR OF COOPERATION CONTRACT	PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINING COMPANY	STATUS
1	VICO Blok Sangasanga PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan Tarakan	PT. Binamitra Sumberarta	selesai <i>accomplished</i>
2	VICO Indonesia Blok Sangasanga	CV. Padang Bara Abadi	selesai <i>accomplished</i>
3	VICO Indonesia Blok Sangasanga	CV. Rizki Jabal Bara	selesai <i>accomplished</i>
4	VICO Indonesia Blok Sangasanga	CV. Rahmat Prima Coal	selesai <i>accomplished</i>

Jumlah Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas Untuk Kegiatan Lainnya di tahun ini relatif meningkat dibandingkan dengan jumlah Rekomendasi dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Grafik berikut menunjukkan jumlah Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas Untuk Kegiatan Lainnya yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak beberapa tahun sebelumnya.

The number of recommendations for the use of oil and gas land for other activity is relatively increasing compared to the number of same recommendation in the previous year. This graphic shows the number of recommendation for the use of oil and gas land for other activity issued by Directorate General of Oil and Gas on behalf of Minister of Energy and Mineral Resources in the previous years.

Grafik Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Lainnya, Tahun 2008-2013

Graphic of Recommendations on Oil and Gas Land Use for Other Activity in 2008 to 2013.



Sedangkan dua pemohon yang belum mendapat rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral adalah:

The other two proposals which have not obtained the recommendation from Minister of Energy and Mineral Resources are:

No.	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA CONTRACTORS OF COOPERATION CONTRACT	PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINING COMPANY	KETERANGAN DESCRIPTION
1	VICO Blok Sangasanga , PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga dan Tarakan	CV. Arwana Prima Coal	Dalam proses <i>In the process</i>
2	VICO Indonesia Blok Sangasanga	CV. Rahmat Prima Coal	VICO Indonesia Blok Sangasanga, Pertamina Aset V
3	VICO Indonesia Blok Sangasanga	CV. Bumi Etam Bebaya	Dalam proses <i>In the process</i>



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2013





05

BAB
CHAPTER

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

***Directorate of Oil and Gas
Downstream Business Development***

Niaga Migas
Oil and Gas Trade and Commerce

Pengolahan Migas
Oil and Gas Processing

Pengangkutan Migas
Oil and Gas Transportation

Penyimpanan Migas
Oil and Gas Storage

Harga dan Subsidi
Oil and Gas Price and Subsidy

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**

NIAGA MIGAS OIL AND GAS TRADE AND COMMERCE

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas, kegiatan usaha hilir migas di Indonesia terbuka lebar bagi pihak swasta. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai regulator dan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan, mengeluarkan izin usaha bagi Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan hilir migas sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 tentang tatacara perizinan usaha hilir migas. Jumlah izin usaha niaga migas selalu bertambah setiap tahun sejak dibukanya peluang usaha hilir migas. Terlebih setelah munculnya ide untuk pembatasan BBM Bersubsidi.

Selain daripada pembinaan, pengawasan, dan pengaturan dari Badan Usaha Niaga Migas, Ditjen Migas juga bertugas dalam pemrosesan rekomendasi izin impor/ekspor migas yang mendukung kegiatan usaha hilir migas sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 Tahun 2009. Rekomendasi ini dikeluarkan sebagai acuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan izin impor/ekspor.

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas yang melakukan impor dan ekspor Migas adalah sebagai berikut:

Since the stipulation of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas and Government Regulation Number 36 Year 2004 on oil and gas downstream business activity, the oil and gas downstream business in Indonesia is widely opened for private sector. Thus, the government as regulator in its function to supervise and monitor issues the license for business entity that will conduct oil and gas downstream business based on Minister of Energy and mineral Resources Regulation Number 0007 Year 2005 concerning oil and gas downstream business license. The oil and gas business license in increasing each year since the downstream sector is open for private sector. It is also supported by the idea of reducing the subsidized oil fuel.

Beside conducting the monitoring, supervision, and arrangement of oil and gas trade business, Directorate General of oil and Gas also has the duty to proceed the recommendation of oil and gas import or export license that supports the oil and gas downstream business based on Minister of Energy and Mineral resources Regulation Number 0007 Year 2005 and Minister of Trade Regulation Number 42 Year 2009. The recommendation is issued as the reference from Ministry of Trade in issuing the import or export license.

The business entity with oil and gas trade business license conducting the oil and gas import and export are as follow:

PT Pertamina (Persero)	PT Yavindo Sumber Persada	PT Baria Bulk Terminal
PT AKR Corporindo	PT Solar Premium Central	PT Petrochina International
PT Petro Andalan Nusantara	PT Cosmic Pekanbaru	PT Apex Indopacific
PT Shell Indonesia	PT Prayasa Sarana Indomitra	PT Kuda Laut Sejahtera
PT Total Oil Indonesia	PT Pertamina Patra Niaga	PT Petro Energi Nusantara
PT Jasatama Petroindo	PT Jagad Energy	PT Laban Raya Samodra
PT Medco Sarana Kalibaru	PT Kutilang Paksi Mas	PT Mega Energi Service
PT Petronas Niaga Indonesia	PT Solaris Prima Energy	PT Anayaka Persada
PT Cosmic Indonesia	PT Sunrise Sunset	PT Lautan Luas
PT Petro Energy	PT Solaris Prima Energi	PT Bahari Berkah Madani

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang melakukan impor dan ekspor Migas adalah PT Tri Wahana Universal. Selain daripada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga dan Penyimpanan, Badan Usaha Lain juga dapat melakukan impor produk migas untuk keperluan sendiri sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 42 Tahun 2009.

The Business Entity with Oil and Gas Processing License which is conducting the oil and gas import and export is PT Tri Wahana Universal. Besides Business Entity with Trade and Storage License, other business entity may also import oil and gas product for its own consumption based on Minister of Trade Regulation Number 42 Year 2009.

Sehubungan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain, dalam permohonan rekomendasi impor BBM, Ditjen Migas telah menambahkan persyaratan untuk melampirkan bukti pembelian BBN yang akan dicampurkan ke dalam BBM yang akan diimpor dari Total BBM yang diimpor sesuai persentase yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut.

Related to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 25 Year 2013 concerning the Amendment of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 32 Year 2008 on the Supply, Utilization, and Trade of Biofuel as Alternative Fuel, Directorate General of Oil and Gas adds a requirement to attach biofuel purchase bill in its oil fuel import recommendation proposal in which the biofuel will be mixed to imported oil fuel from the total imported oil fuel based on the percentage as regulated in the attachment of this Minister Regulation.

Untuk Permohonan Rekomendasi Ekspor Kondensat telah dibentuk Tim Optimalisasi Pemanfaatan Kondensat sesuai SK Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian sebagai dasar persetujuan rekomendasi ekspor Kondensat.

To set the Application of Export Recommendations for Condensate, Team of Condensate Utilization and Optimization was formed in accordance to Decree of the Director General of Industrial Manufacturing Base, Ministry of Industry, as the basic Condensate export approval recommendation.

Untuk Permohonan rekomendasi Ekspor BBM ke Timor Leste khususnya BBM jenis Minyak Bensin RON 88, Minyak Solar dan Minyak Tanah untuk sementara ini sejak Triwulan I/2013 belum diberikan kepada PT Pertamina (Persero) karena belum adanya kesepakatan pihak-pihak terkait mengenai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

The proposal of oil fuel export recommendation to Timor Leste especially oil fuel of RON 88, diesel fuel, and kerosene since the first quarter of 2013 is not yet given to PT Pertamina (Persero) because the agreement between related parties is not yet achieved especially which relates to Presidential Regulation Number 15 Year 2012 on retail price and consumer of particular oil fuel.

Jumlah Izin Usaha Niaga Migas yang dikeluarkan (2002-2013)

Number of license of oil and gas trade issued in 2002 to 2013

Status : Des 2013

No	Jenis Kegiatan Activity	2002-2012	2013	Total
Minyak Bumi Oil				
1	Niaga Umum BBM <i>Oil Fuel General Trade</i>	91	8	99
2	Niaga Terbatas BBM <i>Oil Fuel Limited Trade</i>	116	3	119
3	Niaga Terbatas Minyak Bumi <i>Oil Limited Trade</i>	3	0	3
4	Niaga Umum Minyak Bumi <i>Oil General Trade</i>	1	0	1
5	Niaga Terbatas Recovered Oil <i>Recovered Oil Limited Trade</i>	2	0	2
6	Niaga Umum Hasil Olahan Minyak Bumi <i>Processed Oil General Trade</i>	2	0	2
7	Niaga Terbatas Hasil Olahan Minyak Bumi <i>Processed Oil Limited Trade</i>	6	0	6
Jumlah Total		221	11	232
Gas Bumi Gas				
1	Niaga Gas Bumi Melalui Pipa <i>Gas through pipeline trade</i>	32	1	33
2	Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (<i>Dedicated Hilir</i>) <i>Gas through pipeline Trade (downstream dedicated)</i>	23	8	31
3	Niaga LPG <i>LPG Trade</i>	9	0	9

No	Jenis Kegiatan Activity	2002-2012	2013	Total
4	Niaga Umum BBG Gas as Fuel Trade	6	0	6
5	Niaga CNG CNG Trade	13	5	18
6	Niaga Umum Hasil Olahan Gas Bumi Processed Gas General Trade	1	0	1
7	Niaga Terbatas Hasil Olahan Gas Bumi Processed Gas limited Trade	11	0	11
Jumlah Total		95	14	109
Total Niaga Migas Total of Oil and Gas Trade		316	25	341

Rincian Penggunaan BBM di Indonesia pada tahun 2013

The Oil Fuel Consumption in Indonesia in 2013

No	Jenis Type	Jumlah Total	KL/hari KL/day
1	M. Solar Diesel Fuel	34.047.721,49	93.281,43
2	M. Bensin 88 Gasoline 88	29.501.772,68	80.826,77
3	M. Bensin 92 Gasoline 92	850.407,88	2.329,88
4	M. Bensin 95 Gasoline 95	158.714,24	434,83
5	M. Tanah Kerosene	1.260.489,96	3.453,40
6	M. Bakar Fuel Oil	1.973.903,41	5.407,95
7	M. Diesel Diesel Oil	79.136,62	216,81
8	M. Bensin 100 Gasoline 100	40,60	0,11
9	Avtur	4.159.010,01	11.394,55
10	Avgas	2.868,20	7,86
TOTAL		72.034.065,08	197.353,60

*Data unaudit

Konsumsi BBM Indonesia pada Tahun 2013 sejumlah 72,03 juta KL, menurun 200 ribu KL dari tahun sebelumnya. Di sisi lain impor BBM di Indonesia tahun 2013 sejumlah 32,69 juta KL meningkat 700 ribu KL dari tahun sebelumnya. Salah satu yang mempengaruhi penurunan jumlah konsumsi BBM adalah penurunan konsumsi minyak bakar yang mencapai 1,45 juta KL karena beberapa pembangkit listrik sudah beralih sumber bahan bakar. Namun produk BBM lain mengalami peningkatan konsumsi dan sebagian besar minyak bakar yang dipakai di Indonesia adalah produksi kilang dalam negeri sehingga impor BBM tetap meningkat.

Indonesia oil fuel consumption in 2013 is 72.03 million KL. It decreased 200 thousand KL from the previous year. On the other hand, the oil fuel import in Indonesia in 2013 is 32.69 million KL. It increased 700 thousand KL from the previous year. One of the factors which influence the decrease of oil fuel consumption is the use of other alternative energy in several power plants which amounted 1.45 million KL. However, the consumption of other oil fuel product is increasing in which most of the consumed oil fuel in Indonesia is the product of domestic refinery. Thus, the oil fuel import is increasing.

Rincian impor BBM Indonesia pada Tahun 2013

Indonesia oil fuel import in 2013

No	Jenis Type	Total	KL/hari KL/Day
1	M. Solar <i>Diesel Fuel</i>	11.946.708,18	32.730,71
2	M. Bensin 88 <i>Gasoline 88</i>	18.340.067,61	50.246,76
3	M. Bensin 92 <i>Gasoline 92</i>	268.143,05	734,64
4	M. Bensin 95 <i>Gasoline 95</i>	59.933,00	164,20
5	M. Tanah <i>Kerosene</i>	-	-
6	M. Bakar <i>Fuel Oil</i>	106.749,47	292,46
7	M. Diesel <i>Diesel Oil</i>	6.343,71	17,38
8	Avtur	947.757,04	2.596,59
9	Avgas	2.245,72	6,15
10	HOMC 92	1.014.694,99	2.779,99
11	HOMC 95	-	-
TOTAL		32.692.642,77	89.568,88

*Data unaudit

Pada September 2013 juga Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) ke dalam BBM yang diniagakan. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM juga harus mematuhi peraturan tersebut. Pada tahun 2013 secara keseluruhan, dari laporan Badan Usaha yang diterima oleh Ditjen Migas, jumlah *Fatty Acid Methyl Esther* (FAME) yang dicampurkan ke minyak solar adalah sejumlah 94,25 ribu KL atau baru 3,49 % dari jumlah minyak solar yang diniagakan. Salah satu penyebab masih rendahnya pencampuran ini adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan fasilitas dan mensosialisasikan penggunaan BBM yang telah tercampur BBN kepada konsumennya masing-masing. Juga karena keterbatasan pemasok BBN untuk daerah Timur Indonesia. Diharapkan pada tahun 2014, konsumsi BBN akan meningkat sesuai yang tercantum pada peraturan yang telah ditetapkan. Pencampuran BBN yang telah dilakukan baru sebatas pada pencampuran pada minyak solar. Untuk minyak bensin (kecuali PSO untuk daerah tertentu) dan minyak bakar belum dilakukan pada tahun 2013.

In September 2013, Ministry of Energy and Mineral Resources issued a policy of biofuel mixture to oil fuel. The business entity with oil fuel trade license should obey this policy. The report from the business entity to Directorate General of Oil and Gas in 2013 shows that the number of Fatty Acid Methyl Esther (FAME) mixed to diesel fuel is 94.25 thousand KL or about 3.49% from the total traded diesel fuel. One of the factors that cause the low percentage of this mixture is that the business entity requires more time to prepare the facility and to socialize the use of oil fuel mixed with biofuel to the consumer. Another factor is the lack of biofuel supplier to the eastern Indonesia. It is expected that in 2014, the biofuel consumption will increase as mentioned in the regulation. The biofuel mixture has been implemented to diesel fuel. Meanwhile, the mixture to (gasoline) except for PSO in particular areas) and kerosene have not been implemented in 2013.



Untuk konsumsi dan impor LPG Indonesia pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Indonesia LPG consumption and import in 2013 is as follow:

No	Triwulan Quarterly	Jumlah (MTon) (Volume (M Ton))	per hari (MTon) per Day (MTon)
IMPOR IMPORT			
1	I (Jan - Mar)	737.090,21	2.019,43
2	II (Apr - Jun)	855.494,59	2.343,82
3	III (Jul- Sep)	840.173,55	2.301,85
4	IV (Okt- Des)	867.050,08	2.375,48
TOTAL		3.299.808,43	9.040,57
PENJUALAN SALES			
1	LPG	5.606.900,95	15.361,37
2	Vigas	529,51	1,45
TOTAL		5.607.430,46	15.362,82

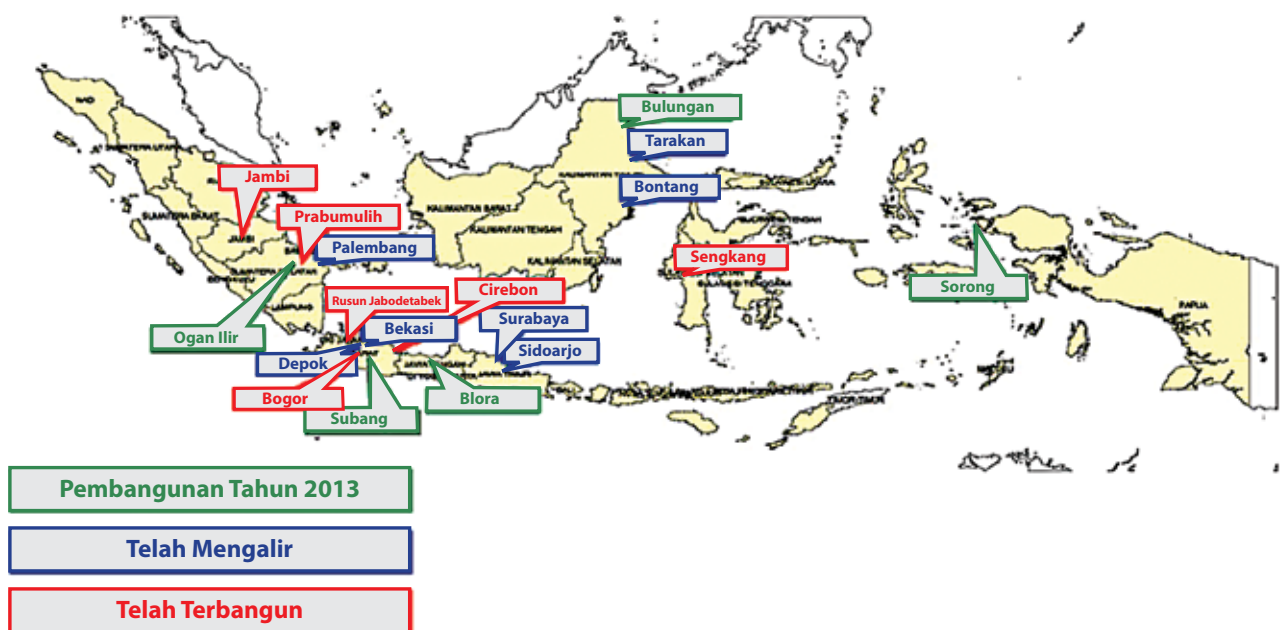
*Data unaudit

Impor dan penjualan LPG di Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya konversi minyak tanah ke LPG.

LPG import and sales in Indonesia in 2013 increased compared to the import and sales in 2012 due to the increasing kerosene to LPG conversion.

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga

City Gas Pipeline for Households Development



Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2013

City Gas for Households in Fiscal Year 2013

Nama Kegiatan Activity	Tahun Year						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penyusunan Regulasi Kebijakan Pendukung <i>Formulation of regulation and supporting policy</i>							
Proses Revisi mjd Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi utk 6 wilayah (FEED, DEDC & Kajian Kelembagaan) <i>The process of revision into the gas Distribution Development Plan for 6 areas (FEED, DEDC, and Institutional Study)</i>							
FEED dan DEDC Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga <i>FEED and DEDC of gas for household</i>	1. Blora 2. Palembang 3. Bekasi 4. Depok 5. Surabaya 6. Medan	• Tarakan, Kaltim • Sidoarjo, Jatim	• Rumah Susun Jabodetabek • Bontang, Kaltim • Sengkang, Sulsel	• Bogor • Cirebon • Jambi • Prabumulih • Kalidawir Sidoarjo	• Sorong, Papua • Ogan Ilir Sumsel • Subang, Jabar • Blora Jateng	• Semarang, Jateng • Batam • Bulungan • Sidoarjo • Lhokseumawe • Kab. Bekasi • Sidoarjo	• Bojonegoro • Lhokseumawe • Gresik • Riau
Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi utk Rumah Tangga (Tahap Konstruksi) <i>Gas for household (construction phase)</i>		1. Kota Palembang; 2. Kota Surabaya.	1. Bekasi; 2. Depok; 3. Tarakan, Kaltim; 4. Sidoarjo, Jatim	1. Bontang, Kaltim 2. Sengkang, Sulsel 3. Bekasi 4. Sidoarjo 5. Rusun Jabotabek	1. Bogor 2. Cirebon 3. Jambi 4. Prabumulih 5. Kalidawir Sidoarjo	1. Sorong, Papua 2. Ogan Ilir 3. Subang, Jabar 4. Blora, Jateng	1. Semarang, Jateng 2. Bulungan 3. Sidoarjo 4. Kab. Bekasi 5. Lhokseumawe

Pada tahun 2013, pembangunan Jargas dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Blora, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sorong. Jaringan yang telah terbangun tersebut selanjutnya akan segera dialiri gas bumi setelah adanya penyelesaian dokumen administrasi dan komersial termasuk penetapan pemenang lelang pengoperasian jaringan distribusi gas bumi yang dibangun Pemerintah dan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) serta Perjanjian Transportasi Gas. Jaringan yang telah dibangun tetap menjadi tanggung jawab kontraktor sampai masa jaminan pemeliharaan selama 1 tahun.

Keterlambatan pembangunan Jargas di Kabupaten Sorong disebabkan oleh rintangan-rintangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yaitu permasalahan teknis terkait letak Kabupaten Sorong yang jauh dari Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan hampir semua material untuk pembangunan Jargas berasal dari Pulau Jawa.

Sedangkan untuk pembangunan pipa transmisi Kabupaten Blora, terkendala oleh perizinan perlintasan rel kereta api dari Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dan PT KAI (Persero). Sebelum perizinan selesai dilakukan, Ditjen Migas tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut. Kontraktor pelaksana

The city gas development in 2013 was conducted in Regency of Ogan Ilir, Subang and sorong. The pipeline will distribute gas after the accomplishment of administration and commercial document including the winner determination of gas distribution pipeline operation tender built by the government and Gas Selling Purchase Agreement as well as Gas Transportation Agreement. The constructed pipeline is the contractor's responsibility until the end of 1 year maintenance guarantee.

The delay in city gas project in Sorong is caused by unpredicted constraints. One of them is the technical problem regarding the location of Sorong for being very far from Java. It becomes a problem since all material for city gas is from Java.

Meanwhile, the transmission pipeline in Blora is delayed by the license of railway from Directorate General of railway of the Ministry of Transportation and PT KAI (Persero). Before the license is issued, Directorate General of Oil and Gas

akan terus bertanggung jawab sampai pembangunan selesai.

will not be able to conduct the project and the contractor will be responsible until the project is accomplished.

Pembangunan fisik Jargas meliputi pembangunan *Metering Regulation Station (MR/S)* bila dibutuhkan, *Regulation Sector (RS)* yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumah, jaringan pipa yang panjang dan susunan diameter yang bervariasi (*Carbon Steel (CS) Ø 4 inch*, pipa *Poly Ethylene (PE)* berukuran Ø 180 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 32 mm, dan Ø 20 mm), serta meter dan regulator pada setiap sambungan rumah.

The physical construction of city gas includes the construction of Metering Regulation Station (MR/S) in case needed, Regulation Sector (RS) to meet 400 households, long and varied diameter pipeline ((Carbon Steel (CS) Ø 4 inch, pipa Poly Ethylene (PE) berukuran Ø 180 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 32 mm, dan Ø 20 mm), as well as meter and regulator for each households.

Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2013 per 31 Desember 2013:

The detail of physical construction of gas for household in 2013 as of 31 December 2013 is:

No	Jenis Pekerjaan <i>Project</i>	Sambungan Rumah <i>Household</i>	Lokasi <i>Location</i>
1	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Sorong <i>City gas for householed in Sorong</i>	3.898	Kelurahan Malawili, Kelurahan Malaweke, Kelurahan Mariat Pantai, Kelurahan Kalabinain, Kelurahan Aimas dan Kelurahan Warmon
2	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Subang <i>City gas for householed in Subang</i>	4.000	Kelurahan Dangdehur & Kelurahan Cidahu
3	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga di Ogan Ilir <i>City gas for householed in Ogan Ilir</i>	3.725	Kelurahan Timbangan, Kelurahan Indralaya Indah, Kelurahan Indralaya Raya, Kelurahan Indralaya Mulia
4	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Blora, Jateng <i>City gas for householed in Blora, Central Java</i>	4.000	Kelurahan Sumber, Kelurahan Wado, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Pulo, Kelurahan Kemantren, Kelurahan Kapuan, dan Kelurahan Mojorembun
5	Pembangunan Jaringan Transmisi Untuk Jargas Rumah Tangga di Blora, Jateng <i>Transmission for City gas for householed in Blora, Central Java</i>	-	-

Kegiatan lain dalam ruang lingkup Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga adalah *Front End Engineering Design/Design Engineering for Detail Construction (FEED/DEDC)* dan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) untuk Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Semarang dan Kota Batam. Dilakukan pula *Front End Engineering Design/Design Engineering for Detail Construction (FEED/DEDC)* untuk Kabupaten Lhokseumawe. Kemudian, telah dilakukan kegiatan sosialisasi Jargas di kota-kota yang sudah dibangun Jargas dengan materi pengenalan jaringan gas bumi sampai cara penggunaan dan pemeliharaan fasilitasnya oleh masyarakat. Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen UKL/UPL dilakukan sampai proses penerbitan izin lingkungan.

Other activities in gas pipeline for household are Front End Engineering Design/Design Engineering for Detail Construction (FEED/DEDC) and the Document of Environmental Management/Environmental Monitoring (UKL/UPL) for Regency of Bekasi, Bulungan, Sidoarjo, as well as City of Semarang and Batam. The Front End Engineering Design/ Design Engineering for Detail Construction (FEED/DEDC) is also conducted to Regency of Lhokseumawe. The government also conducted the socialization of city gas regarding the introduction of gas pipeline, gas utilization and facility maintenance to the public. The UKL/UPL is conducted until the process of environmental license approval.

PENGOLAHAN MIGAS

OIL AND GAS PROCESSING

1.1 Pengolahan Minyak Bumi

Pasokan BBM dari Kilang Dalam Negeri

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri secara langsung menuntut adanya ketersediaan fasilitas pengolahan migas yang cukup memadai, baik dari segi kapasitas maupun produksi. Meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia terkait pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak disertai dengan penambahan kapasitas produksi kilang, sehingga kekurangan jumlah pasokan BBM di Indonesia dipenuhi dari impor. Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2013 adalah sebesar 1.157,1 MBCD yang terdiri atas:

1. Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127,3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD
2. Kilang Pusdiklat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD
3. Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah bahan baku berupa kondensat mulai beroperasi kembali pada November 2013
4. Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan kapasitas 6 MBCD, dan rencana operasi train 2 dengan kapasitas 10 MBCD pada pertengahan 2014.

Selain dari skema pengolahan minyak bumi/kondensat, BBM juga dihasilkan dari pengolahan hasil olahan, seperti dari pelumas bekas, *unconverted oil* atau *sludge oil*. Berikut daftar badan usaha pemegang izin usaha pengolahan hasil olahan di Indonesia;

1.1 Oil Processing

Oil Fuel Supply from Domestic Refinery

The domestic oil fuel demand directly requires the availability of sufficient oil and gas processing facility, both the capacity and production. The increasing oil fuel consumption in Indonesia relates to the increasing number of vehicle that is not followed up with the increasing capacity of refinery production. Thus, the oil fuel supply in Indonesia is derived from import. The total capacity of refinery in Indonesia in the end of 2013 is 1,157.1 MBCD consisted of:

1. PT Pertamina (Persero) Refinery with the total capacity of 1,047.3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127.3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD
2. Education and Training Center of Oil and Gas Cepu Refinery with the capacity of 3.8 MBCD
3. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Refinery with the capacity of 100 MBCD which processes raw material in the form of condensate. It started the operation in November 2014.
4. PT Tri Wahana Universal (TWU) Refinery with the capacity of 6 MBCD and Tran-2 operation plan with the capacity of 10 MBCD in the mid of 2014.

Besides the scheme of oil or condensate processing, the refinery also produces oil fuel from processed used lubricants, *unconverted oil* or *sludge oil*. This is the list of business entity with processed material processing license:

NO	NAMA BADAN USAHA Business Entity	LOKASI Location	KAPASITAS DISAIN Design Capacity
1	PT. PATRA SK	Dumai, Riau	25 ribu barel/hari unconverted oil
2	PT. PRIMERGY SOLUTION	Gresik, Jatim	600 ton/bulan pelumas bekas
3	PT. TAWU INTI BATI	Karawang, Jabar	48.000 ton/tahun pelumas bekas
4	PT. PETROGAS JATIM UTAMA	Lamongan, Jatim	500 ton/bulan sludge oil
5	PT. ISANO LOPO INDUSTRI	Tangerang, Banten	2500 KL/tahun pelumas bekas
6	PT. TRI PUTRI ATARI	Cilegon, Banten	120 KL/hari pelumas bekas
7	PT. LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA	Tangerang, Banten	1500 KL/bulan pelumas bekas

Sampai dengan akhir tahun 2013, diperkirakan produksi BBM mencapai 37 juta KL (terdiri dari produksi kilang Pertamina, kilang Pusdiklat Migas, kilang TPPI dan kilang TWU. Sedangkan secara umum, pasokan BBM hasil produksi kilang hasil olahan tidak terlalu signifikan terkait kapaistasnya yang kecil.

Until the end of 2013, the oil fuel production is 37 million KL from the refinery production of Pertamina, Education Center of Oil and Gas, TPPI and TWU.

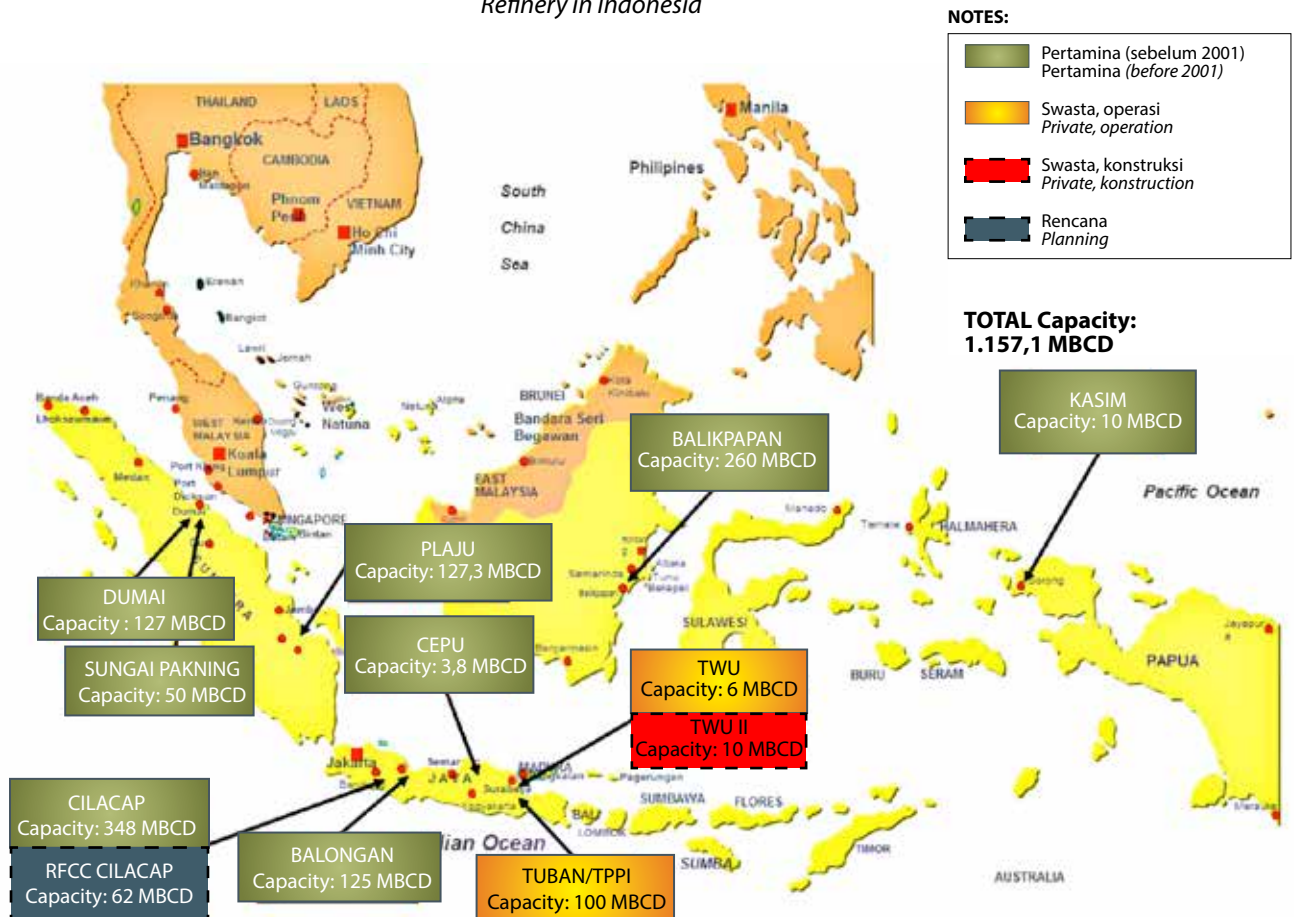
Beberapa kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain:

The obstacles in refinery operation are:

- Kilang minyak Pertamina RU-VII Sorong baru beroperasi kembali pada awal 2013, sebelumnya tidak beroperasi karena mengalami kerusakan pada kolom distilasi sejak tahun 2010
- Kilang RU II Dumai sempat mengalami shutdown pada Oktober 2013 dikarenakan kandungan crude SLC yang masuk kilang mengandung kadar air dan garam yang tinggi sehingga berpotensi merusak peralatan.
- Kilang TPPI dioperasikan kembali pada November 2013 dengan periode uji coba selama 6 bulan.

- *Pertamina RU-VII Sorong refinery started its operation again in early of 2013 after the shutdown in 2010 due technical problem in distillation column.*
- *RU II Dumai refinery experienced shutdown in October 2013 when the SLC crude contained high water and salt that may be potential to cause the tool damage.*
- *TPPI refinery started its operation in November 2013 with 6 months trial.*

Kilang Minyak di Indonesia Refinery in Indonesia



Perkembangan kilang di Indonesia tidak mengalami kemajuan semenjak RU IV Balongan beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik Pertamina. Tercatat hanya kilang milik swasta dengan kapasitas kecil, yaitu kilang milik PT TWU dan PT TPPI di Jawa Timur yang beroperasi. Penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan dibangun adalah Kilang Balongan II (kerjasama Pertamina-Kuwait Petroleum International), dengan status saat ini masih dalam pembahasan insentif antara KPI dan Kementerian Keuangan. Selain itu juga terdapat rencana pembangunan kilang yang berlokasi di Jawa Timur melalui kerjasama Pertamina dan Saudi Aramco, status saat ini sedang dalam penyusunan Studi Kelayakan (FS).

Sedangkan pengembangan kilang *existing* akan dilakukan melalui penambahan fasilitas RFCC di RU IV Cilacap dengan kapasitas 62 MBCD yang rencananya akan beroperasi pada 2016. Fasilitas ini akan meningkatkan produksi BBM melalui pemecahan minyak fraksi berat. Pengembangan lainnya adalah proyek *Centralized Crude Terminal* di RU V Balikpapan, yang bertujuan sebagai lokasi *blending crude* yang berasal dari impor untuk disesuaikan dengan spesifikasi umpan kilang Balikpapan. Sedangkan PT TWU yang semula hanya mempunyai 1 train dengan kapasitas 6 MBCD akan menambah 1 train lagi dengan kapasitas 10 MBCD yang berencana beroperasi pada pertengahan 2014 ini.

Kemampuan Pasokan Energi (BBM) dalam Negeri

Terkait jaminan pasokan BBM dari kilang dalam negeri, dengan semakin tingginya tingkat konsumsi BBM sementara pasokan BBM dari kilang cenderung tetap dikarenakan tidak adanya pembangunan fasilitas kilang BBM di Indonesia semenjak tahun 1994, maka persentase pasokan BBM dari kilang domestik hanya sebesar 51.33% dari total konsumsi BBM nasional. Sebagai gambaran, konsumsi BBM PSO (Premium, Kerosene, Solar) pada tahun 2012 sebesar 45,27 juta KL, pada tahun 2013 meningkat menjadi 46.23 juta KL. Berdasarkan data, pasokan BBM dari produksi kilang dalam negeri sebesar 37.6 juta KL, sedangkan konsumsi mencapai 74.6 juta KL. Selisih pasokan tersebut akhirnya dipenuhi oleh impor BBM yang dilakukan oleh Pertamina maupun impor BBM oleh Badan Usaha ritel asing yang terdaftar. Jumlah impor BBM yang semakin hari semakin meningkat akan berakibat pada menurunnya kemampuan pasok BBM dari kilang dalam negeri secara keseluruhan. Berdasarkan data produksi kilang cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, hal ini dikarenakan kilang milik Pertamina pada awalnya didesain untuk mengolah *crude* domestik, sedangkan saat ini produksi *crude* domestik mengalami penurunan, sehingga akan secara langsung mempengaruhi produksi kilang.

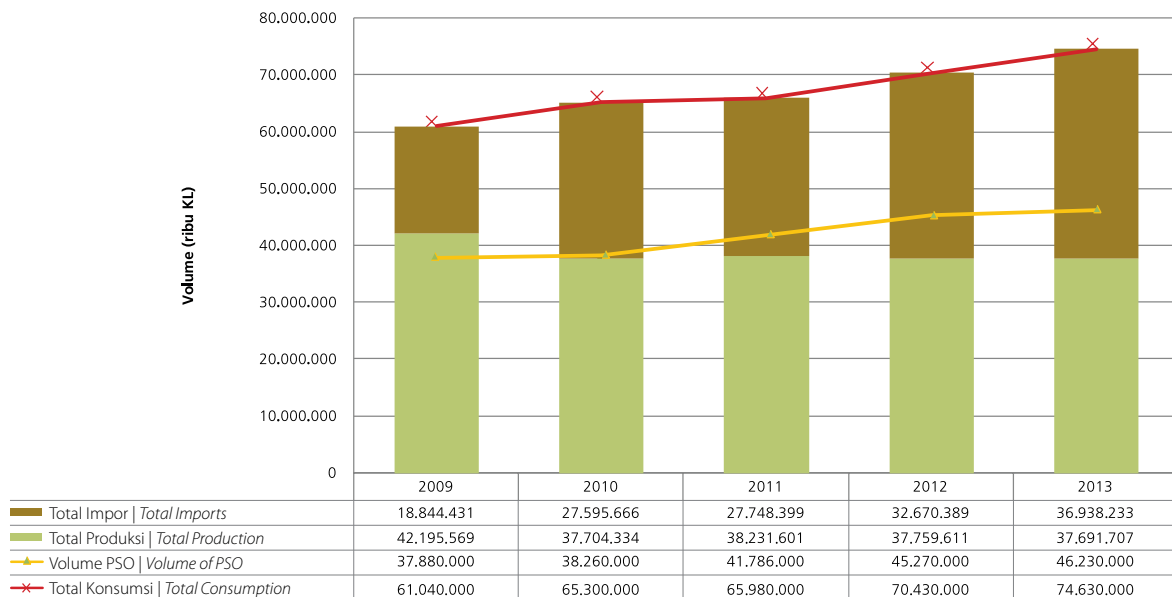
The refinery in Indonesia is not developing since the operation of RU IV Balongan in 1994. Since then, there is no new refinery owned by Pertamina. There are only private refineries owned by PT TWU and PT TPPI in East Java. The planned Pertamina's new refinery is Balongan II Refinery (as cooperation between Pertamina-Kuwait Petroleum International). The project is now in incentive process with KPI and Ministry of Finance. There is also a plan to build a refinery in East Java through the cooperation between Pertamina and Saudi Aramco. It is now in Feasibility Study.

The development of existing refinery is conducted by adding the RFCC facility in RU IC Cilacap with the capacity of 62 MBCD that is planned to be onstream in 2016. This facility will increase the oil fuel production through heavy fraction oil fracturing. The other development is Centralized Crude Terminal project in RU V Balikpapan as crude blending location from the imported crude to be adjusted with Balikpapan refinery specification. PT TWU which operates 1 train with the capacity of 6 MBCD will add 1 more train with the capacity of 10 MBCD in the mid of 2014.

Domestic Oil Fuel Supply

Related to oil fuel supply guarantee from domestic refinery, the increasing oil fuel consumption, and the steady oil fuel supply from refinery due to the stagnant number of refinery in Indonesia since 1994, the percentage of oil fuel supply from domestic refinery is only 51.33% from the total national oil fuel consumption. The PSO oil fuel consumption (premium, kerosene, diesel fuel) in 2012 is 45.27 million KL. It increased into 46.23 million KL in 2013. Based on the data, the oil fuel supply from domestic refinery production is 37.6 million KL while the consumption is 74.6 million KL. The supply deviation is fulfilled through oil fuel import by Pertamina or by registered foreign retail business entity. The increasing oil fuel import will affect the decline of oil fuel supply from domestic refinery. The refinery production is increasing each year since Pertamina's refineries were designed to process domestic crudes, while at present the domestic crude production is decreasing. Thus, it directly influences the refinery production.

Grafik Produksi, Konsumsi, dan Subsidi BBM
The Oil fuel Production, Consumption and Subsidy



Kebutuhan BBM dan Rencana Pembangunan Kilang Minyak Baru

Kebutuhan BBM dalam negeri saat ini sekitar 48% dipenuhi dari impor. Dengan meningkatnya kebutuhan BBM dari tahun ke tahun, ketergantungan Indonesia pada impor BBM diperkirakan akan semakin meningkat. Melihat kondisi yang ada, pemerintah telah mendorong adanya pembangunan kilang minyak baru untuk meningkatkan kehandalan penyediaan BBM dari dalam negeri.

Sebagai gambaran, pada tahun 2013 total kapasitas kilang di dalam negeri adalah sebesar 1157 MBCD, dengan estimasi produksi BBM sebesar 649 MBCD, sedangkan angka konsumsi BBM dalam negeri sebesar 1264 MBCD. Dengan demikian akan ada defisit pasokan BBM sekitar 615 MBCD atau sekitar 49% dari total kebutuhan nasional yang dipenuhi melalui impor BBM.

Oil Fuel Demand and New Oil Refinery Project

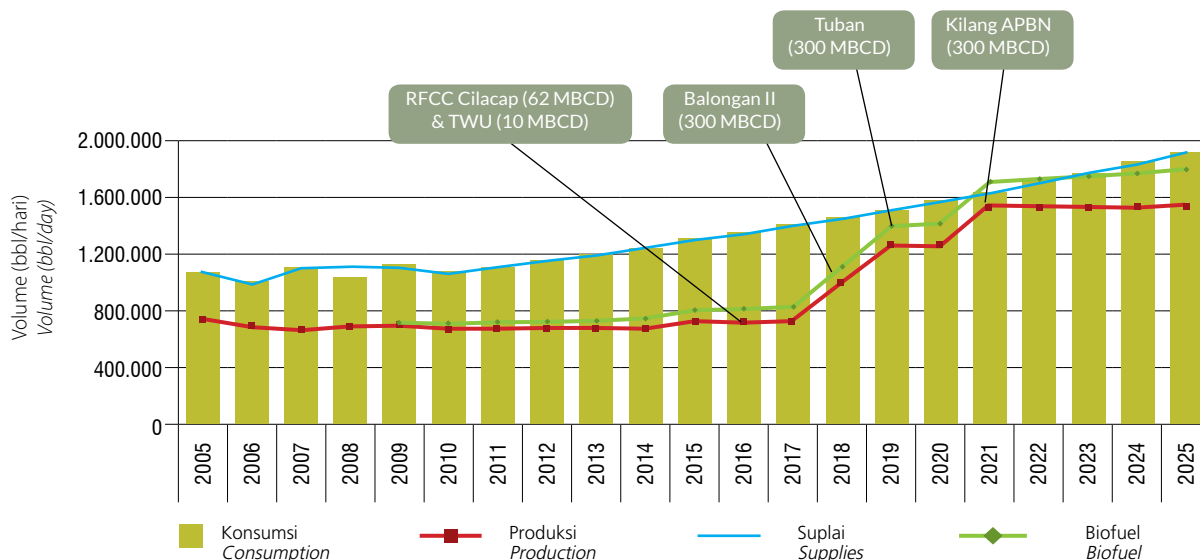
At present, about 48% of domestic oil fuel demand is derived from the import. The increasing oil fuel demand these years will surely increase the dependency of Indonesia on the oil fuel import. To cope with this condition, the government of Indonesia planned to build new oil refinery as the effort to enhance the domestic oil fuel supply security.

In 2013, the total capacity of domestic refinery is 1,157 MBCD with the fuel production estimation is 649 MBCD, while the domestic oil fuel consumption is 1,264 MBCD. It means that the oil fuel supply deficit is 615 MBCD or 49% of the total national demand from oil fuel import.



Grafik Supply – Demand BBM dan Rencana Pembangunan Kilang

Graphic of oil fuel supply-demand and refinery project



Insentif Investasi Pembangunan Kilang Minyak

Melihat semakin besarnya ketergantungan atas impor bahan bakar minyak dan masih belum adanya realisasi pembangunan kilang minyak baru, maka dalam rangka meningkatkan ketahanan penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri, pemerintah bersama Pertamina mengusulkan untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak yang dibiayai oleh APBN (Kilang Minyak APBN). Diharapkan dengan terbangunnya Kilang Minyak APBN ini dapat mengurangi ketergantungan akan impor BBM dan meningkatkan ketahanan penyediaan BBM dalam negeri.

Terkait persiapan pelaksanaan pembangunan kilang minyak APBN, secara simultan pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyusunan kajian Detail Feasibility Study oleh Pertamina, koordinasi penetapan dan pembebasan lahan lokasi pembangunan serta koordinasi kepastian jaminan pasokan bahan baku. Rangkaian kegiatan persiapan ini dilaksanakan karena pembangunan Kilang Minyak APBN mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunannya merupakan rangkaian proses yang cukup kompleks baik dari sisi administratif, hukum, pembiayaan maupun teknis pelaksanaannya.

Setelah terbitnya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah ada beberapa investor yang berminat membangun kilang minyak, namun hanya sedikit yang terealisasi. Lambatnya realisasi pembangunan kilang minyak antara lain disebabkan besarnya investasi yang diperlukan, resiko tinggi dan keekonomian yang marginal. Untuk itu, dalam rangka mendukung terealisasinya pembangunan

Incentive for Refinery Project Investment

Considering the increasing oil fuel import dependency and the delayed new refinery project, the government and Pertamina propose to build new refinery project funded by State Budget to enhance the domestic supply security. The State Budget refinery is expected to be able to reduce the oil fuel import dependency and to enhance the domestic supply security.

To build the State Budget refinery, several activities have been conducted simultaneously in 2013 such as Detail Feasibility Study by Pertamina, coordination on land acquisition, coordination on raw material supply guarantee. The preparation of State Budget project from the design to the construction is a complex process from its administration, legal, cost and implementation.

After the stipulation of Oil and Gas Law number 22 Year 2001, investors are interested to build refinery, but few is realized. The slow realization of refinery project is influenced by the high investment, the high risk and the marginal economical value. To support the refinery project, Directorate General of Oil and Gas has coordinated with related institution such as BKPM (Investment

kilang minyak, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu BKPM, Depkeu, Setjen DESDM dan Pertamina guna membahas dukungan insentif investasi kilang.

Coordination Agency), Ministry of Finance, Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources and Pertamina in discussing the incentive in refinery project.

Sebagai hasilnya, saat ini industri pengolahan minyak bumi telah diberikan insentif dengan gambaran sebagai berikut:

At present, the incentive for oil processing industry is as follows.

Insentif untuk Pembangunan Kilang Minyak

Incentive in Refinery Project

PP 62 Tahun 2008 sebagai amandemen PP 1 Tahun 2007 tentang PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha dan/atau Daerah Tertentu. <i>Government Regulation Number 62 Year 2008 concerning the amendment of Government Regulation Number 1 Year 2007 on tax for investment in certain field of business and/or certain area.</i> - Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun.<i>The reduce of nett income up to 30% from the capital investment to be imposed for 6 years (5% per year)</i> - Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak <i>Income tax on paid dividend to foreign tax payer up to 10%, or lower tariff according to the agreement of double taxation avoidance</i> - Penyusulan dan amortisasi yang dipercepat <i>Accelerated depreciation and amortization</i> - Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan sebagaimana diatur pada PP No.1 Tahun 2007 <i>Compensation of loss for more than 5 years but less than 10 years as regulated in Government Regulation Number 1 Year 2007</i>	PP No. 94 Tahun 2010 dan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. <i>Government Regulation Number 94 Year 2010 and Minister of Finance Regulation Number 130/PMK.011/2011 on Facility of Institutional Tax Free or Reduce</i> - Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak dimulainya produksi komersial. <i>Institutional income tax-free is given for the period of 5 to 10 years starting on the commercial production</i> - Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan), Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 (dua) Tahun Pajak. <i>After the institutional income tax free facility, tax payer is given the reduce of institutional income tax up to 50% from the payable income tax for 2 years</i> - Kel : Fasilitas pembebasan Pajak hanya dapat diberikan kepada Industri pionir (industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional) termasuk industri pengolahan minyak bumi. <i>Note: the tax free facility is only given to pioneer industry (industry with wide linkages, giving added-value and high externality, introducing new technology, and giving national economy strategic value) , including the oil processing industry</i>
--	---

1.2 Pengolahan Gas Bumi

Selain pengolahan minyak mentah menjadi BBM untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, ada pula proses pengolahan gas bumi menjadi LNG dan LPG. Untuk kilang LNG ada yang mengikuti pola hulu dan ada pula yang mengikuti pola hilir. Yang termasuk kilang LNG pola hulu adalah kilang PT Arun (di NAD, 12,85 MMTPA), kilang PT Badak (di Bontang, Kaltim, 21,64 MMTPA) dan kilang LNG BP (di Tangguh, 7,6 MMTPA). Sedangkan yang termasuk kilang LNG pola hilir adalah milik PT Donggi Senoro LNG (di Sulawesi Tengah, 2 MMTPA).

LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Sama halnya dengan LNG, kilang LPG yang berbahan baku gas bumi ada yang mengikuti pola hulu maupun pola hilir. Untuk kilang LPG pola hulu umumnya dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sedangkan kilang LPG pola hilir dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha pengolahan gas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah.

1.2 Gas Processing

Besides crude oil to oil fuel processing, there is also gas to LNG and LPG processing. There are two types of LNG refinery, one with upstream pattern and one with downstream pattern. The LNG refinery with upstream pattern is PT Arun refinery in Nangro Aceh Darussalam with the capacity of 12.85 MMTPA, PT Badak refinery in Bontang. East Kalimantan with the capacity of 21.64 MMTPA, and LNG BP refinery in Tangguh with the capacity of 7.6 MMTPA. The LNG refinery with downstream pattern is PT Donggi Senoro LNG refinery in Central Sulawesi with the capacity of 2 MMTPA.

LPG can be produced both in oil and gas refinery. Similar with LNG, LPG refinery with gas as raw material is divided into two, the upstream and downstream pattern. LPG refinery with upstream pattern is generally owned by Contractor of Cooperation Contract, while LPG refinery with downstream pattern is usually owned by Business Entity holding gas processing license from the government.

Berikut adalah kapasitas desain kilang LNG dan kilang LPG yang beroperasi di Indonesia sampai dengan tahun 2013.

This is the design capacity of operating LNG and LPG refinery in Indonesia until the year of 2013.

Kapasitas Kilang LNG

LNG Refinery Capacity

Nama Badan Usaha <i>Name of Business Entity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Total (MMTPA)
PT. Arun	Lhokseumawe	12,85
PT. Badak	Bontang	21,64
BP Tangguh	Tangguh	7,60
Total Produksi LNG		42,09

Kapasitas Kilang LPG

LPG Refinery Capacity

Nama Badan Usaha <i>Name of Business Entity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Total (MMTPA)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak Oil Refinery			
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68,00
PT. Pertamina (Persero)	Musi	360	131,00
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	630	318,00
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91,00
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548,00
Sub Total Kilang Minyak			1.156,00
Kilang Gas Pola Hulu Gas Refinery Upstream Pattern			
PT. Pertamina (Persero)	Bontang	2,74	1.000,00
Chevron	T. Santan	247	90,00
Petrochina	Arar	38	14,00
Petrochina	Jabung	1,315	600,00
Conoco Phillips	Belanak	1,151	525,00
Hess	Ujung Pangkah	247	113,00
Sub Total (Kilang Gas Pola Hulu Gas Refinery Upstream Pattern)			2.342,00
Kilang Gas Pola Hilir Gas Refinery Downstream Pattern			
PT. Pertamina (Persero)	P. Brandan	120	44,00
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	100	37,00
PT. Maruta Bumi Prima	Langkat	46,57	17,00
PT. Medco LPG Kaji	Kaji	200	73,00
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73,00
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	18	7,00
PT. Odira Energy Persada	Tambun	150	55,00
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	125	46,00
PT. Yudhistira Haka Perkasa	Cilamaya	120	44,00
PT. Wahana Insannugraha	Cemara	102,3	37,00
PT. Media Karya Sentosa	Gresik	160	58,00
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175,00
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58,00
PT. Media Karya Sentosa 2	Gresik	230	84,00
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	70	26,00
PT. Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259,00
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	10.5	3,80
Sub Total (Kilang Gas Pola Hilir Gas Refinery Downstream Pattern)			1096,80
Total Kilang Gas Total of Gas Refinery			3.438,80
Grand Total (Produksi LPG LPG Production)			4.594,80

Disamping kilang-kilang LPG dan LNG yang telah beroperasi di atas, ada beberapa badan usaha lain yang telah memiliki izin usaha sementara pengolahan gas bumi yang sedang dalam tahap konstruksi/pembangunan yaitu:

Besides the above operating LPG and LNG refinery, there are several business entities holding the gas processing license which are conducting the construction stage. They are:

Kilang LPG Pola Hilir
LPG Refinery with Downstream Pattern

Nama Badan Usaha <i>Name of Business Entity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Kapasitas Ton/hari <i>Capacity Tons / day</i>	Kapasitas MTPA <i>MTPA capacity</i>
PT. Bumi Jambi Energi	Tanjung Jabung Barat	127	46,00
PT. Maruta Bumi Prima	Bekasi	80	29,00
PT. Intermedia Energi	Bojonegoro	36	13,00
TOTAL			88,00

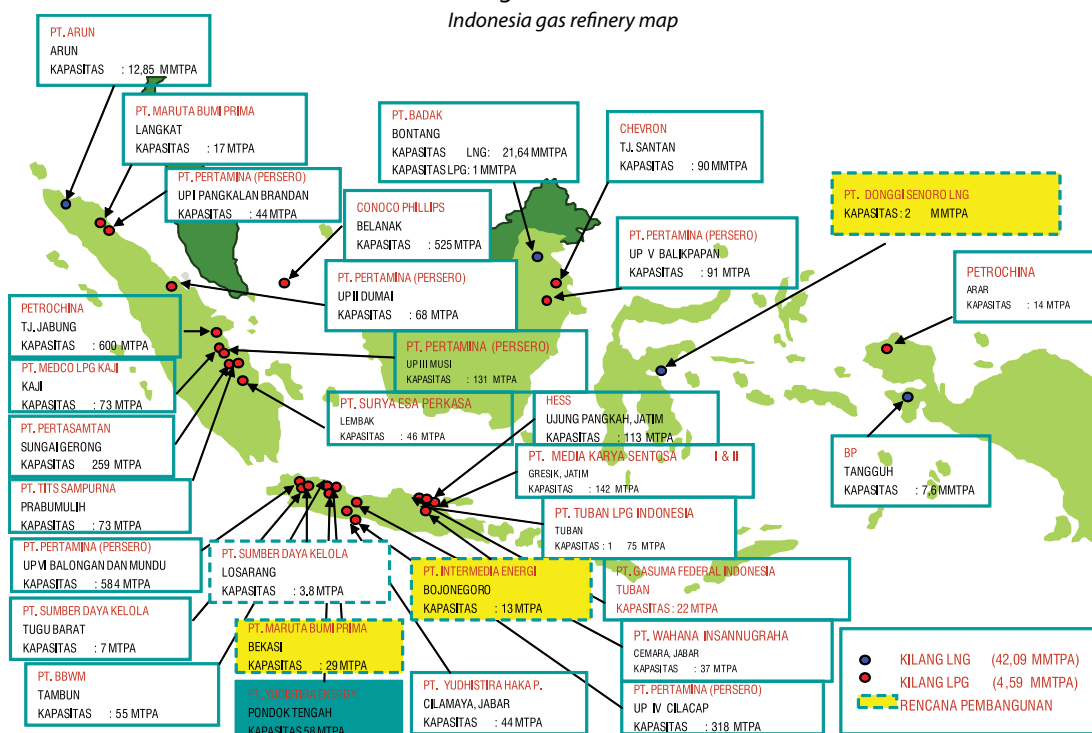
Kilang LNG Pola Hilir
LNG Refinery with Downstream Pattern

Nama Badan Usaha <i>Name of Business Entity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Total Ton/hari <i>Total Ton/day</i>
PT. Donggi Senoro	Sulawesi Tengah	22,00
PT. South Sulawesi	Sulawesi Selatan	0,50
TOTAL		22,50

Dibawah ini adalah peta kilang gas bumi di Indonesia, baik yang sudah beroperasi maupun sedang dalam tahap konstruksi.

Below is gas refinery map in Indonesia, both the operating and under construction refineries.

Peta Kilang Gas Bumi Indonesia
Indonesia gas refinery map

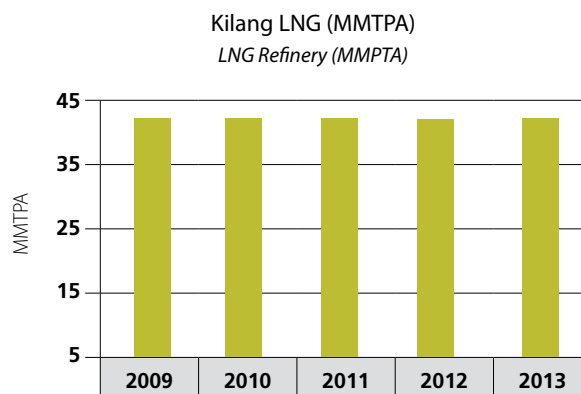
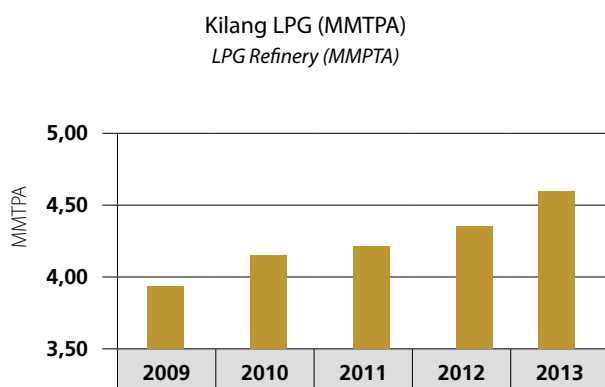


Dengan adanya penambahan kilang-kilang gas baru setelah implementasi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka kapasitas pengolahan gas bumi di dalam negeri pada akhir tahun 2013 mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini:

With the additional number of new gas refineries after the implementation of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001, the domestic gas processing capacity in the end of 2013 increased as shown in the below graphic.

Peningkatan kapasitas kilang LPG dan LNG

The increase of LPG and LNG Refinery Capacity



Kapasitas kilang LPG pada tahun 2013 meningkat 6,00 % dibanding tahun 2012 dari 4,33 MTPA menjadi 4,59 MTPA dikarenakan pada tahun 2013 kilang LPG milik PT Pertasamtan Gas dengan kapasitas 710 ton/ hari mulai beroperasi, kilang tersebut berada di Sungai Gerong, Sumatera Selatan

LPG refinery capacity in 2013 increased 6.00% compared to the volume in 2012 from 4.33 MTPA to 4.59 MTPA with the operation of LPG refinery owned by PT Pertasamtan Gas in 2013 with the capacity of 710 tons/day. The refinery is located in Sungai Gerong, South Sumatera.

Sedangkan untuk kilang LNG tidak ada peningkatan kapasitas dikarenakan tidak ada kilang LNG yang terbangun.

Meanwhile, LNG refinery capacity did not increase since no LNG refinery was built.

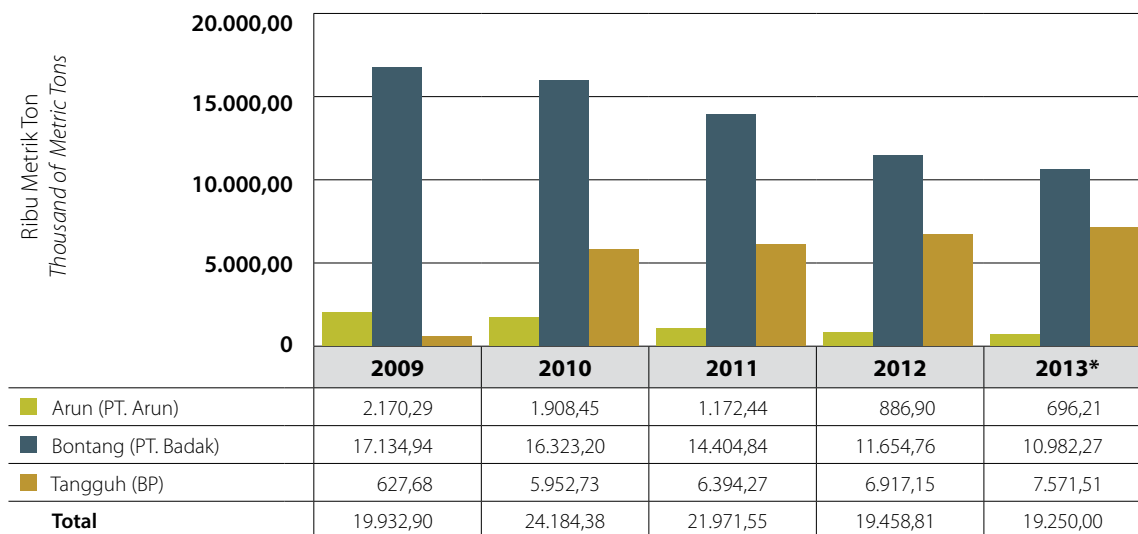
Produksi LNG dan LPG

Dengan beroperasinya kilang LNG BP Tangguh pada tahun 2009, produksi LNG dalam negeri saat ini dipenuhi oleh 3 kilang LNG yaitu kilang PT Arun, PT Badak dan BP Tangguh. Produksi LNG tahun 2013 diperkirakan adalah sebesar 19,24 juta ton, mengalami penurunan sekitar 1,14 % dari tahun sebelumnya sebesar 19,46 juta ton. Berikut adalah grafik produksi LNG lima tahun terakhir.

LNG and LPG Production

The operation of BP Tangguh LNG Refinery in 2009, the domestic LNG is produced from 3 refineries; PT Arun, PT Badak and BP Tangguh refinery. The LNG production in 2013 is predicted around 19.24 million tons. It decreased around 1.14% from the previous production of 19.46 million tons. Here is the LNG production in the last five years.

Produksi LNG 2009-2013 LNG Production in 2009 to 2013

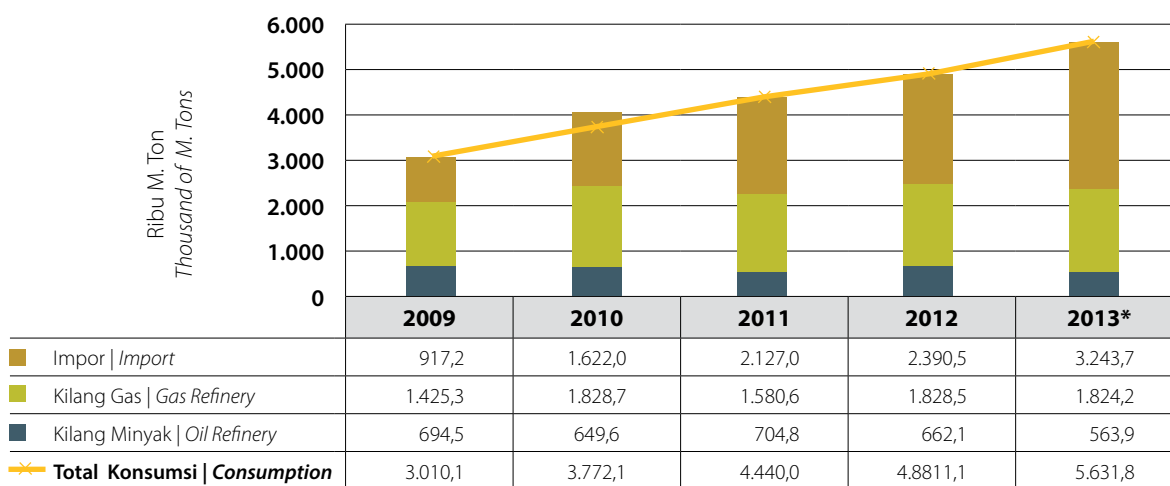


* Estimasi | Estimation

Untuk produksi LPG tahun 2013 diperkirakan adalah sebesar 2,38 juta ton atau turun sebesar 4,05 % dibanding tahun 2012. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh berhentinya operasi kilang LPG milik PT Medco Kaji dengan kapasitas 200 ton/hari dan kilang Tuban LPG Indonesia 480 ton/hari dikarenakan tidak adanya pasokan gas untuk kedua kilang tersebut.

The LPG production in 2013 is predicted around 2.38 million ton or declined around 4.05% compared to the volume in 2012. The decline is caused by the operation termination of LPG refinery owned by PT Medco Kaji with the capacity of 200 tons/day and Tuban LPG Indonesia refinery with capacity of 480 tons/day due to gas supply unavailability.

Grafik Produksi dan Konsumsi LPG Indonesia LPG Production and Consumption in Indonesia



* Estimasi | Estimation

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun impor LPG kita semakin lama semakin meningkat, untuk mengurangi angka impor tersebut kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan kilang LPG baru.

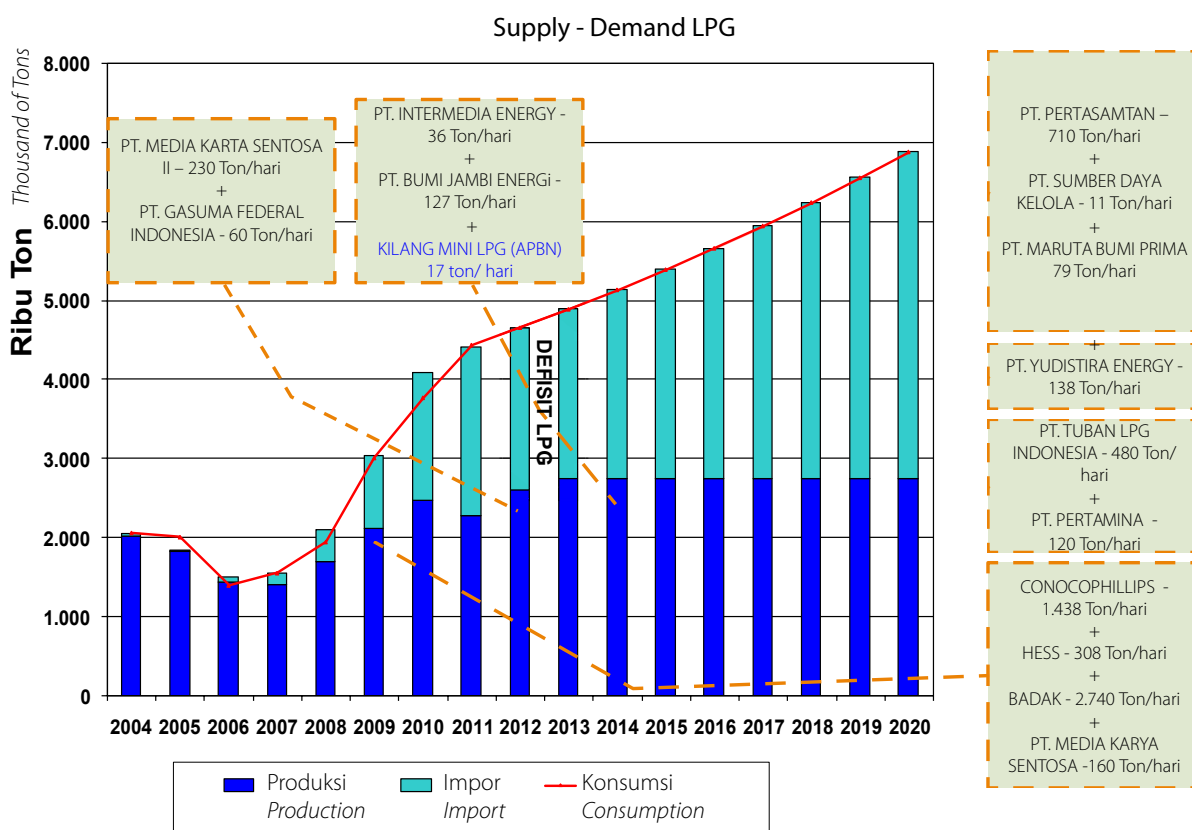
The previous table shows the increasing LPG import. New LPG refinery is needed to reduce the volume of import.

1. Oleh Badan Usaha (Swasta atau BUMN)

Di tahun 2013 terjadi peningkatan kapasitas kilang LPG yang berasal dari kilang LPG Swasta yaitu PT Pertasamtan Gas dengan kapasitas 710 ton/hari di Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

1. LPG refinery by Business Entity (Private sector or State Owned Business Enterprise)

In 2013, there has been an increase of LPG refinery capacity derived from private sector refinery namely PT Pertasamtan Gas with the capacity of 710 tons/day located in Sungai Gerong, South Sumatera.



2. Oleh Negara melalui APBN

Melihat statistik *supply demand* kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan akan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud. Salah satunya adalah pembangunan kilang mini LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

2. LPG refinery funded by State Budget

Analyzing the LPG supply-demand statistic these years in which the production increase is not able to meet the consumption, import is the only way out to meet the demand. As the impact, import will burden the state budget and increase the dependency on other counters. To cope with this condition, the government should build processing infrastructure to reduce the dependency on import and to enhance the energy security. One of them is LPG mini refinery project in Musi Banyuasin, South Sumatera.

Pembangunan Kilang Mini LPG

Construction of LPG Mini Refinery

Nama Kegiatan Activity	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
FEED dan DEDC Pembangunan Kilang Mini LPG serta UKL/ UPL <i>EED and DEDC Development of Mini Refinery LPG and UKL / UPL</i>	Tersusun dokumen FEED dan DEDC serta UKL/UPL <i>Composed documents of DEDC FEED and UKL / UPL</i>				
Kajian Kelembagaan Pengelolaan Kilang Mini LPG <i>Institutional Assessment of LPG Mini Refinery Management</i>		Rekomendasi Kajian Kelembagaan Pengelolaan Kilang Mini LPG <i>Recommendations of Institutional Management of LPG Mini Refinery</i>			
Persiapan Pembangunan\ Kilang Mini LPG <i>Development Preparation \ LPG Mini Refinery</i>			Pembebasan Lahan <i>Land Acquisition</i>		
			Pengurusan Perijinan yang terkait <i>Obtaining a related permit</i>		
			Proses PJBG untuk feed kilang mini <i>PJBG Process for mini refinery feed</i>		
Pembangunan Kilang Mini LPG (Tahap Konstruksi) <i>Construction of Mini Refinery LPG (Construction Phase)</i>				Proses EPC <i>Commissioning & Start Up</i>	

Selesai Dilaksanakan
Implemented
 Sedang Dilaksanakan
Being Implemented
 Rencana / Belum Dilaksanakan
Plan / Not Implemented

Sejak tahun 2010, Ditjen Migas telah menganggarkan pembangunan kilang mini LPG yang dimulai dari pekerjaan FEED, UKL/UPL, kajian kelembagaan dan di tahun 2012 pembebasan lahan dan pengurusan perijinan.

In 2010, Directorate General of Oil and Gas has prepared the budget to build LPG mini refinery. The project includes FEED, UKL/UPL and institutional study. In 2012, land acquisition and licensing process had been conducted.

Di tahun 2012, telah dibebaskan lahan seluas 3,2 hektar di desa Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dasar pemilihan lokasi adalah dekat dengan sumber bahan baku yaitu Lapangan Jata yang berada di wilayah PT Medco E&P Indonesia. Selain itu, lokasi pembangunan kilang mini LPG telah mendapat persetujuan lokasi dari Bupati Musi Banyuasin.

In 2012, the government has finished the 3.2 hectare land acquisition in Sekayu Village, Musi Banyuasin, South Sumatera. It is the nearest location to the raw material in Jata Field in PT Medco E&P Indonesia working area. The location of LPG mini refinery has received the approval from Musi Banyuasin Regent.

Di tahun 2013, telah dipilih kontraktor EPC Kilang Mini melalui proses tender dengan masa berlaku kontrak selama 15 bulan (*multiyears*). Sampai dengan akhir tahun 2013 diperkirakan progres pembangunan kilang mini LPG hanya sebatas *land preparation, detail engineering*, serta pengadaan beberapa material *electrical* dan *instrument*, mengingat waktu dimulainya pengerjaan dimulai pada bulan Oktober 2013.

In 2013, the EPC contractor for mini refinery has been chosen through tender in which the period of multiyears contract is 15 months. Until the end of 2013, it is expected that the progress of the project will reach until the land preparation, engineering, as well as electric and instrument material procurement since the construction will start in October 2013.

Rencana Pembangunan Project Plan

KEGIATAN	2013			2014											
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Pendahuluan Preface															
Survei dan Persiapan <i>Survey and Preparation</i>															
Detail Engineering <i>Engineering Detail</i>															
Pekerjaan Sipil Civil Works															
Urugan - cut & fill <i>stockpiling - cut & fill</i>															
Pembangunan pondasi alat <i>foundation construction for tools</i>															
Pembangunan gedung kantor <i>construction of office building</i>															
Pembangunan dan Instalasi LPG Plant Development and installation of LPG Plant															
LPG Plant <i>LPG Plant</i>															
Mekanikal dan Pemasangan Pipa <i>Mechanical and Piping</i>															
Listrik dan Instrumen <i>Electrical and Instrument</i>															
SKPP - SKPI Certificate of Tools Utilization Appropriateness (SKPP) Certificate of Installation Utilization Appropriateness (SKPI)															
Comissioning															

Terkait dengan jaminan pasokan, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Ditjen Migas dan PT Medco E&P Indonesia tentang jaminan pasokan gas untuk kilang mini LPG di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dan direncanakan tahun depan baru dimulai PJBG antara PT Medco E&P Indonesia dengan calon Operator Kilang.

Regarding the supply guarantee, Directorate General of Oil and Gas and PT Medco E&P Indonesia has signed MoU on gas supply guarantee for LPG mini refinery in Musi Banyuasin, South Sumatera. The Gas Selling Purchase Agreement between PT Medco E&P Indonesia and candidate of refinery operator is planned to be started in 2014.



PENGANGKUTAN MIGAS OIL AND GAS TRANSPORTATION

A. Sarana dan Fasilitas Pengangkutan Migas Tahun 2013

1. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan

Dalam pendistribusian BBM untuk kebutuhan Nasional di seluruh wilayah Indonesia, saat ini terdapat 11 (sebelas) sarana pengangkutan baik melalui darat maupun laut dengan sarana pengangkutan melalui darat meliputi Mobil Tangki, *Rail Tank Wagon* (RTW) dan Pipa, sedangkan melalui laut meliputi kapal *tanker*, *Landing Craft Tank* (LCT), *Tongkang*, *Self Propeller Oil Barge* (SPOB), *Kapal Motor*, *Cargo*, *Supply Vessel*, dan *Tug Boat*. Pada tahun 2013, beberapa Badan Usaha di Papua mendaftarkan armada daratnya (mobil non tangki) dengan drum yang berkapasitas masing-masing 200L.

A. Oil and Gas Transportation Equipment and Facility in 2013

1. Facility of Oil/Oil Fuel/Processed Oil Transportation

In distributing oil fuel for national consumption in all areas of Indonesia, there are 11 transportation tools both land and sea transportation. The land transportation includes tank car, rail tank wagon (RTW), and pipeline, while sea transportation includes tanker, landing craft tank (LCT), barge, Self Propeller Oil Barge (SPOB), motor ship, cargo, supply vessel, and tug boat. In 2013, several business entities in Papua registered their land transportations (non-tank car) with the drum having the capacity of 200 L each.

Armada Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (Darat)

Land Transportation for Oil/Oil Fuel/Processed Oil

JENIS KAPASITAS TYPE OF CAPACITY	JUMLAH UNIT ARMADA UNIT TOTAL FLEET
1 KL	1
3 KL	2
4 KL	2
5 KL	1.398
6 KL	6
7 KL	36
8 KL	489
9 KL	26
10 KL	1.016
12 KL	93
14 KL	144
15 KL	60
16 KL	836
18 KL	49
20 KL	130
22 KL	2
23 KL	3
24 KL	413
25 KL	15
26 KL	3
28 KL	3
30 KL	1
32 KL	99
36 KL	1

JENIS KAPASITAS TYPE OF CAPACITY	JUMLAH UNIT ARMADA UNIT TOTAL FLEET
40 KL	16
63 KL	2
65 KL	2
TOTAL	4.848

Dari tabel di atas, terhitung bahwa pada tahun 2013 jumlah armada terdaftar sebanyak 4.848 unit armada darat dengan total nilai kapasitas 57.181 KL.

The table shows the number of land transportation in 2013 of 4,848 units with the total capacity of 57,181 KL.

Armada Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan (Laut) Sea Transportation for Oil/Oil Fuel/Processed Oil

JENIS ALAT ANGKUT JENIS ALAT ANGKUT	JUMLAH TOTAL
TANKER	332
LCT	76
TONGKANG (BARGE)	253
SPOB	170
KAPAL MOTOR (MOTOR BOAT)	82
CARGO	1
SUPPLY VESSEL	24
TUG BOAT	177
TOTAL	1.115

Armada laut di atas belum termasuk PT Pertamina (Persero). Armada laut milik Pertamina berjumlah 145 unit sehingga total armada berjumlah 1.260 unit dengan total nilai kapasitas 7.961.973,76 KL.

The above sea transportations have not included the units owned by PT Pertamina (Persero). Pertamina has 145 units of land transportation. Thus, the total land transportation is 1,260 units with the total capacity of 7,961,973.76 KL.

Pada tahun 2012 dan 2013 ini, terdapat kenaikan kapasitas fasilitas pengangkutan BBM moda darat dan moda laut terdaftar yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran yang mulai tumbuh dari Badan Usaha Hilir Migas untuk memiliki legalitas dalam melakukan pendistribusian bahan bakar migas sampai konsumen akhir.

In 2012 and 2013, there was significant increase on the number of land and sea transportation. The oil and gas downstream business entity has developed its awareness to have legality in distributing the oil and gas fuel to the final consumer.

Jaringan Pengangkutan BBM melalui pipa yang ada pada saat ini dan sudah diterbitkan Izin Usahanya adalah sebagai berikut :

The tables show License of oil fuel transportation through pipeline.

Jaringan Pipa Pengangkutan BBM Milik PT Pertamina (Persero) Oil Fuel Transportation pipeline owned by PT Pertamina (Persero)

JALUR Line	DIAMETER	CAP. (INCH) (Kilo Liter)	JARAK Distance (Kilometer)	VOLUME PIPA Pipe Volume (Kilo Liter)
Cilacap - Bandung 1	12	200	250	18,2
Cilacap - Bandung 2	16	400	250	32,4
Cilacap - Yogyakarta 1	8	120	180	5,8
Cilacap - Yogyakarta 2	12	300	180	13,1
Balongan - Jakarta	16	800	210	27,2
Plaju - Kertapati	12	400	12,6	920
Rewulu - Teras	12	300	66	4,8
Balongan - Cikampek (Operasi (Operated) 2010)	16	650	160	20,7
Tuban - Surabaya (Operasi (Operated) 2010)	16	650	138	17,8

Jaringan Pipa Pengangkutan BBM Badan Usaha Non PT Pertamina (Persero)
Oil Fuel Transportation pipeline owned by business entity other than PT Pertamina (Persero)

NAMA BU COMPANY	JARINGAN PIPA Pipeline		PANJANG LENGTH (KM)	DIAMETER (INCH)
	Dari From	Sampai up to		
PT Geo Ling Nusantara	Banyu Urip (Bojonegoro)	Mudi (Tuban)	37,19	6

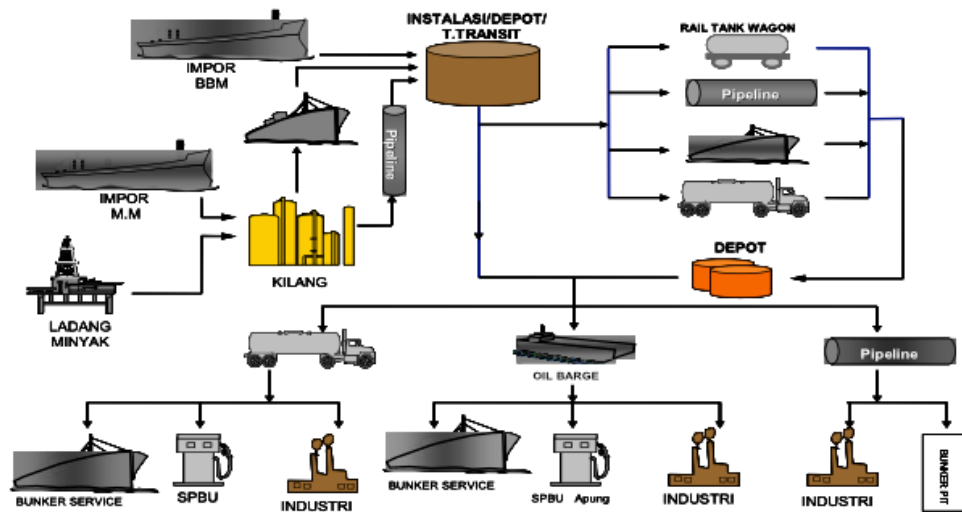
Pola Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nasional

The Scheme of National Fuel; Supply and Distribution

Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir/masyarakat dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah pola penyediaan dan distribusi Bahan Bakar (Premium, Minyak Solar, Diesel, Minyak Bakar dan Minyak Tanah) :

The oil and gas processing, transportation, storage and trade are integrated to ensure that the national fuel supply and distribution meet the final consumer well. The scheme of fuel supply and distribution (premium, Diesel fuel, diesel, fuel oil and kerosene) is as follow:

Pola Penyediaan dan Distribusi Premium, Minyak Solar, Diesel dan Minyak Bakar
The scheme of supply and distribution of premium, diesel fuel, diesel, and fuel oil



Pola Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Nasional

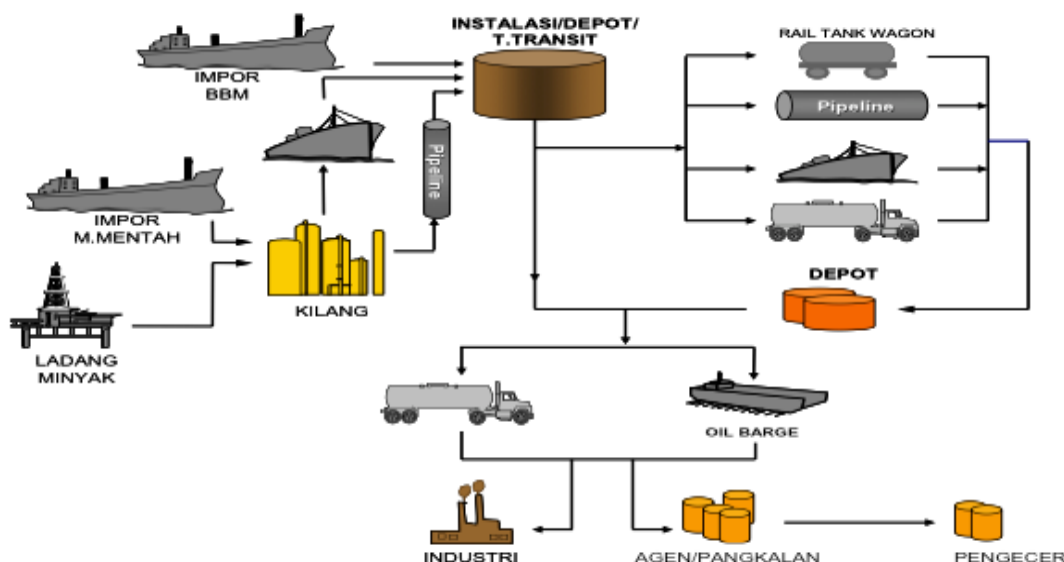
The National Fuel Supply and Distribution Scheme

Sarana pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak dan gas bumi dilakukan secara terintegrasi agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Nasional sampai ke konsumen akhir/masyarakat dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah pola penyediaan dan distribusi Bahan Bakar (Premium, Minyak Solar, Diesel, Minyak Bakar dan Minyak Tanah) :

The facilities of oil and gas processing, transportation, storage and trade are integrated to supply and distribute national fuel to final consumer. This is the supply and distribution scheme of premium, diesel fuel, fuel oil and kerosene:

Pola Penyediaan dan Distribusi Minyak Tanah

The scheme of kerosene supply and distribution



Pola Distribusi BBM dalam Peta Indonesia

The scheme of oil fuel distribution in Indonesian map



2. Sarana/Fasilitas Pengangkutan Gas

- Sarana Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Sampai tahun 2012, terdapat jaringan pipa transmisi gas bumi terpasang sepanjang 2.694,4 KM di Sumatera,

2. Gas Transportation Facility

- Gas Transportation through pipeline

Until 2012, the existing gas transmission pipeline is along 2,694.4 KM in Sumatera, 1,050.01 KM in Java and 69

1.050,01 KM di Jawa, dan 69 KM di Kalimantan. Sedangkan persetujuan jaringan pipa gas bumi untuk kepentingan sendiri terpasang 32 KM di Sumatera dan 25,2 KM di Jawa.

Pada tahun 2013, tidak ada pembaruan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi baik yang telah dibangun maupun yang akan dibangun. Sehingga tidak ada Izin Sementara, Izin Tetap, maupun Persetujuan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang diterbitkan oleh Menteri ESDM cq Dirjen Migas.

- Sarana Pengangkutan LPG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan pengisian LPG diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG. Pada tahun 2013 diterbitkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) sebanyak 53 Badan Usaha. Sehingga sepanjang tahun 2010 – 2013, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan LPG (dengan fasilitas Pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) sebanyak 196 Badan Usaha.

Sedangkan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan LPG (tanpa fasilitas pengisian Tabung LPG/*Bottling Plant*) yang mendapatkan Izin Usaha selama tahun 2013 adalah sebanyak 2 Badan Usaha. Dari tahun 2007 – 2013, telah diterbitkan 14 Izin Usaha Pengangkutan LPG dengan moda darat dan moda laut.

Pada tahun 2013 ini, pada sarana fasilitas pengangkutan LPG moda darat telah terdaftar total 592 unit truk tangki LPG dengan total kapasitas 7.937,9 MT dan sarana tangki timbun pada SPPBE dengan total kapasitas 11.779 MT. Sedangkan pada sarana fasilitas pengangkutan LPG moda laut, terdapat 15 unit kapal tanker LPG dengan kapasitas 40.703,8 MT.

- Sarana Pengangkutan Compressed Natural Gas (CNG)

Pada tahun 2013 diterbitkan sebanyak 2 Izin Usaha Pengangkutan CNG. Sehingga sepanjang tahun 2010–2013, total Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan CNG adalah sebanyak 7 Izin Usaha. Sejauh ini, sarana fasilitas pengangkutan CNG di Indonesia yang telah terdaftar adalah moda darat sejumlah 58 unit dengan total kapasitas 126.540 MT.

KM in Kalimantan. The existing gas pipeline for private interest is 32 KM in Sumatera and 25.2 KM in Java.

In 2013, there was no renovation on existing and planned gas transmission and distribution pipeline. Thus, Minister of Energy and Mineral Resources cq Directorate General of Oil and Gas did not issue Temporary License, Permanent License or Gas Transportation through Pipeline Approval.

- LPG Transportation

Based on Minister of Energy and Mineral Resources Number 26 Year 2009 concerning LPG Supply and Distribution, Business Entity conducting the LPG transportation and filling is mandated to have LPG Transportation License. In 2013, 53 LPG Transportation Licenses with bottling plant facility were issued. Thus, there are 196 business entities receiving LPG Transportation Licenses with bottling plant facility during 2012 to 2013.

There were 2 business entity acquiring LPG transportation license without bottling plant facility during 2013. Meanwhile, the Directorate General of Oil and gas has issued 14 LPG Transportation license with land and sea transportation in 2007 to 2013.

In 2013, there were 592 LPG tank trucks with the total capacity of 7,937.9 MT and storage tank in SPBBE with the total capacity of 11,779 MT registered in land LPG transportation facility. Meanwhile, 15 LPG tankers are registered as LPG sea transportation with the capacity of 40,703.8 MT.

- CNG Transportation

There were 2 CNG Transportation licenses issued in 2013. In 2010 to 2013, two business entities received CNG Transportation licenses. Tat present, there as 58 CNG transportation facilities in Indonesia with the capacity of 126,540 MT.

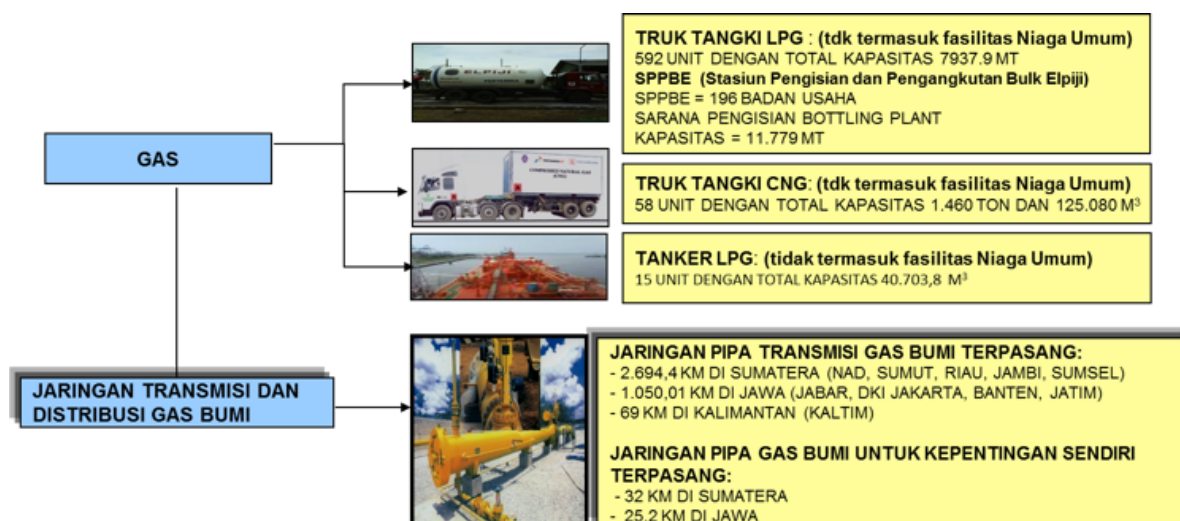
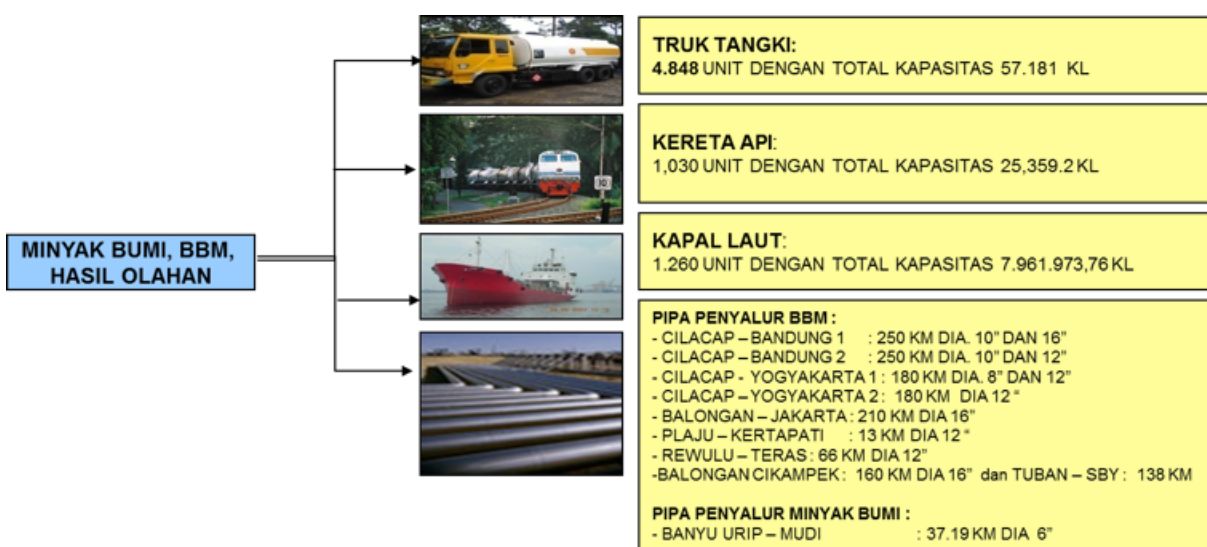
- Perkembangan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha pengangkutan migas dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi serta masih tingginya ketergantungan masyarakat akan bahan bakar fosil. Berikut macam moda sarana dan fasilitas pengangkutan migas yang telah terdaftar sampai pada tahun 2013 berikut kapasitasnya.

- The development of oil and gas transportation

The oil and gas transportation activity is increasing along with the increasing energy demand and the dependency on fossil fuel. This is the data of oil and gas transportation facilities and the capacity registered in 2013.

Kondisi Infrastruktur/Fasilitas Pengangkutan Migas Tahun 2013 (Berdasarkan Izin Usaha Pengangkutan)
The Condition Of Infrastructure/Facility in Oil and Gas Transportation In 2013 (Based On Transportation License)



Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

Oil and Gas Transportation License

Sesuai Undang – Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah telah membuka kesempatan

Based on Oil and Gas Law Number 22 Year 2001, the government has opened the business opportunity in

kepada Badan Usaha untuk dapat bergerak di bidang kegiatan usaha migas, dimana salah satu kegiatannya yaitu kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi. Untuk pelaksanaan tersebut setiap Badan Usaha diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha, dalam pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Migas Badan Usaha wajib menyampaikan dokumen kelengkapan yang terdiri dari Data administratif, Data Teknis, serta kelengkapan lainnya. Setelah persyaratan disampaikan secara lengkap, maka selanjutnya akan dilakukan penelitian dan evaluasi oleh Ditjen Migas dalam jangka waktu 10 hari.

oil and gas for business entity, including the oil and gas transportation. The business entity will need a license. In proposing the oil and gas transportation license, the business entity should submit administrative data, technical data, and other related data. If the documents are complete, Directorate General of Oil and gas will analyze and evaluate it in 10 working days.

Perkembangan Izin Usaha Pengangkutan Migas semenjak diterbitkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 dapat diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

The development of oil and gas transportation license until 2013 after the stipulation of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001 is shown in the table.

Perkembangan Jumlah Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi *

The development of oil and gas transportation license

IZIN USAHA		TAHUN										TOTAL
		2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
PENGANGKUTAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN	IZIN TERBIT	-	3	23	33	41	77	46	84	122	314	743
	PENYESUAIAN IZIN USAHA	-	-	1	5	27	32	36	64	71	82	318
	PERPANJANGAN IZIN USAHA	-	-	-	-	-	-	-	5	11	16	32
PENGANGKUTAN LPG	IZIN TERBIT	-	-	-	1	3	1	1	4	2	2	14
	PERPANJANGAN IZIN USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	2
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA		1	-	-	-	-	2	-	5	2	-	10
PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI		-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
PENGANGKUTAN CNG		-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	7
SPPBE		-	-	-	-	-	-	1	47	95	53	196

*Status : Desember 2013

*Status: December 2013

PENYIMPANAN MIGAS OIL AND GAS STORAGE

I. Penerbitan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

I.1. Izin Usaha Penyimpanan Migas yang Telah Diterbitkan

Semenjak diberlakukannya Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka terbuka kesempatan sektor swasta untuk ikut serta dalam memajukan industri hilir minyak dan gas bumi nasional. Salah satu yang terasa efek menguntungkan dari dibukanya kegiatan usaha tersebut yaitu swasta dapat membangun fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi nasional sehingga berdampak fasilitas penyimpanan di Indonesia mengalami peningkatan dari segi kapasitas penyimpanan dan juga mempermudah distribusi minyak dan gas bumi nasional. Salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas yaitu dengan pemberian izin usaha migas. Dengan pemberian izin usaha kegiatan usaha hilir, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan. Dalam menerbitkan izin usaha khususnya izin usaha penyimpanan, kepada Badan Usaha dibebankan beberapa kewajiban yaitu menjalankan penugasan dari menteri untuk menyediakan cadangan BBM nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM nasional dan Melaporkan mengenai kondisi BBM sebagai bagian dari cadangan BBM Nasional meliputi lokasi, jumlah, dan jenis kepada Badan Pengatur dan ditembuskan kepada Menteri setiap bulannya.

Seiring dengan adanya program pemerintah yaitu konversi Minyak tanah ke LPG maka permintaan LPG dalam tabung meningkat drastis sehingga banyak bermunculan badan usaha yang bergerak dalam jasa pengisian LPG ke dalam tabung. Semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Maka terhadap badan usaha yang memiliki usaha penyimpanan dengan fasilitas *bottling plant* LPG sesuai dengan skema usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut diwajibkan memiliki izin usaha penyimpanan LPG dengan fasilitas *bottling plant*.

I. I. Oil and Gas Storage License

I.1. The Issued Oil and Gas Storage License

Since the stipulation of Oil and Gas Law Number 22 Year 2001, the government has widely opened the opportunity for private sector to participate in national oil and gas downstream industry. One of the beneficial in this sector is that the private sector may build national oil and gas storage facility. Thus, the number of storage facility and the storage capacity in Indonesia will increase. It will also smooth the national oil and gas distribution. One of the monitoring by the government in oil nad gas downstream business is the issuance of oil and gas business license. In relation with downstream business license, the government determines the policy on oil and gas business based on existing oil and gas potential and reserve, production, domestic oil and gas demand, technology, environment and its preservation, national capability, and development policy. Business entity with storage license is obliged to carry out the mandate from Minister to supply national oil fuel stockpiling, to fulfill national oil fuel demand, and to submit monthly report concerning the oil fuel condition including the location, volume and type of oil fuel as part of national oil fuel stockpiling to BPH Migas copied to Minister of Energy and Mineral Resources.

Along with the government program on kerosene to LPG conversion, the LPG in cylinder demand is significantly increasing which triggers the emergence of business entities in LPG filling services. After the stipulation of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 26 Year 2009 on LPG supply and distribution, the business entity conducting storage business with LPG bottling plant facility is obliged to have a license.

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dilakukan dengan cara mengeluarkan izin usaha, dengan izin usaha tersebut kepada badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan migas dibebankan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Izin Usaha kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan migas. Pada tahun 2009 seiring dengan dimulainya program konversi minyak tanah ke LPG maka dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, pada peraturan tersebut diwajibkan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan dengan fasilitas *bottling plant* atau yang biasa dikenal dengan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk memiliki Izin usaha penyimpanan LPG yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

The monitoring and supervision of oil and gas storage business is conducted through the issuance of business license. The business entity with this license should conduct several obligations. Based on Government Regulation Number 36 Year 2004 on Oil and Gas Downstream Business and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 0007 Year 2005 on Requirements and Implementation Guidance in Oil and Gas Downstream Business License, Director General of Oil and Gas on behalf of Minister of Energy and Mineral Resources issues business license for oil and gas storage. To conduct kerosene to LPG conversion program in 2009, Minister of Energy and Mineral Resources stipulated a Regulation Number 26 Year 2009 on LPG Supply and Distribution. The regulation mandates business entity with storage activity with bottling plant facility or commonly known as LPG Bulk Filling Station to have the LPG storage license issued by Minister of Energy and Mineral Resources.

Semenjak diberlakukannya peraturan – peraturan tersebut, Dirjen Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas dalam kurun waktu tahun 2005 – 2013, yang terdiri dari 43 Izin Usaha Penyimpanan BBM dan 48 Izin Usaha Tetap Penyimpanan LPG (termasuk SPBE).

Based on the above regulations, Director General of Oil and Gas on behalf of Minister of Energy and Mineral Resources has issued Permanent Oil and Gas Storage License in 2005 to 2013 including 43 Oil fuel storage license and 48 LPG storage license.

Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas *Permanent Oil and Gas Storage License*

Izin Usaha <i>Business Licenses</i>	Tahun Year									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Penyimpanan BBM <i>Fuel Storage</i>	2	5	6	9	5	5	2	4	5	43
Penyimpanan LPG <i>LPG storage</i>	-	-	-	2	-	3	11	23	9	48

Selain izin usaha diatas, dalam rangka pembangunan fasilitas dan perizinan yang akan dilakukan oleh badan usaha, maka Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan izin usaha sementara dari tahun 2005 hingga saat ini (status Desember 2013) izin sementara penyimpanan Migas yang telah dikeluarkan:

Besides the above mentioned licensed, Director General of Oil and Gas also on behalf of Minister of Energy and Mineral Resources also issues temporary oil and gas storage license from 2005 until today (as of December 2013). The issued licenses are as follow:

Izin Usaha Sementara Penyimpanan Migas *Temporary Oil and Gas Storage License*

Izin Usaha Sementara <i>Temporary Business License</i>	
BBM Oil Fuel	10
Gas Gas	5

Untuk tahun 2013 dikeluarkan Izin Sementara sebanyak 9 (Sembilan) Badan Usaha.

Director General of Oil and Gas has issued 9 temporary licenses in 2013.

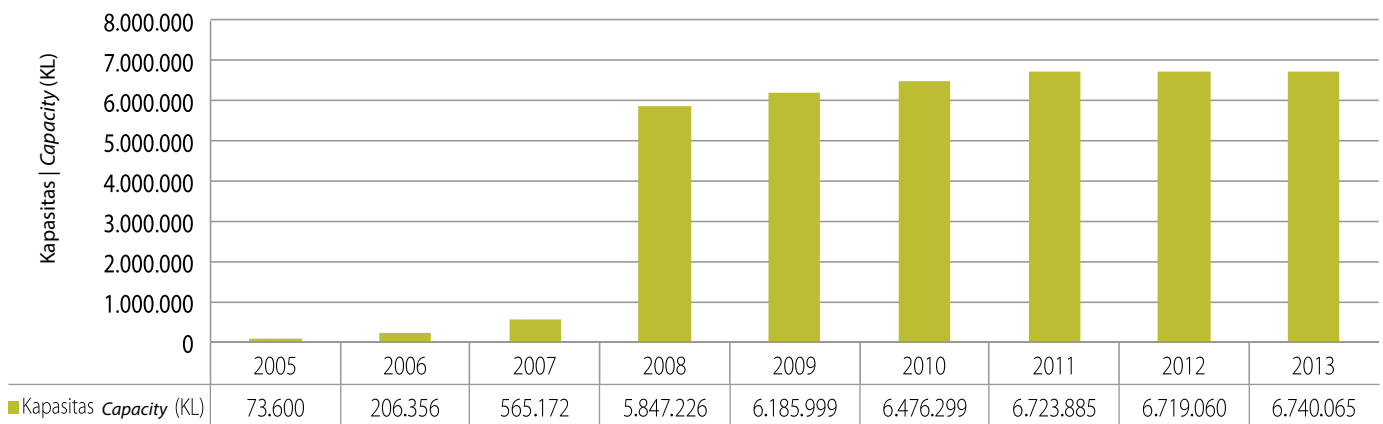
1.2 Kapasitas dan Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi

Dengan dibukanya kegiatan usaha hilir minyak dan gas Bumi diharapkan terjadi akselerasi dalam hal pembangunan infrastruktur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dengan diberlakukannya Undang – Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka sektor swasta dapat ikut membangun dan ikut serta dalam kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi. Hal ini memberi keuntungan kepada Negara dikarenakan dengan dibangunnya fasilitas infrastruktur penyimpanan minyak bumi oleh pihak swasta, maka kapasitas penyimpanan minyak bumi dalam negeri mengalami peningkatan.

1.2 Capacity and Facility of Oil and Gas Storage

The opportunities in oil and gas downstream activity are expected to create acceleration in oil and gas downstream infrastructure development. The oil and gas law number 22 Year 2001 has widely opened the opportunity for private sector to participate in oil storage business. It is beneficial for the government since the domestic oil storage will increase with the development of oil storage infrastructure.

Kapasitas Penyimpanan BBM
Oil Fuel Storage Facility



Terlihat dari Gambar bahwa terjadi peningkatan kapasitas penyimpanan nasional dari tahun ke tahun. Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM secara signifikan terjadi pada tahun 2008 setelah PT. Pertamina (Persero) mendapat Izin Usaha Penyimpanan BBM dari Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. Pertamina memiliki fasilitas infrastruktur penyimpanan yang terbesar di Indonesia, dari 6.740.065 KL kapasitas penyimpanan BBM Nasional, Pertamina memiliki fasilitas penyimpanan sebesar 5,45 juta kiloliter atau sebesar 80,88 % dari kapasitas penyimpanan nasional. Pada tahun 2010 terdapat 1 Badan Usaha yang tidak memperpanjang izin usaha tetap penyimpanan BBM nya yaitu PT. AKR Corporindo (Surabaya). Pada Tahun 2011 terdapat 4 Badan Usaha yang tidak memperpanjang izin usaha tetap penyimpanan BBM yang menyebabkan penurunan kapasitas penyimpanan BBM pada tahun 2012 (sesuai Gambar 1 di atas). Badan Usaha yang tidak memperpanjang izinnya adalah PT. AKR Corporindo (Ciwandan), PT. Petro Andalan Nusantara, PT. Humpuss Aromatik, dan PT. Dharma Karya Perdana.

The picture describes the increase of national storage capacity. The significant oil fuel storage capacity occurred in 2008 after PT Pertamina (Persero) obtained oil fuel storage license from Minister of Energy and Mineral Resources. Pertamina owns the biggest storage facility in Indonesia with the capacity of 5.45 million KL or 80.88% from the national storage capacity of about 6,740,065 KL. In 2010, one business entity did not extend its oil fuel storage license, namely PT AKR Corporindo (Surabaya). In 2011, four business entities did not extend the license that caused the decline of oil fuel storage capacity in 2012 (based on picture 1), namely PT. AKR Corporindo (Ciwandan), PT. Petro Andalan Nusantara, PT. Humpuss Aromatik, dan PT. Dharma Karya Perdana.



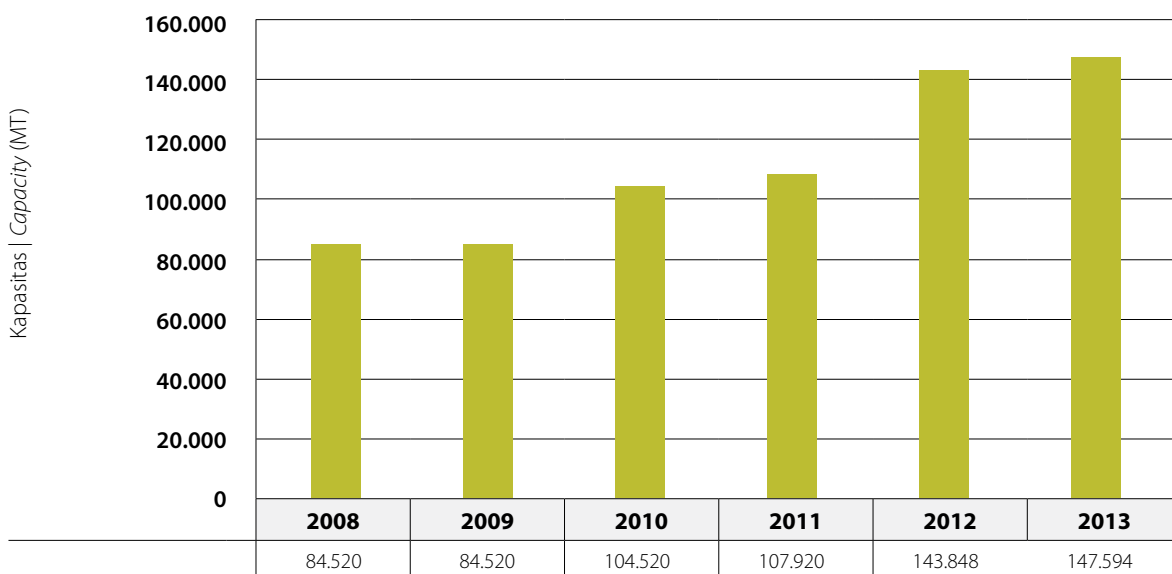
1.3 Kapasitas dan Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi

Sedangkan untuk penyimpanan gas bumi, di kegiatan usaha hilir didominasi oleh kegiatan usaha penyimpanan LPG, dan dikarenakan peran PT Pertamina (persero) yang menguasai pasar LPG PSO di Indonesia, fasilitas penyimpanan LPG yang ada di Indonesia merupakan satu rantai distribusi dari kegiatan usaha niaga LPG Pertamina.

1.3 Gas Storage Capacity and Facility

The gas storage business in downstream sector is dominated by LPG storage since PT Pertamina (Persero) dominates LPG PSO market in Indonesia. The LPG storage facility in Indonesia is one distribution chain from PT Pertamina's LPG trade business.

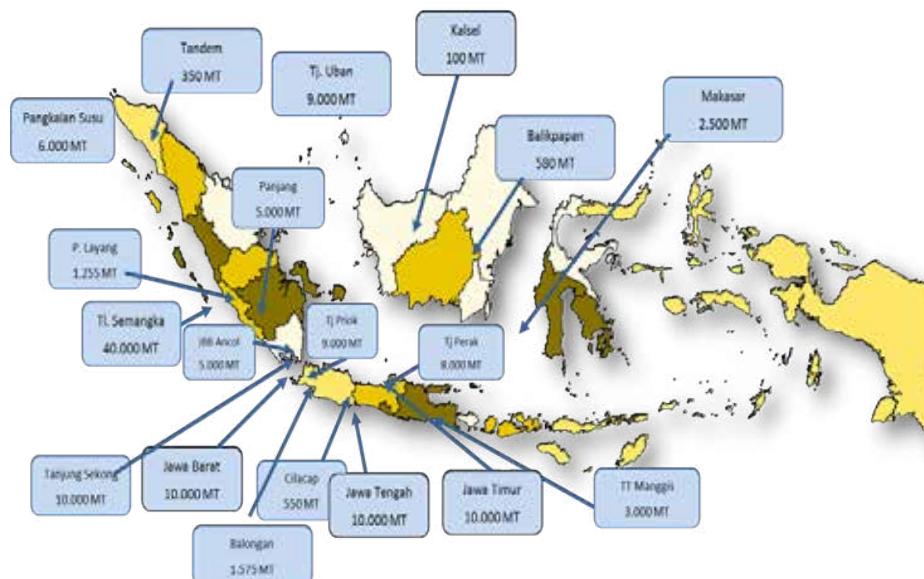
Kapasitas Penyimpanan Gas
Gas Storage Capacity



Terjadi kenaikan kapasitas pada tahun 2013 sebesar 3.746 MT hal ini didapatkan dari penambahan kapasitas dari SPBE dan SPPBE yang beroperasi.

The increase of capacity in 2013 of 3,746 MT is due to additional capacity from operating SPBE and SPPBE.

Kapasitas Penyimpanan Gas
Gas Storage Capacity

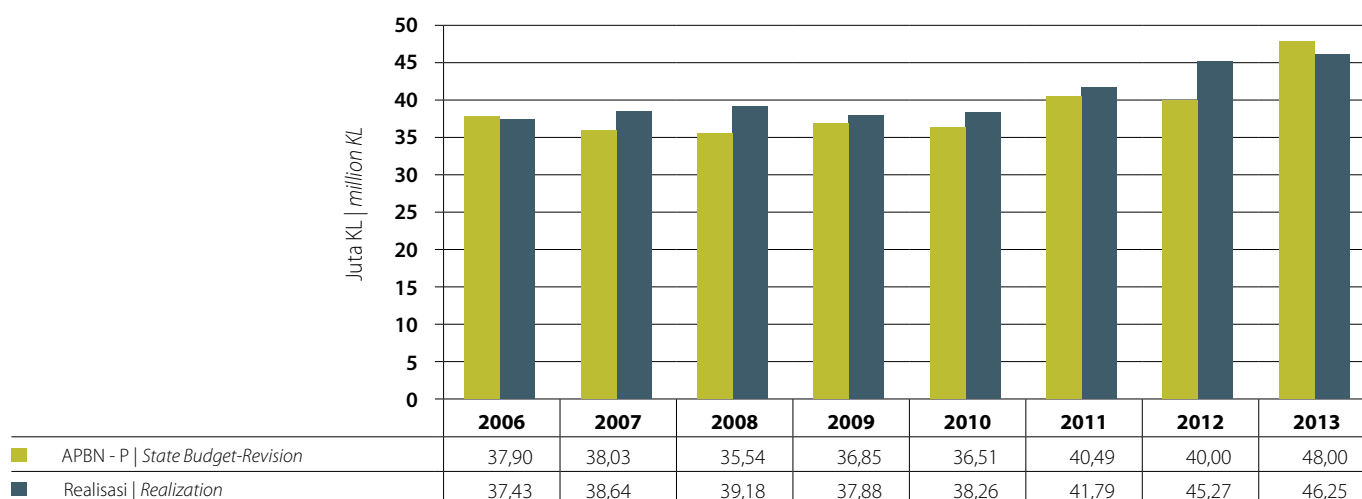


HARGA DAN SUBSIDI PRICE AND SUBSIDY

Volume Bahan Bakar Bersubsidi

A. Volume Jenis BBM Tertentu

Volume Jenis BBM Tertentu pada tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan volume jenis BBM tertentu tahun 2012, berikut tabel realisasi jenis BBM tertentu terhadap kuota dari tahun 2006-2013 :



Keterangan : realisasi tahun 2013 hanya dari PT Pertamina (Persero)
Note: the realization in 2013 was derived from PT Pertamina

Penambahan kuota pada APBNP 2013 dilakukan dengan pertimbangan berikut :

- Pertumbuhan Ekonomi 6,2% dengan perkiraan penjualan kendaraan:
 - Mobil 1,1 juta unit ;
 - Motor 7,1 juta unit.
- Disparitas harga pada bulan Januari – April 2013 mencapai Rp. 5.400/liter, sehingga kendaraan pribadi masih menggunakan premium.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi jenis BBM tertentu tahun 2013 tidak melebihi kuota jenis BBM tertentu tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

The addition of quota in State Budget-Revision Year 2013 is based on these considerations:

- Economy growth is 6.2% with the vehicle sales calculation:
 - 1.1 million units of car
 - 7.1 million units of motorbike
- The price disparity in January to April 2013 is Rp 5,400/ liter that makes the private car consumes premium.

The table shows that the realization of certain oil fuel in 2013 did not exceed the quota of certain oil fuel in 2013 with the details as follow:

Izin Usaha Tetap Penyimpanan Migas Permanent Oil and Gas Storage License

NO	JENIS BBM TERTENTU CERTAIN TYPES FUEL	KUOTA (juta KL) QUOTA (million KL)	REALISASI(juta KL) REALIZATION (million KL)
1.	Bensin (Gasoline) RON 88	30,77	29,26
2.	Minyak Tanah Kerosene	1,20	1,11
3.	Minyak Solar Gas oil	16,03	15,88

Pemerintah telah berhasil menjaga realisasi volume BBM bersubsidi Tahun 2013 pada kisaran 46,25 juta kl, ada penghematan sebesar 1,75 juta kl dari kuota 48 juta kl. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatur realisasi BBM Tertentu agar tidak melebihi kuota meliputi :

1. Pengendalian jenis BBM tertentu yang dilaksanakan melalui Permen ESDM 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM, dengan pengaturan sebagai berikut :

A. Transportasi Jalan

- Pentahapan pembatasan penggunaan Bensin RON 88 untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD :
 - Dilaksanakan untuk wilayah Jawa Bali
 - Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013 untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan
 - Dilaksanakan mulai 1 Juli 2013 untuk wilayah Sulawesi
- Pentahapan pembatasan penggunaan Solar untuk Kendaraan Dinas instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD :
 - Dilaksanakan mulai 1 Februari 2013, di Jabodetabek
 - Dilaksanakan mulai 1 Maret 2013 untuk wilayah Jawa Bali lainnya
- Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi
- Mobil Barang dengan jumlah roda lebih dari 4 (empat) untuk pengangkutan hasil kegiatan kehutanan dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 Maret 2013.

B. Transportasi Laut

Transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung mulai 1 Februari 2013 dilarang menggunakan Minyak Solar subsidi.

2. Penyesuaian harga BBM Tertentu dengan kompensasi bantuan langsung sementara kepada masyarakat.

B. Volume LPG Tabung 3 Kg

Volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2012, berikut tabel realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota dari tahun 2008-2013 :

The government has succeeded in maintaining the realization of subsidized oil fuel volume in 2013 on range of 46.25 million KL with the saving of 1.75 million KL from the quota of 48 million KL. The government's efforts in managing the realization of certain oil fuel not to exceed the quota are:

1. *The management of certain oil fuel through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 1 Year 2013 concerning oil fuel consumption management with the arrangements as follow:*

A. Land Transportation

- *The restriction of Gasoline RON 88 consumption for official, local government, State own enterprise and local own enterprise vehicle in:*
 - *Java and Bali*
 - *Sumatera and Kalimantan starting 1 February 2013*
 - *Sulawesi starting 1 July 2013*
- *The restriction of diesel fuel consumption for official, local government, State own enterprise and local own enterprise vehicle in:*
 - *Jabodetabek starting on 1 February 2013*
 - *in Java and Bali starting 1 March 2013*
- *Carrier cars with more than 4 wheels to transport plantation and mining products are prohibited to consume subsidized diesel fuel*
- *Carrier cars with more than 4 wheels to transport forestry product are prohibited to consume subsidized diesel fuel starting on 1 March 2013*

B. Sea Transportation

Sea transportation such as non pioneer ship and non cruise is prohibited to consume subsidized diesel fuel starting on 1 February 2013.

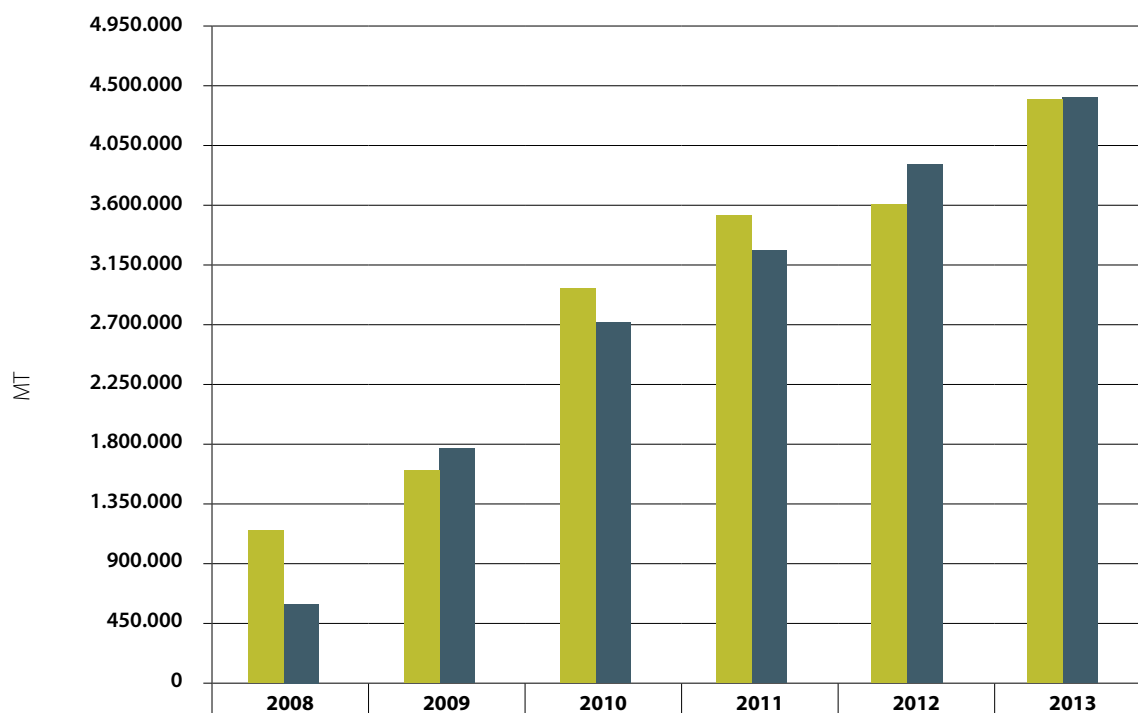
2. *The price adjustment of certain oil fuel with the compensation of temporary direct aid to public.*

B. The volume of 3 kg LPG cylinder

The volume of 3 kg LPG cylinder in 2013 increased compared to its volume in 2012. This is the table of 3 kg LPG cylinder realization toward the quota in 2008 to 2013.

Volume LPG Tabung 3 Kg 2008-2013

The volume of 3 kg LPG cylinder 2008-2013



APBN - P State Budget-Revision	1.144.020	1.600.000	2.973.342	3.522.000	3.606.105	4.394.000
Realisasi Realization	592.242	1.765.374	2.713.918	3.257.918	3.905.925	4.403.027

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi LPG Tabung 3 Kg tahun 2013 melebihi kuota LPG Tabung 3 Kg tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

The table shows that the realization of 3 kg LPG cylinder in 2013 exceeded the quota in 2013 with the details as follow:

JENIS Type	KUOTA (juta MT) QUOTA (million MT)	REALISASI (juta KL) REALIZATION (million KL)
LPG Tabung 3 Kg	4,39	4,40

Realisasi pada tahun 2013 melebihi kuota yang telah ditetapkan karena adanya faktor-faktor berikut :

- Peningkatan pertumbuhan penduduk
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg
- Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.
- Tambahan paket konversi tahun 2013 dengan jumlah paket sebesar ± 1,3 juta paket

The realization in 2013 exceeded the quota due to these factors:

- The increase of population
- The increase of public awareness to use 3 kg LPG
- The shift of public culture to use clean and environmentally friendly energy
- The addition of conversion package in 2013 of about 1.3 million packages.

Dengan adanya program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg, volume LPG Tabung 3 Kg mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut hasil program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2013 :

The kerosene to 3 kg LPG conversion program has increased the volume of 3 kg LPG each year. The results of kerosene to LPG conversion program 2013 are:

Keterangan Note	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Distribusi Paket (Paket)* Package distribution (package)*	3.705.047	15.757.487	24.160.036	4.630.008	5.581.686	166.484	1.301.101	55.301.849
Refill LPG PSO (MT)** LPG PSO Refill (MT)**	21.476	547.407	1.766.551	2.711.678	3.257.845	3.905.405	4.403.027	16.613.910
Penarikan Mitan (KL)*** Kerosene withdrawal (KL)***	109.116	2.104.349	5.275.468	7.609.596	8.263.229	8.775.843	8.849.844	40.987.515

Angka tersebut berdasarkan surat PT.Pertamina (Persero) Nomor 042/C00000/2014-S3 tanggal 22 Januari 2014

* Tahun 2011 dan sebagian 2012 adalah carry over tahun 2010 dengan beban anggaran APBN tahun 2010 serta program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2012 sejumlah 1.957 paket.Data distribusi mengacu pada data BAST (Berita Acara Serah Terima)

** Realisasi tahun 2007-2009 sudah di audit BPK,tahun 2010-2011 telah di audit BPK,tahun 2012 adalah hasil verifikasi pemerintah dan realisasi tahun 2013 sampai bulan Desember.

*** Realisasi tahun 2007-2009 sudah di audit BPK,tahun 2010-2011 telah di audit BPK,tahun 2012 adalah hasil verifikasi pemerintah dan realisasi tahun 2013 sampai bulan Desember.

The number is based on the letter of PT Pertamina (Persero) Number 042/C00000/2014-S3 dated 22 January 2014

* Year 2011 and half of 2012 is carry over year 2010 with the Year Budget 2010 and the kerosene to LPG conversion program year 2012 amounted 1,957 packages. The distribution data refers to Acceptance data (BAST)

** The realization in 2007 to 2009 has been audited by BPK. The realization in 2010 to 2011 has been audited by BPK. The realization in 2012 is the result of the government's verification, while the realization in 2013 is up to December.

*** The realization in 2007 to 2009 has been audited by BPK. The realization in 2010 to 2011 has been audited by BPK. The realization in 2012 is the result of the government's verification, while the realization in 2013 is up to December.

Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg tahun 2013 telah dilakukan di 10 (sepuluh) propinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

The kerosene to 3 kg LPG conversion in 2013 is conducted in 10 provinces namely Aceh, West Sumatera, Bangka Belitung, Central Kalimantan, North Kalimantan, South Kalimantan, North Sulawesi, Gorontalo, South Esat Sulawesi and Central Sulawesi.

Penghematan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut :

The saving is as follow:

Kegiatan Activity	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Gross Penghematan 1) Saving gross 1) (Rp. Billion)	286,866	9.873,554	12.367,718	15.533,027	25.636,720	27.317,631	29.750,654	120.766,489
Biaya Konversi 2) (Rp.Milyar) Conversion cost 2) (Rp Billion)	935,700	2.024,700	5.077,800	4.713,900	0,000	0,000	329,906	13.082,006
Nett Penghematan 3) (Rp.Milyar) Saving nett 3) (Rp Billion)	-648,834	7.848,854	7.289,918	10.819,127	25.636,720	27.317,631	29.420,748	107.684,483

Angka tersebut berdasarkan surat PT.Pertamina (Persero) Nomor 042/C00000/2014-S3 tanggal 22 Januari 2014

(1) Gross Penghematan dihitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan harga patokan LPG

(2) Biaya Konversi yang meliputi biaya paket dan biaya pendukung mengacu pada surat Dirjen Migas Nomor 14486/04/DJM.O/2011 perihal Realisasi Anggaran Konversi 2007-2010.Namun belum termasuk biaya konversi 2012 sebanyak 1.957 paket dan kekurangan pembayaran senilai 2.947 triliun

(3) Nett penghematan subsidi dihitung dari selisih gross penghematan (1) dengan biaya (2)

The number is based on the letter of PT Pertamina (Persero) Number 042/C00000/2014-S3 dated 22 January 2014

1) The saving gross is calculated based on economical value of kerosene and LPG standard price

2) The conversion cost includes package cost and supporting cost which refers to the letter of Director General of Oil and Gas Number 14486/04/DJM.O/2011 concerning the Realization of Conversion Budget Year 2007 – 2010. It has not included the conversion cost in 2012 up to 1,957 packages and the deficiency of payment up to Rp 2.947 trillion.

3) The saving nett of subsidy is calculated from the deviation of saving gross 1) and cost 2)

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2013





06

BAB
CHAPTER

Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

***Directorate of Oil and Gas
Technique and Environment***

Standarisasi
Standardization

Lingkungan
Environment

Keselamatan Hulu Migas
Oil and Gas Upstream Safety

Keselamatan Hilir Migas
Oil and Gas Downstream Safety

Penunjang
Supporting Business

**DIREKTORAT JENDERAL MINYAK
DAN GAS BUMI**

DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

STANDARISASI STANDARDIZATION

Sesuai dengan amanat Permen ESDM No. 18 Tahun 2010, Ditjen Migas melaksanakan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur, bimbingan teknis, kerjasama, pembinaan dan pengawasan standar teknis material, peralatan, instalasi dan instrumentasi dalam kegiatan usaha migas serta Produk Migas dan Pelumas. Disamping itu juga mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengawasan/penerapan standar serta melakukan evaluasi pelaksanaan penerapan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur peralatan, instalasi dan instrumentasi kegiatan migas.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan akan standar yang dapat diterapkan secara langsung terhadap kondisi dan situasi di Indonesia meningkat dimana standar yang sudah menjadi SNI masih relatif sedikit sekitar 150 standar dibanding dengan jumlah standar nasional dan internasional seperti ISO, API, ASME, ASTM, AWS, NACE, British Standar, JIS, DNV dan ANSI yang berjumlah kurang lebih 1500 standar, maka dipandang perlu untuk melanjutkan program perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI-2).

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Tujuan standarisasi antara lain :

- Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional, baik antara produsen maupun antara produsen masyarakat; dan
- Meningkatkan efisiensi produksi, membentuk persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi serta meningkatkan kepastian usaha.

1. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Dalam rangka melaksanakan tugas perumusan standar untuk produk, jasa dan personel. Pada tahun 2013 Ditjen

Based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 Year 2010, Directorate General of Oil and Gas formulates the standard, norm, criteria, technical assistance, cooperation, mentoring and supervision on technical standard of material, tools, installation and instrumentation in oil and gas upstream activity as well as the oil and gas product and lubricant. Directorate General of Oil and Gas also coordinates and prepares the material of formulation and supervision or standard implementation as well as evaluates the implementation of oil and gas standard, norm, criteria, technical assistance, cooperation, mentoring and supervision on technical standard of material, tools, installation and instrumentation.

In line with the development of science and technology, the need of standard to be directly implemented in Indonesia's condition and situation is increasing. The number of SNI (National Standard) is relatively small of about 150 compared to the national and international standard like ISO, API, ASME, ASTM, AWS, NACE, British Standard, JIS, DNV and ANSI with 1500 standards. Thus, the draft of Indonesian National Standard (RSNI) program should be continued to increase the number of RSNI-2.

Standard is technical specification or the standardized formula including the procedure and method based on consensus of all related parties by taking into account the requirements of safety, security, health, environment, science and technology as well as experience, recent update and future to obtain optimum benefits. The purpose of standardization is:

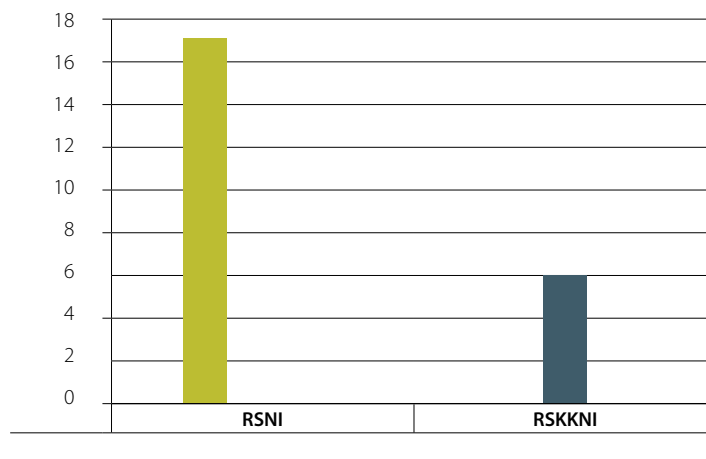
- Increasing the protection for consumer, business entity, worker, and other society for the safety, security health, and environmental.*
- Increasing the certainty, success and efficient business transaction in the country and international world, both between the producers and consumers;*
- Increasing the production efficiency, building fair and transparent business competition, fostering the innovation ability and increasing the business certainty.*

1. The formulation of Indonesia National Standard Draft (RSNI) and Indonesia National Work Competency Standard Draft RSKKNI)

In formulating the standard of product, services and personnel, Directorate General of Oil and Gas have

Migas telah menghasilkan 17 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan 6 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

produced 17 RSNI and 6 RSKKNI in 2013 as shown in this picture.



Adapun Rancangan Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan dan dikonsensuskan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

RSNI formulated and brought into consensus in 2013 is as follow:

No.	Judul Title	Referensi Reference	Panitia Tek. Committee
1.	Industri Minyak dan Gas Bumi–Material yang Digunakan Dalam Lingkungan Mengandung H ₂ S dalam produksi Minyak dan Gas. Bagian 1 : Prinsip Umum Pemilihan Material Tahan Retakan <i>Oil and Gas Industry-Material with H₂S content in oil and gas production. Part 1: General Principle in Crack Resistant Material Selection</i>	RSNI-2 ISO 15156-1 : 2013	75-01/S1
2.	Industri Minyak dan Gas Bumi–Material yang Digunakan Dalam Lingkungan Mengandung H ₂ S dalam produksi Minyak dan Gas. Bagian 2 : Baja Karbon dan Baja Paduan Tahan Retakan dan Penggunaan Besi Cor <i>Oil and Gas Industry-Material with H₂S content in oil and gas production. Part 2: crack resistant carbon steel and steel alloy and cast iron</i>	RSNI-2 ISO 15156-2 : 2013	75-01/S1
3.	Industri Minyak dan Gas Bumi–Material yang Digunakan Dalam Lingkungan Mengandung H ₂ S dalam produksi Minyak dan Gas. Bagian 3 : Ketahanan-Retakan Paduan Tahan Korosi (CRA's) dan Paduan Lainnya <i>Oil and Gas Industry-Material with H₂S content in oil and gas production. Part 3: Corrosion Resistant Alloys and other alloy</i>	RSNI-3 6219-3/NACE MR 0175/ ISO 15156-3 : 2012	75-01/S1
4.	Pedoman Pembuatan dan Pembelian Pipa Karet untuk Mooring (tambatan) lepas pantai (Pipa Apung) <i>The guidance of offshore rubber pipe production and purchase for mooring</i>	RSNI-2 7643:2013/REV. SNI 7643:2010	75-01/S1
5.	Industri Minyak dan gas Bumi–Material Lumpur Pemboran–Spesifikasi dan Pengujian <i>Oil and Gas Industry-Drilling Mud Material-Specification and Test</i>	SNI 13-6902-2002 (ISO 13500:2008)	75-01/S2
6.	Equipment for Well Cementing–Part 3: Performance Testing of Cementing Float Equipment <i>Equipment for Well Cementing-Part 3: Performance Testing of Cementing Float Equipment</i>	SNI 13-6980-2003 (ISO 10427-3	75-01/S2
7.	Evaluasi Sistem Pemrosesan Cairan Pemboran <i>Evaluation of Drilling Liquid Process System</i>	SNI 13-6093-2002 (ISO 13501)	75-01/S2
8.	Petroleum and Natural gas Industries–Sucker rods (pony rods, polished rods, coupling and sub couplings) – Specification <i>Petroleum and Natural Gas Industries-sucker rods (pony rods, polished rods, coupling and sub couplings)-specification</i>	ISO 10428 : 1993	75-01/S3

No.	Judul Title	Referensi Reference	Panitia Tek. Committee
9	Petroleum and Natural gas Industries— Downhole Equipment—Lock Mandrels and Landing Nipples <i>Petroleum and natural gas industries—Down hole Equipment—Lock Mandrels and landing nipples</i>	ISO 16070 : 2005	75-01/S3
10.	Petroleum and Natural gas Industries—Drilling and Production equipment – Part 1 : Side-Pocket Mandrels <i>Petroleum and natural gas industries-drilling and production equipment-Part 1: side-pocket mandrels</i>	ISO 17078-1 : 2005	75-01/S3
11	Petroleum and Natural gas Industries – Drilling and Production equipment – Part 2 : Flow-Control Devices for Side –Pocket Mandrels <i>Petroleum and natural gas industries-drilling and production equipment-Part 2: Flow-Control Devices for side-pocket mandrels</i>	ISO 17078-2 : 2005	75-01/S3
12	Petroleum and Natural gas Industries – Drilling and Production equipment – Part 3 : Running Tools, Pulling Tools and Kick – Over Tools and Latches for Side – Pocket Mandrels <i>Petroleum and natural gas industries-drilling and production equipment-part 3: running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for side-pocket mandrels</i>	ISO 17078-3 : 2005	75-01/S3
13	Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Centrifugal Pump <i>Petroleum, petrochemical and natural gas industries- centrifugal pump</i>	ISO 13709 : 2011	75-01/S5
14	Metode Uji Standar Untuk Kehilangan Minyak Lumas Akibat Penguapan Dengan Metode Noack <i>Standard Test Method for lubricants loss due to noack method evaporation</i>	ASTM D 5800	75-02/S3
15	Metode Uji Standar Untuk Pengukuran Viskositas Pada Temperatur dan Shear Rate Tinggi Menggunakan Viskometer Kapiler Multisel <i>Standard Test Method for viscosity measurement at high temperature and shear rate with multi-cells capillary viscometer</i>	ASTM D 5481	75-02/S3
16	Metode Uji Standar Untuk Stabilitas Geser Fluida Yang Mengandung Polymer Dengan Menggunakan Peralatan Injektor Diesel Buatan Eropa <i>Standard Test Method for Fluid Sliding Stability with polymer using European Diesel Injector</i>	ASTM D 6278	75-02/S3
17	Metode Uji Standar Untuk Penetapan Air Dalam Produk Petroleum, Minyak Lumas dan Aditif Dengan Titasi Karl Fischer Kolometris <i>Standard Test Method with water content determination in petroleum, lubricant and additive product with Karl Fischer Colometric titration</i>	ASTM D 6304	75-02/S3

2. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang dirumuskan dan dilakukan pra konvensi serta konsensi adalah sebagai berikut :

- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting), Bidang Jasa Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Sub Bidang Pesawat Angkat;
- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu, Sub Bidang Bahan Peledak;
- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting), Sub Bidang Inspektur Bejana Tekan;
- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting), Sub Bidang Inspektur Tangki Timbun
- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting), Sub Bidang Inspektur Pipa Penyalur; dan
- Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Sub Bidang Distribusi Gas Alam dan Buatan

3. Penerbitan Sertifikat Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Kualifikasi Juru Las dan Prosedur Pengelasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam

2. Formulating RSNI and RSKKNI

RSKKNI that are formulated and brought into preconvention and consensus are as follow:

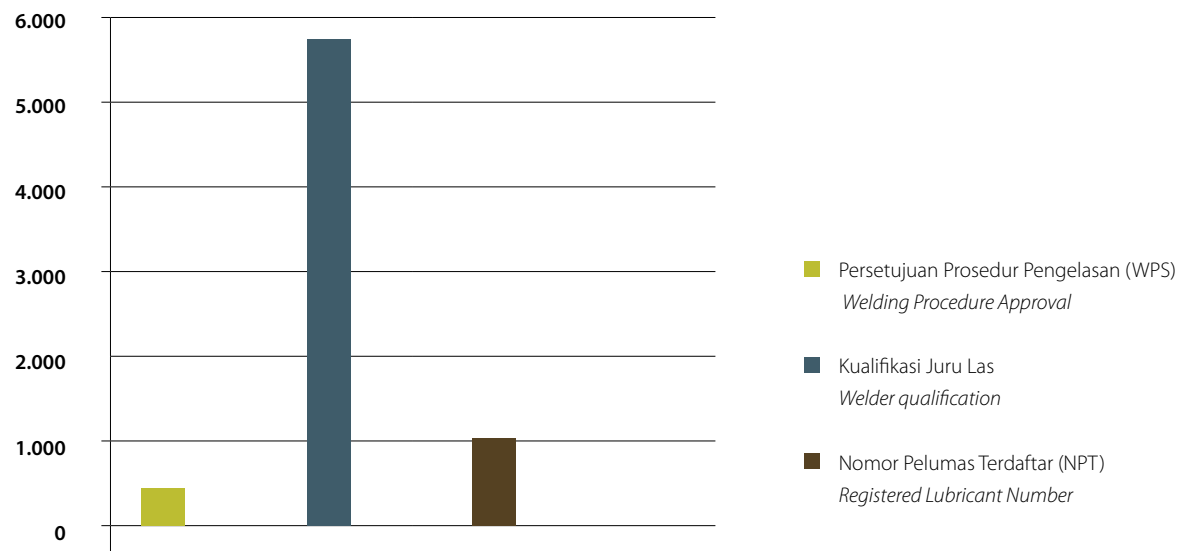
- Upstream and Downstream Oil and Gas industry Sub Sector, Oil and Gas Services, Crane;
- Upstream oil and gas industry and explosive sub sector
- Upstream and downstream oil and gas industry, Inspector of Pressure Vessel;
- Upstream and Downstream Oil and Gas industry Sub Sector, Inspector of Storage Tank;
- Upstream and Downstream Oil and Gas industry Sub Sector, Inspector of Distributing Pipeline; and
- Downstream Oil and Gas industry Sub Sector, Natural and synthetic Gas Distribution.

3. Registered Lubricants Number Certificate (NPT), welder Qualification and welding Procedures

Based on minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 53 Year 2006 concerning the Registration of

Negeri dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi serta untuk mendukung kegiatan usaha migas baik di Hulu dan Hilir, Sub Direktorat Standarisasi mempunyai tugas untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Kualifikasi Juru Las dan Prosedur Pengelasan. Pada Tahun 2013, telah dikeluarkan sertifikat NPT, Kualifikasi Juru las dan Persetujuan Prosedur Pengelasan dengan rincian seperti pada gambar berikut :

Domestically Marketed Lubricants and Government Regulation Number 11 Year 1979 concerning the working safety of oil and gas and processing as well as the effort to support the upstream and downstream oil and gas business, Sub Directorate of Standardization holds the duty to proceed the Certificate of Registered Lubricants number (NPT), welder Qualification and Welding Procedure. In 2013, the issued NPT, welder qualification and welding procedure are as follow.



Adapun Jumlah Sertifikat Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Kualifikasi Juru Las dan Prosedur Pengelasan adalah sebagai berikut :

While the number of certificate of NPT, welder qualification and welding procedure is as follow:

No.	Kegiatan Activity	Jumlah Total
1	Persetujuan Prosedur Pengelasan (WPS) <i>Welding Procedure Approval</i>	574
2	Kualifikasi Juru Las <i>Welder qualification</i>	5.802
3	Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) <i>Registered Lubricant Number (NPT)</i>	1.099



LINGKUNGAN ENVIRONMENT

I. REGULASI

1. Penerbitan Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas tentang Residual Life Assessment (RLA)

Sehubungan dengan semakin banyaknya peralatan dan instalasi pada kegiatan operasi migas yang sudah mengalami "ageing" atau penuaan sehingga dapat berpotensi mengalami unplanned shutdown, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas menerbitkan Edaran Nomor: 12024/18.05/DMT/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pemeriksaan Peralatan Operasi Migas yang telah Melewati Umur Desain (*Design Life*) dan yang Tidak Memiliki Data.

Edaran dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:

1. BU/BUT yang akan mempergunakan peralatan dan instalasi yang telah melewati *design life* dan atau akan menggunakan peralatan dan instalasi yang tidak memiliki data agar melakukan Residual Life Assessment (RLA)
2. Pelaksanaan RLA sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengumpulan data teknis: riwayat pengoperasian, pemeliharaan, dan data teknis dari pabrik pembuat peralatan dan instalasi serta kondisi operasi terakhir.
 - b. Pengujian dengan menggunakan metode pengujian tertentu sesuai dengan kondisi peralatan yang akan diuji.
 - c. Perhitungan sisa umur pakai (*remaining life*) peralatan dan instalasi.
 - d. Metode dan frekuensi inspeksi yang harus dilakukan selama sisa umur pakai peralatan dan instalasi.
3. RLA dapat dilaksanakan oleh BU/BUT pengoperasian peralatan dan instalasi, dan atau oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang melaksanakan RLA harus perusahaan nasional dan dapat bekerjasama dengan perusahaan asing dalam hal penggunaan teknologi dan personil yang belum ada di dalam negeri.
4. Ditjen Migas tidak akan menerbitkan sertifikat kelayakan untuk peralatan dan instalasi yang melewati *design life* atau tidak memiliki data kecuali dilakukan RLA.

2. Persetujuan, Rekomendasi dan Penilaian Teknis

Selama tahun 2013 terdapat beberapa persetujuan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan. Persetujuan dan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pengelolaan Limbah Lumpur Pemboran Berdasarkan Permen ESDM No. 045 tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan untuk limbah lumpur bor wajib dilakukan

I. REGULATION

1. The Issuance of Director of Oil and Gas Technique and Environment Circular Letter concerning Residual Life Assessment (RLA)

In relation with the increasing number of ageing tools and installations in oil and gas operation that may cause unplanned shutdown, Director of Oil and Gas Technique and Environment issues Circular Letter Number 12024/18.05/DMT/2013 dated 14 June 2013 concerning the inspection on Oil and Gas Operation Tools that are already in Design Life and do not have data.

The circular letter includes:

1. *The Business entity/permanent business establishment that is using the tools and installation which is in design life and/or using the tool and installation which does not have any data to conduct RLA.*
2. *RLA includes:*
 - a. *Collecting technical data: operational history, maintenance and technical data from the company which produces the tool and installation, and last operation condition.*
 - b. *Testing with certain method based on the condition of the tested tools.*
 - c. *Counting the remaining life of the tool and installation.*
 - d. *Inspection method and frequency in the remaining tool and installation life.*
3. *RLA is conducted by Business entity/Permanent business establishment in tools and installation operation or by the third party. The third party who conducts RLA is the national company or company in cooperation with foreign company in term of utilizing the technology and worker not yet available in the county.*
4. *Directorate General of Oil and gas will not issue the certificate for the tool and installation in design life or which does not have the data unless RLA is conducted.*

2. Technical Approval, Recommendation and Assessment

Directorate General of Oil and Gas has issued several approvals and recommendations in 2013. They are:

- a. *The approval of Drilling Mud Management based on Minister of Energy and Mineral Resources Number 045 Year 2006 concerning Drilling Mud, Mud Waste and Drilling Powder Management in Oil and Gas Drilling Activity. In this case, the drilling mud management should conduct toxicity test (TCLP or LC50-9 hours), while the*

uji toksisitas (TCLP atau LC50-96 jam) dan serbuk bor wajib dilakukan uji kandungan minyak. Pada tahun 2013, telah dikeluarkan persetujuan pengelolaan limbah lumpur dan serbuk bor sebanyak 5 surat.

b. Rekomendasi Bahan Kimia untuk Penanggulangan Pencemaran

Dalam rangka meningkatkan penggunaan bahan kimia yang ramah lingkungan untuk penanggulangan pencemaran, maka dikeluarkan rekomendasi bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran berdasarkan hasil analisis fisika-kimia, uji tingkat toksisitas akut (LC50-96 jam), uji Biodegradabilitas dan Koefisien Partisi Oktanol-Air (Kow) di laboratorium. Pada tahun 2013, telah dikeluarkan rekomendasi bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran sebanyak 2 surat rekomendasi.

c. Penilaian Teknis Dokumen AMDAL

Sesuai Kepmen LH No. 42 tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas merupakan anggota Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat yang membidangi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Berdasarkan hal tersebut, maka dikeluarkan rekomendasi teknis dokumen AMDAL (KA ANDAL, AMDAL, RKL dan RPL) kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pada tahun 2013, telah dikeluarkan usulan tertulis dokumen KA-ANDAL, AMDAL dan RKL/RPL kegiatan usaha migas sebanyak 10 dokumen.

d. Penilaian Teknis Dokumen UKL-UPL

Sesuai Pasal 7 ayat (1) PermenLH No. 13 tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL, instansi lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan (Ditjen Migas). Pada tahun 2013, telah dilaksanakan koordinasi dan penilaian teknis dokumen UKL-UPL kegiatan usaha migas dengan instansi terkait sebanyak 6 dokumen.

drilling powder management should conduct oil test. In 2013, Directorate General of Oil and Gas issued five drilling mud and drilling powder management approvals.

b. Recommendation of Chemicals for Pollution Prevention
In order to increase the use of environmentally friendly chemical substances to prevent the pollution, the recommendation of chemicals for pollution is given based on the result of physics and chemical analysis, toxicity test (LC50-96 hours), biodegradability test, and coefficient of octanol-water partition (Kow) in the laboratory. In 2013, two recommendations of chemical for pollution hamper were issued.

c. Technical Document Assessment of Environmental Impact Assessment (AMDAL)

Based on Minister of Environment Decree Number 42 Year 2000 concerning the Membership of Assessment Commission and Central AMDAL Analysis Technical Team, Ministry of Energy and Mineral Resources c.q Directorate General of Oil and Gas is the member of Assessment Commission and Central AMDAL Technical Team in oil and gas activity. Directorate General of Oil and Gas has the authority to issue the recommendation of AMDAL document (KA ANDAL, AMDAL, RKL and RPL) in oil and gas activity. In 2013, Directorate general of Oil and Gas issued 10 documents of KA-ANDAL, AMDAL and RKL/RPL in oil and gas activity.

d. The Technical Assessment of UKL-UPL

Based on Article 7 Paragraph 1 of Minister of Environment regulation Numer 13 Year 2010 concerning UKL-UPL and SPPL, the environmental institution is mandated to coordinate with the institution in charge of the certain activity (in the field of oil and gas is Directorate General of Oil and Gas). In 2013, there were 6 documents of coordination and technical assessment on UKL-UPL in oil and gas activity.

II. PEMBINAAN

1. Pembinaan Keselamatan Lingkungan

Selama tahun 2013 terdapat beberapa kegiatan dalam rangka pembinaan keselamatan lingkungan kegiatan usaha migas sebagai berikut:

a. Forum Komunikasi Lingkungan

Kegiatan forum komunikasi lingkungan pada kegiatan usaha migas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat fungsi koordinasi antara Ditjen

II. MONITORING

1. Supervision on environmental Safety

The environmental safety supervision in oil and gas activity in 2013 is as follow;

a. Environmental Communication Forum

The environmental communication forum in oil and gas activity is purposed to synergize the perception, enhance the coordination between Directorate General of Oil and

Migas dengan instansi terkait (KLH, Pemerintah Daerah, dan lain-lain) dalam pengawasan keselamatan lingkungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta meningkatkan pembinaan terhadap Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala Teknik sebagai penanggung jawab kegiatan. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan forum komunikasi lingkungan di Lombok pada bulan Mei 2013. Pada kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pembakaran gas suar bakar (*flaring*) pada kegiatan usaha Migas.

Gas and related institution (Ministry of Environment, local government, etc) in oil and gas environmental safety, and increase the supervision to Technical Head an/or Technical Vice Head as the person in charge of this activity. This forum was held in Lombok in May 2013. This forum also socialized the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 31 Year 2012 concerning the flaring in oil and gas activity.

b. Forum Komunikasi Keteknikan Migas

Tujuan dari Forum Komunikasi Keteknikan Migas yaitu:

- Sebagai wadah komunikasi untuk menyamakan persepsi antara Ditjen Migas dan *Stakeholders* maupun diantara *Stakeholders* keteknikan migas;
- Sebagai media sosialisasi kebijakan/peraturan di bidang keteknikan migas;
- Sebagai saran penyampaian masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan peraturan di bidang keteknikan migas;
- Mewujudkan kebersamaan langkah (kemitraan) antara Pemerintah dengan *stakeholders* dalam mewujudkan operasi migas yang efisien, efektif, aman, andal dan akrab lingkungan.

b. Oil and Gas Technical Communication Forum

The purposes of this forum are:

- *A means of communication to synergize the perception between Directorate General of Oil and Gas and stakeholders or between stakeholders in oil and gas technical.*
- *A forum to socialize the oil and gas technical policy or regulation.*
- *A forum to give inputs to the government in formulating policy or regulation on oil and gas technical.*
- *A forum to build partnership between the government and stakeholders in creating efficient, effective, safe, reliable and environmentally friendly oil and gas operation.*

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Keteknikan Migas di Bali pada bulan September 2013.

This forum was held in Bali in September 2013.

c. Koordinasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Kegiatan koordinasi kinerja pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk:

- menyamakan persepsi antara Ditjen Migas dengan Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala Teknik terkait dengan peraturan K3PL;
- melakukan sosialisasi seluruh peraturan pemerintah terkait dengan K3PL dalam kegiatan usaha migas;
- sebagai tempat melakukan tukar pengalaman maupun transfer teknologi dengan para *stakeholders*; dan
- dan memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan dari Ditjen Migas terhadap BU/BUT.

c. Environmental Management Performance Coordination

The purposes of Environmental Management Performance Coordination are;

- *Synergizing the perception between Directorate General of Oil and Gas and/or Head of Technique and/or Vice Head of Technique regarding K3PL;*
- *Conducting socialization of the government regulation concerning k3PL in oil and gas business activity;*
- *Being a means of experience exchange and technology transfer with stakeholders;*
- *Enhancing coordination and supervision from Directorate General of Oil and Gas to business entity/permanent business establishment.*

Pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kinerja pengelolaan lingkungan sebanyak 2 kali, yaitu di Bandung dan Cirebon.

In 2013, the coordination have been held twice in Bandung and Cirebon.

d. Pembinaan Keselamatan Lingkungan Lainnya

Kegiatan pembinaan keselamatan lingkungan lainnya antara lain: melalui peran aktif dalam wawancara Kepala/Wakil Kepala Teknik Migas, rapat-rapat pembahasan izin

d. Other Environmental Safety Supervision

The supervision on other environmental safety is conducted through active participation in the interview of Head or Vice Head of Oil and Gas Technical, meetings to

usaha BU/BUT bersama Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, dan lain-lain.

discuss business entity/permanent business establishment license with Directorate of Oil and Gas Downstream Business Development, etc.

III. PENGAWASAN

1. Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan

Pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan meliputi pengawasan rutin (pengawasan administrasi dan teknis operasional) dan pengawasan insidental.

a. Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi merupakan bagian dari pengawasan rutin. Pengawasan administrasi dilakukan dengan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik yang dilakukan oleh BU/BUT. Sesuai dengan Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor: 9498/10.08/DMT/2009 tanggal 19 Mei 2009, laporan pengelolaan lingkungan model LPL 1 s.d. 5 yang dievaluasi meliputi: laporan terjadinya tumpahan minyak >15barrel, laporan penggunaan bahan dan bahan kimia untuk penanggulangan pencemaran dan proses produksi, laporan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), laporan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (meliputi kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas biota, laporan pencemaran, laporan tumpahan minyak <15 barrel) sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL). Pada tahun 2013, terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari BU/BUT sebanyak 70 laporan.

b. Pengawasan Teknis Operasional

Pengawasan teknis operasional merupakan bagian dari pengawasan rutin. Pengawasan teknis operasional dilakukan dengan melaksanakan pengawasan/inspeksi lapangan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan BU/BUT. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan pengawasan/inspeksi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di BU/BUT sebanyak 23 kali.

c. Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental yaitu melaksanakan pengawasan terhadap terjadinya keadaan darurat (*emergency*), antara lain terjadinya pencemaran lingkungan berupa tumpahan minyak, *blow out* dan lain-lain. Selama tahun 2013, telah dilaksanakan investigasi sebanyak 2 (dua) kali.

III. SUPERVISION

1. Supervision on Environmental Technique and Safety

The supervision on environmental technique and safety includes the regular supervision (administration and operational technical supervision) and incidental supervision.

a. Administration supervision

The administration supervision is part of regular supervision by evaluating the periodic report of environmental management and monitoring done by the business entity. Based on Director of oil and Gas Technique and Environment Circle Number 9498/10.08/DMT/2009 dated 19 May 2009 concerning the report of environmental management LPL model number 1 to 5, the evaluation includes the report of oil spill which amounted more than 15 barrel, the report of chemicals substances use for pollution prevention and production, the report of dangerous and toxic waste (B3), the report of pollution prevention tools, the report of environmental management and monitoring (including water quality, air quality, land quality, biota quality, pollution report, oil spill report which amounted, there were less than 15 barrel) based on documents of AMDAL or UKLUPL. In 2013, there were 70 reports from the business entity concerning the environmental management and monitoring.

b. Operational technique supervision

The operational technique supervision is part of regular supervision. It is conducted through supervision and field inspection of the environmental management and monitoring conducted by business entity. The environmental management and monitoring supervision or inspection to business entity has been conducted 23 times in 2013.

c. Incidental Supervision

The incidental supervision is conducted on emergency situation, such as environmental pollution from oil spill, blow out and etc. the incidental supervision has been conducted twice in 2013.

2. Penerbitan SKPP dan SKPI

Untuk pengaturan dan pengawasan keteknikan terhadap peralatan dan instalasi maka dilakukan penerbitan SKPP dan SKPI agar terwujud peralatan dan instalasi migas yang aman, andal dan akrab lingkungan. Pada tahun 2013, telah diterbitkan SKPP dan SKPI sebagai berikut:

- Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) untuk Instalasi Pengelolaan Lingkungan dan DPPU sebanyak 4 SKPI, yaitu:
 - PT Chevron Pacific Indonesia
 - PT Pertamina DPPU Deli Serdang
 - PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih
 - PT Pertamina RU IV Cilacap
- Sertifikat Kelaikan Penggunaan Peralatan (SKPP), terdiri dari:
 - Peralatan listrik sebanyak 2.445 SKPP
 - Pesawat Angkat untuk kegiatan usaha hilir dan penunjang migas sebanyak 1.285 SKPP.

3. Statistik Tumpahan Minyak

Data tumpahan minyak tahun 2006 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada tahun 2013, terjadi tumpahan minyak sebesar 2.071,4 barrel di darat dan laut, dimana tumpahan terbesar terjadi di area operasi PT Medco E&P Indonesia Kaji pada bulan Agustus 2013 sebanyak 1.431 barrel yang diakibatkan oleh illegal tapping pada pipa penyalur minyak di KM-19,35. Penanganan tumpahan minyak tersebut dilakukan dengan memasang oil boom untuk membatasi pencemaran di perairan, melakukan pembersihan tumpahan minyak baik di darat maupun di perairan dan menutup pipa yang bocor.

2. SKPP and SKPI

For technical arrangement and supervision on tools and installation, SKPP and SKPI are issued to produce a safe, reliable and environmentally friendly tool and installation. The issued SKPP and SKPI in 2013 are as follow:

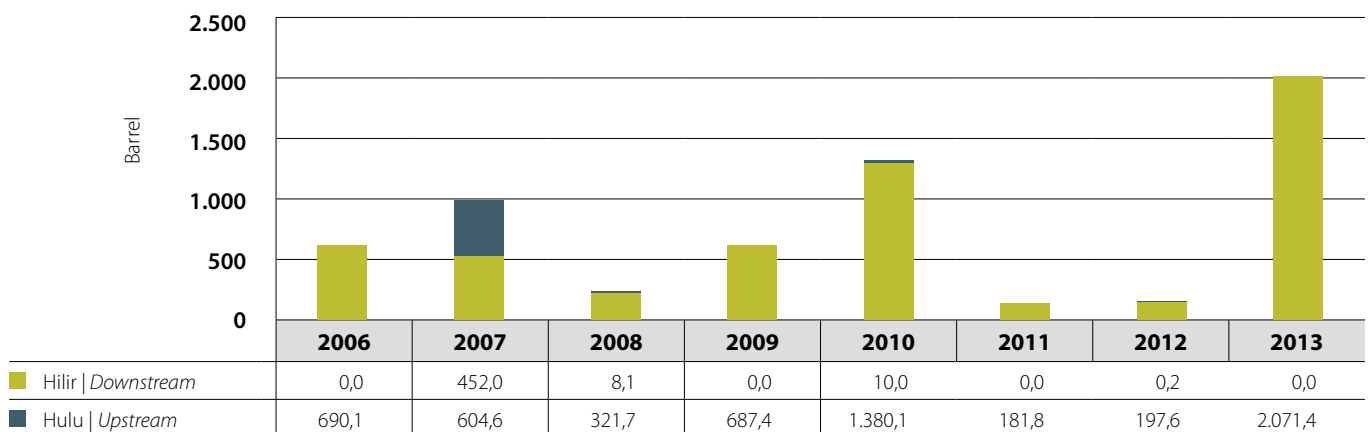
- Four Certificate of Installation Utilization Appropriateness (SKPI) for Environmental Management Installation and DPU to:
 - PT Chevron Pacific Indonesia
 - PT Pertamina DPPU Deli Serdang
 - PT Pertamina EP Asset 2 Field Prabumulih
 - PT Pertamina RU IV Cilacap
- Certificate of Tools Utilization Appropriateness (SKPP) which consists of:
 - Electric tools with 2,445 SKPP
 - Crane for oil and gas downstream and supporting with 1,285 SKPP.

3. Statistic of Oil Spill

The oil spill data from 2006 to 2013 can be seen in the table below. In 2013, the oil spill in the land and sea was amounted 2,071.4 barrel in which most of the spill happened in the operation area of PT Medco E&P Indonesia Kaji in August 2013 of about 1,431 barrel due to illegal tapping on oil distribution pipe at KM-19.35. The oil spill is handled by installing oil boom to limit the pollution in the sea, cleaning oil spill in the land and sea, and sealing the leaked pipe.

Data Tumpahan Minyak 2006-2013

Oil Spill Data 2006-2013



IV. PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Selama tahun 2013 terdapat kegiatan dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Kegiatan tersebut yaitu:

- Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan persetujuan dokumen UKL dan UPL kegiatan usaha minyak dan gas bumi berada pada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi, yaitu Ditjen Migas dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai pengawas aspek sosial, ekonomi dan budaya (sesuai ketentuan Pasal 6 Kepmen Pertambangan dan Energi No. 103.K/008/M.PE/1994).
- Setelah keluarnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009, kewenangan rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup pusat atau daerah. Namun dalam hal rekomendasi UKL dan UPL, instansi lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan membidangi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi, yaitu Ditjen Migas (sesuai PermenLH No. 13 tahun 2010 tentang UKL dan UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi teknis UKL dan UPL kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan instansi terkait dilaksanakan karena maksud tersebut di atas. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemda dan instansi terkait sebanyak 36 kali.

2. Monitoring Tumpahan Minyak dengan Satelit

Pada tahun 2013, dilaksanakan kegiatan monitoring tumpahan minyak dengan satelit. Kegiatan monitoring tumpahan minyak dengan satelit dimaksudkan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan usaha migas dengan dukungan teknologi monitoring.

Program monitoring ini dapat digunakan sebagai alat untuk yang dapat memetakan kondisi perairan secara langsung (*near real time*) dan terus-menerus (*continue*) serta mencakup semua proses fisik yang terjadi dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Selain itu juga dapat mendeteksi kemungkinan ancaman yang timbul dari kegiatan usaha migas maupun dari kegiatan lainnya terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung bisa dideteksi apakah tumpahan minyak berasal dari kegiatan usaha migas atau dari kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut atau kegiatan sejenis. Pada tahun 2013 dilakukan pencitraan sebanyak 131 *scene*/gambar.

IV. OTHER ACTIVITIES

1. The Coordination with local government and related institution

The coordination with local government and related institution in 2013 is:

- *Before the stipulation of Law number 32 year 2009 concerning Environment Protection and Management, the authority to approve UKL and UPL document on oil and gas activity is on the technical institution in charge of oil and gas (Directorate General of Oil and Gas) which conducting the coordination with local government as supervisor of social, economy and cultural aspect (based on Article 6 of Minister of Mine and Energy Decree Number 103.K/008/M.PE/1994).*
- *After the stipulation of Law Number 32 Year 2009, the recommendation of UKL-UPL is assessed by technical tem of central or local environmental institution. However, in the case of UKL and UPL recommendation, the environmental institution is mandated to coordinate with the institution in oil and gas activity (Directorate General of Oil and Gas) based on Minister or Environment Regulation Number 13 year 2010 on UKL and UPL and Letter of Environment Management and Monitoring. Thus, the technical coordination of UKL and UPL in oil and gas activity with related institution is conducted for the above purpose. The technical coordination with local government and related institution has been conducted 36 times in 2013.*

2. Oil Spill Monitoring with Satellite

In 2013, the oil spill monitoring with satellite has been conducted to prevent environmental pollution and damage from the oil and gas activity with the support of monitoring technology.

The monitoring program can be a tool for real time and continuous water condition mapping that includes all physical process with remote sensing technology. The satellite monitoring also detects the potential threats that may arise from oil and gas activity and other activities to the environment and to the people. It may directly and indirectly detect the oil spill from the oil and gas activity from the ships sailing through the sea. There were 131 satellite images in 2013.



KESELAMATAN HULU MIGAS OIL AND GAS UPSTREAM SAFETY

Pembangunan fasilitas dan pemanfaatan gas untuk transportasi

Mengingat produksi minyak dan gas bumi Indonesia terus mengalami penurunan dan saat ini telah menjadi net importir Bahan Bakar Minyak (BBM), maka laju pertumbuhan konsumsi BBM perlu ditekan. Untuk itu pemerintah telah mengambil kebijakan diversifikasi sumber energi di semua sektor kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Sektor industri dan transportasi darat merupakan sektor penting untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi dan merupakan sektor yang membutuhkan energi dalam jumlah besar dimana saat ini didominasi oleh BBM. Keberhasilan pemenuhan target substitusi BBM pada dua sektor ini akan berarti besar bagi keberhasilan upaya diversifikasi energi secara nasional.

Hal ini untuk mendukung pula program Langit Biru yang dicanangkan pada tahun 1996 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1996 yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Energi alternatif untuk sektor industri dan transportasi diharapkan mempunyai emisi gas buang yang lebih bersih dibanding emisi gas buang dari hasil pembakaran BBM yang saat ini dampak lingkungannya lebih terasa sangat mengganggu, terutama di kota-kota besar.

Salah satu jenis sumber energi alternatif untuk industri dan sektor transportasi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor adalah CNG (Compressed Natural Gas). CNG mempunyai potensi yang besar untuk dapat dikembangkan menjadi bahan bakar alternatif pengganti BBM mengingat secara teknis tidak ada masalah, baik secara teknologi konversi, cadangan gas yang ada, dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur pipa yang sebagian kota di Indonesia telah tersedia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi, dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas yang digunakan untuk transportasi dan guna mendukung pengurangan penggunaan bahan bakar minyak dalam negeri.

Pola SPBG CNG yang akan direncanakan adalah dengan sistem on line (dapat digunakan sebagai mother station - daughter station, dimana lokasi pipa gas tidak terdapat pada seluruh area dimana terdapat konsumen CNG (angkutan

The development of gas for transportation facility and utilization

Considering the decline of Indonesia oil and gas production and Indonesia as oil fuel net importer, the oil fuel consumption should be reduced. Thus, the government has made a policy of energy diversification in all sector as stipulated in Presidential Regulation Number 5 Year 2006 concerning National Energy Policy.

Industry and land transportation are important sectors to support the economy. These sectors are also major energy consumers especially oil fuel. The success of oil fuel substitution target achievement in these sectors means a lot for the success of national energy diversification program.

The national energy diversification program is also purposed to support Langit Biru program proclaimed in 1996 in Minister of Environment Decree Number 15 Year 1996 aimed at managing air pollution from the mobile activity such as vehicle. The alternative energy for industry and transportation is expected to have cleaner exhaust emission compared to oil fuel exhaust emission in which its environmental impact has been very disturbing especially in big cities.

One of the alternative energy resources for industry and transportation to be utilized in vehicle is CNG (Compressed Natural gas). CNG is potential to be developed as alternative fuel to substitute oil fuel considering that it is acceptable both the conversion technology, the available gas reserve, the impact for the environment, and the existing pipeline infrastructure in several cities in Indonesia.

The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 19 Year 2010 concerning the Gas as Fuel Utilization for Transportation is purposed to accelerate gas as fuel utilization for transportation and to reduce domestic oil fuel consumption.

The CNG Filling Station is planned to use online system which can be used as mother station-daughter if the pipeline is not available in the area with CNG consumer. Thus, the tapping on the existing pipeline can only be

umum). Oleh karena itu tapping pada pipa gas existing hanya dilakukan pada mother station sedangkan pada daughter station akan dipasok CNG dengan menggunakan trailer/truck yang berasal dari mother station.

conducted in mother station while the daughter station will get the CNG supply from trailer or truck in mother station.

Ditjen Migas telah menyusun draft road map pembangunan SPBG yang kan ditetapkan melalui suatu Keputusan Menteri.

Directorate General of Oil and Gas has formulated Gas Filling Station development road map as stipulated in Minister Decree.

ROAD MAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPBG UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010 - 2015

KEGIATAN		TAHUN					
		2007 s.d. 2010	2011	2012	2013	2014	2015
FEED Pembangunan SPBG		Palembang	Surabaya (termasuk Gresik dan Sidoarjo), Bali, Medan, dan Jabodetabek	Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, Jogakarta, Bandung dan Cirebon	Batam, Semarang, Mini LNG-LCNG	-	-
Pembanguna/ Konstruksi	SPBG	-	Palembang (4 SPBG)	Surabaya, Gresik, Sidoarjo (4 SPBG)	Kalimantan Timur (4 SPBG) & Jabodetabek	Semarang & Jabodetabek	-
	PIPA	-	-	-	Jabodetabek	Jabodetabek	-
	BENGKEL	-	-	Jabodetabek & Jatim	Kalimantan Timur	Semarang	-
Mini LNG - LCNG Station		-	-	-	-	Lahan Mini LNG Plant -LCNG Station	Pembangunan Mini LNG Plant - LCNG Station
LNG Plant - Pilot Project (PT. Pertamina) untuk Heavy Vehicles		-	-	-	Bontang	-	-
Converter Kit		4687 (Hubdar)	900 (Hubdar 400, KESDM 500)	1000 (KESDM)	2000 KESDM	2000 (KESDM)	-

Dalam merealisasikan road map tersebut, Ditjen Migas pada tahun 2011 telah membangun 4 (empat) SPBG di Palembang, pada tahun 2012 telah membangun 4 (empat) SPBG di Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dan pada tahun 2013 membangun 4 (empat) SPBG di Kota Balikpapan, sebagai berikut:

In realizing the road map, Directorate General of Oil and Gas has built 4 Gas Filling Stations in Palembang in 2011; 4 Gas Filling Stations in Surabaya, Gresik and Sidoarjo in 2012; and 4 Gas Filling Stations in Balikpapan in 2013 as follow:

1. SPBG di Palembang terletak di lokasi yang di lewati oleh angkutan umum dan kendaraan dinas Pemerintah Daerah, yaitu di Jln. Sukamto, Jln. H. Burlin, Jln. Ki Marogan dan Jln. S.W. Subekti.
2. SPBG di Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo terletak di lokasi yang di lewati oleh angkutan umum dan kendaraan dinas Pemerintah Daerah, yaitu di Jln. Rungkut Menanggal, Jln. Lakar Santri, Jln. Simpang By Pass Kriyan dan Jln. Raya Ambengan.
3. SPBG di Kota Balikpapan terletak di lokasi yang di lewati oleh angkutan umum dan kendaraan dinas Pemerintah Daerah, yaitu di Jln. Letjend Suprpto (wilayah UP V Pertamina), Jln. Kol. Syarifudin Yoes, Jln. Iswahyudi dan Jln. Patimura, namun untuk pembangunan 2 (dua) SPBG

1. The Gas Filling Stations in Palembang are located in the area passed by public vehicles and local government official vehicle in Jln. Sukamto, Jln. H Burlin, Jln. Ki Marogan and Jln. SW Subekti.
2. The Gas Filling Stations in Surabaya, Gresik, and Sidorajo are located in the area passed by public vehicles and local government official vehicle in Jln. Rungkut Menanggal, Jln. Lakar Santri, Jln. Simpang By Pass Kriyan dan Jln. Raya Ambengan.
3. Gas Filing Stations in Balikpapan are located in the area passed by public vehicles and local government official vehicle in Jln. Letjend Suprpto (UP V Pertamina), Jln. Kol. Syarifudin Yoes, Jln. Iswahyudi and Jln. Patimura. The two Gas Filling Stations located in Jln Letjend Suprpto (UP V

yang berada di Jln. Letjend Suprpto (wilayah UP V Pertamina) dan Jln. Kol. Syarifudin Yoes akan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2014.

Pertamina) and Jln Kol Syarifudin Yoes will be continued in 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014, Ditjen Migas menyerahkan tugas pembangunan infrastruktur gas bumi untuk sektor transportasi kepada PT Pertamina (Persero) seperti pembangunan Infrastruktur pipa dan SPBG di Kota Semarang dan pembangunan Mini LNG & LCNBG Station dengan menggunakan APBN TA 2014, hal tersebut dilakukan mengingat:

In 2014, Directorate General of Oil and Gas hands over the responsibility of gas infrastructure development for transportation to PT Pertamina (Persero) such as pipeline infrastructure development and Gas Filling Stations in Semarang and Mini LNG & LCNBG Station development with State Budget 2014 based on the consideration:

1. Apabila dilakukan oleh Ditjen Migas dan PT Pertamina (Persero) maka terdapat perbedaan pada spesifikasi peralatan dan harga perkiraan sendiri, sedangkan anggaran tersebut berada pada tanggung jawab KPA yang sama
2. Penyerahan asset akan lebih mudah karena dari pihak Pertamina tidak melakukan audit asset ulang apabila pembangunan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sehingga infrastruktur gas untuk transportasi dapat segera beroperasi
3. Pada saat instalasi selesai konstruksi dapat langsung dioperasikan sambil menunggu penetapan PMP kepada PT Pertamina (Persero)

1. *If the project is conducted by Directorate General of Oil and Gas and PT Pertamina (Persero), there will be a difference in tools specification and own price estimation, while the budget is on the same budget user (KPA).*
2. *The asset handover will be easier since Pertamina does not conduct the assets re-audit if the project is conducted by PT Pertamina (Persero). Thus, the gas for transportation infrastructure will operate soon.*
3. *When the installation is finished, the construction will be able to be operated while waiting for PMP to PT Pertamina (Persero).*

Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar minyak yang berasal dari pengolahan minyak bumi dimana produksinya semakin lama semakin menipis. Untuk itu, perlu strategi baru dalam hal memenuhi kebutuhan energi untuk transportasi yang bersumber dari gas yang masih cukup melimpah ketersediaannya.

The infrastructure project is aimed at reducing oil fuel consumption from oil processing in which its production is declining. New strategy is required to meet the energy demand from transportation by utilizing gas in which its reserve is still adequate.

Strategi yang dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

The strategies to conduct the project are:

1. Pembentukan Panitia Lelang dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Infrastruktur Gas untuk Sektor Transportasi Tahun 2014 di awal Tahun Anggaran berjalan agar proses pengadaan barang dan jasa Pembangunan Infrastruktur Gas untuk Sektor Transportasi dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.
2. Melakukan Rapat Koordinasi intensif terkait pembahasan segala macam jenis perizinan pembangunan SPBG dengan instansi terkait seperti Pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain terkait.

1. *The establishment of Tender Team and P2K of Gas for Transportation Infrastructure Development Project Year 2014 in the early Fiscal Year to smooth the tools and services procurement of Gas for Transportation Infrastructure Development Project based on the target.*
2. *Conducting intensive coordination concerning licenses on Gas Filling Station with related institutions such as local government, Ministry of Public Work, Ministry of Transportation, and other related institution.*

- | | |
|---|---|
| <p>3. Melakukan Koordinasi insentif dengan Pemda terkait penyediaan lahan SPBG, pekerjaan penggalian dan rehabilitasi pasca penggalian.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemda yang akan menerima manfaat/dampak Pembangunan SPBG terkait pemberian pemahaman dan meredam gejala yang kemungkinan ada di masyarakat.</p> <p>5. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada kontraktor pelaksana konstruksi SPBG dan konsultan pengawas dengan berkoordinasi bersama Pemda setempat terhadap setiap kemajuan proyek dan penyelesaian setiap kendala yang mungkin timbul agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat biaya.</p> | <p>3. <i>Conducting intensive coordination with local government regarding land use for Gas Filling Station, excavation and post-excavation rehabilitation.</i></p> <p>4. <i>Conducting information sharing session to the public and local government which will receive direct impact of Gas Filling Station project especially regarding the comprehension on the project and riot avoidance that may arise in the public.</i></p> <p>5. <i>Conducting the supervision and evaluation function to contractor of Gas Filling Station and supervisor consultant by coordinating with local government concerning the project progress and the solution to constraint that may arise to ensure that the construction work will run on time and meet the appropriate quality, volume and cost.</i></p> |
|---|---|

Kejadian kecelakaan kerja operasi kegiatan Hulu migas

Kegiatan usaha migas merupakan usaha yang melibatkan teknologi tinggi, resiko tinggi dan nilai investasi yang besar yang harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memiliki dampak sosial yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha hulu migas maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi sehingga dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap lingkungan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas yaitu melalui kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi, dan instrumentasi; Forum Komunikasi Keselamatan Migas; Bimbingan Teknis Keselamatan Hulu Migas, pembinaan dan pengawasan keselamatan hulu migas dan pembinaan kepala teknik/wakil kepala teknik.

Dalam rangka memenuhi target kinerja untuk terjadinya kecelakaan kerja operasi kegiatan hulu migas sejumlah 4 (empat) kejadian pada tahun 2013, maka Ditjen Migas

The operational Accidents in Oil and Gas Upstream Activity

The oil and gas upstream activity involves high technology, high risk and high investment that should be followed up by human resources capability in its operation. The oil and gas upstream activity also gives major social impact to the public. Thus, monitoring and supervision on work safety and health should be conducted.

The oil and gas law number 22 Year 2001 regulates the government c.q Directorate General of Oil and Gas to conduct monitoring and supervision in oil and gas activity. The monitoring and supervision is conducted by Head of Inspection assisted by Oil and Gas Inspector. Considering the complexity and the developing oil and gas upstream activity, intensive monitoring and supervision on oil and gas activity is required to conduct a safe, reliable, effective, efficient and environmentally friendly operation.

The form of guidance and supervision of the upstream oil and gas business activities are evaluation of the technical inspection of equipment, installation, and instrumentation; Forum Communications Oil and Gas Safety; Upstream Oil and Gas Safety Technical Guidance, guidance and supervision of the safety of oil and gas upstream activity and coaching techniques for head / deputy head of engineering.

To meet the performance target in oil and gas upstream activity in 2013, Directorate General of Oil and Gas is formulating the policy, norm, procedure, criteria, technical assistance

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi. Sub Direktorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2013 yaitu melalui kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi, dan instrumentasi; Forum Komunikasi Keselamatan Migas; Bimbingan Teknis Keselamatan Hulu Migas, pembinaan dan pengawasan keselamatan hulu migas dan pembinaan kepala teknik/wakil kepala teknik.

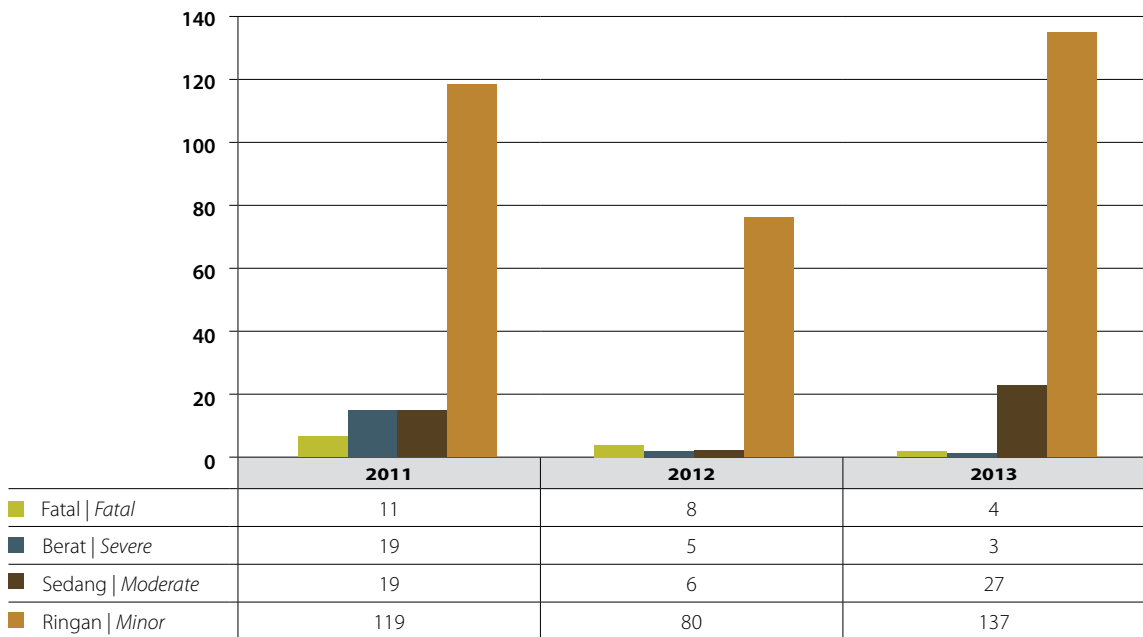
and evaluation in worker, general affairs, and oil and gas installation safety. Sub Directorate of Oil and Gas Upstream Safety has conducted several activities in 2013 through the evaluation of tools, installation and instrumentation technical test; Forum Komunikasi Keselamatan Migas (Oil and Gas Safety Communication Forum); Technical Assistance on Oil and gas Upstream Safety; oil and gas upstream safety monitoring and supervision; and monitoring of Technical Head or Vice Head of Technical.



Kecelakaan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

The operational accident in oil and gas upstream activity can be seen in the Picture.

Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Operational Accidents in Oil and Gas Upstream Activity



Pada tahun 2011 telah terjadi 11 kejadian kecelakaan fatal kerja di kegiatan hulu migas dan pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah kecelakaan fatal yang signifikan yaitu 8 kejadian serta pada tahun 2013 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 4 kejadian. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir angka kecelakaan fatal selalu mengalami penurunan.

There were 11 fatal accidents in oil and gas upstream activity in 2011. This number decreased significantly into 8 accidents in 2012 and 4 accidents in 2013. The graphic shows that the fatal accidents have been significantly decreasing in the last three years.

Untuk terus dapat menurunkan angka kecelakaan perlu ditingkatkan beberapa faktor, sebagai berikut:

The efforts to decrease the number of accidents are:

1. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan di kegiatan hulu migas.
2. Meningkatkan pemahaman BU/BUT terhadap tanggung jawab keselamatan kerja.
3. Meningkatkan pemahaman pekerja terhadap aspek keselamatan kerja dan bahaya di lingkungan kerja.
4. Menambah jumlah pegawai migas untuk dapat langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kontraktor di kegiatan hulu migas.

1. *Optimizing monitoring and supervision in oil and gas upstream activity.*
2. *Increasing the comprehension of Business Entity or Permanent Business Establishment concerning its responsibility on work safety.*
3. *Increasing the comprehension of workers concerning the work safety and dangers in working place.*
4. *Increasing the number of oil and gas staffs to conduct direct monitoring and supervision to oil and gas upstream contractors.*

Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi sehingga dilakukan upaya-

Accidents are unexpected and unplanned. Accidents are expected not to occur through the prevention from worker and general sector as well as the tools and installation safety in oil

upaya pencegahan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas. Oleh karena itu pada tahun 2014 ditargetkan penurunan kejadian kecelakaan fatal.

and gas upstream activity. Thus, the government targeted to reduce the number of fatal accidents in 2014.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

The efforts and strategies to prevent the accidents are:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
3. Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis instalasi dan sistem alat ukur.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
5. Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para stake holder migas.

1. Monitoring and supervision on oil and gas upstream safety through routine and incidental inspection on worker and general safety as well as tools and installation safety.
2. Monitoring the Head of Technique and Vice Head of Technique through meetings and communication forums.
3. Drafting the work principle or procedure of installment technique check and measurement system.
4. Conducting information sharing session on regulations to business entity.
5. Conducting technical assistance to oil and gas stakeholders.

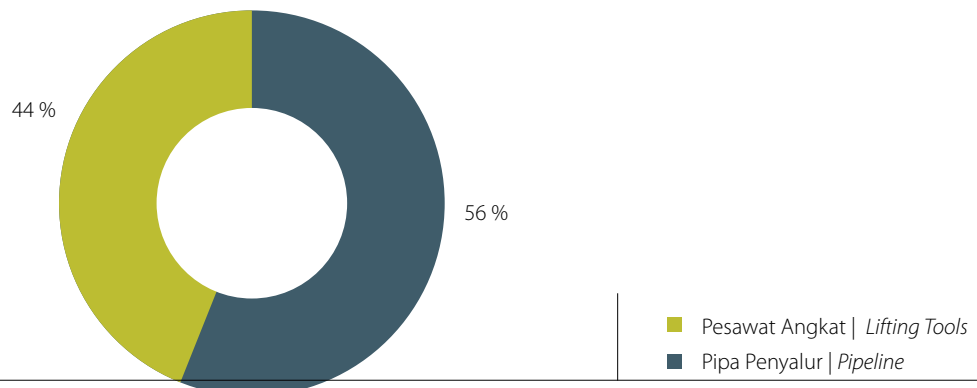
Selama periode tahun 2013 telah diterbitkan:

In 2013, Sub Directorate of Oil and Gas Upstream safety issued recommendations as follow:

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) untuk 757 unit dengan rincian sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

1. Certificate of Tools Utilization Properness (SKPP) for 757 units with the details as seen in Picture .

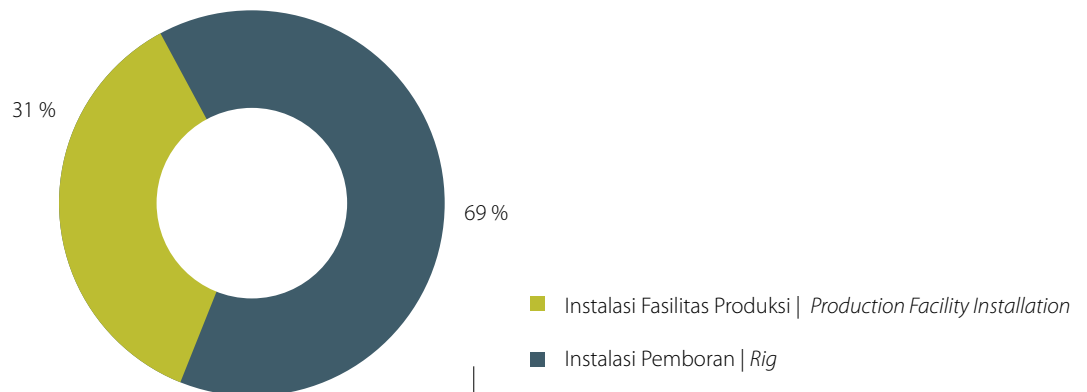
Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)
Certificate of Tools Utilization Properness





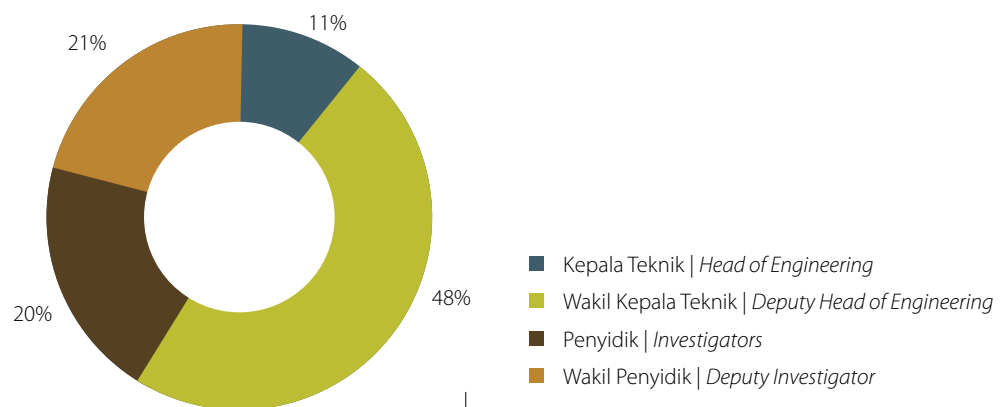
- | | |
|---|--|
| <p>2. Persetujuan Pemasangan Platform dan Penggelaran Pipa Penyalur Bawah Air 19 unit</p> <p>3. Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP) 42 unit</p> <p>4. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPI) untuk 229 instalasi dengan rincian sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.</p> | <p>2. <i>The approval of Platform Construction and Under Water Distribution Pipeline Deployment for 19 units.</i></p> <p>3. <i>Certificate of Platform Construction Properness for 42 units.</i></p> <p>4. <i>Certificate of Tools Utilization Properness for 229 installations with the details in Picture.</i></p> |
|---|--|

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi
Certificate of Installation Utilization Properness



- | | |
|--|---|
| <p>5. Selama periode tahun 2013 telah disahkan Kepala Teknik Tambang Migas 35 orang, Wakil Kepala Teknik Tambang Migas 151 orang, Penyelidik 61 orang dan Wakil Penyelidik 66 orang, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.</p> | <p>5. <i>The inauguration of 35 Technique Heads of Oil and Gas in 2013, 151 Vice Heads of Oil and Gas, 161 supervisors, and 66 vice supervisor as shown in picture.</i></p> |
|--|---|

Persetujuan Pengangkatan/Pengesahan Kepala/Wakil Kepala Teknik dan Penyelidik/Wakil Penyelidik
The Approval of Appointment and Inauguration of Head/Vice Head of Technique.



- | | |
|---|--|
| <p>6. Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak 50 rekomendasi</p> <p>7. Selama tahun 2013 tidak ada penerbitan rekomendasi pemusnahan Bahan Peledak</p> <p>8. Perizinan Menggunakan Gudang Bahan Peledak 171 izin</p> | <p>6. <i>50 recommendations on the Purchase and Use of Explosion Material.</i></p> <p>7. <i>In 2013, there was no recommendation on explosion material removal.</i></p> <p>8. <i>171 Licenses to Use Explosion Material.</i></p> |
|---|--|

KESELAMATAN HILIR MIGAS OIL AND GAS DOWNSTREAM SAFETY

PENERBITAN PERIZINAN MIGAS

1. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP)

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan adalah persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas operasi atau penggunaan peralatan setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja.

SKPP yang diterbitkan sebanyak 27.698 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Katup Pengaman : 14.065 unit
- b. Peralatan Putar : 2.977 unit
- c. Bejana Tekan : 10.656 unit

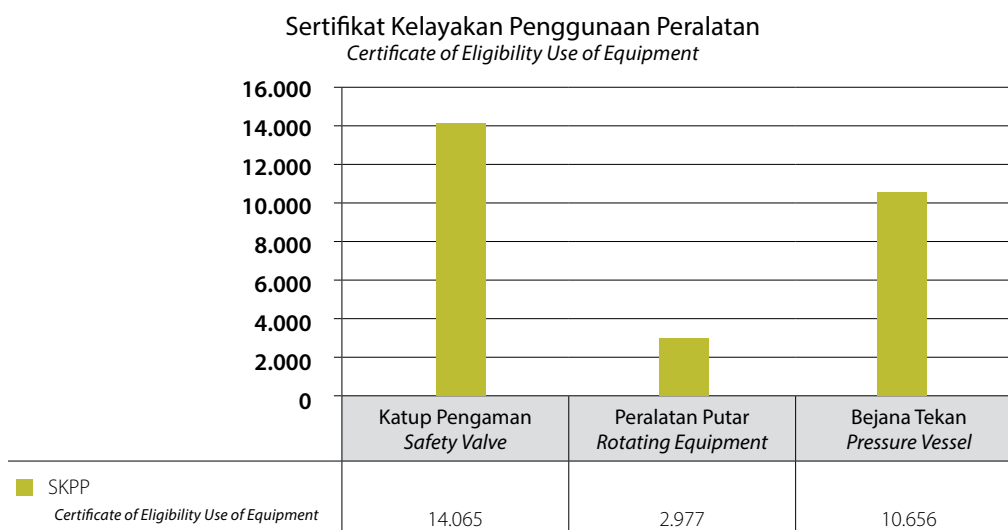
OIL AND GAS LICENSE

1. Certificate of Tools Utilization Properness (SKPP)

The certificate of tools utilization properness is issued by Director General of Oil and Gas upon the operation or tools utilization after the work safety check.

There have been 27,698 SKPP issued with the details:

- a. Safety valve : 14,065 units
- b. Rotating equipment : 2,977 units
- c. Pressure vessel : 10,656 units



2. Izin Penggunaan Tangki Penimbun

Izin Penggunaan Tangki Penimbun adalah persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atas penggunaan dan/atau pengoperasian tangki penimbun yang telah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja dengan mendapat penilaian layak.

Izin Penggunaan Tangki Penimbun yang diterbitkan sebanyak 1.155 unit.

2. License of storage tank

The license of storage tank is issued by Director General of Oil and Gas c.q. Director of Oil and Gas Technique and Environment on the use and operation of storage tank that has been checked its work safety.

There are 1,155 licenses of storage tank.

3. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi adalah persetujuan yang diberikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas operasi atau penggunaan instalasi setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja.

SKPI yang diterbitkan sebanyak 172 instalasi.

3. Certificate of Installation Properness (SKPI)

Certificate of Installation Properness is issued by Director General of Oil and Gas on the operation or installation use after the work safety check. The government has issued 172 SKPI.

4. Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Minyak dan Gas Bumi

Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Minyak dan Gas Bumi adalah prosedur yang disepakati para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan serah terima minyak dan gas bumi yang berisi tata cara penyerahan atau penerimaan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG hasil olahan, dan bahan bakar lain di titik penyerahan dalam kegiatan usaha hulu atau kegiatan usaha hilir.

Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan sebanyak 67 prosedur, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Serah Terima Minyak Bumi : 32 prosedur
- b. Serah Terima Gas Bumi : 35 prosedur

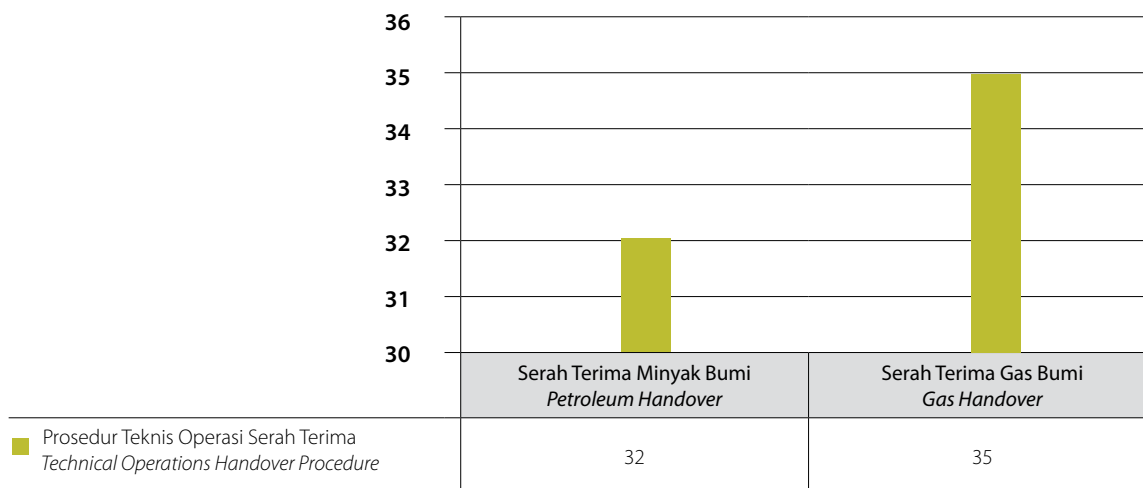
4. Technical Procedure of Oil and Gas Handover Operation

The technical procedure of oil and gas handover operation is a procedure agreed by related parties which includes the procedure of oil, gas, oil fuel, gas fuel, LPG, processed LNG, and other fuels handover in handover point in oil and gas downstream activity.

There are 67 technical procedure of oil and gas handover operation issued with the details as follow:

- a. Oil handover: 32 procedures
- b. Gas handover: 35 procedures

Prosedur Teknik Operasi Serah Terima
Technical Operation Handover Procedure



5. Persetujuan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi

Persetujuan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi adalah persetujuan secara teknis yang diberikan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap sebelum melakukan pembangunan suatu sistem alat ukur yang terdapat pada fasilitas operasinya.

Persetujuan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan sebanyak 47 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem Alat Ukur Meter Cairan : 10 unit
- b. Sistem Alat Ukur Meter Gas : 37 unit

5. The Approval on Oil and Gas measurement System

The approval on oil and gas measurement system is technical approval to business entity and permanent business establishment before developing measurement system in the operation facility.

There have been 47 oil and gas measurement system approvals, as follow:

- a. Liquid Measurement System: 10 units
- b. Gas Measurement System: 37 units

6. Izin Penggunaan Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi

Izin Penggunaan Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap untuk dapat menggunakan alat ukur dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan teknis, pengujian, dan kalibrasi/kalibrasi ulang (tera/tera ulang) terhadap alat ukur termaksud.

Izin Penggunaan Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan sebanyak 1.101 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Alat Ukur Tinggi Permukaan Cairan : 269 unit
- Automatic Tank Gauging : 31 unit
- Pelat Orifis : 294 unit
- Timbangan : 49 unit
- Alat Kompensator : 391 unit
- Bejana Ukur : 67 unit

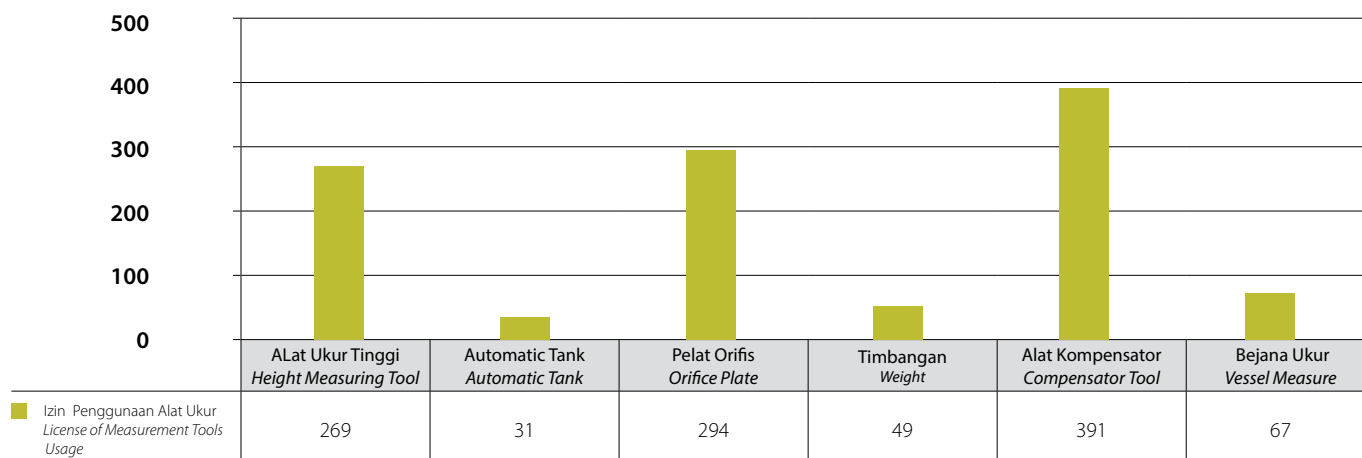
6. License of Oil and Gas measurement Use

The license of oil and gas measurement use is given to business entity or permanent business establishment to use the measurement in oil and gas activity after considering the result of technical check, test, and calibration/re-calibration (tera/re-tera) of the measurement.

There have been 1,101 oil and gas measurement licenses with the details as follow:

- Liquid Surface Height Measurement: 269 units
- Automatic Tank gauging: 31 units
- Orifis Plate: 294 units
- Weigher: 49 units
- Compensator: 391 units
- Measuring vessel: 67 units

Izin Penggunaan Alat Ukur
License of Measurement Tools Usage



7. Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi

Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap untuk dapat menggunakan sistem alat ukur dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan teknis, pengujian, dan kalibrasi/kalibrasi ulang (tera/tera ulang) terhadap sistem alat ukur termaksud.

Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan sebanyak 984 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Sistem Alat Ukur Meter Cairan : 229 unit
- Sistem Alat Ukur Meter Gas : 534 unit

7. License of Oil and Gas Measurement System Use

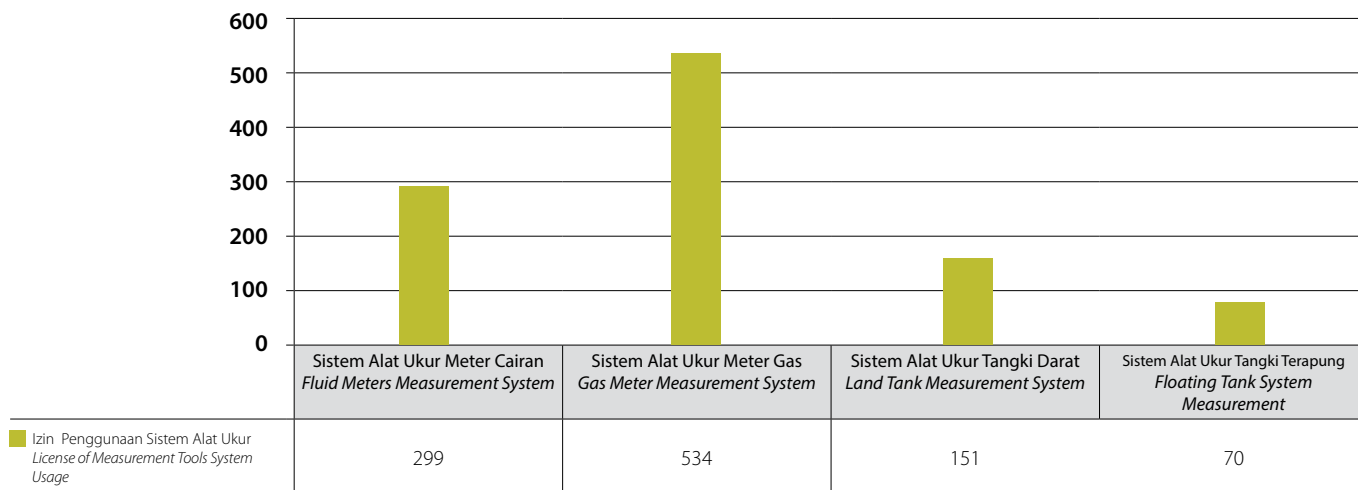
The license of oil and gas measurement system use is given to business entity or permanent business establishment to use the measurement in oil and gas activity after considering the result of technical check, test, and calibration/re-calibration (tera/re-tera) of this measurement.

There have been 984 licenses issued with the details as follow:

- Fluid Meter System : 229 units
- Gas Meter System : 534 units

- c. Sistem Alat Ukur Tangki Darat : 151 unit
d. Sistem Alat Ukur Tangki Terapung : 70 unit
- c. *Land Tank Measurement System* : 151 units
d. *Floating Tank Measurement System*: 70 units

Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur
License of Measurement Tools System Usage



PENGESAHAN KEPALA TEKNIK/WAKIL KEPALA TEKNIK PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Kepala Teknik pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi adalah penanggung jawab dari suatu kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan pemurnian dan pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan, serta transmisi dan distribusi. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Teknik dibantu oleh Wakil Kepala Teknik.

THE INAUGURATION OF HEAD/DEPUTY HEAD OF ENGINEERING IN OIL AND GAS DOWNSTREAM ACTIVITY

Head of Engineering in oil and gas downstream activity is responsible for the activities of purification and processing, storage and transportation, as well as transmission and distribution. The Head of Engineering is assisted by deputy Head of Engineering.

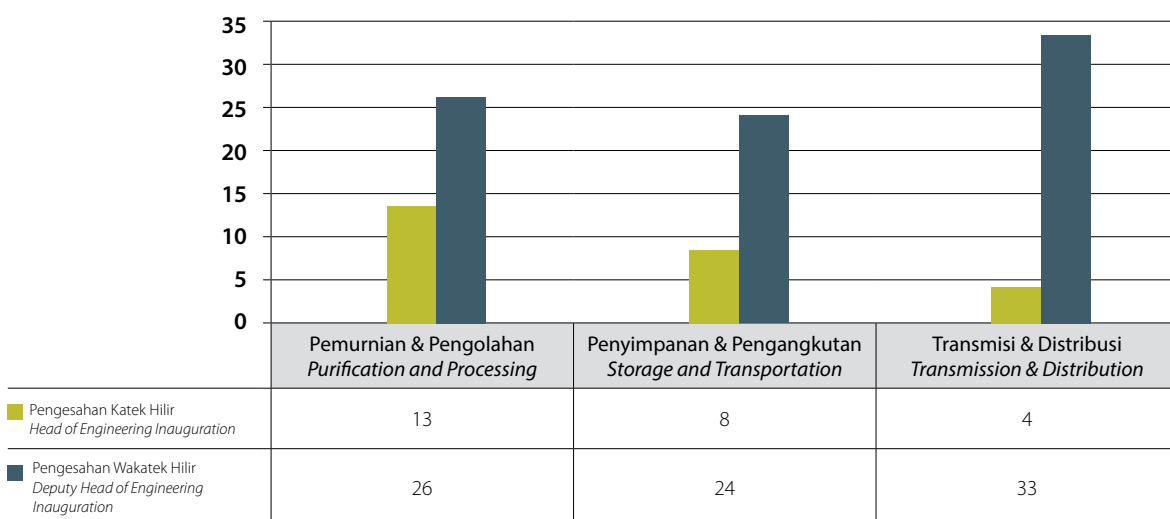


Selama periode tahun 2013 telah disahkan 25 orang Kepala Teknik dan 88 orang Wakil Kepala Teknik pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Pemurnian dan Pengolahan :
Katek 13 orang, Wakatek 26 orang
- Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan:
Katek 8 orang, Wakatek 24 orang
- Kegiatan Transmisi dan Distribusi :
Katek 4 orang, Wakatek 33 orang

There are 25 Head of Engineering and 88 Deputy Head of Engineering inaugurated in 2013 with the details as follow:

- Purification and Processing: 13 Head of Engineering and 26 Deputy Head of Engineering*
- Storage and Transportation: 8 Head of Engineering and 24 Deputy Head of Engineering*
- Transmission and Distribution: 4 Head of Engineering and 33 Deputy Head of Engineering*



KECELAKAAN OPERASI KEGIATAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

Selama periode tahun 2013, kecelakaan pada kegiatan usaha hilir migas sebagai berikut:

- Ringan : 12 orang
- Sedang : 2 orang
- Berat : 0 orang
- Fatal : 2 orang

OIL AND GAS DOWNSTREAM OPERATION ACCIDENT

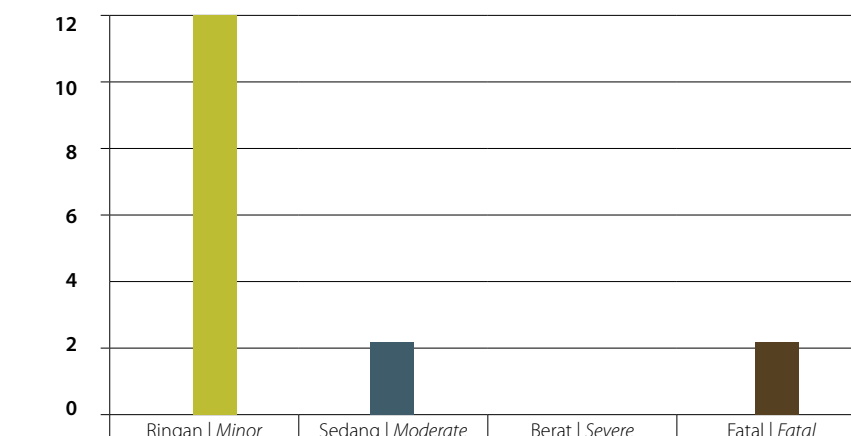
The oil and gas downstream accident in 2013 is as follow:

- Minor : 12 persons*
- Moderate : 2 person*
- Severe : 0 person*
- Fatal : 2 persons*

Kecelakaan fatal terjadi di PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap (1 orang) pada Januari 2013 dan PT Pertamina (Persero) RU II Dumai (1 orang) pada September 2013.

Fatal accident happened in PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap (1 person) in January 2013 and PT Pertamina (Persero) RU II Dumai in September 2013.

Kecelakaan Kegiatan Hilir Migas *Oil and Gas Downstream Operation Accident*



PENUNJANG SUPPORTING BUSINESS

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN PERUSAHAAN JASA INSPEKSI TEKNIK (PJIT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 06.P/0746/M.PE/1991 dan Surat Keputusan Dirjen Migas No. 43P/382/DDJM/1992, dalam rangka menunjang kelancaran pemeriksaan teknis atas peralatan dan instalasi, Dirjen Migas dapat menunjuk pihak lain untuk membantu Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dalam melaksanakan pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi pada kegiatan usaha migas. Untuk menjadi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT), perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Ditjen Migas antara lain:

- memiliki Tenaga Ahli yang bertanggungjawab atas bidang keahliannya serta memiliki pengalaman yang cukup;
- memiliki peralatan atau dapat menunjukkan surat jaminan penggunaan dari pemilik peralatan penunjang inspeksi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang inspeksinya; dan
- memiliki kemampuan membuat prosedur pemeriksaan teknis secara rinci sesuai bidang inspeksinya.

Selama tahun 2013 telah dilakukan 26 penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) sesuai bidang pemeriksaan teknis yang terdiri dari 1 penunjukan baru dan 25 perpanjangan penunjukan. Hingga Desember 2013 Ditjen Migas telah menerbitkan 56 lisensi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) dengan rincian sebagai berikut:

SUPERVISION AND EMPOWERMENT OF ENGINEERING INSPECTION SERVICES COMPANY (PJIT)

Based on Minister of Mining and Energy Regulation Number 06.P/0746/M.PE/1991 and Director General of Oil and Gas Decree Number 43P/382/DDJM/1992, Director General of Oil and Gas may appoint other party to help Directorate of Oil and Gas Technique and Environment in conducting technical check on tools and installation in oil and gas activity. The requirements as to be Engineering Inspection Services Company (PJIT) as regulated by Directorate General of Oil and Gas are:

- Having experts with sufficient skills and experience;
- Having the tools or showing the guarantee letter from inspection tools owner based on the inspection field;
- Having the ability to formulate detail engineering check procedure based on the inspection field.

In 2013, there have been 26 licenses of Engineering Inspection Services Company (PJIT) based on engineering field which consists of 1 new license and 25 licenses extension. Until December 2013, Directorate General of Oil and Gas has issued 56 PJIT licenses. They are:

No.	Bidang Pemeriksaan Teknis Sector of Engineering Inspection	Jumlah lisensi Number of licenses
1.	Bejana Tekan Pressure Vessel	9
2.	Pipa Penyalur Distribution pipeline	8
3.	Konstruksi Platform Platform Construction	4
4.	Tangki Penimbun Storage Tank	3
5.	Pesawat Angkat Crane	7
6.	Peralatan Putar (Pompa, Kompresor, dan Penggeraknya) Rotating Tools (Pump, compressor, and activator)	7
7.	Peralatan Listrik Electric tools	7
8.	Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Feasibility of Installation Usage	4
9.	Instalasi Pemboran Rig	7



PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA PENUNJANG MIGAS

Pembinaan terhadap Usaha Penunjang Migas dilakukan dengan menganalisis dan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan jasa nasional.

Pembinaan usaha penunjang dilakukan sebagai berikut:

- melakukan kunjungan ke perusahaan jasa penunjang migas dalam rangka evaluasi secara langsung terhadap sumber daya manusia, sarana prasarana, mesin dan peralatan yang dimiliki, permodalan dan aspek legalitas;
- melakukan analisa dan evaluasi terhadap perusahaan usaha penunjang migas; dan
- melakukan koordinasi dengan Asosiasi dan Stakeholder Perusahaan Usaha Penunjang Migas.

Selama periode tahun 2013 telah diterbitkan sebanyak 2066 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas untuk 1405 Perusahaan Penunjang Migas dari 1728 Perusahaan Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

MONITORING AND EMPOWERMENT OF OIL AND GAS SUPPORTING BUSINESS

The monitoring of oil and gas supporting business is conducted by analyzing and evaluating the national services company capability.

The monitoring is by:

- Visiting the oil and gas supporting business to conduct direct evaluation on its human resources, facility, machine and tools, capital and legal aspect;
- Analyzing and evaluating oil and gas supporting business company;
- Coordinating with association and stakeholder.

In 2013, Directorate General of Oil and Gas issued 2,055 Oil and Gas Registered Letter (SKT) for 1,405 Oil and Gas Supporting Business Company from 1,728 applicants. The details are:

Bidang Klasifikasi Sector Classification	Jumlah SKT (lembar) Number of SKT
Konstruksi Construction	412
Non konstruksi Non construction	1.533
Industri Penunjang Supporting Industry	121





PENUTUP

CLOSING

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2013 secara garis besar telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun di awal tahun. Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2013 berhasil mendekati target yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan beberapa program kegiatan yang disusun telah berhasil mencatatkan nilai di atas target. Kenaikan nilai investasi, pencapaian penerimaan sub sektor minyak dan gas bumi di atas target, kenaikan pemanfaatan produk dalam negeri, peningkatan penggunaan tenaga kerja nasional, peningkatan pemanfaatan gas untuk domestik, dan keberhasilan penghematan volume jenis BBM tertentu merupakan beberapa prestasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang berhasil dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah.

Laporan Tahunan ini menyajikan tema mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menyampaikan wacana betapa pentingnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan sumber daya

The activities of Directorate General of Oil and Gas in 2013 have been conducted based on the work plan of 2013. The performance achievement of Directorate General of Oil and Gas in 2013 has almost reached the target. Several programs have exceeded the target. The increasing investment value, the revenue from oil and gas sub sector above the target, the increasing domestic product utilization, and the success of certain oil fuel volume saving are several achievements by Directorate General of Oil and Gas.

This Annual Report presenting the theme of local content provides the information regarding the Governments' efforts to enhance the national resources. It is expected that Indonesia will be more competitive in globalization



nasional agar bangsa Indonesia memiliki kemampuan yang cukup tangguh untuk menghadapi persaingan terbuka di era globalisasi nantinya khususnya pada saat ASEAN menjadi wilayah yang benar-benar terbuka secara ekonomi. Peningkatan kemampuan sumber daya nasional menjadi tumpuan untuk menggerakkan perekonomian dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi melibatkan banyak pihak dan membutuhkan dukungan yang cukup besar dari para pemangku kepentingan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan kerja keras pemerintah yang didukung oleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah disusun agar mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Kesinambungan dari pelaksanaan program dan kegiatan sub sektor minyak dan gas bumi sangat membutuhkan peran aktif semua pihak terutama masukan-masukan dari pelaksanaan di daerah agar mampu memberikan sumbangsih berupa informasi yang akurat dan terkini sehingga implementasi dari program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2013, diharapkan mampu menjadi salah satu sumber bagi para pemangku kepentingan dalam perumusan rencana kerja untuk turut berperan serta memberikan kontribusinya di sub sektor minyak dan gas bumi dan ikut memajukan industri minyak dan gas bumi nasional dalam memperkuat tatanan perekonomian nasional menuju era globalisasi.

era especially when ASEAN Free Trade begins. The national resources capability enhancement is a foundation to promote the economy in sustainable national development.

The government's c.q Directorate General of Oil and Gas policy in oil and gas sub sector involves many parties and requires support from the stakeholders to be able to give the maximum benefits for national interest. The success by Directorate General of Oil and gas is the government's hard work supported by the stakeholders in conducting the policies to achieve the targets. The program and activity in oil and gas sub sector requires the active participation from all related parties especially the inputs upon the program conducted in local area in order to give accurate and update information. Thus, the implementation of the program and activity will run as planned.

The 2013 Directorate General of Oil and Gas Annual Report is expected to be one of the sources for stakeholders in formulating the work plan to give more contribution in oil and gas sub sector as well as to promote national oil and gas industry in enhancing the national economy toward the globalization.

